Pemerintah Provinsi Jambi

LAPORAN KINERJA

LKj

TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
INSPEKTORAT
Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000
J A M B I – 36122

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Jambi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jambi, Maret 2016

INSPEKTUR,

PEMERINTAH PROVINSI INSPEKTORAT J A M B I

H. HEFNI ZEN, S.H.,M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570721 198503 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 dapat diselesaikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2015. LKj Provinsi Jambi Tahun 2015 ini sekaligus merupakan laporan kinerja masa akhir periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi 2010-2015 yang merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang kinerja Pemerintah Provinsi Jambi selama satu tahun anggaran dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja tahun 2015. Penyusunan LKj ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini merupakan langkah percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada masa yang akan datang.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi beserta analisis dan evaluasinya sangat penting bagi upaya peningkatan kualitas kinerja organisasi secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal tersebut memerlukan dukungan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi agar senantiasa meningkatkan kinerja, sehingga akan mendukung terwujudnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel menuju Jambi EMAS 2015.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 telah banyak membuahkan hasil pembangunan, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang perlu ditingkatkan capaiannya pada masa yang akan datang. Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi dalam pelaksanaannya.

Jambi, Maret 2016

a.n. GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SETDA JAMBI

H. RIDHAM PRISKAP, S.H., M.H. M.M.
Pembina Utama
NIP. 19601211 198503 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iv
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR GRAFIK ix
DAFTAR DIAGRAM xi
DAFTAR TABEL xii

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Kedudukan & Asas Penyelenggaraan Pemerintahan 1
1.3. Kondisi Geografis Daerah 2
1.3.1. Letak Wilayah dan Topografi 2
1.3.2. Klimatologi 4
1.3.3. Potensi Wilayah 4
1.3.4. Kondisi Demografi 5
1.3.4.1. Penduduk 5
1.4. Potensi Unggulan Daerah 5
1.5. Kondisi Ekonomi Daerah 6
1.5.1. Kondisi Belanja Daerah 6
1.5.2. Target dan Realisasi Belanja 7
1.5.3. Belanja Tidak Langsung 7
1.5.4. Belanja Langsung 7
1.6. Wilayah Administratif dan Struktur Pemerintah Provinsi Jambi 8
1.6.1. Wilayah Administrasi 8
1.6.2. Struktur Pemerintah Provinsi Jambi 8
1.7. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan 8
1.8. Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja Pemerintah Daerah 13
1.9. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 14

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 15

2.1. Perencanaan 15
2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 15
2.1.2. Visi Pembangunan 15
2.1.3. Misi Pembangunan 15
2.1.4. Tujuan Pembangunan 16
2.1.5. Sasaran 17

2.2. Strategi, Arah Kebijakan, Program & Indikator Kinerja dalam RPJMD 19
2.2.1. Strategi 19
2.2.2. Arah Kebijakan 20
2.2.3. Program 22
2.2.4. Rencana Kinerja 2015 26
2.2.5. Program untuk pencapaian sasaran 27
2.2.6. Rencana Anggaran Tahun 2015 28
2.3. Perjanjian Kinerja 2015 29
2.4. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jambi 31

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 35

A. Capaian Kinerja 35
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama s.d. tahun 2015 36
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Perjanjian Kinerja 39
1. Sasaran Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur 39
2. Sasaran Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik 43
3. Sasaran Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih 46
4. Sasaran Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas 54
5. Sasaran Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat 58
6. Sasaran Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial 66
7. Sasaran Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi 72
8. Sasaran Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisataan daerah 88
9. Sasaran Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah 96
10. Sasaran Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan 108
11. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup 111
12. Sasaran Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik 116
13. Sasaran Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan 126
3.3. Capain Kinerja Lainnya 132
3.4. Capaian Tujuan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 133

B. Realisasi Anggaran 143

BAB IV : PENUTUP 145

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2015 ini merupakan amanat Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaoran Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi.

LKj ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) serta capaian tujuan Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi yang telah dicanangkan pada awal periode RPJMD 2010-2015 telah berhasil dicapai.

Secara umum, capaian inidkator kinerja utama tahun 2015 yang juga sekaligus merupakan indikator capaian tujuan RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015 dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, tujuan yang telah berhasil dicapai. Kedua, tujuan yang menunjukkan kemajuan bermakna dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015. Ketiga, tujuan yang masih memerlukan upaya keras untuk mencapainya.

Tujuan-tujuan IKU RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015 yang telah tercapai adalah :

- IKU 1, Persentase jalan dalam kondisi baik (mantap), dengan persentase capaian sebesar 100,53%.
- IKU 2, Rasio elektrifikasi, dengan persentase capaian sebesar 109,29%.
- IKU 3, Perkembangan energi baru terbarukan, dengan persentase capaian sebesar 105,07%.
- IKU 4, Persentase fungsionalisasi luas daerah irigasi, dengan persentase capaian sebesar, 118,14%.
- IKU 8, Prevalensi kekurangan gizi pada balita (kasus balita gizi buruk tertangani), dengan persentase capaian sebesar 100%
- IKU 12, Nilai investasi PMA, dengan persentase capaian sebesar 100,71%.
- IKU 13, Nilai investasi PMDN, 174,97%.
- IKU 14, Nilai ekspor, dengan persentase capaian sebesar 123,18%.
- IKU 16, Peningkatan pelaku usaha mikro kecil menengah, dengan persentase capaian sebesar 125,15%.
- IKU 17, Laju inflasi Provinsi Jambi, dengan persentase capaian sebesar 403,64%.
- IKU 18, Pertumbuhan kunjungan wisata, dengan persentase capaian sebesar 157,47%
- IKU 22, Ketersediaan energi kkal/kap/hr dan pola pangan harapan, dengan persentase capaian sebesar 97,70%.
- IKU 26, Opini BPK, dengan persentase capaian sebesar 100%.
- IKU 27, Aksi daerah percepatan dan pemberantasan korupsi (AD-PPK), dengan persentase capaian sebesar 100%
- IKU 30, Persentase kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan persentase capaian sebesar 100,61%.

Tujuan-tujuan IKU RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015 yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada masa yang akan datang (on-track) adalah :

- IKU 5, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan, dengan persentase capaian sebesar 91,11%.
- IKU 6, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan, dengan persentase capaian sebesar 93,27%.
- IKU 7, Angka partisipasi murni, dengan persentase capaian sebesar 89,26%.
- IKU 11, Indeks pembangunan manusia, dengan persentase capaian sebesar 97,48%.
- IKU 19, Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, dengan persentase capaian sebesar 99,21%.
- IKU 20, Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, dengan persentase capaian sebesar 95,51%.
- IKU 21, Nilai tukar petani, dengan persentase capaian sebesar 92,03%.
- IKU 24, Persentase luasan lahan tertutup pohon (rehabilitasi lahan kritis), 98,94%.

Tujuan-tujuan IKU RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015 yang telah menunjukkan kemajuan namun masih diperlukan kerja keras untuk mencapainya adalah :

- IKU 9, Persentase puskesmas berkinerja baik, dengan persentase capaian sebesar 48,40%.
- IKU 10, Persentase menurunnya rumah tangga sangat miskin (RTSM), dengan persentase capaian sebesar 54,82%.
- IKU 15, Persentase koperasi yang berkualitas, dengan persentase capaian sebesar 67,40%.
- IKU 23, Penurunan jumlah titik api, dengan persentase capaian sebesar 18,13%.
- IKU 25, Penurunan emisi gas rumah kaca (kemampuan menurunkan emisi karbon), dengan persentase capaian sebesar 75,07%.
- IKU 28, Skor indeks kepuasan masyarakat / survey kepuasan masyarakat, dengan persentase capaian sebesar 89,42%.
- IKU 29, Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi, dengan persentase capaian sebesar 88,10%.

Jika ditinjau dari pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2010-2015 yang merupakan kerangka pembangunan strategis Provinsi Jambi untuk periode 5 tahun sebagaimana visi dan misi Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi yang tertuang dalam RPJMD, maka capaian tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Jambi Dengan Infrastruktur Pelayanan Umum Yang Berkualitas dan Ketersediaan Yang Lebih Baik.
2. Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya.
3. Mewujudkan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan.
5. Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dalam memenuhi kepentingan umum.

Capaian dari masing-masing tujuan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik i. Persentase capaian tujuan RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015

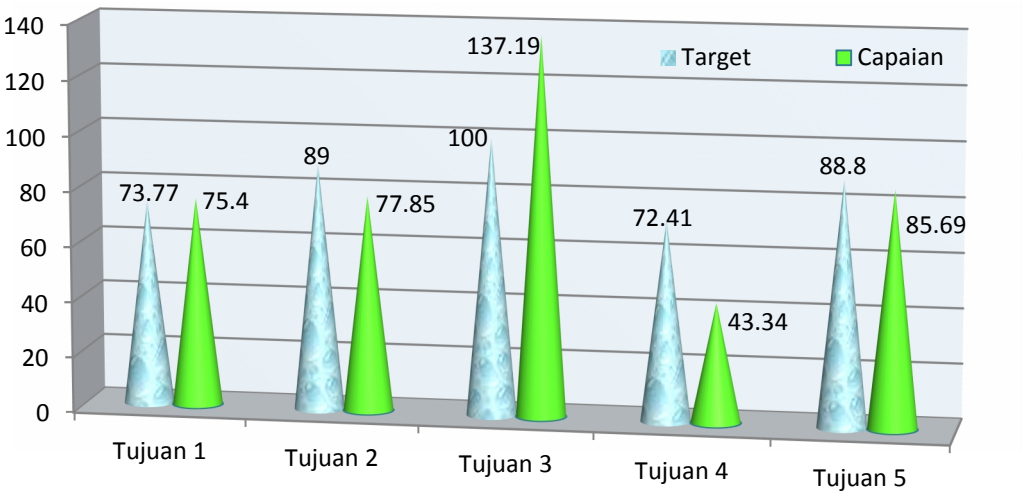

Secara keseluruhan, capaian tujuan Provinsi Jambi sampai dengan periode akhir RPJMD telah tercapai dengan baik. Tujuan yang mendapatkan angka capaian paling tinggi yakni Tujuan ke-tiga yakni Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persentase sebesar 137,19%. Sedangkan capaian paling rendah berada pada Tujuan ke-empat yakkni pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan Provinsi Jambi hanya mencapai angka 43,34%. Belum maksimalnya capaian tujuan ini dikarenakan capaian yang harus diraih oleh Pemerintah Provinsi disebabkan oleh beberapa faktor yang memang merupakan kondisi nyata yang harus dihadapi oleh Provinsi Jambi, terutama mengenai bencana kebakaran hutan dan lahan yang merupakan masalah nasinal yang pada akhirnya berimplikasi pada tidak maksimalnya upaya penurunan emisi karbon CO_2 pada tahun 2015.

Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan upaya yang mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2015, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk sistem akuntabilitas kinerja yang dikenal sebagai e-sakip adalah bagian dari upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/ kegiatan yang berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui link laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (lppk).

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi ke depan. *Pertama*, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan masih tingginya angka rumah tangga sangat miskin, laju inflasi yang cenderung naik, hingga nilai ekspor non migas Provinsi Jambi yang masih rendah. Peran Pemerintah Provinsi Jambi diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi, daerah yang berbatasan dengan Provinsi Jambi maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti masih tingginya angka rumah tangga sangat miskin sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, laju inflasi yang cenderung naik, hingga nilai ekspor non migas Provinsi Jambi yang masih rendah menunjukkan pentingnya kontribusi dan koordinasi dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas, kreatifitas, inovasi, dan komitmen yang kuat dalam upaya mencapai kinerja yang akuntabel sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

DAFTAR GAMBAR

1.1. Suasana Kantor Gubernur Provinsi Jambi Tempo Dulu 2
1.2. Peta Provinsi Jambi 2
1.3. Persentase Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota 3
1.4. Taman Nasional Kerinci Seblat, TN. Berbak, TN Bukit Tiga Puluh 4
1.5. Persentase Jumlah Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota 5
1.6. Persentase Pegawai Negeri Sipil Dalam Wilayah Kantor Gubernur Jambi & SKPD 8
1.7. Log In e-SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi 14
3.1. Ruas Jalan Provinsi Jambi..... 39
3.2. Aktivitas Perbaikan Jalan di Provinsi Jambi 40
3.3. Sumber Energi Panas Bumi Kab. Kerinci 44
3.4. Daerah irigasi di Kab. Kerinci 46
3.5. Aktivintas Panen Padi Petani 48
3.6. Ilustrasi Ketersediaan Air Siap Minum 49
3.7. Potret kebutuhan akses sanitasi layak 51
3.8. Suasana Perpustakaan Provinsi Jambi 57
3.9. Perpustakaan Keliling Provinsi Jambi 58
3.10. Struktur Nilai Ekspor Menurut Kelompok Komoditi di Provinsi Jambi Januari-November 2015 76
3.11. Pelabuhan Talang Duku Jambi 77
3.12. Pelatihan Kewirausahaan 85
3.13. Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Kota Jambi 86
3.14. Obyek wisata Percandian Muaro Jambi 88
3.15. Proporsi Kunjungan wisatawan ke Museum Negeri Jambi (Museum Siginjei 89
3.16. Malam Apresiasi Seni Melayu Jambi 90
3.17 Kawasan Geopark Merangin Jambi 90
3.18. Hotel berbintang di Kota Jambi 93
3.19. Peta Kerentanan Kerawanan Pangan 106
3.20. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi 109
3.21. Kondisi Jarak Pandang Di Bandara Sultan Thaha Jambi 109
3.22. Luas Kawasan Tertutup Pohon 112
3.23. Persentase luasan lahan tertutup pohon Provinsi Jambi 2010 s.d. 2015 113
3.24. Penerimaan Opini WTP oleh BPK RI kepada Gubernur Jambi 116
3.25. Kebijakan Pembangunan, Transparansi Anggaran, Keterbukaan informasi publik, serta aplikasi e-SAKIP 125

DAFTAR GRAFIK

i. Persentase capaian tujuan RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015 vi
3.1. Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 40
3.2. Persentase Capaian Fungsionalisasi Luas Daerah Irigasi 47
3.3. Capaian Proporsi Akses Air Minum Layak 49
3.4. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan 49
3.5. Cakupan Desa yang Melaksanakan STBM Di Provinsi Jambi Tahun 2015 53
3.6. Capaian APM tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan atas Tahun 2010 s.d. 2015 55
3.7. Peningkatan Jumlah Anggota dan Pengunjung Perpustakaan 2010 – 2015 58
3.8. Hasil Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2015 60
3.9. Proporsi Jumlah SDM Kesehatan Provinsi Jambi Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2015 63
3.10. Trend angka RTSM Provinsi Jambi 68
3.11. Capaian IPM tahun 2014 Kabupaten/Kota 70
3.12. Perkembangan Pelayanan Perizinan Provinsi Jambi 2010-2015 75
3.13. Distribusi Persentase Ekspor Provinsi Jambi Menurut Komoditi Januari-November 2015 76
3.14. Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 78
3.15. Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 79
3.16. Perkembangan UMKM tahun 2011 dan 2015 83
3.17. Trend Laju Inflasi Provinsi Jambi 87
3.18. Capaian Kunjungan Wisatawan Ke Provinsi Jambi tahun 2010 s.d. 2015 91
3.19. Perkembangan Jumlah Restoran & Biro Perjalanan Wisata Tahun 2011-2015 92
3.20. Perkembangan TPK Hotel Bintang Menurut Klasifikasi Hotel di Provinsi Jambi Bulan November 2014 – November 2015 93
3.21. Capaian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jambi 2010 – 2015 98
3.22. Capaian NTP 101
3.23. Cadangan Pangan Provinsi Jambi 104
3.24. Jumlah Pemberdayaan Desa Rawan Pangan 105
3.25. Trend Titik Api berdasar satelit NOAA Tahun 2010 s.d. 2015 110
3.26. Kemampuan penurunan emisi gas rumah kaca (dalam MtCO2) 115
3.27. Trend rata-rata skor survey IKM / SKM Provinsi Jambi 2013 – 2015 121
3.28. Capaian SKM Per Unsur 122
3.29. Trend Perolehan Skor SAKIP Provinsi Jambi 2010 – 2015 123
3.30. Rasio APM SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi 2001 – 2014 127
3.31. Rasio AMH Perempuan Terhadap Laki-laki Penduduk Berusia 15-24 Tahun, 2001-2014 ... 129
3.32. Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian 2001 – 2014 ... 129
3.33. Persentase Anggota DPR Perempuan pada Periode Pemilu 1950 – 2014 130
3.34. Jumlah Anggota DPR Perempuan Periode 2014-2019 menurut Provinsi 130
3.35. Pertumbuhan PDRB q to q Menurut Lapangan Usaha 132
3.36. Pertumbuhan y-on-y Beberapa Lapangan Usaha Triwulan III-2015 133
3.37. Trend pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi 133

3.38. Capaian Tujuan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik 135
3.39. Capaian Tujuan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya 136
3.40. Capaian Tujuan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi 138
3.41. Capaian Tujuan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan Provinsi Jambi 140
3.42. Capaian Tujuan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara professional dalam memenuhi kepentingan umum 141

DAFTAR DIAGRAM

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 38
3.2. Kasus gizi buruk tertangani 60
3.3. Perkembangan Investasi PMA & PMDN 73
3.4. Perkembangan nilai Ekspor Provinsi Jambi 2010-2015 78
3.5. Perkembangan Jumlah Hotel di Provinsi Jambi Tahun 2011-2015 93
3.6. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Provinsi Jambi tahun 2010 s.d. 2015 94
3.7. Target dan capaian ketersediaan energi/kap/hari Provinsi Jambi 103

DAFTAR TABEL

2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 17
2.2. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2015 27
2.3. Belanja daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 28
2.4. Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2015 28
2.5. Perjanjian Kinerja tahun 2015 29
2.6. IKU Misi I 31
2.7. IKU Misi 2 32
2.8. IKU Misi 3 32
2.9. IKU Misi 4 33
2.10. IKU Misi 5 34
3.1. Skala nilai capaian kinerja 36
3.2. Capaian IKU Gubernur Jambi s.d. Tahun 2015 36
3.3. Perbandingan dan Capaian Kinerja Indikator Peningkatan Jalan Provinsi Jambi Dalam Kondisi Mantap Tahun 2010 s.d. 2015 41
3.4. Perbandingan dan Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi Tahun 2010 s.d. 2015 44
3.5. Peningkatan Jumlah Pengembangan Energi Baru Terbarukan 45
3.6. Perbandingan dan Capaian Kinerja fungsionalisasi daerah irigasi tahun 2010 s.d. 2015 47
3.7. Cakupan Pelayanan Perusahaan Air Bersih di Provinsi Jambi 2014 50
3.8. Jumlah dan Pertumbuhan Pelanggan per tahun di Provinsi Jambi, 2010-2014 50
3.9. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Ledeng Meteran sebagai Air Minum di Provinsi Jambi, 2010-2014 50
3.10. Perbandingan dan Capaian Kinerja Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan, Pedesaan, serta Perkotaan dan Pedesaaan Tahun 2010 s.d. 2015 51
3.11. Perbandingan Capaian Kinerja Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Dasar Layak, Perkotaan, Pedesaan, serta Perkotaan dan Pedesaaan Tahun 2010 s.d. 2015 52
3.12. Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar 55
3.13. Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar s.d. Pendidikan Menengah Atas Tahun 2010 s.d. 2015 56
3.14. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 56
3.15 Target penurunan masalah gizi masyarakat 59
3.17. Kasus Gizi Buruk Provinsi Jambi yang Mendapatkan Perawatan 59
3.18. Hasil Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Provinsi Jambi Tahun 2015 61
3.19. Perbandingan Capaian Kinerja Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita Tahun 2010 s.d. 2015 61
3.20. Capaian Puskesmas Dengan Kinerja Baik Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2015 63
3.21. Sebaran SDM Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun2015 64
3.22. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Puskesmas Yang Berkinerja Baik Tahun 2010 s.d. 2015 65
3.23. Penduduk Miskin di Provinsi Jambi Menurut Daerah, Maret 2015-September 2015 66
3.24. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah Tahun 2015 67
3.25. Garis Kemiskinan Menurut Komponen Maret 2015-September 2015 (Rp/Kapita/Bln) 68
3.26. Perbandingan dan Capaian Kinerja Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sangat Miskin Tahun 2010 s.d. 2015 69
3.27. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi dan Kab/Kota 70

3.28. Perbandingan dan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 s.d. 2015 71
3.29. Perbandingan dan Capaian Kinerja Nilai Investasi PMA dan Nilai Investasi PMDN Tahun 2010 s.d. 2015 74
3.30. Perbandingan dan Capaian Kinerja Nilai Ekspor Tahun 2010 s.d. 2015 79
3.31. Perbandingan dan Capaian Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas Tahun 2010 s.d. 2015 81
3.32. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (*y-on-y*)Triwulan III Tahun 2015 83
3.33. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (*q-to-q*) Triwulan IV Tahun 2015 Provinsi Jambi 84
3.34. Perbandingan dan Capaian Kinerja Peningkatan Jumlah Unit Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2010 s.d. 2015 85
3.35. Perbandingan dan Capaian Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2010 s.d. 2015 87
3.36. Koleksi dan Kunjungan Wisatawan ke Museum Negeri Jambi (Museum Siginjei) Tahun 2012 – 2015 88
3.37. Jumlah Koleksi dan Kunjungan Wisatawan ke Museum Perjuangan Rakyat Jambi Tahun 2012 – 2015 89
3.38. Perkembangan Kunjungan Wisata Ke Provinsi Jambi 91
3.39. Perbandingan dan Capaian Kinerja Pertumbuhan Industri Pariwisata dan Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2010 s.d. 2015 92
3.40. Jumlah Tamu Mancanegara dan Tamu Nusantara pada Hotel Bintang Menurut Klasifikasi Hotel di Provinsi Jambi Bulan September – November 2015 94
3.41. Perbandingan dan Capaian Kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2010 s.d. 2015 95
3.42. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Wilayah, 2013-2015 96
3.43. Perkembangan dan Distribusi Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai Menurut Wilayah, 2013-2015 97
3.44. Perbandingan Capaian Kinerja Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2010 s.d. 2015 98
3.45. Indeks Harga Konsumen Perdesaan dan Persentase Perubahannya Provinsi Jambi, Desember 2015 (2012=100) 100
3.46. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian serta Persentase Perubahannya Menurut Provinsi se-Sumatera, Desember 2015 (2012=100) 101
3.47. Perbandingan dan Capaian Kinerja NTP Tahun 2010 s.d. 2015 102
3.48. Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Jambi Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 103
3.49. Kondisi Ketersediaan dari Kemampuan Produksi Tahun 2014 (angka tetap) dan 2015 (angka ramalan II), Jumlah Konsumsi Penduduk dan Kebutuhan Berdasarkan Pola Pangan Harapan 104
3.50. Klasifikasi Desa / Kelurahan Menurut Prioritas Penanganan Kerentanan Pangan 107
3.51. Skor PPH Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 107
3.52. Perbandingan Capaian Kinerja Ketersediaan Energi/kap/hari, dan Pola Pangan Harapan Tahun 2010 s.d. 2015 108
3.53. Perbandingan dan Capaian Kinerja Penurunan Jumlah Titik Api Tahun 2010 s.d. 2015 ... 110
3.54. Persentase Luasan Lahan Tertutup Pohon Tahun 2010 s.d. 2015 113
3.55. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2010 s.d. 2015 116
3.56. Perbandingan Capaian Kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah dan Asset Daerah Tahun 2010 s.d. 2015 117

3.57. Realisasi ADPPK Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota B12 Tahun 2015 118
3.58. Perbandingan Capaian Kinerja ADPPK Provinsi Jambi dan Kab/Kota Tahun 2013 s.d. 2015 119
3.59. Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2015 120
3.60. Perbandingan dan Capaian Kinerja Peningkatan Skor SKM Pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2013 s.d. 2015 122
3.61. Perbandingan dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2010 s.d. 2015 123
3.62. Hasil Evaluasi Kemepan RB RI atas Akuntabilitas Kinerja Provinsi Jambi Tahun 2014 (2015) 124
3.63. Indikator Kesetaraan Gender MDGs (Nasional) 126
3.64. Kesetaran Gender Pendidikan pada Jejang SD, SMP, SMA dan PT di Daerah 128
3.65. Perbandingan dan Capaian Kinerja Persentase Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010 s.d. 2015 131
3.66. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Wanita Yang Menjabat Eselon lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2010 s.d. 2015 131
3.67. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2015 143

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I :

1.1. Latar Belakang
1.2. Kedudukan & Asas Penyelenggaraan Pemerintahan
1.3. Kondisi Geografis Daerah
1.4. Potensi Unggulan Daerah
1.5. Kondisi Ekonomi Daerah
1.6. Wilayah Administrasi
1.7. Isu Strategis
1.8. Sistematika Penyajian

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Jambi Tahun 2015 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, serta mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah Provinsi Jambi yang menjadi dokumen laporan kinerja tahunan berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Dengan disusunnya LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 ini, diharapkan bermanfaat untuk :

1. Mendorong Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menjadikan Pemerintah Provinsi Jambi lebih akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat Provinsi Jambi terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah.

1.2. Kedudukan & Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

Gambar 1.1. Suasana Kantor Gubernur Provinsi Jambi Tempo Dulu

Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Gubernur yang dibantu seorang Wakil Gubernur. Asas penyelengaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara yang terdiri dari atas : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas.

1.3. Kondisi Geografis Daerah

1.3.1. Letak Wilayah dan Topografi

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0°45' sampai 2°45' lintang selatan dan antara 101°10' sampai 104°55' bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.

Gambar 1.2. Peta Provinsi Jambi

Luas Wilayah Provinsi Jambi sebesar 53.435 Km2 dengan luas daratan 50.160,05 KM² dan luas perairan sebesar 3.274,95 KM² terdiri dari :

1. Kabupaten Kerinci 3.355,27 KM² (6,69%)
2. Kabupaten Merangin 7.679 KM² (15,31%)
3. Kabupaten Sarolangun 6.184 KM² (12,33%)
4. Kabupaten Batanghari 5.804 KM² (11,57%)
5. Kabupaten Muaro Jambi 5.326 KM² (10,62%)
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.445 KM² (10,86%)
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4.649,85 KM² (9,27%)
8. Kabupaten Tebo 6.461 KM² (12,88%)
9. Kabupaten Bungo 4.659 KM² (9,29%)
10. Kota Jambi 205,43 KM² (0,41%)
11. Kota Sungai Penuh 391,5 KM² (0,78%)

Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.679 KM² atau sebesar 15,31 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.461 KM² dan 6.184 KM². Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2013 sebanyak 138 kecamatan dan 1.553 desa/kelurahan, dimana jumlah kecamatan terbanyak berada di Kabupaten Merangin yaitu 24 kecamatan, sedangkan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci yaitu 287 desa/kelurahan.

Gambar 1.3. Persentase Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota

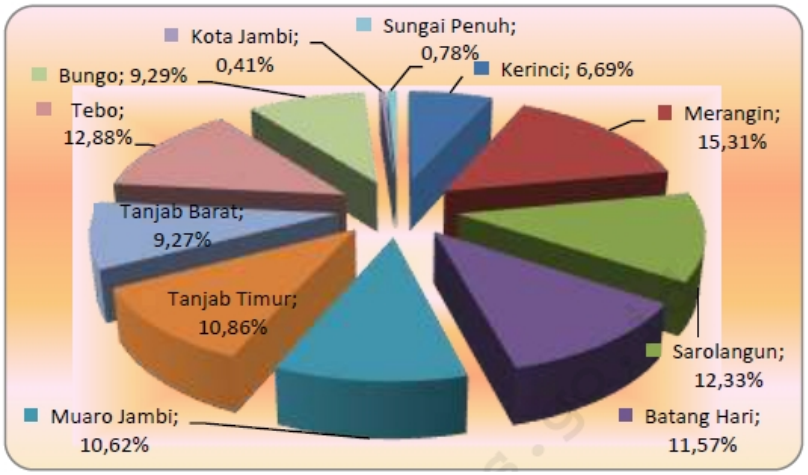

(Sumber : BPS Provinsi, Jambi dalam angka 2015)

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian, yakni :

1) Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin ;
2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan
3) Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

1.3.2. Klimatologi

Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.

Sepanjang tahun 2015, Provinsi Jambi memiliki karakteristik curah hujan sedang dan lembab, sehingga Jambi termasuk daerah yang beriklim tropis. Rata-rata curah hujan pada tahun 2015 mencapai 1.782,0mm, sedangkan jumlah penyinaran matahari 4,0 jam perhari dengan kelembaban udara rata-rata sebesar 82,8%. Suhu udara rata-rata maksimum mencapai 33,4°C, sedangkan rata-rata minimum mencapai mencapai 22,1°C.

1.3.3. Potensi Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :

a. Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan)
b. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
c. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
d. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Gambar. 1.4. Taman Nasional Kerinci Seblat, TN. Berbak, TN Bukit Tiga Puluh

Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang merupakan wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi. Adapun kawasan-kawasan strategis yang berada di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
2. Kawasan strategis Metropolitan Jambi dan sekitarnya.
3. Kawasan strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya.
4. Kawasan strategis Bungo - Tebo
5. Kawasan strategis Merangin - Sarolangun
6. Kawasan strategis Sungai Penuh dan sekitarnya

Berdasarkan penunjukan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts-II/1999, dimana kawasan hutan Provinsi Jambi

meliputi luas ± 2.179.440,00 Ha atau 42,73% dari keseluruhan luas Provinsi Jambi. Adapun luasan tersebut sesuai dengan pemaduserasian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 30.400,00 Ha (1,39%), Taman Nasional 608.630,00 Ha (27,92%), Taman Hutan Raya 36.660,00 Ha (1,68%), Hutan Wisata Alam 430,00 Ha (0,02%), Hutan Lindung 191.130,00 Ha (8,77%), Hutan Produksi Terbatas 340.700,00 Ha (15,63%), Hutan Produksi Tetap 971.490,00 Ha (44,57%).

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang berpotensi terhadap bencana Geologi yaitu di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsoran, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan. Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan dengan wilayah terjadinya kebakaran yang berada pada Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Barat. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta.

1.3.4. Kondisi Demografi

1.3.4.1. Penduduk

Berdasarkan Jambi Dalam Angka Tahun 2015, Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2014 sebanyak 3.344.421 jiwa, pada tahun 2013 sebanyak 3.317.034. Selama kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan sebesar 0,83 persen. Kepadatan penduduk tahun 2014 menurut Kabupaten/Kota :

1. Kabupaten Kerinci 72 orang/km2
2. Kabupaten Merangin 47 orang/km2
3. Kabupaten Sarolangun 44 orang/km2
4. Kabupaten Batanghari 44 orang/km2
5. Kabupaten Muaro Jambi 73 orang/km2
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 39 orang / km2
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 66 orang/km2
8. Kabupaten Tebo 50 orang/km2
9. Kabupaten Bungo 72 orang/km2
10. Kota Jambi 2.765 orang/km2
11. Kota Sungai Penuh 220 orang/km2

Gambar 1.5. Persentase Jumlah Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota

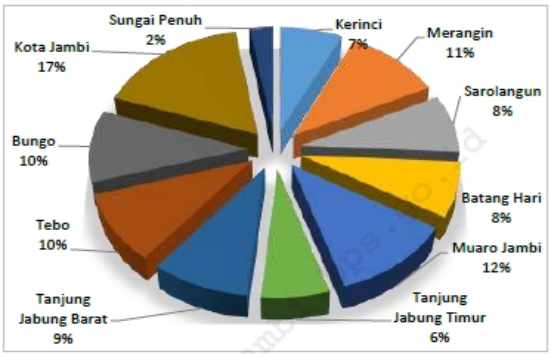

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Jambi Dalam Angka 2015

1.4. Potensi Unggulan Daerah

Provinsi Jambi terletak di tengah Pulau Sumatera merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah. Sumberdaya alam yang mempunyai potensi cukup besar tersebut antara lain; perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Untuk sektor bahan pertambangan dan penggalian yang menjadi potensi unggulan daerah adalah batu bara, gas bumi, minyak, tambang mineral lainnya. Sedangkan potensi industri pengolahan di Provinsi Jambi yang potensial untuk dikembangkan terutama untuk pengolahan dengan bahan baku *(crude palm oil), crumb rubber, virgin coconut oil (vico), cassiavera,* serta olahan dari produk tanaman pangan dan produk dari ikan.

Bila dilihat dari Komoditi unggulan Provinsi Jambi, maka terdapat 12 komoditi unggulan yang didominasi dari berbagai sub-sektor pertanian antara lain: Karet, Kelapa sawit, Kelapa dalam, Cassievera, Kopi, Buah-buahan, Pinang, Nenas, Perikanan Laut dan darat dan Peternakan serta hasil pertambangan umum lainnya.

1.5. Kondisi Ekonomi Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi yang tergambar dalam pelaksanaan APBD merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pendapatan Daerah pada tahun 2015 memperlihatkan peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan daerah sebesar 3.259.508.046.034,99 dan terealisasi sebesar Rp. 3.126.800.423.069,51. Jika dibandingkan dengan pendapatan daerah pada tahun 2014 sebesar Rp. 3.127.131.786.586,67 terealisasi sebesar Rp. 3.223.628.749.270,97. pada tahun 2013, realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi meningkat sebesar 11,69 % yaitu dari realisasi Rp. 2.886.263.091.626,10 pada tahun 2013. Peningkatan pendapatan tahun 2015 tersebut, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar 95,93% persen. Untuk pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp. 1.419.079.798.364,00 dari target Rp. 1.527.551.544.653,32 atau 92,90%, sementara untuk pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah realisasinya mencapai 98,13% persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 469.401.997.500,00 atau melampaui target sebesar Rp. 478.332.166.000,00.

Dari total Pendapatan Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2015 yang mencapai Rp. 3.259.508.046.034,99, terlihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah sebesar 38,46% atau sebesar Rp. 1.253.624.335.381,67 dan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan memberikan kontribusi sebesar 46,86% atau sebesar Rp. 1.527.551.544.653,32 sedangkan pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sebesar 14,67 persen atau sebesar Rp. 478.332.166.000,00.

Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2015 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya berbagai penghematan dari sisi belanja dan pembiayaan.

1.5.1. Kondisi Belanja Daerah

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana.

Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

1.5.2. Target dan Realisasi Belanja

Program Prioritas Pembangunan tahun anggaran 2015 sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya yang dijabarkan dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2015 dengan mengalokasikan anggaran secara proporsional kepada seluruh SKPD dengan satuan standar tertinggi. Alokasi target belanja daerah tahun 2015 sebesar Rp. 1,825 Triliun yang merupakan belanja langsung, dan 1,4 Triliun untuk belanja tidak langsung. Dari target belanja tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 1.649 Triliun dengan tingkat capaian realisasi belanja daerah tahun 2015 sebesar 90,37%.

Tidak tercapainya target belanja tahun 2015 karena adanya kegiatan pada SKPD yang tidak dapat dilaksanakan sesuai target serta adanya keterbatasan waktu serta efisiensi dari berbagai pengeluaran namun tetap mengedepankan capaian target kinerja masing-masing program/kegiatan yang telah ditetapkan.

1.5.3. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota serta belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 1,4 Triliun dan terealisasi sebesar Rp. 1.3 Triliun atau 94,01% lebih tinggi dari rencana anggaran.

Belanja Pegawai yang merupakan belanja gaji pegawai selama tahun 2015 terealisasi sebesar Rp. 434.867.287.415,00 atau 90,23% dari jumlah anggaran, belanja ini lebih kecil 5,6% dari realisasi tahun sebelumnya.

Belanja Subsidi tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 0,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari jumlah anggaran, belanja subsidi ini mengalami tidak mengalami peningkatan dari total realisasi tahun lalu.

Belanja bagi hasil tahun 2015 kepada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp. 558,4 Milyar dan telah terealisasi sebesar Rp. 517,1 Milyar,- atau sebesar 92,6%, Alokasi belanja ini lebih besar dari tahun 2014.

Belanja bagi hasil ini merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota yang terdiri dari belanja bagi hasil PKB, BBN-KB, PBB-KB, Belanja Bagi Hasil Pajak Air permukan, Belanja Bagi Hasil Pajak Air Bawah Tanah, Belanja Bagi Hasil Pajak Kendaraan Diatas Air dan bagi hasil BBN Kendaraan di atas Air.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa tahun 2015 sebesar Rp. 157.225.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 150.386.797.280,- atau 95,65% yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Sungai Penuh, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.087.471.900,- atau sebesar 69,58%.

1.5.4. Belanja Langsung

Komponen utama Belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal yang merupakan cerminan pelaksanaan kebijakan program pembangunan tahunan dan tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang ditetapkan setiap tahunnya. Komposisi penyediaan anggaran belanja langsung 60% dari total belanja daerah, hal ini mencerminkan bahwa struktur APBD Provinsi Jambi memberikan porsi yang cukup besar untuk pembangunan daerah.

Penyediaan anggaran belanja langsung tahun 2015 lebih tinggi dari anggaran tahun sebelumnya yaitu sebesar 60,05%, dan 56,13% pada tahun 2014 dari total belanja daerah, yang dialokasikan untuk Belanja pegawai sebesar Rp. 300.336.655.113,- atau terealisasi sebesar 87,56%, belanja barang dan jasa disediakan anggaran sebesar Rp. 702.495.631.097,- atau terealisasi sebesar 90,79% serta belanja modal dianggarkan sebesar Rp.

1.029.488.615.439,- atau terealisasi sebesar Rp. 937.983.069.666,- atau sebesar 91,11%. Anggaran Belanja langsung tersebar pada 45 Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Jambi dan secara umum telah terealisasi 89,66% dari target belanja langsung.

1.6. Wilayah Administrasi dan Struktur Pemerintah Provinsi Jambi

1.6.1. Wilayah Administrasi

Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Terdapat 138 kecamatan, 1.381 desa dan 168 kelurahan yang tersebar di kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerinci tediri dari 16 kecamatan, 287 desa dan 2 kelurahan.
b. Merangin tediri dari 24 kecamatan, 207 desa dan 10 kelurahan
c. Sarolangun tediri dari 10 kecamatan, 149 desa dan 9 kelurahan
d. Batang Hari tediri dari 8 kecamatan, 101 desa dan 13 kelurahan
e. Muaro Jambi tediri dari 11 kecamatan, 148 desa dan 5 kelurahan
f. Tanjung Jabung Timur tediri dari 11 kecamatan, 73 desa dan 20 kelurahan
g. Tanjung Jabung Barat tediri dari 13 kecamatan, 104 desa dan 20 kelurahan
h. Tebo tediri dari 12 kecamatan, 107 desa dan 5 kelurahan
i. Bungo tediri dari 17 kecamatan, 142 desa dan 12 kelurahan
j. Kota Jambi tediri dari 8 kecamatan dan 62 kelurahan
k. Kota Sungai Penuh terdiri dari 8 kecamatan, 65 desa dan 4 kelurahan

1.6.2. Struktur Pemerintah Provinsi Jambi

Pegawai Negeri Sipil (PNS)Daerah dalam wilayah Kantor Gubernur Jambi meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor, rumah sakit, sekretariat KPU dan Korpri. Secara keseluruhan berjumlah 6.365 orang yang terdiri dari 3.512 orang laki-laki (55,18 persen) dan 2.853 orang perempuan (44,82 persen). Ditinjau dari segi golongan kepangkatan terbagi menjadi ; golongan I sebanyak 96 orang (1,51 persen), golongan II sebanyak 1.449 orang (22,77 persen), golongan III sebanyak 4.220 orang (66,30 persen), dan golongan IV 600 (9,43 persen). Secara umum, tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil terbanyak adalah Strata 1 (S1)2.718 orang (42,70 persen), disusul Sekolah Menengah Atas (SMA) 2.024 orang (32,08 persen), Diploma IV 812 orang (12,76 persen), Pasca Sarjana (S2)531 orang (8,34 persen), SMP 151 orang (2,37 persen), Sekolah Dasar (SD) 116 orang (1,63 persen), dan Doktor (S3)7 orang (0,11 persen).

Gambar 1.6. **Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Wilayah Kantor Gubernur Jambi menurut Unit Organisasi, 2013**

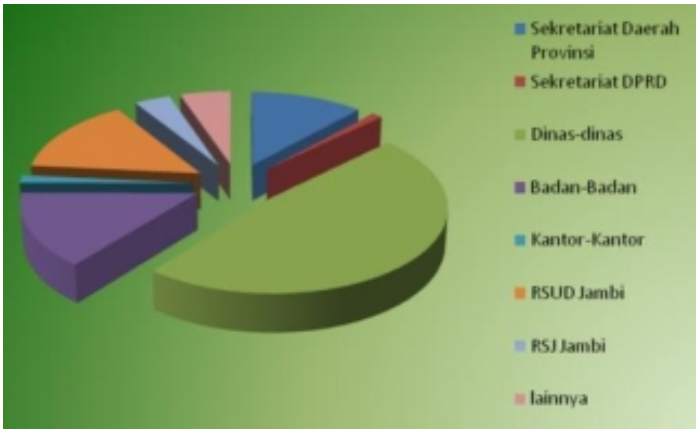

1.7. Isu Strategis Dan Permasalahan Pembangunan

Analisa isu-isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah provinsi Jambi mempertimbangkan kondisi obyektif daerah dan perkembangan yang terjadi di Provinsi Jambi selama pelaksanaan pembangunan, yang merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah yang juga akan menentukan kinerja pembangunan tahun mendatang.

1.7.1. Infrastruktur Daerah

1. Kualitas infrastruktur tranportasi darat terutama jalan yang relatif rendah mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam

wilayah provinsi Jambi maupun dari provinsi Jambi ke Provinsi tetangga. Pembangunan infrastruktur jalan-jalan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Provinsi Jambi perlu dilakukan untuk kelancaran transportasi orang, barang dan jasa terutama dari kawasan sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran.

Sampai dengan Desember 2014, panjang jalan provinsi Jambi dalam keadaan baik yakni sepanjang 74,82% (1.369,06 Km) dari target sebesar 75% (1.504,92 Km) pada tahun 2015. Ini berarti masih tersisa 0,18% untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2015. Sebagai informasi, panjang jalan provinsi Jambi seluruhnya yakni 1.504,92 Km.

2. Terbatasnya pengembangan akses perhubungan untuk daerah pantai dan pulau terluar di bagian timur Provinsi Jambi, serta masih adanya desa yang belum terjangkau oleh sarana transportasi darat. Serta pembebanan berlebihan (*overloading*) masih terjadi terutama pada lintas Timur dan Barat Sumatera yang melalui Provinsi Jambi.
3. Transportasi sungai, danau dan laut merupakan transportasi tradisional masyarakat Jambi masih belum dimanfaatkan dengan baik. Transportasi ini relatif lebih murah karena mampu mengakomodasi kapasitas angkut yang lebih besar dan biaya perawatan sarana transportasi yang lebih rendah. Transportasi ini dapat dimanfaatkan terutama untuk angkutan barang seperti hasil tambang dan hasil pertanian dalam arti luas. Revitaliasi transportasi sungai dan laut perlu dilakukan untuk mengembalikan kejayaan transportasi sungai dan laut di Provinsi Jambi. Prasarana perhubungan laut belum tersedia Pelabuhan Internasional, yang ada baru pelabuhan laut antar pulau yang masih relatif kecil.

   Namun demikian, pada tahun 2014 ini telah dilakukan berbagai pengembangan kawasan ujung jabung dengan menyiapkan pengembangan luas lahan kawasan pelabuhan sebesar 182 Ha.
4. Prasarana perhubungan udara belum tersedia bandar udara internasional, yang ada hanya dua bandar udara sekunder dan satu bandara udara perintis.

   Sejak tahun 2014, telah dilakukan pengembangan perluasan dan pembangunan bandara Sultan Thaha Jambi sebagai upaya menuju bandar udara internasional, selanjutnya juga telah diupayakan bandara Sultan Thaha Jambi sebagai bandara antara bagi jema'ah haji provinsi Jambi dan pada awal tahun 2015 telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 205 Tahun 2014 tentang penetapan bandara Sultan Thaha Jambi sebagai bandara haji antara.
5. Defisit tenaga listrik yang mencapai 30 MW sehingga pemadaman bergilir harus dilakukan. Pembangkit listrik sebagian besar masih menggunakan Pembangun Listrik Tenaga Uap dan tenaga diesel dan saat ini hanya tersedia 3 unit pembangkit listrik dengan kapasitas masih dibawah kebutuhan.
6. Sungai Merangin di Kabupaten Kerinci sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan potensi 350 MW belum termanfaatkan secara optimal. Provinsi Jambi butuh listrik 181,07 MW sementara kemampuan hanya 155 MW. Disamping itu dapat mengairi sawah-sawah disekitarnya. Jika dibangun PLTA 350 MW maka kelebihan kapasitas dapat didistribusikan pada daerah yang lain.
7. Kualitas Mutu Air (KMA) yang terdapat pada Sungai Batanghari sudah berada pada tingkat tercemar sedang sampai tercemar berat.
8. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Selain itu pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut juga akan meningkatkan produksi padi khususnya sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jambi.

1.7.2. Sosial Budaya

1.7.2.1. Pendidikan

Permasalahan pokok pendidikan di Provinsi Jambi antara lain :

1. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah serta kesadaran masyarakat untuk bersekolah yang masih relatif rendah.
2. Belum meratanya sebaran pendidikan di kabupaten/kota yang menyebabkan perbedaan APK/APM yang mencolok antara kabupaten dan kota.
3. Banyak jumlah sekolah yang rusak, 53.6% dari total 14.747 ruang kelas SD dan 19.6% dari total 2.260 ruang kelas SMP serta 27.37% dari total 1.030 ruang kelas SMA.
4. Belum optimalnya proses belajar mengajar sebagai akibat sarana dan prasarana seperti buku, alat-praktik, alat peraga dan alat-alat laboratorium yang belum memadai.
5. Distribusi guru dan tenaga pendidik yang kurang merata antar satuan pendidikan dan antar wilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru di daerah terpencil sesuai dengan standar pelayanan minimal.
6. Belum mantapnya koordinasi antara dinas kabupaten/kota dengan dinas provinsi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.
7. Distribusi tenaga pendidik yang tidak proporsional antar daerah maupun antara sekolah pada daerah yang sama, terutama yang berhubungan dengan tenaga pendidik bagi bidang ilmu tertentu.

1.7.2.2. Kesehatan

Adapun permasalahan pokok yang dihadapi antara lain ;

1. Pelayanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata untuk seluruh lapisan dan strata ekonomi dan sosial masyarakat. Pelayanan kesehatan masih bersifat diskriminatif sehingga menyebabkan disparitas status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender.
2. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah, yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi di Provinsi Jambi.
3. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Jambi pada saat ini masih belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Sarana, prasarana dan tenaga kesehatan terpusat di Kota Jambi sementara di sebagian besar ibukota Kabupaten tidak memiliki sarana, prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai apalagi di wilayah-wilayah terpencil.
5. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan penyebaran yang tidak merata.

1.7.2.3. Kebudayaan dan Pariwisata

Beberapa permasalahan bidang kebudayaan antara lain :

1. Besarnya potensi kepariwisataan di Provinsi Jambi belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.
2. Rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya nasional maupun budaya asing yang unggul dan dapat menunjang percepatan peningkatan pembangunan daerah.
3. Lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta meningkatnya kegiatan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah.

4. Kurangnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah.

1.7.3. Perekonomian Daerah

1.7.3.1. Keuangan Daerah

Fakta dan Permasalahan dari Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Penerimaan PAD Provinsi Jambi masih tergantung pada penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak kenderaan bermotor dan biaya balik nama yang besarnya pada tahun 2014 mencapai 85 persen dari total penerimaan PAD Provinsi Jambi pada tahun tersebut.
2. Adanya kesenjangan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota yang disebabkan adanya perbedaan karakteristik potensi sumberdaya yang berbeda setiap wilayah. Kabupaten/Kota dengan kapasitas fiskal terbesar adalah Kota Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, dan Bungo, sedangkan kapasitas fiskal terendah di Kabupaten Merangin.
3. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada awal tahun pelaksananaan RPJMD mengalami peningkatan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan penerimaan dari dana perimbangan masih lebih kecil. Kondisi ini mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara persentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Jambi terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Provinsi sangat terbatas sebagai sumber pendapatan daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada.

1.7.3.2. Sumberdaya Ekonomi

1. Menurunnya kinerja ekspor yang antara lain disebabkan biaya ekonomi tinggi; rendahnya infrastuktur ekspor seperti pelabuhan, peti kemas dan angkutan kapal laut serta rendahnya infrastruktur jalan ke pelabuhan; ketergantungan pada produk primer (nilai tambah rendah), penurunan ekspor produk kayu olahan dan karena keterbatasan bahan baku, berpengaruh besar terhadap kinerja ekspor Jambi; masih besarnya ketergantungan pasar ekspor pada negara tertentu seperti Singapura; keragaman ekspor yang masih rendah; lemahnya sistem jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam mendukung peningkatan daya saing ekspor.
2. Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan.
3. Rendahnya pendapatan petani yang tercermin dari nilai NTP petani masih dibawah 100 (98,54) tahun 2009. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan daya beli petani di Jambi masih rendah karena rendahnya pendapatan.
4. Setiap tahun lahan–lahan potensi tanaman pangan dan hortikultura ada yang beralih (konversi) ke subsektor lain seperti perkebunan sawit, sehingga luas baku lahan pertanian pangan & hortikultura kecenderungan terjadi penurunan, jika tidak diikuti dengan pembukaan lahan – lahan baru.
5. Rendahnya produktivitas yang umumnya terdapat di daerah rawa/ pasang surut.
6. Terjadinya kesenjangan produktivitas karena belum optimalnya teknologi yang digunakan, ketersediaan dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhan pertanaman.
7. Masih tingginya desa rawan pangan di Provinsi Jambi.
8. Pola konsumsi masih banyak tergantung dengan padi-padian (beras).
9. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan nelayan.
10. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, cold storge, jenis alat tangkap.
11. Rendahnya produktivitas dan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya

dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.

12. Terbatasnya akses UMKM dan Koperasi kepada sumberdaya produktif.
13. Tertinggalnya kinerja koperasi dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang disebabkan antara lain karena rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.

1.7.3.3. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Rendahnya nilai tambah sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan.
2. Kemampuan dan keberlanjutan produksi pangan, pertanian, dan perikanan yang akan menghadapi kendala dan keterbatasan dukungan kapasitas sumberdaya alam.
3. Jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap input produksi (pakan, pupuk, dan benih).
4. Rendahnya minat berinvestasi untuk pengusahaan mineral dan batubara. Keadaan ini disebabkan masalah kepastian hukum dan belum optimalnya sistem insentif untuk menarik masuknya investor baru dalam usaha pertambangan.
5. Pemanfaatan tambang telah menyisakan permasalahan lingkungan. Reklamasi tambang belum dikelola secara ekologis dan ekonomis, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup fisik meliputi air, udara, tanah, dan bentang alam, ataupun nonfisik seperti sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Persyaratan lingkungan yang ketat pada tingkat provinsi belum dipersiapkan secara optimal. Di samping itu, pembangunan pertambangan sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya alam belum dilaksanakan, ditata, dan dikembangkan secara terpadu dengan pembangunan wilayah dalam suatu kerangka tata ruang yang terintegrasi.
6. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air yang tersedia pada musim hujan dan pada musim kemarau, menyebabkan ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir. Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan lainnya berupa kekeringan yang berkepanjangan.

1.7.4. Tata Pemerintahan

1.7.4.1. Pemerintahan Umum

1. Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. Upaya untuk melakukan efektivitas peraturan daerah sampai dengan saat ini masih terkendala dengan masih adanya peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir sehingga kesulitan dalam membauat aturan turunannya di tingkat peraturan daerah. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan dalam bentuk peraturan daerah juga belum sepenuhnya dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan daerah masih dirasakan minim.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Salah satu permasalahan utama yang menjadi hambatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, terkait erat dengan belum tuntasnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, belum tuntas dan terintegrasinya program *Single Identification Number* (SIN), dan belum tuntasnya reformasi manajemen keuangan negara, terutama reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sampai dengan saat ini upaya pencegahan belum dilaksanakan secara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan umum, bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.
3. Upaya pencegahan KKN juga masih terkendala oleh belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan negara dan pengawasannya. Penyebabnya antara lain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan auditor daerah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di

bidang pengawasan, belum sempurnanya mekanisme/hubungan kerja yang mengatur pengawasan yang dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kode etik/standar audit.

4. Di samping permasalahan tersebut di atas, budaya kerja produktif juga belum berkembang secara maksimal di lingkungan birokrasi. Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi publik *(code of conduct)* masih kabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk berprestasi, kejujuran, rasa tanggungjawab, serta bersih dan bebas dari KKN. Di samping itu, pengaturan tentang konflik kepentingan di lingkungan birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh PNS juga belum memadai. Oleh sebab itu pengembangan dan penerapan *e-procurement* merupakan instrumen yang efektif untuk mencegah praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa publik.
5. Pelayanan Publik. Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan skor indeks kepuasan masyarakat yang baik, namun disadari bahwa pemerintah Provinsi Jambi belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
6. Para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Provinsi Jambi masih terkendala dengan berbagai regulasi, system pelayanan investasi dan birokrasi pelayanan perizinan yang lambat dan mahal. Oleh karena itu diperlukan adanya berbagai kemudahan pelayanan investasi.
7. Sebagian besar unit pelayanan publik belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan.
8. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis proses yang ada di dalam birokrasi banyak yang belum efisien dan belum akuntabel. Proses kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.
9. Pengembangan budaya hukum dan HAM. Meskipun upaya pengembangan budaya hukum dan HAM terus dilakukan secara sinergi antara pemerinrah dan pemerintah provinsi, dan kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, namun kesadaran hukum serta penghormatan terhadap HAM masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

1.8. Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah membangun sistem akuntabilitas kinerja terpadu.

Sistem akuntabilitas kinerja terpadu ini untuk memastikan sinkronosasi planning dan implementasi yang terukur dan akuntabel. Pengembangan sistem akuntabiltas terpadu ini diupayakan melalui pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas perencanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Hal ini meliputi pengembangan e-Planning untuk perencanaan, dan pengembangan sistem aplikasi untuk monitoring dan evaluasi yang mengintegrasikan Laporan Perkembangan Pelaksaaan Kegiatan (LPPK), Monev APBD dan E-sakip. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan rangkaian inovasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, termasuk pengembangan sistem tunjangan kinerja pegawai bagi aparatur di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi.

Untuk peningkatan monitoring dan evaluasi pembangunan, Pemerintah Provinsi Jambi mengembangkan aplikasi LPPK, Web Monev dan e-SAKIP. Program aplikasi LPPK adalah instrumen yang digunakan oleh SKPD untuk menuangkan detail pelaksanaan kegiatan dalam waktu dengan memberikan target progres capaian fisik dan keuangan pada tahapan waktunya. Webmonev merupakan aplikasi untuk melaporkan realisasi progres pelaksanaan kegiatan. Data yang dihasilkan dalam LPPK telah diintegrasikan dengan Webmonev dalam bentuk database nama program dan kegiatan serta target fisik dan keuangan. Penggunaan LPPK dan Webmonev dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, aplikasi e-Sakip merupakan aplikasi yang dibangun untuk melakukan evaluasi atas sejauh mana tingkat pencapaian target kinerja baik di tingkat provinsi maupun di level SKPD, sistem aplikasi berbasis teknologi informasi ini bisa diakses di sakip.jambiprov.go.id.

Gambar 1.7. Log In e-SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi

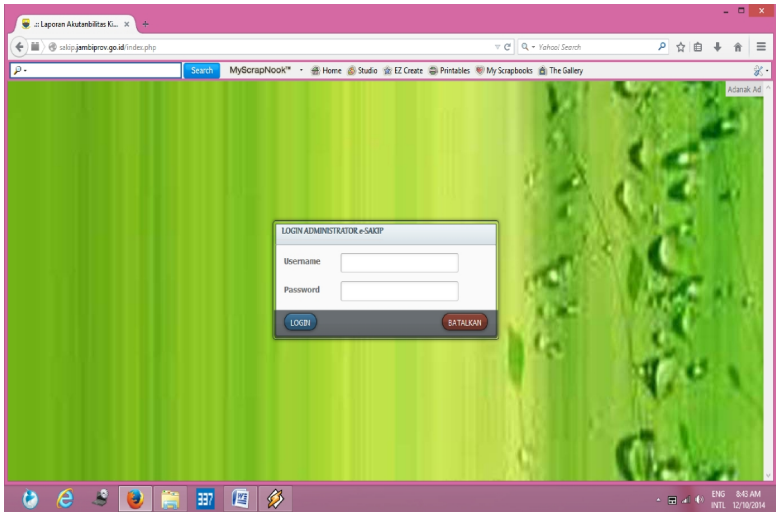

1.9. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja (LKj)

Sistematika penyajian LKj Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, sejarah pemerintah Provinsi Jambi, kondisi geografis, data demografi dan kondisi ekonomi daerah. Bab ini juga berisi penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memuat Pengelolaan Kinerja Daerah, Rencana Strategis Daerah, Tema Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2015, dan Perjanjian Kinerja tahun 2015. Bab ini juga berisi Program-program untuk Pencapaian IKU 2015.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi

Berisi penjelasan singkat tentang capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk setiap pernyataan kinerja, capaian IKU tahun 2015, juga Evaluasi dan Analisis Capaian IKU 2015 yang diuraikan per sasaran dan IKU. Selain itu, bab ini juga berisikan program/kegiatan yang menunjang capaian Kinerja serta capaian Kinerja Keuangan Daerah.

Bab IV : Penutup

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

BAB II
PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II :

2.1. Perencanaan

2.2. Strategi, arah kebijakan, program & indikator kinerja dalam RPJMD 2010-2015

2.3. Perjanjian Kinerja

2.4. Indikator Kinerja Utama Provinsi Jambi

2.1. Perencanaan

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

2.1.2. Visi Pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2010 – 2015, yaitu :

J A M B I E M A S 2015
"EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA"

Ekonomi Maju : mengartikan bahwa adanya pergerakan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selain itu, juga ditandai dengan struktur ekonomi yang kokoh yang mampu mencapai produktifitas tinggi dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aman : keadaan yang menggambarkan perwujudan memiliki perasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju; serta memilliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya, yang dilandasi supremasi hukum dan Hak Azazi Manusia yang tinggi.

Adil : mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sejahtera : mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan sandang dan pangan secara merata.

2.1.3. Misi Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015, sebagai berikut :

1) **Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum** yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang

berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik;

2) **Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya** yaitu pembangunan yang menekankan pada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera;

3) **Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri** yaitu mengembangkan perekonomian daerah yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal berbasis agribisnis dan agroindustri sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat;

4) **Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan** yaitu melaksanakan pembangunan yang memanfaatkan ekonomi Sumberdaya Alam dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan;

5) **Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender** yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan akses dan kesempatan bagi penduduk laki-laki dan perempuan agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata.

2.1.4. Tujuan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Provinsi Jambi untuk periode 5 tahun. Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2009 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025, maka sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan.

Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD tersebut, maka kedepan tujuan pembangunan daerah provinsi Jambi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik
2. Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya
3. Mewujudkan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan
5. Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dalam memenuhi kepentingan umum

2.1.5. Sasaran

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran per-Misi yang hendak dicapai Provinsi Jambi dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum yang Berkualitas, dengan sasaran:
   a. Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur
   b. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik
   c. Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Budaya, dengan sasaran :
   a. Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas
   b. Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat
   c. Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis/Agroindustri, serta Investasi, dan Kepariwisataan dengan sasaran :
   a. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi
   b. Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisataan daerah
   c. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu yang Optimal dengan Mengedepankan Penataan Ruang dan Lingkungan, dengan sasaran :
   a. Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan
   b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Serta Kesetaraan Gender, dengan sasaran :
   a. Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik
   b. Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Akhir 2015
1.	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur (jalan)	– Persentase jalan Provinsi Jambi dalam kondisi mantap (kondisi baik, sedang)	68,98 (1.037 Km)	75
2.	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik	– Persentase Rasio elektrifikasi – Persentase pengembangan energi baru terbarukan (PLTMH/PLTMS)	49,59 48,90	82 88
3.	Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	– Persentase fungsionalisasi daerah irigasi – Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan – Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	60,62 44,32 (MDGs) 40,93 (MDGs)	66,35 68,87 (MDGs) 62,41 (MDGs)

4.	Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas	– Angka partisipasi murni (APM) - SD (%) - SMP (% - SMA (%)	 91,5 66,9 45,7	 100 90 78
5.	Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat	– Prevalensi kekurangan gizi pada balita (kasus gizi buruk balita tertangani) – Persentase puskesmas berkinerja baik	100% kasus tertangani 50	100% kasus tertangani 75
6.	Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial	– Persentase menurunnya rumah tangga sangat miskin – Indeks pembangunan manusia	8,34 65,39	5 70
7.	Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi	– Nilai investasi PMA – Nilai investasi PMDN – Nilai Ekspor – Persentase koperasi berkualitas – Peningkatan pelaku UMKM – Laju inflasi provinsi Jambi	US$448,4jt Rp. 11,2 T US$ 1.209.672 89,21 65.240 10,42	US$1.161,35jt Rp. 18,26 T US$2.000.000 98,91 65.500 5,53
8.	Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisataan daerah	– Pertumbuhan kunjungan wisata – Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1.110.000 wisatawan 14,53	1.554.319 wisatawan 19
9.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	– Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB – Persentase nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan – Ketersediaan energi/kap/perhari	27,9 96 1.929 kkal/kap/hr	29 - 29,5 104 – 106 2.200 kkal/kap/hr
10.	Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan	– Penurunan titik api (hot spot)	623 titik	300 titik
11.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup	– Persentase luasan lahan tertutup pohon (rehabilitasi hutan & lahan kritis) – Penurunan emisi gas rumah kaca (kemampuan penanganan emisi GRK)	64,80 (1.120.355Ha) 2,5 MtCO2	65,5 (1.120.855Ha) 17,25 MtCO2
12.	Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik	– Opini BPK terhadap laporan keuangan & asset daerah – Aksi daerah pencegahan & pemberatasan korupsi Provinsi Jambi, dan Kab/Kota – Skor indeks kepuasan masyarakat (IKM) Provinsi Jambi – Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja Pemprov. Jambi	WDP - - - C (44,32)	WTP 8 aksi (kategori hijau) 9% (kategori hijau) >85 “A” B (60)
13.	Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan	– Persentase kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	96	99,0

2.2. Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2010 - 2015

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

2.2.1. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, antara lain sebagai berikut :

1. Strategi untuk mencapai misi *Meningkatkan infrastruktur wilayah dan Pelayanan umum*, adalah :
   a) Melakukan percepatan pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur listrik terutama bagi daerah yang belum terjangkau oleh transportasi darat. Hal ini dilakukan demi kelancaran transportasi orang, barang dan jasa terutama dari kawasan sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran.
   b) Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih dengan cara mengoptimalkan pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Selain itu pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut juga akan meningkatkan produksi padi khususnya, sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jambi.
   c) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana seperti buku, alat-praktik, alat peraga dan alat-alat laboratorium sekolah.
2. Strategi untuk mencapai misi *Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta sosial budaya,* adalah :
   a) Pemerataan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas, Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin, serta distribusi tenaga pendidik yang proporsional antar daerah maupun antara sekolah pada daerah yang sama, terutama yang berhubungan dengan tenaga pendidik bagi bidang ilmu tertentu.
   b) Meningkatkan Peran Agama dan Budaya Dalam Pembangunan dengan memasukkan mata ajar muatan lokal yang menyentuh langsung terhadap kepentingan daerah masing-masing.
   c) Meningkatkan Peran Pemuda pemuda baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan, serta meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.
   d) Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan dengan cara mengoptimalkan kinerja pelayanan kesehatan serta mendorong perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.
3. Strategi untuk mencapai misi *Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri*, adalah :
   a) Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan, membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.
   b) Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat, meningkatkan inovasi, penajaman promosi,

peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar pelaku wisata.

4. Strategi untuk mencapai misi *Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu yang Optimal dengan Mengedepankan Penataan Ruang dan Lingkungan*, adalah :
   a) Meningkatkan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dengan cara menyiapkan lahan–lahan potensial bagi tanaman pangan dan hortikultura sehingga luas baku lahan pertanian pangan & hortikultura akan terus meningkat.
   b) Melakukan reklamasi tambang yang dikelola secara ekologis dan ekonomis, sehingga menimbulkan dampak positif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup fisik meliputi air, udara, tanah, dan bentang alam, ataupun nonfisik seperti sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
   c) Meningkatkan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup dengan cara melakukan pengawasan secara intensif terhadap pengelolaan hutan dan lahan, serta Pemanfaatan ruang terkendali.
5. Strategi untuk mencapai misi *Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Serta Kesetaraan Gender*, adalah:
   a) Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel.
   b) Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.

2.2.2. Arah Kebijakan Daerah

1. Arah kebijakan daerah untuk mencapai misi pertama *Meningkatkan infrastruktur wilayah dan Pelayanan umum*, adalah :
   a. Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap dari 68,98% menjadi 75%.
   b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi dan listrik : rasio elektrifikasi dari 49,59 menjadi 82%, dan desa yang memakai energi baru terbarukan (PLTMH/PLTS) dari 9 PLTMH / 5.649 PLTS menjadi 15 PLTMH / 7.084 PLTS.
   c. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih ;
      – Persentase fungsionalisasi daerah irigasi dari 60,62% menjadi 66,35%
      – Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan dari 44,32% menjadi 68,87%.
      – Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan dari 40,93% menjadi 62,41%.
2. Arah kebijakan daerah untuk mencapai misi kedua *Meningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta sosial budaya,* adalah :
   a. Meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas, dilihat melalui indikator ;
      – Angka partisipasi murni (APM)
        - APM SD dari 95,6% menjadi 100%.
        - APM SMP dari 66,9% menjadi 90%.
        - APM SMA dari 45,7% menjadi 78%.
   b. Meningkatkan pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat. Dilihat melalui indikator ;
      – Prevalensi kekurangan gizi pada balita (penanganan kasus balita gizi buruk) dari 100% menjadi 100%.

– Persentase puskesmas yang berkinerja baik dari 50% menjadi 75%.

c. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, dilihat dari indikator ;

– Persentase menurunnya rumah tangga sangat miskin dari 8,34% menjadi 5%.
– Indeks pembangunan manusia dari 65,39% menjadi 70%.

3. Arah kebijakan daerah untuk mencapai misi ketiga *Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri*, adalah :

a. Meningkatkan iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi, dilihat dari indikator ;

– Nilai investasi PMA dari US$448,4jt menjadi US$1.161,3jt.
– Nilai investasi PMDN dari Rp. 11,2 Triliun menjadi Rp. 18,36 Triliun.
– Nilai Ekspor dari US$ 1.209.672 menjadi US$ 2.000.000.
– Persentase koperasi berkualitas dari 89,21% menjadi 98,91%.
– Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro, kecil, menengah dari 65.240 unit menjadi 65.500 unit.
– Laju inflasi provinsi Jambi dari 10,42% menjadi 5,53%.

b. Meningkatkan promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisataan daerah, yang dilihat dari indikator ;
– Pertumbuhan kunjungan wisata dari 1.110.000 wisatawan menjadi 1.554.319 wisatawan.
– Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari 14.53% menjadi 19%.

c. Meningkatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, dilihat dari indikator ;
– Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 27,9% menjadi 29% - 29,5%.
– Persentase nilai tukar petani (NTP) dari 96% menjadi 104 – 106%.
– Ketersediaan energi/kap/perhari dari 1.929kkal/kap/hr menjadi 2.200 kkal/kap/hr.

4. Arah kebijakan daerah untuk mencapai misi keempat *Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu yang Optimal dengan Mengedepankan Penataan Ruang dan Lingkungan*, adalah :

a. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan, dilihat dari indikator ;
– Penurunan titik api (hot spot) dari 623 titik menjadi 300 titik.

b. Meningkatkan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup, dilihat dari indikator ;
– Persentase luasan lahan tertutup pohon dari 64,80% menjadi 65,5%.
– Penurunan emisi gas rumah kaca (kemampuan penanganan) dari 2,5 MtCO2 menjadi 17,25 MtCO2.

5. Arah kebijakan daerah untuk mencapai misi ke lima *Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, serta Kesetaraan Gender*, adalah :

a. Meningkatkan Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, dengan indikator;
– Opini BPK terhadap laporan keuangan & asset daerah dari WDP menjadi WTP
– Aksi daerah pencegahan & pemberatasan korupsi Provinsi Jambi dari 0 aksi menjadi 8 aksi (kategori hijau), dan Kab/Kota dari 0% menjadi 100%
– Persentase peningkatan indeks kepuasan masyarakat menjadi A.
– Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja daerah dari C menjadi B.

b. Meningkatkan partisipasi & peran perempuan dalam pembangunan, dengan indikator ;

– Persentase kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (dilihat dari APM 15-24 T) dari 96% menjadi 99%.

2.2.3. Program

Untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan program pembangunan menurut bidang urusan, yakni :

1. Upaya mewujudkan Misi Pertama yakni Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum, maka program pembangunan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

   a. Urusan Wajib Penataan Ruang, melalui program antara lain :

      (1) Program Perencanaan Tata Ruang.
      (2) Program Penataan Kawasan.

   b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Pengairan), melalui program antara lain :

      (1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.
      (2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rawa.
      (3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku/Air Tanah.
      (4) Program Pengendalian Banjir.
      (5) Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong.

   c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Cipta Karya), melalui Program antara lain :

      (1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
      (2) Program Pengembangan Perumahan.
      (3) Program Pengembangan Kawasan Permukiman.
      (4) Program Pembangunan Saluran Drainase.
      (5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

   d. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Bina Marga), melalui program antara lain :

      (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
      (2) Program Inspeksi Jalan dan Jembatan.
      (3) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
      (4) Program Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Jembatan

   e. Urusan Wajib Perhubungan, melalui program antara lain :

      (1) Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
      (2) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
      (3) Program Transportasi Udara.
      (4) Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan

   f. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui program antara lain :

      (1) Program Pengembangan Potensi dan Kecukupan Energi Listrik dan Bahan Bakar
      (2) Program Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan.

2. Upaya mewujudkan Misi Kedua yakni Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya, maka program pembangunan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

   a. Urusan Wajib Pendidikan melalui program antara lain :

      (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
      (2) Program Wajib Belajar 12 tahun.
      (3) Program Pendidikan Menengah.
      (4) Program Pendidikan Non-Formal.
      (5) Program Pendidikan Luar Biasa.
      (6) Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan.

(7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

b. Urusan Wajib Kesehatan melalui program antara lain :

(1) Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
(2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
(3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan.
(4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
(5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
(6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
(7) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
(8) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
(9) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.
(10) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
(11) Program Upaya Kesehatan Perorangan.
(12) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
(13) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
(14) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata.
(15) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.

c. Urusan Wajib Perpustakaan, melalui program antara lain :

(1) Program Pengembangan Budaya Membaca dan Pembinaan Perpustakaan.
(2) Pelestarian dan Pemeliharaan Bahan Pustaka

d. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan melalui program antara lain :

(1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
(2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
(3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
(4) Program Pembinaan Anak Terlantar.
(5) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
(6) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
(7) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).
(8) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
(9) Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.

e. Urusan Wajib Kebudayaan melalui program antara lain :

(1) Program Pengembangan Nilai Budaya.
(2) Program Pengelolahan Kekayaan Budaya.
(3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
(4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolahan Kekayaan Budaya.

3. Upaya mewujudkan Misi Ketiga yakni Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri, maka program pembangunan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, melalui program antara lain :

(1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM.
(2) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM.
(3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
(4) Program Pengembangan Kemitraan.
(5) Program Perkuatan Permodalan UMKMK.

(6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK.
(7) Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKM

b. Urusan Wajib Penanaman Modal, melalui program antara lain :

(1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
(2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
(3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

c. Urusan Wajib Ketenagakerjaan, melalui program antara lain :

(1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
(2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
(3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

d. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, melalui program antara lain:

(1) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
(2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
(4) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

e. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui program antara lain :

(1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat.

f. Urusan Pilihan Industri, melalui program antara lain :

(1) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
(2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
(3) Program Penataan Struktur Industri

g. Urusan Pilihan Perdagangan, melalui program antara lain :

(1) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
(2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
(3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan.
(4) Program Pengembangan Standarisasi Nasional.

h. Urusan Pilihan Pariwisata, melalui program antara lain :

(1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
(2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
(3) Program Pengembangan Kemitraan.

i. Urusan Pilihan Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura), melalui program antara lain :

(1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
(2) Program Peningkatan Nilai Tambah Agribisnis.
(3) Program Peningkatan Pemasaran Produk Pertanian.

j. Urusan Pilihan Pertanian (Perkebunan) melalui program antara lain :

(1) Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan.
(2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

k. Urusan Pilihan Kehutanan, melalui program antara lain :

(1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Kehutanan.

l. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral dengan program sebagai berikut :

(1) Program Promosi Investasi Sektor Pertambangan dan Energi
(2) Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Wilayah Tambang.

4. Upaya mewujudkan Misi Keempat yakni Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan, maka program pembangunan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

   a. Urusan Wajib Ketahanan Pangan melalui program antara lain :

      (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.
      (2) Program Lumbung Pangan.

   b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Bina Marga) melalui program antara lain :

      (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

   c. Urusan Wajib Lingkungan Hidup melalui program antara lain :

      (1) Program Pengendalian dan Pengrusakan Lingkungan.
      (2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
      (3) Program Fasilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
      (4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

   d. Urusan Pilihan Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura), melalui program antara lain :

      (1) Program Pengembangan Sentra-sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
      (2) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
      (3) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian.
      (4) Program Perbaikan dan Penyediaan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana Pertanian

   e. Urusan Pilihan Pertanian (Perkebunan), melalui program antara lain :

      (1) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan.
      (2) Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan.
      (3) Program Pengembangan Proteksi Tanaman Perkebunan.
      (4) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan .
      (5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
      (6) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

   f. Urusan Pilihan Kehutanan, melalui program antara lain :

      (1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
      (2) Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
      (3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi.
      (4) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

   g. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui program antara lain :

      (1) Program Pengembangan Energi.
      (2) Program Survei Geologi dan Sumberdaya Mineral, Mitigasi Bencana Alam Geologi, dan Pemenfaatan Sumber Daya Mineral.
      (3) Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.
      (4) Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan dan Pertambangan.
      (5) Program Pembinaan dan Pengawasan K3 Pertambangan.
      (6) Program Pengembangan Sumur Tua dan Pengusahaan Migas.
      (7) Program Pengembangan Potenasi Energi Lokal/Desa.

5. Upaya mewujudkan Misi Kelima: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender, maka program pembangunan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian melalui program antara lain :

(1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
(2) Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
(3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
(4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
(6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
(7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
(8) Progam Penigkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
(9) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum
(10) Program Perencanaan dan Perbantuan Hukum
(11) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
(12) Program Pengelolaan Kekayaan Daerah

b. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika melalui program antara lain :

(1) Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa.
(3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
(4) Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan

c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri dengan program sebagai berikut :

(1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
(2) Program Perwujudan Lembaga Demokrasi yang makin kokoh.
(3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
(4) Program Pendidikan Politik Masyarakat.

d. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui program antara lain :

(1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
(2) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
(3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

e. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui program antara lain :

(1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
(2) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
(3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
(4) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Desa

2.2.4. Rencana Kinerja 2015

Kerangka pembangunan dalam konteks negara kesatuan mengandung arti terdapatnya kesesuaian antara kerangka pembangunan di tingkat pusat dengan pembangunan di daerah, dalam satu wadah bernama pembangunan nasional. Karenanya, prioritas pembangunan di daerah juga disusun dengan mengacu dan mendukung prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam program Nawa Cita Presiden Republik Indonesia.

Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan inti dari sembilan program tersebut antara lain :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan, adalah merupakan bagian dari target yang lebih strategis seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan).

2.2.5. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program program prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran Indikator Kinerja Utama tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2015

No.	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1.	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur (jalan)	12
2.	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik	11
3.	Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	7
4.	Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas	9

5.	Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat	17
6.	Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial	12
7.	Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi	17
8.	Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisataan daerah	13
9.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	22
10.	Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan	11
11.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup	10
12.	Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik	11
13.	Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan	9
	Total	**161**

2.2.6. Rencana Anggaran Tahun 2015

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 1.825.339.129.976,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Belanja daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015

No.	Uraian	Rencana (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.434.168.916.058,-	43,99
2.	Belanja Langsung	1.825.339.129.976,-	56,01

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2015

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	% Alokasi Anggaran
1.	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur (jalan)	565,856,445,133,-	37.60
2.	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik	12,005,133,000,-	0.80
3.	Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	228,150,101,842,-	15.16
4.	Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas	254,517,818,435,-	16.91
5.	Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat	282,016,024,665,-	18.74
6.	Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial	26,271,907,000,-	1.75
7.	Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi	24,618,592,000,-	1.64

8.	Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisataan daerah	18,074,754,000,-	1.20
9.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	32,715,262,500,-	2.17
10.	Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan	7,704,026,000,-	0.51
11.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup	9,732,846,000,-	0.65
12.	Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik	29,815,318,000,-	1.98
13.	Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan	13,537,743,400,-	0.90
	Jumlah	**1,505,015,971,975,-**	**100**
	Belanja langsung pendukung	**320,323,158,001,-**	
	Total belanja langsung	**1,825,339,129,976,-**	

Pada tabel tersebut, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program utama sebesar Rp. 1,505,015,971,975,- sedangkan anggaran untuk program pendukung sebesar Rp. 320,323,158,001,-.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran pembangunan dengan anggaran paling besar adalah sasaran kualitas ketersediaan infrastruktur meningkat dengan besar anggaran Rp. 565,856,445,133,- atau mencapai alokasi anggran sebesar 37,60%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat yaitu sebesar Rp. 282,016,024,665,- atau sebesar 18,74% dari total anggaran. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan sebesar Rp. 7,704,026,000,- atau hanya 0,51% dari total anggaran.

2.3. Perjanjian Kinerja

Sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran Pemerintah Provinsi Jambi pada akhir periode RPJMD 2010-2015, maka telah ditetapkan langkah strategis yang dijabarkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel. 2.5. Perjanjian Kinerja tahun 2015

No	Sasaran	Indikator	Target 2015
1.	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur (jalan)	– Persentase jalan Provinsi Jambi dalam kondisi mantap (kondisi baik, sedang)	75
2.	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik	– Persentase Rasio elektrifikasi – Persentase pengembangan energi baru terbarukan (PLTMH/ PLTMS)	82 88
3.	Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	– Persentase fungsionalisasi daerah irigasi – Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan – Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	66,35 68,87 62,41

4.	Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas	– Angka partisipasi murni (APM) - SD (%) - SMP (% - SMA (%)	 100 90 78
5.	Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat	– Prevalensi kekurangan gizi pada balita (penanganan kasus balita gizi buruk) – Persentase puskesmas yang berkinerja baik	100 75
6.	Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial	– Persentase menurunnya rumah tangga sangat miskin – Indeks pembangunan manusia	5 70
7.	Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi	– Nilai investasi PMA – Nilai investasi PMDN – Nilai Ekspor – Persentase koperasi berkualitas – Peningkatan pelaku usaha mikro, kecil, menengah. – Laju inflasi provinsi Jambi	US$ 1.161 Jt Rp. 18,26 T US$ 2 Jt 98,91 65.500 unit 5,53%
8.	Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisataan daerah	– Pertumbuhan kunjungan wisata – Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1.554.319 wisatawan 19
9.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	– Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB – Persentase nilai tukar petani (NTP) – Ketersediaan energi/kap/perhari	29-29,5 104-106 2.200 gr/kap/hr
10.	Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan	– Penurunan titik api (hot spot tertangani)	300 titik
11.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup	– Persentase luasan lahan tertutup pohon – Penurunan emisi gas rumah kaca (kemampuan penurunan emisi GRK)	65,5 (1.120.855Ha) 17,25 Mt CO2
12.	Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik	– Opini BPK terhadap laporan keuangan & asset daerah – Skor Aksi daerah pencegahan & pemberatasan korupsi Provinsi Jambi, dan Skor ADPPK Kab/Kota – Skor indeks kepuasan masyarakat – Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD	WTP 100 8 Aksi (kategori hijau) >85 (A) B (nilai minimal 60)
13.	Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan	– Persentase kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (dilihat dari APM 15-24 T)	99,0

2.4. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jambi

Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Untuk itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jambi mendefenisikan fokus utama pembangunan dalam program prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2010 – 2015 dengan Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan untuk mengukur tercapainya tujuan pada akhir periode RPJMD adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum

Tujuan : Mewujudkan Jambi dengan ketersediaan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan lebih baik

Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan umum daerah, pembangunan infrastruktur energi dan listrik, serta terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih.

Tabel 2.6. IKU Misi I

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
1. Persentase jalan dalam kondisi mantap (baik)	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas PU, Dishub
2. Rasio elektrifikasi	$\frac{\text{Daya listrik terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan}} \times 100\%$	Dinas ESDM
3. Persentase pengembangan energi baru terbarukan	$\frac{\text{Jumlah RT menggunakan listrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	Dinas ESDM, Bappeda, PU
4. Persentase fungsionalisasi luas daerah irigasi	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$	Dinas PU
5. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Dinas PU, Bappeda
6. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Dinas PU, Bappeda

Misi 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya

Tujuan : Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya

Sasaran : Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial

Tabel 2.7. IKU Misi 2

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
1. Angka partisipasi murni (APM) : - SD (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Bappeda, BPMPP
- SMP (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$	
- SMA (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 Tahundijenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun}} \times 100\%$	
2. Prevalensi kekurangan gizi pada balita	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan, RSUD
3. Persentase puskesmas berkinerja baik	Kriteria berdasarkan indikator dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014	Dinas Kesehatan
4. Persentase menurunnya rumah tangga sangat miskin (RTSM)	Angka BPS	Sosnakertrans, Bappeda
5. Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \frac{1}{3}[X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ dimana : $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$(indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$(indeks rata-rata lama sekolah) $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak	Bappeda

Misi 3 : **Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri**

Tujuan : Mewujudkan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi

Sasaran : Terciptanya iklim investasi yang kondusif, peningkatan kepariwisataan daerah, serta terselenggaranya pembangunan pertanian dan ketahanan pangan

Tabel 2.8. IKU Misi 3

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
1. Persentase koperasi berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi berkualitas}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	Dinas Koperasi
2. Peningkatan pelaku usaha mikro kecil menengah	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Disperindag
3. Nilai investasi PMA	Nilai investasi berskala nasional (PMA)	Badan Penanaman Modal Daerah, Bappeda

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
4. Nilai investasi PMDN	Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Bappeda, Disperindag
5. Nilai Ekspor	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	Disperindag, Bappeda
6. Laju inflasi provinsi	$[\{(1+\Delta Inf_1)(1+\Delta Inf_2)(1+\Delta Inf_t)\}^{1/t}]-1$ Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.	Bappeda
7. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} x100\%$	Dinas Pariwisata, Bappeda, Disperindag
8. Pertumbuhan kunjungan wisata	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota}} x100\%$	Dinas Pariwisata
9. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} x100\%$	Dinas Pertanian, Bappeda
10. Nilai tukar petani	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan
11. Ketersediaan energi/kap/perhari dan Persentase pola pangan harapan (PPH)	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} x100\%$	Badan Ketahanan Pangan, Badan Koordinasi Penyuluhan

Misi 4 : **Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu Yang Optimal Dengan Mengedepankan Penataan Ruang dan Lingkungan**

Tujuan : Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan

Sasaran : Terwujudnya kualitas dan kelestarian sumber daya air, lahan, serta meningkatnya kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup

Tabel 2.9. IKU Misi 4

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
1. Penurunan titik api (hot spot)	Pencegahan dan penanggulangan titik api	Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan
2. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%luasan lahan tertutup pohon)	$\frac{\text{Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan dan lahan kritis}} x100\%$	Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan
3. Penurunan emisi gas rumah kaca	$\frac{\text{penurunan emisi tertangani}}{\text{target penurunan emisi gas rumah kaca}} x100\%$	Bappeda, BLHD, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan

Misi 5 : **Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Serta Kesetaraan Gender**

Tujuan : Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dalam memenuhi kepentingan umum

Sasaran : Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum, serta meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan

Tabel 2.10. IKU Misi 5

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
1. Opini BPK	Opini BPK terhadap laporan keuangan dan asset	Inspektorat, Bappeda, Lembaga pusat, Biro Organisasi, seluruh SKPD
2. Aksi daerah pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota	Kategori "baik" (hijau) dalam pelaksanaan ADPPK Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota	Bappeda, Biro Organisasi, Inspektorat
3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jambi	Skor rata-rata IKM	Biro Organisasi, seluruh SKPD
4. Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja daerah	Penilaian atas evaluasi kinerja oleh Kementerian PAN RB RI	Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi
5. Persentase kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	APM laki-laki (SD/SMP/MI/SMA) / APM perempuan (SD/SMP/MI/SMA) - kontribusi perempuan dalam pekerjaan non pertanian - rasio melek huruf perempuah terhadap laki-laki	Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosnakertrans

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III Berisi :

A. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi
3.1. Capaian IKU Pemerintah Provinsi Jambi s.d. tahun 2015
3.2. Evaluasi & Analisis Capaian Perjanjian Kinerja
3.3. Capaian Kinerja Lainnya
3.4. Capaian Tujuan Akhir RPJMD
B. Realisasi Anggaran

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Povinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam me-reviu kinerja organisasi pemerintah.

A. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan /program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran diukur berdasarkan pada data hasil pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran.

Jika dilihat bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LKj ini. Kriteria pengukuran kinerja yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala nilai capaian kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≥100	Sangat baik	
2.	76 s.d. 90	Tinggi	
3.	66 s.d. 75	Sedang	
4.	51 s.d. 65	Rendah	
5.	s.d. 50	Sangat rendah	

Sumber : Permendagri 54 tahun 2010, diolah.

Indikator dan target yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, antara lain :

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama s.d. 2015

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2015. Pencapaian IKU Gubernur Jambi s.d. tahun 2015 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Capaian IKU Gubernur Jambi s.d. Tahun 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	2011	2012	2013	2014	2015			Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi	% Capaian	
1. Persentase jalan dalam kondisi mantap (baik)	68,98 (1.037Km)	71,42	72,83	74,11	74,82	75	75,40	100,53	75
2. Rasio elektrifikasi	49,59	53,45	65,48	67,11	72,57	82	89,62	109,29	82
3. Persentase pengembangan energi baru terbarukan	48,90	55,13	61,26	72,50	87,93	88	92,47	105,07	88
4. Persentase fungsionalisasi luas daerah irigasi	60,62	60,62	52,50	60,62	77,39	66,35	78,03	117,60	66,35
5. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	44,32	44,32	44,62	42,72	42,72	68,87	62,75	91,11	68,87
6. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	40,93	50,65	52,79	53,70	53,70	62,41	58,21	93,27	62,41
7. Angka partisipasi murni (APM) SD : SMP : SMA :	 95,6 66,9 45,7	 92,36 67,43 48,55	 94,1 69,56 46,42	 96,43 72,73 51,77	 98,4 69,87 74,93	 100 90 78	 99,95 79,44 62,47	 99,95 87,77 80,08	 100 90 78

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	2011	2012	2013	2014	2015			Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi	% Capaian	
8. Prevalensi kekurangan gizi pada balita (kasus balita gizi buruk tertangani)	100%	100%	100% (63 kasus)	100% (6 kasus)	100% (79 kasus)	100%	100% (88 kasus)	100	100%
9. Persentase puskesmas berkinerja baik	50	50	60	36,4	50	75	36,3	48,4	75
10. Persentase menurunnya rumah tangga sangat miskin (RTSM)	8,34	7,9	8,28	8,42	8,39	5	9,12	54,82	5
11. Indeks Pembangunan Manusia	65,39	66,14	66,94	67,76	68,24	70	68,24	97,48	70
12. Nilai investasi PMA	USD Juta 448,4	USD Juta 621,37	USD Juta 827,85	USD Juta 984,45	USD Juta 1.015,5	USD Juta 1.161,35	USD Juta 1.169,67	100,71	USD Juta 1.161,35
13. Nilai investasi PMDN	Rp 11,2 T	Rp 15,23 T	Rp 19,93 T	Rp 25,17 T	Rp 26,62 T	Rp 18,26 T	Rp. 31,95 T	174,97	Rp 18,26 T
14. Nilai Ekspor	USD.000 1.209.672	USD.000 2.383.555	USD.000 1.659.055	USD.000 1.354.135	USD.000 1.282.430	USD.000 2.000.000	USD.000 2.463.660	123,18	USD.000 2.000.000
15. Persentase koperasi berkualitas (berprestasi)	89,21	97,23	104,11	113,35	92,28	98,91	66,67	67,40	98,91
16. Peningkatan pelaku usaha mikro kecil menengah	65.240	67.825	79.119	81.552	81.595	65.500	81.979	125,15	65.500
17. Laju inflasi provinsi	10,42	2,76	4,22	8,74	8,72	5,53	1,37	403,64	5,53
18. Pertumbuhan kunjungan wisata	1.110.000	1.122.350 ± (12.350)	1.278.240 (155.890)	1.434.130 (155.890)	1.520.000 (85.870)	1.554.319	2.447.660 (927.660)	157,47	1.554.319
19. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	14,53	14,94	15,78	16,98	18,7	19	18,85	99,21	19
20. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	29,6	29,4	29,6	29,83	27,8	29-29,5	27,70	95,51	29-29,5
21. Nilai tukar petani	96	96,01	89,45	96,2	94,71	104 – 106	95,72	92,03	104 – 106
22. Ketersediaan energi/kap/perhari dan Persentase pola pangan harapan (PPH)	3.527 gr/kap/hr	3.409 gr/kap/hr	3.113 gr/kap/hr	3.186 gr/kap/hr	3.217 gr/kap/hr	3.220 gr/kap/hr	3.146 gr/kap/hr	97,70	2.200 gr/kap/hr
23. Penurunan titik api (penanganan hot spot)	623	1.784	1.414	1.551	1.152	300	1.654	18,13	300
24. Persentase luasan lahan tertutup pohon (rehabilitasi lahan kritis)	64,80 (1.120.355 Ha)	64,80 (1.120.510 Ha)	64,80 (1.120.555 Ha)	64,81 (1.120.655 Ha)	64,812 (1.120.655 Ha)	65,5 (1.120.855 Ha)	64,81 (1.120.755 Ha)	98,94	65,5 (1.120.855 Ha)
25. Penurunan emisi gas rumah kaca	2,5 MtCO2	3,45 MtCO2	6,90 MtCO2	10,25 MtCO2	12,70 MtCO2	17,25 MtCO2	12,95 MtCO2	75,07	17,25 MtCO2
26. Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP
27. Aksi daerah pemberantasan korupsi Provinsi Jambi dan Kab/Kota	Prov. - Kab/Kota -	Prov. - Kab/Kota -	Prov. - Kab/Kota -	Prov. - Kab/Kota -	Prov : 100 (8 aksi hijau) Kab/Kota : 70	100 100	100 45	100 45,45	100 100
28. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jambi	-	-	-	76,89 (B)	77,61 (B)	> 85 (A)	76,01	89,42	> 85 (A)
29. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemprov Jambi	C (44,32)	C (44,71)	CC (50,95)	CC 56,71	CC (59,36)	B (60)	CC (52,87)	88,10	B (60)
30. Persentase kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	96	96,06	96,33	97,4	97,43	99	99,61	100,61	99

Dari capaian 30 Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jambi pada tahun 2015, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa hampir keseluruhan capaian IKU mendapatkan kriteria sangat baik. IKU yang masuk dalam kriteria sangat baik yakni sebanyak 23 IKU dengan presentase rata-rata di atas 91% dengan capaian rata-rata keseluruhan indikator sebesar 76,66%.

Diagram 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

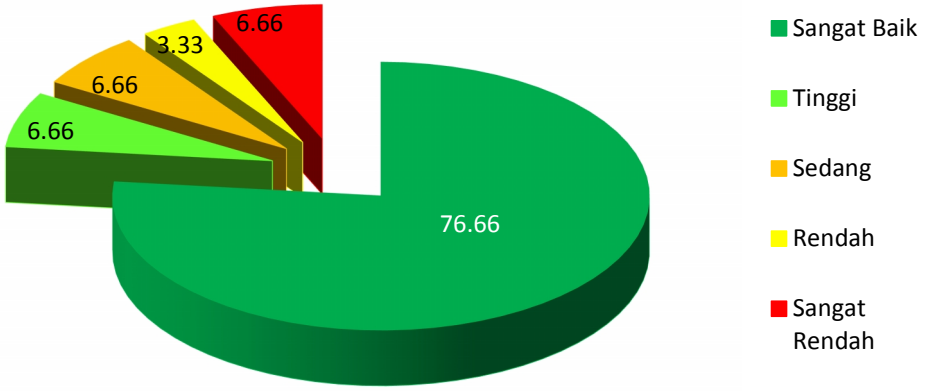

IKU yang mendapatkan persentase yang sangat baik yakni indikator penurunan laju inflasi Provinsi Jambi pada tahun 2015 dengan capaian inflasi sebesar 1,37% dan tingkat realisasi berbanding target sebesar 5,53% dengan persentase capaian sebesar 403,64%. Disusul IKU Peningkatan Nilai Investasi PMDN yang terealisasi sebesar Rp. 31,95 Triliun lebih besar dari target yang ingin dicapai pada tahun 2015 yakni sebesar Rp. 18,26 Triliun, sehingga persentase capaian berbanding target adalah sebesar 174,97%.

Selanjutnya, IKU yang masuk dalam kriteria penilaian sedang yakni IKU Penurunan emisi gas rumah kaca (upaya penurunan emisi karbon) tercapai dengan kemampuan sebesar 12,95MtCO_2. Upaya pengurangan emisi karbon pada tahun 2015 memang belum mencapai target penanganan sebesar 17,25MtCO_2, realisasi ini hanya mampu menyumbang sebesar 75,07% terhadap upaya pengurangan emisi karbon pada akhir periode RPJMD. Selain itu, indikator yang juga masuk dalam capaian sedang ini adalah indikator peningkatan persentase koperasi berkualitas (berprestasi) dengan realisasi capaian sampai dengan akhir periode RPJMD menurun menjadi 66,67% masih cukup jauh dari target yang direncanakan yakni sebesar 98,91 sehingga hanya mampu memberikan realisasi capaian RPJMD sebesar 67,40%.

Selain capain IKU dengan indikator berkategori tinggi/baik, terdapat pula IKU dengan capaian paling rendah yakni IKU penurunan titik api/panas (hot spot) selama tahun 2015. Pada tahun 2015 jumlah titik api yang terdeteksi sateri NOAA meningkat pesat menjadi 1.654 titik sangat jauh meningkat jika dibandingkan dengan jumlah titik api pada tahun 2014 yakni sebesar 1.152 titik. Peningkatan titik api ini terjadi karena bertepatan dengan datangnya musim kemarau yang cukup panjang serta bencana elnino membuat jumlah titik api semakin bertambah. Hal ini juga diperparah oleh ulah para oknum perusahaan serta oknum petani yang ingin membuka lahan dengan cara membakar lahan dengan alasan efisiensi.

Penetapan target dan pengukuran realisasi dilakukan dengan menggunakan proxy indicator karena karakter indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator. Indikator yang dimaksud dan penjelasan mengapa dipergunakan proxy indicator adalah sebagai berikut :

1. Sebagian indikator merupakan indikator pada *level outcome*, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja IKU secara langsung, seperti IKU yang ketiga serta beberapa IKU lainnya.
2. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah Laju Inflasi, Kontribusi sektor pariwisata, dan sektor pertanian terhadap PDRB, Angka Partisipsi Murni,

Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Opini Pemeriksaan BPK, dan AD-PPK, serta beberapa indikator lainnya.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

1. Sasaran Terselenggaranya Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Indikator Kinerja Persentase Jalan Provinsi Jambi Dalam Kondisi Mantap (Baik)

Dalam rangka mendukung aktivitas sosial ekonomi daerah, kesiapan infrastruktur merupakan salah satu aspek penentu arah dan perkembangan dinamika sosial, aktivitas ekonomi serta fungsi-fungsi distribusi. Arahan pembangunan infrastruktur ditujukan pada upaya mengakselerasi perkembangan daerah secara menyeluruh dengan memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana yang belum sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Secara finansial pemenuhan infrastruktur memang belum mampu menjangkau pendekatan suplai yang bertujuan merangsang investasi. Namun dengan kemampuan terbatas, upaya berkelanjutan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat terus dilakukan melalui langkah-langkah peningkatan, pemeliharaan serta perbaikan tata kelola yang diharapkan mampu memacu terciptanya efisiensi dan efektivitas pembangunan secara luas dan merangsang tumbuh kembangnya perekonomian di Provinsi Jambi.

Infrastruktur pekerjaan umum merupakan salah satu urusan wajib prioritas dalam kebijakan pembangunan Provinsi Jambi yang menjadi bagian penopang utama peningkatan perekonomian dan kemandirian daerah. Perhatian ini telah dinyatakan sebagai salah satu prioritas utama dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015, serta terlihat jelas dalam pengalokasian anggaran daerah, dimana porsi terbesar memang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pekerjaan Umum.

Penanganan infrastruktur di Provinsi Jambi pada Tahun 2015 difokuskan pada program pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang bertujuan untuk meningkatkan arus barang dan jasa serta mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah. Total implementasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dimana jalan yang harus ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jambi adalah sepanjang 1.504,929 (seribu lima ratus empat koma sembilan ratus dua puluh sembilan) kilometer.

Dalam rangka mewujudkan jalan Provinsi Jambi dalam kondisi "mantap" (kondisi jalan dengan kualitas baik dan sedang), maka telah dilaksanakan Program pembangunan jalan dan jembatan periode RPJMD 2010-2015 dengan anggaran yang didistribusikan menggunakan pendekatan kewilayahan dimana Provinsi Jambi dibagi menjadi 7 wilayah yang terdiri dari:

1. Wilayah I (Kabupaten Tanjab Barat),
2. Wilayah II (Kab. Tanjab Timur dan Ma. Jambi),
3. Wilayah III (Kab. Bungo),
4. Wilayah IV (Kab. Batanghari dan Ma. Jambi),
5. Wilayah V (kab. Merangin),
6. Wilayah VI (Kab. Kerinci) dan
7. Wilayah VII (Kab. Sarolangun).

Gambar 3.1. Ruas Jalan Provinsi Jambi

Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan infrastruktur. Peningkatan Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap sama artinya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bila dibandingkan dengan target Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 telah memenuhi realisasi Persentase jalan Provinsi Jambi kondisi mantap pada tahun 2015 sebesar 75.40% jalan mengalami peningkatan sebanyak 0.58 persen dari tahun sebelumnya.

Peningkatan Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 untuk kondisi jalan baik dan kondisi jalan sedang menunjukan perkembangan yang sangat signifikan. Adapun capaian Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap tahun 2015 jika dibandingan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 3.1. Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015

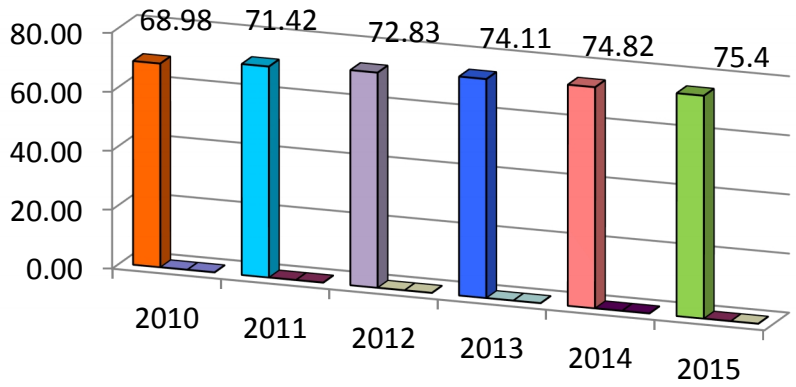

Dari grafik di atas, terlihat perkembangan peningkatan jalan wilayah provinsi Jambi dalam kondisi mantap dari tahun ke tahun. Dengan kondisi jalan wilayah provinsi Jambi pada awal RPJMD sebesar 68,98%, terjadi peningkatan sebesar 2,44% pada tahun 2011, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2012 sebesar 1,41% serta peningkatan cukup berarti dicapai pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing 0,82 dan 1,32%. Terakhir pada tahun 2015, peningkatan capaian target kinerja jalan Provinsi Jambi dalam kondisi mantap meningkat sebesar 0,58% yang berarti telah melampaui target RPJMD.

Sampai dengan tahun 2015, capaian persentase jalan provinsi Jambi dalam kondisi mantap sudah mencapai sekitar 75.40% dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 sebesar 75%. Ini dibuktikan Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap sampai dengan tahun 2015 telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut.

Gambar 3.2. Aktivitas Perbaikan Jalan di Provinsi Jambi

Bila dilihat realisasi capaian kinerja tersebut diatas, terlihat bahwa terjadi peningkatan jalan dalam kondisi mantap mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015, hal ini disebabkan karena ditunjang oleh pemeliharaan jalan. Peningkatan jalan dalam kondisi mantap ditandai dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan jalan dalam kondisi mantap yaitu terdiri atas 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu : (1) Kemampuan teknis, (2) Pengawasan yang baik, (3) Matangnya perencanaan.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi Peningkatan jalan dalam kondisi mantap yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah pusat/swasta. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan jalan dalam kondisi mantap yaitu aksesibilitas, kondisi jalan, keselamatan, kecepatan, dan mobilitas.

Selain faktor tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada peningkatan jalan dalam kondisi mantap. Sepanjang tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan :

a. Pembangunan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat) dengan realisasi jalan efektif 11 km dan fungsional 20km.
b. Pembangunan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur) dengan realisasi jalan efektif 15 km dan fungsional 20Km.
c. Pembangunan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo dan Tebo) dengan realisasi jalan efektif 7.5 km.
d. Pembangunan Jembatan di Wilayah VII dan VIII (Kab. Batanghari dan Kota Jambi) dengan realisasi panjang jembatan yang di bangun 1004 m1.
e. Pembangunan Jembatan di Wilayah VI dan VII (Kab. Merangin, Kerinci, dan Tanjab Timur) dengan realisasi panjang jembatan yang di bangun 160 m1.
f. Pembangunan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi) dengan realisasi jalan efektif 10 km dan fungsional 34 Km.
g. Pembangunan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin) dengan realisasi jalan efektif 130 Km.
h. Pembangunan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) dengan realisasi jalan efektif 36.8 km dan fungsional 37.15 km.
i. Pembangunan Jalan di Wilayah VIII (Kab. Sarolangun) dengan realisasi jalan efektif 10.7 Km.

Selain itu, dengan diterbitkannya kebijakan pengaturan pengangkutan batubara, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi, telah menurunkan laju kerusakan jalan publik, yang selanjutnya meringankan biaya pemeliharaan jalan yang sangat besar dan mengurangi beban APBD. Oleh karena itu, perlunya dukungan dan komitmen bersama semua pihak agar dapat mengawasi jalannya Peraturan Daerah ini secara efektif.

Perbandingan capaian kinerja jalan Provinsi Jambi dalam kondisi mantap dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.3. Perbandingan dan Capaian Kinerja Indikator Peningkatan Jalan Provinsi Jambi Dalam Kondisi Mantap Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase Jalan Provinsi Jambi Dalam Kondisi Mantap	68,98	71,42	72,83	73,50	74,82	75	75,40	100,53	75,40	75
(Panjang Jalan 1.504,929 Km)	971,24 Km	1.005,59 Km	1.093,78 Km	1.106,2 Km	1.125,99 Km	1.135,77 Km	1.139,77 Km		1.139,77 Km	1.135,77 Km

Sumber : Dinas PU Provinsi Jambi & Hasil pengolahan data tahun 2016

Dampak positif dari meningkatnya infrastruktur jalan Provinsi Jambi, yakni telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata Provinsi Jambi. Peningkatan pertumbuhan industri dan perdagangan berdampak pada terkendalinya kondisi ketersediaan stock dan harga kebutuhan pangan. Kondisi jalan baik ini,memberikan dampak terhadap peningkatan mobilitas hasil-hasil pertanian dan hasil-hasil bumi lainnya dari sentra produksi ke sentra-sentra pemasaran. Misalnya, sebelum dilakukan pembangunan ruas jalan Simpang Pulau Rengas-Jangkat waktu tempuh biasa sampai 10 jam bahkan lebih. Saat ini,dapat ditempuh hanya dalam waktu 3 jam.

Disamping itu, biaya angkut produksi lebih murah, yaitu sebesar 300-400 rupiah per kilogram sedangkan biaya angkut sewaktu kondisi jalan masih buruk sebesar 2000 rupiah per kilogram. Dampak lainnya juga dapat terlihat dalam ruang lingkup pariwisata, salah satu indikator pendukung keberhasilan yang tergambar adalah adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan perkembangan usaha pariwisata di Provinsi Jambi. Kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah Jambi mengalami peningkatan sebesar 1,38%, dimana pada tahun 2014 tercatat sebanyak 9.919 wisatawan dan meningkat sebanyak 10.056 wisatawan pada tahun 2015. Sedangkan kunjungan wisatawan nusantara mengalami peningkatan sebesar 5,99%, dimana pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1.434.130 wisatawan, dan pada tahun 2015 bergerak naik menjadi 1.520.000 wisatawan. Kondisi ini membuktikan bahwa semakin membaiknya akses infrastruktur jalan menuju tempat-tempat wisata sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara, dan secara tidak langsung pula berdampak pada tumbuhnya industri pariwisata serta mendongkrak perekonomian industri kecil di Provinsi Jambi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan infrastruktur daerah. Dalam tahun 2015, program yang dilakukan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 7 program, yakni :

1. Program pembangunan jalan dan jembatan
2. Program inspeksi jalan dan jembatan
3. Program tanggap darurat jalan dan jembatan
4. Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
5. Program pembebasan lahan untuk jalan dan jembatan
6. Program pengembangan lalu lintas angkutan umum
7. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Hambatan/kendala :

1. Pelaksanaan program peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang dijabarkan dalam implementasi kegiatan, merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2015 ini, permasalahan yang umumnya terjadi adalah terjadinya kerusakan jalan yang diakibatkan oleh faktor alam berupa tanah longsor, selain itu juga relatif terbatasnya anggaran untuk meningkatkan kualitas jalan di Provinsi Jambi.
2. Pelaksanaan pelelangan paket kegiatan peningkatan infrastruktur jalan masih terkendala pada teknis administratif yang pada umumnya terkadang tidak tepat waktu mulai dari penetapan DPA SKPD hingga proses pelaksanaan kegiatan, sehingga berimbas pada terhambatnya pelaksanaan pekerjaan pembenahan infrastruktur jalan.

Langkah antisipatif :

1. Mengatasi terjadinya longsor dan faktor alam lainnya, Pemerintah Provinsi telah menyiapkan alat berat sebagai upaya untuk membersihkan daerah yang terkena longsor agar jalur transportasi tetap berjalan lancar. Terbatasnya anggaran dalam pembangunan infrastruktur terutama jalan merupakan masalah yang dialami oleh sebagian daerah berkembang di Indonesia, untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan dapat mengukur kemampuan keuangan daerah dalam hal proporsi peningkatan infrastruktur jalan. Setelah didapat analisis kemampuan anggaran tersebut, maka ditentukan skala prioritas pembangunan jalan terutama bagi daerah-daerah yang menjadi jalur-jalur sentra produksi pertanian, perkebunan, tanaman pangan serta sektor-sektor lain yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.
2. Untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan pada tahun-tahun yang akan datang, maka perlu upaya pelelangan paket-paket pekerjaan yang lebih dipercepat untuk memberikan ruang dan waktu perencanaan terhadap implementasi pekerjaan yang lebih baik tentunya tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat sesuai aturan yang berlaku pada proses lelang sehingga pelaksanaan peningkatan infrastruktur jalan dapat dilaksanakan tepat waktu.

2. Sasaran Terpenuhinya Pembangunan Infrastruktur Energi Dan Listrik

Menyadari bahwa pembangunan infrastruktur energi dan listrik mempunyai akses yang luas terhadap publik, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah membuat rencana dan menetapkan target kinerja energi dan listrik. Mengingat sampai 2015 masih terdapat beberapa desa di Provinsi Jambi yang belum ter-aliri listrik, sementara fasilitas listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi Jambi memperioritaskan desa-desa yang teraliri listrik dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Untuk itu, dalam mewujudkan capaian kinerja menyangkut infrastruktur listrik ditetapkan indikator sebagai variabel ukuran capaian kinerja, yakni Rasio Elektrifikasi.

a. Rasio Elektrifikasi

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja peningkatan rasio elektrifikasi, maka dalam Program Pengembangan energi dilakukan dengan melaksanakan berbagai upaya, antara lain :

1. Menginventarisasi dan melakukan pembinaan Desa Mandiri Energi, yang bertujuan untuk penyediaan data potensi Energi Baru Terbarukan dan terbinanya desa mandiri Energi sehingga tersedia energy alternatif guna mengurangi penggunaan BBM.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan biogas.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan PLTMH di Kabupaten Sarolangun.
4. Menginventarisir desa belum berlistrik di provinsi Jambi.
5. Melaksanakan study kelayakan potensi mikrohidro (PLTMH).
6. Melakukan perbaikan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dan pembangkit tenaga kincir air di Kabupaten Bungo.

Provinsi Jambi dengan jumlah penduduk lebih kurang 3.344.421 jiwa dan yang memperoleh aliran listrik dari PT. PLN (Persero) mencapai 89,62% dengan total pelanggan 854ribu pelanggan. Sistem kelistrikan di Propinsi Jambi sudah terintegrasi dengan Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu. Disamping itu masih terdapat kebutuhan tenaga listrik di Propinsi Jambi yang disuplai dengan sistem yang terisolasi. Beban puncak untuk sistem integrasi di Jambi mencapai 61 MW dan sistem yang terisolasi dengan perkiraan beban puncak 29 MW dengan total konsumsi listrik mencapai 498 GWH. Kapasitas terpasang sistem terisolasi mencapai 154 MW yang disuplai dengan PLTD. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Propinsi Jambi, juga disuplai dengan captive power yang diperkirakan mencapai 290 MVA, yang terdiri dari pembangkit utama sebesar 265 MVA dan 55 MVA sebagai cadangan. Sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan rencana tata ruang daerah telah diperuntukan beberapa daerah sesuai keperluannya seperti daerah pariwisata terdapat di Jambi Bagian Barat, lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan diperuntukan di Propinsi Jambi Bagian Tengah, Jambi Bagian Timur telah dikembangkan menjadi daerah kawasan industri.

Sektor energi merupakan sektor vital pendukung pembangunan daerah, dengan semua keterbatasan yang ada, maka tidak semua desa di Provinsi Jambi dapat dialiri listrik PLN. Oleh karena itu, dalam rangka penyediaan energi khususnya pada desa-desa yang tidak terjangkau oleh aliran PT. PLN, hingga saat ini telah terbangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro beserta jaringannya dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Dari 1.484 desa yang ada di Provinsi Jambi, masih ada 154 desa yang belum dialiri listrik PLN. Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 22 desa yang belum teraliri listrik. Kemudian Kabupaten Tanjab Barat 59 desa, Kabupaten Tanjab Timur ada 1 desa,

Kabupaten Batanghari 6 desa, Kabupaten Sarolangun ada 35 desa. Selanjutnya, di Kabupaten Tebo ada 13 desa, Kabupaten Bungo ada 3 desa, Kabupaten Kerinci ada 4 desa, dan Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi sudah teraliri oleh aliran listrik.

Dengan terjangkaunya jaringan aliran listrik di desa-desa tersebut berdampak pada meningkatnya Rasio Elektrifikasi Desa di Provinsi Jambi yang mencapai 89,62 persen, meningkat sebesar 17,65 persen dari tahun 2014.

Berbagai upaya dalam pengembangan energi yang telah dilakukan tersebut, saat ini telah terinventarisir dan tersedia data potensi desa yang mempunyai bahan nabati serta terbinannya masyarakat desa mandiri energi, serta terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana energi sambungan listrik. Lebih lanjut mengenai rasio elektrifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4. Perbandingan dan Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase rasio elektrifikasi	49,59	53,45	65,48	67,11	72,57	82	89,62	109,29	89,62	82

Sumber : Dinas ESDM & Hasil pengolahan data tahun 2016

Dari tabel tersebut dapat dilihat capain target rasio elektrifikasi pada tahun 2015 telah melebihi target sebesar 89,62% dengan tingkat capaian sebesar 109,29%, hal ini berarti pencapaian target RPJMD telah tercapai bahkan melebihi target 82%. Dampak positif dari peningkatan rasio elektrifikasi tersebut adalah semakin maju dan berkembangnya masyarakat yang mendapatkan informasi serta menjadikan masyarakat yang tersambung jaringan elektrifikasi menjadi lebih produktif dengan menumbuhkan industri-industri rumah tangga yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi industri kecil.

b. Peningkatan Energi Baru Terbarukan

Upaya peningkatan rasio elektrifikasi tentunya tidak terlepas dari peningkatan energi baru terbarukan. Dalam rangka memenuhi kecukupan energi di Provinsi Jambi, sejak tahun 2012 PLTMH Kerinci Hydro Power telah menghasilkan 350 MW yang berada di Batang Merangin Kabupaten Kerinci. Sampai dengan bulan Desember 2015, pemanfaatan 13 unit PLTMH di Provinsi Jambi berjalan dengan baik, sumber elektrifikasi lainnya juga berasal dari pemanfaatan tenaga surya dengan jumlah pemanfaatan peralatan tenaga surya sebanyak 6.120 unit. Selain itu, pada tahun 2015 ini masih berlanjut pengembangan eksploitasi dan uji sumur produksi oleh berbagai perusahaan baik BUMN maupun swasta, disamping itu masih terus dilakukan eksplorasi terhadap potensi geothermal di lokasi sekitarnya.

Gambar. 3.3. Sumber Energi Panas Bumi Kab. Kerinci

Untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga, juga dilakukan upaya pembangunan Digester Biogas yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2010. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan pembangunan Biogas dalam rangka memanfaatkan kotoran sapi sebagai sumber energi alternatif. Adapun perkembangan pembangunan PLTMH, PLTS, dan Digester Biogas di Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 3.5. Peningkatan Jumlah Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase pengembangan energi baru terbarukan	48,90	55,13	61,26	72,50	87,93	88	92,47	105,07	92,47	88
Jumlah PLTMH	9 unit 60%	10 unit 66,67%	11 unit 74%	13 unit 86,67%	13 unit 86,67%	15 unit 100%	15 unit 100%	100	15	15
Jumlah PLTS (unit)	5.649 80,70%	6.069 86,70%	6.073 86,76%	6.077 86,82%	6.098 87,12%	7.000 unit 100%	6.120 unit 87,42%	87,42	7.000 unit	7.000 unit
Jumlah Digester Biogas (unit)	6 6%	12 12%	23 23%	44 44%	90 90%	100 100%	90 90%	90 90%	90%	100

Sumber : Hasil pengolahan data 2016

Jika dibandingkan dengan target sasaran dalam RPJMD Provinsi Jambi, di tahun 2015 total jumlah PLTMH yang ada berjumlah 15 unit, ini berarti target pembangunan PLTMH telah diwujudkan dari target yang akan dicapai secara keseluruhan di tahun 2015 yakni sebanyak 15 PLTMH yang berada di Kabupaten Sarolangun. Ini berarti pencapaian sasaran RPJMD telah menyentuh angka 100%, begitu pula dengan peningkatan PLTS dan Digester. Berbagai survei, pembangunan/pengembangan, serta pembinaan telah dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber pembangkit listrik dari energi baru terbarukan di wilayah Provinsi Jambi.

Dalam rangka peningkatan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, pemanfaatan Biogas juga semakin digalakkan di wilayah kota maupun pedesaan. Teknologi biogas merupakan teknologi tepat guna untuk mengolah limbah padat (tinja dan isi rumen) dan limbah cair (urine dan air pencucian kandang/ternak) yang dihasilkan dari usaha peternakan. Pengolahan yang dilakukan dapat mengurangi pencemaran lingkungan serta memanfaatkan limbah sebagai produk berdaya guna penghasil sumber energi berupa bahan bakar gas (gasbio) dan dapat pula menghasilkan pupuk organik padat dan cair yang bermutu bagi usaha pertanian. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pembinaan dan pembangunan unit biogas yang berlokasi di Biogas di Kab. Kerinci, Merangin, Sarolangun, dan Tebo.

Tahun 2015 Pembangunan Digester Biogas dilaksanakan di 6 (enam) Kabupaten dengan jumlah total sebanyak 46 unit, antara lain : Kab. Muaro Jambi (8 unit), Kab. Bungo (8 unit), Kab. Tanjab Barat (7 unit), Kab. Tanjab Timur (8 unit), Kab. Batanghari (8 unit) dan Kabupaten Kerinci (7 unit).

Dimanfaatkannya energi terbarukan ini telah membawa Provinsi Jambi menjadi provinsi yang memiliki energi cadangan selain dari elektrifikasi yang dilakukan oleh PLN. Dampak yang bisa dirasakan adalah pemerintah dapat mengurangi subsidi bahan bakar minyak, banyak energi jadi lebih murah sehingga menghemat anggaran Pemerintah Daerah. Selain itu, penggunaan gas sebagai pembangkit listrik sangat responsif terhadap beban dan fleksibel dalam pegoperasiannya sehingga dapat mendukung stabilitas jaringan.

Dengan demikian, selama periode 2010-2015 target kinerja peningkatan kualitas infrastruktur energi dan listrik mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat terwujud tentunya tidak terlepas dari program dan kegiatan yang terencana dengan baik dan sejalan dengan program ”satu milyar satu kecamatan”.

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan infrastruktur energi dan listrik. Dalam tahun 2015, program yang dilakukan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 5 program, yakni :

1. Program pengembangan potensi dan kecukupan energi listrik dan bahan bakar
2. Program pengembangan jaringan listrik perdesaan

3. Program pengembangan energi
4. Program pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan
5. Program pengembangan potensi energi lokal/desa

Hambatan/kendala :

1. Rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi relatif rendah dikarenakan sulitnya akses ke daerah terisolir.
2. Rendahnya pemanfaatan sumber energi alternatif juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi di Provinsi Jambi. Seperti belum termanfaatkannya potensi energi alternatif seperti kotoran sapi dan bijih jarak, dan belum dimanfaatkannya potensi panas bumi (geothermal) dan potensi air terjun sebagai sumber energi.

Langkah antisipatif :

1. Meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi dengan memanfaatkan potensi-potensi energi yang ada untuk dikembangkan menjadi energi listrik terutama di daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik negara.
2. Memanfaatkan potensi energi alternatif di Provinsi Jambi dengan cara menggali potensi serta menciptakan energi baru terbarukan. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diharapkan lebih giat dalam memberikan pembinaan serta melaksanakan pembangunan Biogas dalam rangka memanfaatkan kotoran hewani sebagai sumber energi alternatif. Pembangunan Digester Biogas telah dilaksanakan sejak Tahun 2010, dan pada masa yang akan datang akan terus dikembangkan agar menjadi sumber energi pendamping selain jalur elektrifikasi dari PLN.

3. Sasaran Terciptanya Kualitas Dan Kesediaan Jaringan Irigasi Dan Air Bersih

a. Persentase Fungsionalisasi Luas Daerah Irigasi

Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan target terpeliharanya bendung, saluran pembawa dan pembuang serta bangunan pelengkap lainnya sebagai upaya untuk memberikan jaminan pelayanan terhadap lahan irigasi seluas 6.029 ha (kewenangan Provinsi) pada wilayah-wilayah produksi utama di Provinsi Jambi. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak peningkatan produktivitas sektor pertanian dan kepada masyarakat luas secara umum.

Gambar 3.4. Daerah irigasi di Kab. Kerinci

Fungsionalisasi daerah irigasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Persentase fungsionalisasi daerah irigasi sama artinya dengan meningkatkan lahan pertanian. Bila dibandingkan dengan target Persentase fungsionalisasi daerah irigasi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 realisasi Persentase fungsionalisasi daerah irigasi pada tahun 2015 mencapai angka 78,03% fungsionalisasi irigasi. Hal ini berarti jaringan fungsional mengalami peningkatan sebanyak 0.64% dari tahun sebelumnya.

Persentase fungsionalisasi daerah irigasi dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 untuk kondisi irigasi yang fungsional menunjukan perkembangan yang sangat signifikan. Adapun capaian Persentase fungsionalisasi daerah irigasi tahun 2015 jika dibandingan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 3.2. Persentase Capaian Fungsionalisasi Luas Daerah Irigasi

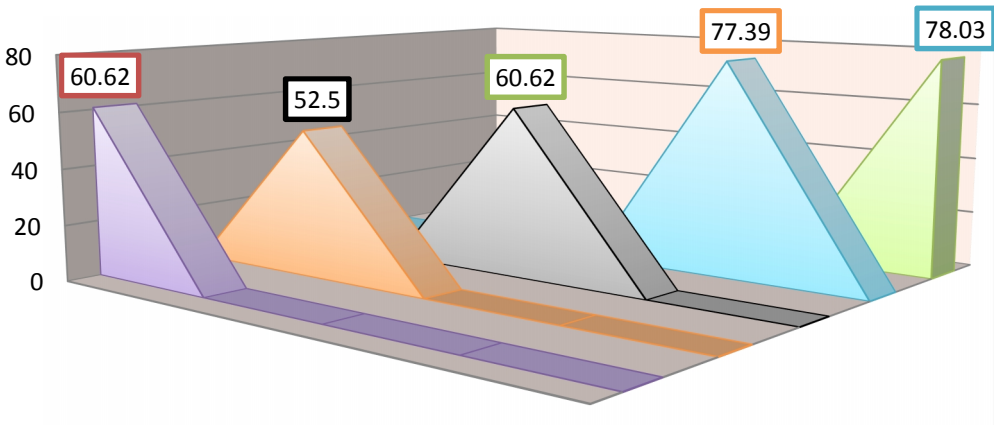

Persentase luas daerah irigasi yang fungsional dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 untuk kondisi irigasi yang fungsional menunjukan perkembangan yang sangat signifikan. Adapun capaian Persentase luas daerah irigasi yang fungsional tahun 2015 jika dibandingan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 3.2. Persentase Fungsionalisasi Daerah Irigasi Tahun 2011-2015

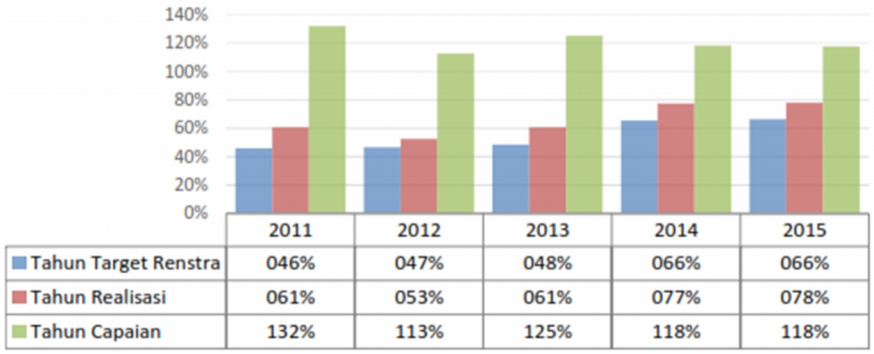

Sampai dengan tahun 2015, Persentase luas daerah irigasi yang fungsional sudah mencapai sekitar 78.03 persen dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 yakni sebesar sebesar 66,35 persen.

Tabel 3.6. Perbandingan dan Capaian Kinerja fungsionalisasi daerah irigasi tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase fungsionalisasi luas daerah irigasi	60,62	60,62	52,50	60,62	77,39	66,35	78,03	117,60	78,01	66,35

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2016

Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional ditandai dengan Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatnya lahan pertanian. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu terdiri atas 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu :

1. Kemampuan teknis
2. Pengawasan yang baik
3. Matangnya perencanaan

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu

1. Dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah
2. Kerjasama dengan Dinas Pertanian

Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu :

1. Aksesibilitas
2. Kondisi lahan pertanian

Dengan peningkatan panjang dan rehabilitasi jaringan irigasi telah berdampak positif pada peningkatan produksi pertanian Provinsi Jambi tentunya disandingkan dengan program-program prioritas di bidang pertanian dan ketahanan pangan, pada tahun 2014 Provinsi Jambi berdasarkan angka tetap produksi padi Jambi mencapai 664.721 ton GKG, terjadi kenaikkan 187 ton atau 0,003 persen dibandingkan 2013, sebesar 664.533 ton GKG.

Gambar 3.5. Aktivitas Panen Padi Petani

Pada tahun 2015, berdasarkan ARAM BPS 2015, produksi padi meningkat menjadi 786.948 ton GKG, atau mengalami peningkatan sebesar 122.228, ton atau sebesar 18,39 persen dibandingkan tahun 2014. Perkiraan peningkatan produksi padi pada 2015 menyumbang produksi padi nasional sebesar 1,04 persen.

Kenaikkan produksi padi terjadi karena adanya peningkatan produktivitas sebesar 2,17 kuintal atau lima persen, sedangkan luas panen mengalami *penurunan seluas 7.253 hektare (ha)* atau sebesar 4,73 persen. Sementara itu, produksi padi nasional pada 2014 sebesar 70.846.465 ton atau menurun sebesar 0,61 persen, di mana produksi padi Jambi 2014 hanya memberikan sumbangan terhadap produksi padi nasional sebesar 0,94 persen.

Kontribusi untuk pulau Sumatera, yang terdiri dari 10 provinsi terhadap produksi padi nasional sebesar 23,47 persen dan kontribusi terbesarnya masih disumbangkan oleh pulau Jawa, yang hampir 50 persen.

Secara umum, pada kondisi normal, pola panen padi antar subround cenderung sama, yaitu panen terbesar terjadi pada subround I, yakni Januari hingga April, disusul subround II (Mei hingga Agustus) dan subround III (September - Desember). Untuk peningkatan produktivitas terjadi karena petani telah banyak yang mengerti dengan sistem pertanian yang terpadu dan adanya perbaikan teknologi berupa peningkatan penggunaan benih unggul bermutu, penggunaan pupuk organik, pemanfaatan agen hayati sebagai alternatif adanya kekurangan pupuk pada saat musim tanam tiba serta perbaikan sarana prasarana pertanian seperti perbaikan sistem pengelolaan Tata Air Mikro (TAM) dan perbaikan saluran irigasi lahan sawah.

b. Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak

Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat dan taraf kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Penyediaan air minum atau air bersih yang layak bagi masyarakat sampai saat ini masih menjadi salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini didasarkan pada kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa aksesibilitas masyarakat (baik di perkotaan maupun perdesaan) terhadap air bersih dan air minum masih relatif rendah. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jambi secara konsisten dan berkesinambungan terus mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program penyediaan air bersih dan air minum ini.

Sebagaimana diketahui bahwa capaian target kinerja atas rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan, perdesaan, serta perkotaan dan perdesaan Provinsi Jambi juga merupakan target nasional yang bertujuan untuk pencapaian target *Millenium Development Goals (MDG's)*. Artinya, target kinerja yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi merupakan target kinerja yang sama dengan target MDG's.

Gambar 3.6. Ilustrasi Ketersediaan Air Siap Minum

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan merupakan target MDG'S Provinsi Jambi. Bila dibandingkan dengan target Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan yang tercantum dalam target MDGs Provinsi Jambi s.d. 2015, realisasi Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan mencapai angka 62,75 persen.

Grafik 3.3. Capaian Proporsi Akses Air Minum Layak

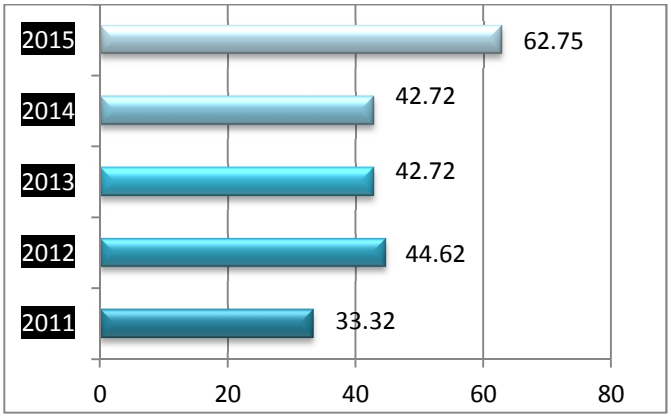

Menurut data BPS Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 untuk kondisi baik menunjukan perkembangan yang sangat signifikan. Adapun capaian Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan tahun 2015 dibandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana grafik disamping.

Jika dibandingkan dengan capaian Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum yang layak antar provinsi pada tahun 2014 (lap. MDGs 2015) memiliki disparitas dari 22,66 persen sampai 24,50 persen. Sebanyak 14 dari 34 provinsi memiliki proporsi di atas rata-rata nasional dan provinsi dengan proporsi tertinggi adalah DKI Jakarta, disusul DI Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Timu, sedangkan provinsi dengan proporsi terendah adalah Kalimantan Tengah, Bengkulu, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik. 3.4. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan

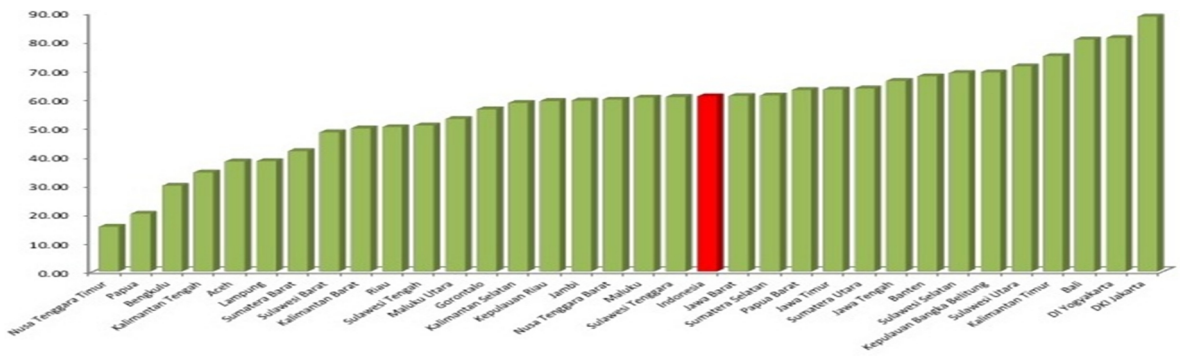

Upaya meningkatkan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan, Pedesaan, dan Perkotaan+Pedesaan sebagaimana target MDGs, langkah nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi adalah dengan melakukan pemasangan pipa (pipa distribusi) yang meliputi wilayah Kota dan Kabupaten dalam Provinsi Jambi.

Tabel 3.7. Cakupan Pelayanan Perusahaan Air Bersih di Provinsi Jambi 2014

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kecamatan yang terlayani	Cakupan pelayanan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Kerinci *)	16	7	44
2. Merangin	24	11	46
3. Sarolangun	10	8	80
4. Batanghari	8	8	100
5. Muaro Jambi	11	7	64
6. Tanjung Jabung Timur	11	5	45
7. Tanjung Jabung Barat	13	5	38
8. Tebo	12	7	58
9. Bungo	17	9	53
10. Kota Jambi	8	8	100
11. Kota Sungai Penuh	8	*)NA	*)NA
Provinsi	**138**	**75**	**54**

*) Data Kabupaten Kerinci masih tergabung dengan Kota Sungai Penuh
Sumber : BPS Provinsi Jambi (Statistik Air Bersih 2010-

Dilihat dari cakupan pelayanan air bersih oleh PDAM Jambi, terutama dilihat dari segi wilayah administrasi, Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota serta 138 kecamatan. Perusahaan air bersih hanya ada sebanyak 10 perusahan, dimana dari total 138 kecamatan terdapat 75 kecamatan yang mendapatkan pelayanan air bersih dari PAM sehingga dari sisi cakupan wilayah 54 persen telah mendapatkan layanan air bersih dari PAM.

Dari jumlah pelanggan, selama 5 tahun terakhir jumlah pelanggan PAM meningkat 13 persen yaitu sebanyak 17.346 pelanggan, dengan pertambahan pelanggan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,34 persen atau bertambah sekitar 8.841 pelanggan dari tahun sebelumnya.

Jumlah total pelanggan PAM di Provinsi Jambi untuk kelompok rumah tangga pada tahun 2014 tercatat sebanyak 128 ribu pelanggan, jika jumlah rumah tangga di Provinsi Jambi ada 828 ribu ruta maka hanya sekitar 15 persen rumah tangga di Provinsi Jambi yang mendapatkan pelayanan air bersih dari PAM.

Tabel 3.8. Jumlah dan Pertumbuhan Pelanggan per tahun di Provinsi Jambi, 2010-2014

Tahun	Jumlah Pelanggan	Pertumbuhan per tahun (%)
[1]	[2]	[3]
2010	130 959	0,99
2011	131 502	0,41
2012	134 486	2,27
2013	139 464	3,70
2014	148 305	6,34

Tabel 3.9. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Ledeng Meteran sebagai Air Minum di Provinsi Jambi, 2010-2014

	Sumber Air	2010	2011	2012	2013	2014
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Sumur	50,07	47,7	43,64	44,97	43,13
2	Air kemasan/isi	8,29	15,27	22,91	24,51	24,18
3	Ledeng meteran	15,66	14,19	11,39	9,2	10,28
4	Hujan	12,64	11,77	10,71	10,88	9,97
5	Sungai	6,86	5,36	6,68	5,29	5,2
6	Sumur bor	3,29	2,72	2,14	2,62	4,38
7	Mata air	3,07	2,79	2,17	2,17	2,51
		100	100	100	100	100

Selama periode 2010-2014 penggunaan sumber air bersih rumah tangga untuk air minum yang berasal dari leding meteran mengalami pertumbuhan rata-ratanya minus 4,69 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sumur bor yang mencapai rata-rata 15,11 persen per tahun. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada musim kemarau sumur menjadi kering sehingga masyarakat membuat sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari termasuk untuk kebutuhan air minum. Perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10. Perbandingan dan Capaian Kinerja Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan, Pedesaan, serta Perkotaan dan Pedesaaan Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaaan	44,32	44,32	44,62	42,72	42,72	68,87	62,75	91,11	42,72	68,87

Sumber : MDGs & Hasil pengolahan data tahun 2016

Dengan adanya akses berkelanjutan terhadap sambungan air minum layak ini, secara tidak langsung mengubah pola hidup masyarakat Provinsi Jambi dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan sebagai dasar menuju kualitas hidup yang lebih baik. Salah satu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat adalah melalui pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini merupakan komponen fisik sarana dan prasarana air minum.

c. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak

Terkait dengan proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak, tentunya tidak terlepas dengan pentingnya akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar layak, perkotaan, pedesaan, perkotaan dan pedesaan (target mdgs). Kondisi sanitasi di Provinsi Jambi saat ini sebagaimana data BPS dan Susenas tahun 2015 baru mencapai angka 58,21% untuk akses layak dan 7,6% untuk akses dasar serta tidak ada akses 37,1%. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan pada 2019 seluruh daerah di Provinsi Jambi mendapatkan akses layak sanitasi.

Gambar 3.7. Potret kebutuhan akses sanitasi layak

Tahun 2015 ini memasuki tahap ke-2 dimana Pemerintah Provinsi Jambi dituntut untuk berupaya memenuhi target yang dicanangkan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Pemerintah pusat telah menetapkan target Universal Acces bidang sanitasi pada tahun 2015-2019 yaitu 0-100 yang artinya 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi.

Pada tahun 2019 Provinsi Jambi ditargetkan pencapaian sanitasi layak sebesar 85% akses layak, 15% dasar dan tidak ada akses sebesar 0%. Salah satu upaya untuk mencapai target tersebut diantaranya melalui program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP), guna menghimpun data-data dan permasalahan sanitasi yang ada di kabupaten/kota untuk selanjutnya disusun program-program kerja untuk menuntaskan permasalahan sanitasi tersebut.

Beberapa isu strategis dalam pembangunan sanitasi antara lain adanya jarak yang cukup besar untuk mencapai akses sanitasi layak 100% tahun 2019, masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan, keterbatasan dalam pendanaan sektor sanitasi dan yang terakhir masih kurangnya kesiapan daerah dalam menghadapi tahap implementasi.

Program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Provinsi Jambi saat ini telah memasuki tahun ke-5 yang diawali pada tahun 2009 dan telah dilakukan pemuktahiran pada tahun

2014, pada tahun 2012 ada 3 kabupaten/kota yang masuk program PPSP yaitu kabupaten Sarolangun, kabupaten Merangin, dan kota Sungai Penuh yang rencananya akan dilakukan pemuktahiran dokumen pada tahun 2017, langkah ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan pembangunan sanitasi pada tahun 2013 lalu dengan 6 kabupaten yang masuk program PPSP yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung JAbung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan terakhir tahun 2014 yaitu Kabupaten Muaro Jambi.

Akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi dasar layak secara nasional terus meningkat, tapi secara umum masih terdapat variasi antar provinsi. Kecenderungan untuk perkotaan dan perdesaan 2006-2014 memperlihatkan pertumbuhan yang seimbang, sedangkan disparitas provinsi untuk tahun 2013 memperlihatkan perbedaan yang cukup besar, dengan Provinsi DKI Jakarta menempati urutan paling tinggi (86,57%) dan Provinsi Papua paling rendah (27,89%). Rata-rata nasional adalah 60,91%. Analisis terhadap disparitas provinsi pada kurun waktu 2011-2013 menunjukkan variasi yang tidak jauh berbeda, kecuali untuk beberapa provinsi tertentu seperti Papua Barat yang mengalami lonjakan pada tahun 2012 dan Bengkulu yang mengalami kecenderungan menurun.

Berdasarkan angka-angka tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa target MDGs untuk akses terhadap sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan sebesar 62,41 persen rata-rata nasional pada tahun 2015 optimis akan tercapai, bahkan mungkin terlampaui. Untuk perdesaan, meskipun cenderungannya lebih baik dari perkotaan, tapi capaian pada tahun 2013 (44,74 persen) masih jauh dari target MDGs sebesar 55,55 persen, sehingga masih memerlukan upaya yang lebih keras untuk mencapainya.

Akses hanyalah salah satu dari sejumlah indikator lain untuk kinerja pelayanan sanitasi yang lebih baik, yang berkaitan dengan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, jamban dan tangki septik yang memenuhi syarat serta sistem pengelolaan lumpur tinja yang baik, manajemen pengumpulan, pembuangan dan pengolahan limbah padat yang lebih baik serta pengelolaan limbah cair yang lebih komprehensif, termasuk institusi pengelolanya pada tingkat kabupaten/kota.

Untuk Provinsi Jambi, capaian proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan pada kondisi awal RPJMD yakni tahun 2010 sebesar 40,93% dan mengalami kenaikan sebesar 9,72% menjadi 50,65% tahun 2011. Pada tahun 2012 kondisi capaian masih sebesar 52,79% dan mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 53,70%, dan tahun 2014 berdasarkan data susenas BPS masih berada pada angka memperoleh angka realisasi sebesar 53,70%. Capaian akses sanitasi pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 58,21% dengan persentase kenaikan sebesar 4,51%.

Untuk target pada indikator ini, telah ditetapkan persentase capaian indikator kinerja sesuai dengan target MDGs. Lebih lanjut mengenai perbandingan capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11. Perbandingan Capaian Kinerja Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Dasar Layak, Perkotaan, Pedesaan, serta Perkotaan dan Pedesaaan Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Dasar Layak, Perkotaan dan Pedesaaan	40,93 (MDG's)	50,65	52,79	53,70	53,70	62,41	58,21	93,27	58,21	62,41

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2016

Analisis capaian kinerja tersebut di atas tidak terlepas dari upaya pelaksanaan desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tahun 2015. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku bersih sehat. Sebagai indikator pencapaian STBM, salah satunya adalah adanya deklarasi masyarakat desa bebas buang air besar sembarangan (Open Defecation Free/ODF), dengan capaian dalam bentuk :

1. Pelaksanaan STBM yang dilakukan secara intensif melalui proyek CWSH yang terencana, terkoordinasi secara lebih baik.
2. Pembiayaan yang berbasis masyakarat dan dukungan pembiayaan oleh ADB sesuai kebutuhan.
3. Adanya community fasilitator (desa)
4. Adanya dukungan pemerintah daerah (Bupati) secara intensif.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah salah satu strategi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi masyarakat dengan pembangunan, penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi yang sehat, dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, menitikberatkan pada peningkatan perilaku hygiene dan sanitasi masyarakat pedesaan. Apabila STBM dapat kita laksanakan dengan baik maka target MDGs 2015 untuk Indonesia dibidang sanitasi dipastikan dapat kita capai. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, masyarakat serta stkeholder terkait.

Pencapaian tahun 2015, dimana ditargetkan sebanyak 251 desa yang melaksanakan STBM terealisasi sebanyak 364 desa meningkat 145%, jika dibandingkan tahun lalu meningkat 8 desa (2%) dan peningkatan terbanyak terjadi pada tahun 2012 sebanyak 77 desa (95%), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.5. Cakupan Desa yang Melaksanakan STBM Di Provinsi Jambi Tahun 2015

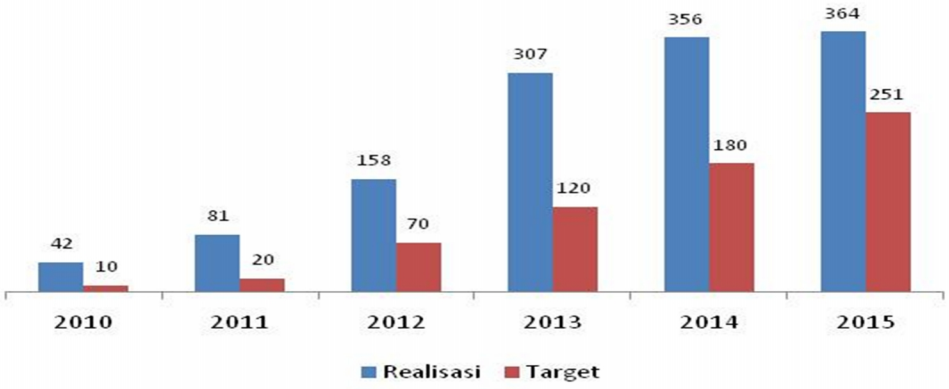

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak. Dalam tahun 2015, program yang dilakukan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 5 program, yakni :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
2. Program penyediaan dan pengelolaan ari baku/tanah
3. Program pengendalian banjir
4. Program pembangunan saluran drainase
5. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

<u>Hambatan/kendala</u> :

1. Keandalan sistem jaringan irigasi merupakan pilar penting yang memberikan kontribusi bagi optimalisasi produksi pangan daerah dan ketahanan pangan nasional. Masalah utama dalam rangka mengoptimalkan jaringan irigasi adalah pembebasan lahan menuju sumber-sumber produksi pangan.

2. Pencapaian target proporsi penduduk dengan akses terhadap sumber air minum Provinsi Jambi pada tahun 2015 mempunyai dimensi tantangan yang beraneka ragam, antara lain sebagai berikut :

   a. Cakupan pembangunan yang sangat besar.
   b. Keterbatasan sumber pendanaan.
   c. Penurunan kualitas dan sumber air baku.
   d. Mengingat jumlah kepadatan penduduk di kawasan perkotaan lebih tinggi masalah kemiskinan yang diderita penduduk turut menjadi penyebab rendahnya kemampuan penduduk untuk mengakses air minum yang layak, serta
   e. Lemahnya kemampuan manajerial operasional air minum.

3. Berkaitan dengan masalah sanitasi dasar, terdapat beberapa tantangan dalam rangka mencapai target penurunan proporsi penduduk dengan akses fasilitas sanitasi dasar yang layak pada tahun 2015, yakni :

   a. Pengetahuan penduduk tentang kualitas lingkungan yang masih rendah.
   b. Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor yang berupaya menyediakan fasilitas sanitasi dasar yang layak dan sehat menyebabkan penanganan masalah sanitasi kurang diatasi.
   c. Rendahnya kualitas bangunan tangki septik di perkotaan.
   d. Masih rendahnya masyarakat di kawasan perkotaan yang mendapatkan pelayanan sistem pembuangan air limbah (sewerage system).
   e. Tidak adanya pelayanan sanitasi yang layak berdampak pada kualitas kesehatan yang rendah.

Langkah antisipatif :

1. Perlu ketegasan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengendalikan laju alih fungsi lahan yang begitu cepat demi keberlangsungan penguatan ketahanan pangan nasional, sehingga akses jaringan irigasi menjadi lebih optimal menuju sentra pangan.
2. Melihat pencapaian target MDGs khususnya bidang air minum yang masih stagnan, maka upaya yang bisa dilakukan antara lain berlandaskan pada pilar-pilar peningkatan pengetahuan akan penyediaan air minum, penguatan kerjasama para Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak-pihak terkait seperti PDAM, serta pengembangan kemampuan masyarakat lokal dalam penyediaan air minum, serta konservasi sumber air baku.
3. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, jajaran eksekutif, jajaran legislatif, dan pelaku dunia usaha agar memahami bahwasanya sanitasi berkaitan erat dengan kualitas hidup. Bila masyarakat telah menyadari pentingnya sanitasi, khususnya berkaitan dengan kesehatan dan produktivitas, maka kebutuhan terhadap prasarana dan sarana sanitasi akan meningkat.
4. Meningkatan kualitas sarana sanitasi yang diberikan dalam bentuk penyediaan dana dan pendampingan dalam pembangunan sarana yang memenuhi kriteria teknis dan standar kesehatan yang ditetapkan tetapi sekaligus mudah dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat.
5. Membangun sistem pengolahan tinja individual dengan menggunakan tangki septik yang memenuhi syarat. Tangki septik yang buruk menyebabkan kebocoran sehingga meningkatkan pencemaran terhadap sumber air minum dari sumur/pompa.

4. Sasaran Terwujudnya Pemerataan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas

Komponen penting dari pembangunan pendidikan adalah perluasan akses pendidikan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Perluasan akses ini menjadi kunci karena berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis, menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan yang sudah dijamin oleh konstitusi bisa jadi tidak terpenuhi. Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemerintah Provinsi Jambi telah

menetapkan indikator angka partisipasi murni (APM), persentase angka melek huruf, serta angka rata-rata lama sekolah sebagai penanda perluasan akses pendidikan.

Persentase Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Tabel 3.12. Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar

NO.	Kabupaten/Kota	Jumlah SD		Jumlah SMP	
		Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
1.	Kota Jambi	219	64,224	62	25,192
2.	Kota Sungai Penuh	73	10,096	13	4.424
3.	Kab. Batanghari	211	32,330	51	9,075
4.	Kab. Bungo	230	41.982	60	13.066
5.	Kab. Kerinci	228	25.756	55	9,093
6.	Kab. Tanjab Barat	209	37.885	60	9,692
7.	Kab Merangin	309	47.883	89	11,956
8.	Kab. Sarolangun	230	35.717	67	9.404
9.	Kab. Tebo	239	41,302	56	11,558
10.	Kab. Muaro Jambi	246	42.508	76	13.174
11.	Kab. Tanjab Timur	206	24.824	46	7.125
	JUMLAH	2.400	404.507	633	123.780

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 2014

Upaya peningkatan akses pendidikan, terutama bagi siswa miskin dari sisi ekonomi sangat ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan dengan baik dan dibangun dengan proses partisipatif. Dalam upaya tersebut pemerintah menganut kebijakan yang berpihak pada siswa miskin. Kebijakan yang berpihak kepada siswa miskin bertujuan untuk mengupayakan siswa miskin menikmati layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah tanpa terancam putus sekolah. Kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang telah dicanangkan oleh Mendikbud RI telah memperluas kesempatan dan jangkauan partisipasi semua golongan untuk memperoleh layanan pendidikan. Capaian APM pendidikan dasar sampai dengan menengah dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.6. Capaian APM tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan atas
Tahun 2010 s.d. 2015

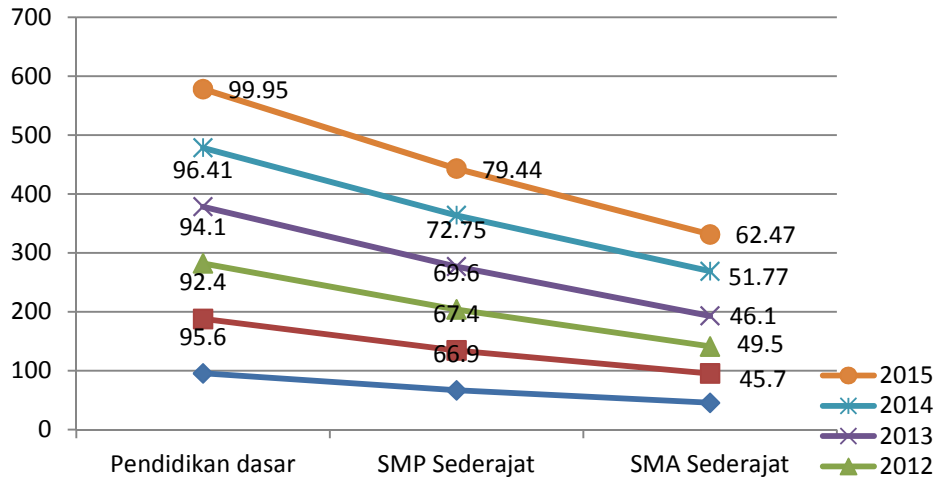

Penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah di Provinsi Jambi juga ditempuh dengan meningkatkan sarana dan prasarana belajar dalam rangka pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan. Pembangunan infrastruktur beserta alat penunjang belajar serta beberapa kegiatan pembinaan anak didik seperti pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA, penyelenggaraan Paket C, kegiatan pembinaan peserta FLSSN, SMA, kegiatan lomba seni Nasional, lawatan sejarah, kegiatan Pembangunan Bisnis center.

Dari upaya-upaya yang sudah dilakukan tersebut berdampak terhadap target capaian indikator kinerja bidang pendidikan pada RPJMD antara lain Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan menengah SMA sederajat sebesar 78%.

Tabel 3.13. Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar s.d. Pendidikan Menengah Atas Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase Angka Partisipasi Murni Pendidikan dasar	95,61	92,36	94,15	96,43	98,4	100	99,95	99,95	99,95	100
Persentase Angka Partisipasi Murni SMP sederajat	66,91	67,43	69,56	72,73	69,87	90	79,44	87,77	79,44	90
Persentase APM pendidikan menengah (SMA sederajat)	45,7	48,55	46,42	51,77	74,93	78	62,47	80,08	74,93	78

Ketersediaan Sekolah

Bagian penting dari perluasan akses pendidikan adalah ketersediaan sarana pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah yang layak bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Data dalam di bawah ini menunjukkan bahwa untuk jenjang SD/MI, rasio gedung sekolah per 10.000 penduduk telah mengalami peningkatan pada tahun 2010, dari sebelumnya 71/10.000 penduduk menjadi 73/10.000 penduduk. Kondisi ini terjaga hingga tahun 2014. Namun untuk jenjang SLTP, mengalami fluktuasi karena mengalami penurunan pada tahun 2010 dari 37/10.000 penduduk menjadi 36/10.000 penduduk, walaupun sudah meningkat dan menjadi lebih baik pada tahun 2012 (menjadi 38/10.000 penduduk).

Tabel 3.14. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Provinsi Jambi Tahun 2010-2015

No.	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	SD/MI						
1.	Jumlah sekolah	2.204	2.360	2.382	2.382	2.400	2.400
2.	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	403.980	404.120	404.300	404.405	404.507	404.557
3.	Rasio (per 10.000)	71	73	73	73	73	73,3
II	SMP/MTs						
1.	Jumlah sekolah	460	476	487	487	495	495
2.	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	120.200	123.405	123.650	123.700	123.780	123.780
3.	Rasio (per 10.000)	37	36	38	39	39	39,2

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 2015

Hambatan/kendala :

a. Sasaran perluasan aksesbilitas pendidikan perlu memperhatikan fluktuasi rasio guru dan murid serta ketersediaan gedung sekolah, karena dampaknya bagi kelancaran dan peningkatan kualitas belajar mengajar.

b. Disparitas antar kabupaten/kota, sebagaimana ditunjukkan dalam angka APM dan APK, perlu dijawab dengan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di berbagai kabupaten/kota.

Langkah antisipatif :

a. Pemerintah Propinsi Jambi memiliki peran strategis untuk mengkoordinasikan program dan capaian kinerja antar kabupaten/ kota, termasuk untuk meminimalkan ketimpangan antar wilayah pada aspek pendidikan.

b. Pemberian beasiswa, bantuan siswa miskin, pemberian bantuan biaya pendidikan mahasiswa, dan pemberian jaminan pendidikan bagi siswa miskin untuk pelajar/mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Provinsi Jambi, maka dilaksanakan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, peningkatan koleksi bahan pustaka yang variatif, peningkatan pelayanan perpustakaan keliling, meningkatkan minat baca dan budaya baca masyarakat Jambi yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan, serta melestarikan informasi tentang kebudayaan daerah Jambi sebagai bagian dari kebudayaan nasional agar dapat selalu ada dan dapat diketahui dan bermanfaat bagi generasi berikutnya.

Untuk mendukung program tersebut, telah dilakukan upaya strategis, diantaranya :

1. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar,
2. Pengembangan Minat Baca dan Budaya Baca,
3. Pengembangan Koleksi Deposit dan Pelestarian Karya Cetak/ Karya Rekam Khasanah Budaya Rakyat Jambi,
4. Pengembangan, Pengolahan Sistem Otomasi dan Koleksi Bahan Perpustakaan,
5. Pengembangan Kapasitas Tenaga Pengelola Perpustakaan,
6. Pelestarian bahan Pustaka,
7. Pelestarian Transformasi Digital Bahan Pustaka,
8. Pameran Buku.

Gambar 3.8. Suasana Perpustakaan Provinsi Jambi

Berjalannya program ini telah meningkatkan jumlah anggota perpustakaan dari 8.951 orang di tahun 2011 menjadi 12.084 orang pada tahun 2012 dan mengalami peningkatan jumlah pengunjung pada tahun 2013 sebesar 13.506 orang, tahun 2014 peningkatan menjadi 14.540 dan pada tahun 2015 eningkat menjadi 17.042 orang. Dari sisi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan, pengunjung perpustakaan pada tahun 2010 sebanyak 121.524, 2011 sebanyak 132.461, pada tahun 2012 sebanyak 145.707 orang, dan mengalami penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2013 menjadi 96.756 orang, dan pada tahun 2014 sebanyak 85.310 orang. Sampai dengan Tr.III tahun 2015, jumlah pengunjung perpustakaan daerah provinsi Jambi mengalami penurunan sekitar 40% menjadi 65.611 orang. Hal ini disebabkan pesatnya kemajuan teknologi sehingga semua informasi dapat diakses dimana saja dan berdampak kurangnya minat kunjungan literatur ke perpustakaan daerah. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi antara lain dengan menambah jam kunjung layanan pada sore bahkan pada malam hari, serta hari sabtu dan minggu. Selain itu juga dilakukan

peningkatan layanan melalui internet gratis di setiap area perpustakaan daerah provinsi Jambi. Lebih lanjut perbandingan capaian peningkatan jumlah anggota dan pengunjung perpustakaan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.7. Peningkatan Jumlah Anggota dan Pengunjung Perpustakaan 2010 – 2015

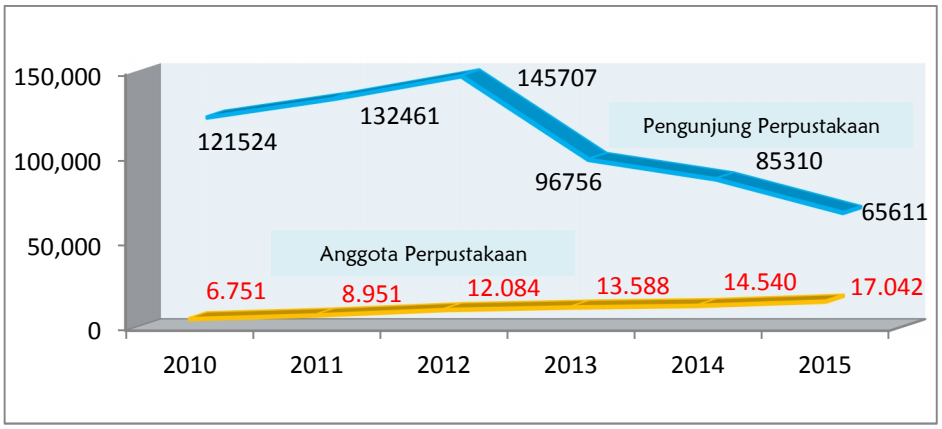

Upaya yang telah dilakukan agar meningkatkan jumlah pengunjung antara lain dengan cara melaksanakan perpustakaan keliling dan sirkulasi layanan bahan Perpustakaan hingga pelayanan kepada Pemustaka, semata-mata tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Meningkatnya budaya baca dikalangan masyarakat berdampak positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran gerakan masyarakat gemar membaca.

Gambar 3.9. Perpustakaan Keliling Provinsi Jambi

Capaian keberhasilan kinerja peningkatan pengunjung perpustakaan di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan akses terhadap pendidikan. Dalam tahun 2015, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 2 program, yakni :

1. Program pengembangan budaya membaca dan pembinaan perpustakaan
2. Pelestarian dan pemeliharaan bahan pustaka

5. Sasaran Terwujudnya Pemerataan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat

a. Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita

Pembangunan Kesehatan sebagaimana kita ketahui bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen Internasional yang dituangkan dalam Milennium Development Goals (MDGs) dimana dalam pencapaian MDGs tersebut sektor kesehatan tercantum Indikator tujuan MDGs yaitu : Penurunan Prevalensi kekurangan gizi pada Balita, Menurunkan kematian Ibu dan Anak, serta Meningkatkan Kesehatan Ibu.

Penanganan pangan dan gizi merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional. Pangan dan gizi terkait langsung dengan status kesehatan masyarakat. Perwujudan ketahanan pangan dan gizi tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas

kesehatan individu dan masyarakat, serta peningkatan daya saing SDM, yang selanjutnya menjadi daya saing bangsa. Indonesia telah berada dalam jalur yang benar *(on track)* untuk mencapai MDGs.

Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang kesehatan No 36 tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMN 2010-2014 telah menetapkan 4 sasaran pembangunan kesehatan yaitu 1). Meningkatkan umur harapan hidup, 2). Menurunkan angka kematian bayi, 3). Menurunkan angka kematian ibu dan 4) Menurunkan prevalensi gizi kurang. Besaran masalah gizi masyarakat diukur dengan mengukur status gizi anak balita berdasarkan indeks Berat badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB).

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Daerah tahun 2010 dimana diperoleh besaran masalah gizi masyarakat di Provinsi Jambi untuk prevalensi gizi kurang indeks (BB/U) sebesar 19,6%, prevalensi kurus indeks (BB/TB) sebesar 20% dan prevalensi pendek (TB/U) sebesar 30,2%.

Tabel 3.15. Target penurunan masalah gizi masyarakat

No.	Tahun/Indikator	Kondisi 2010	Target Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Gizi Kurang (Berat badan kurang menurut umur)	19.6	18.5	18	17	16	15
2.	Kurus (Berat badan kurang menurut tinggi badan) = Akut	20.0	19	18	17	16	15
3.	Pendek (Tinggi Badan Rendah menurut umur) = Kronis	30.2	30	29	28	27	26

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2015

Atas dasar penurunan target dimaksud, maka penanganan penurunan kasus gizi buruk terutama pada balita menjadi perhatian yang sangat penting bagi Provinsi Jambi. Berikut disajikan jumlah kasus gizi buruk pada balita yang mendapatkan perawatan di Provinsi Jambi :

Tabel 3.16. Kasus Gizi Buruk Provinsi Jambi yang Mendapatkan Perawatan

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KASUS	JUMLAH KASUS DIRAWAT	PERSENTASE KASUS DIRAWAT (%)	JUMLAH MENINGGAL	
1	KERINCI	3	3	100	1	ORANG
2	SEI. PENUH	4	4	100	1	ORANG
3	MERANGIN	16	16	100	0	ORANG
4	SAROLANGUN	7	7	100	0	ORANG
5	BUNGO	4	4	100	0	ORANG
6	TEBO	13	13	100	1	ORANG
7	BATANGHARI	14	14	100	0	ORANG
8	TANJAB TIMUR	3	3	100	1	ORANG
9	TANJAB BARAT	4	4	100	0	ORANG
10	KOTA JAMBI	11	11	100	0	ORANG
11	MUARO JAMBI	9	9	100	1	ORANG
	PROVINSI	**88**	**88**	100	**4**	**ORANG**

Sumber : Laporan Bulanan Kasus Gizi Buruk Kabupaten/Kota Tahun 2015

Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Jambi tahun 2015 sebanyak 88 kasus dan sebanyak 4 orang meninggal. Semua kasus gizi buruk mendapat perawatan (100%), adapun perawatan yang diberikan berupa rawat inap atau rawat jalan. Bagi penderita pasca perawatan pemerintah Provinsi Jambi memberikan bantuan berupa formula pemulihan yang

diberikan kepada 30 anak. Jumlah penderita gizi buruk yang meninggal pada tahun 2015 sebanyak 4 orang. Terjadi penurunan jumlah kasus gizi buruk dibandingkan tahun 2014 (13 orang) dan tahun 2013 (15 orang). Jumlah kasus meninggal terjadi penurunan dibandingkan tahun 2014.

Penyebab terjadinya kasus gizi buruk pada balita di Provinsi Jambi disebabkan oleh masalah konsumsi yang kurang, kelainan kongenital dan atau adanya infeksi seperti : ekonomi, penkyakit jantung, penyakit infeksi (diare,kecacingan, pneumoni, TB paru), BBLRDown Sindrome, TB Tulag, Cacat Fisik). Masalah lain yang ditemukan masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan orang tua dalam mengasuh anak terutama dalam hal pemberian makan, kesehatan perorangan dan kesehatan lingkungan akibat kemiskinan.

Diagram 3.2. Kasus gizi buruk tertangani

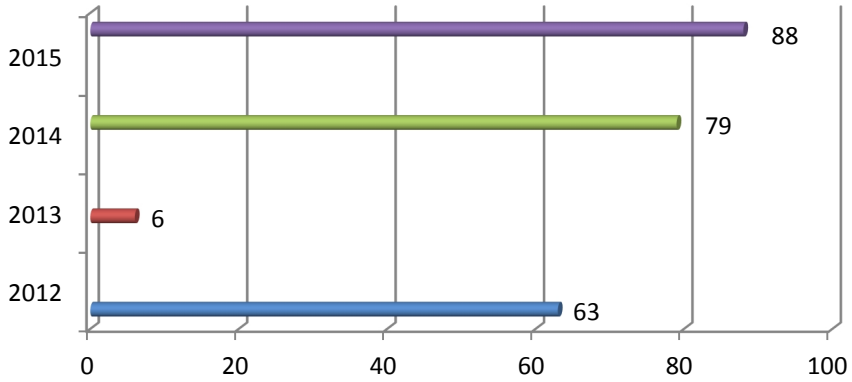

Penyebab terjadinya kasus gizi buruk pada balita di Provinsi Jambi disebabkan oleh masalah konsumsi yang kurang, kelainan kongenital dan atau adanya infeksi seperti : cacingan, pneumoni, TB paru, kelainan ginjal, kelainan jantung, talasemia, katarak, BBLR dan ISPA. Masalah lain yang ditemukan masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan orang tua dalam mengasuh anak terutama dalam hal pemberian makan, kesehatan perorangan dan kesehatan lingkungan akibat kemiskinan.

Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita di Provinsi Jambi yang bertujuan memantau peningkatan pelayanan gizi sesuai dengan Prosedur Pemantauan Pertumbuhan Balita dengan perkembangan s.d. tahun 2015 sebagai berikut :

Grafik 3.8. Hasil Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita
di Provinsi Jambi Tahun 2011 - 2015

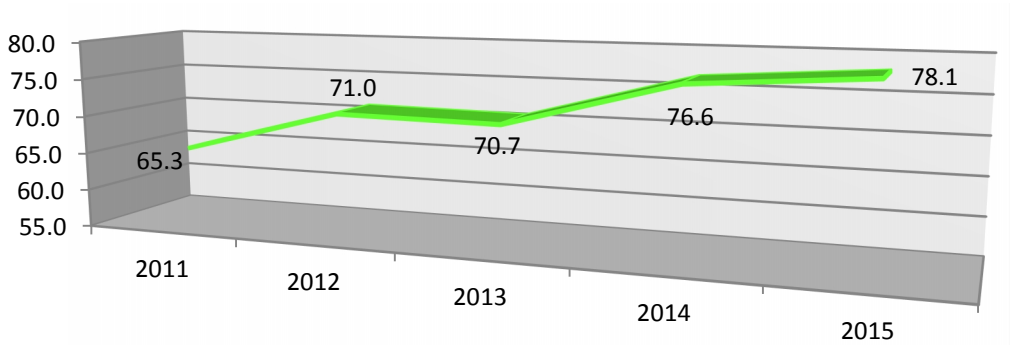

Pada grafik di atas, dapat dilihat tingkat partisipasi masyarakat dalam menimbang balita dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 (78,1%) telah mencapai target indikator tahunan (D/S = 69%), bahkan telah mencapai target RPJMD 2015 (D/S = 69%).

Tabel 3.18. Hasil Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Provinsi Jambi Tahun 2015

No	KAB/KOTA	S	K	D	N	T	0	B
1	KERINCI	9,142	8,623	7,063	6,020	264	430	349
2	SEI. PENUH	2,934	2,934	2,528	2,298	49	80	98
3	MERANGIN	15,691	15,043	11,520	9,569	766	547	499
4	SAROLANGUN	10,632	10,631	10,168	8,813	600	365	391
5	BATANG HARI	10,183	10,092	8,713	7,244	387	672	312
6	MA JAMBI	14,601	14,601	12,397	10,989	189	619	555
7	TJ. TIMUR	7,769	7,576	6,272	5,272	396	369	248
8	TJ BARAT	9,894	9,668	8,585	7,552	269	449	314
9	TEBO	13,686	13,686	9,430	7,556	642	757	476
10	BUNGO	13,214	13,141	11,213	9,681	568	598	355
11	JAMBI	22,499	22,468	13,762	10,547	1,186	1,421	478
	PROVINSI	130,243	128,463	101,650	85,540	5,318	6,307	4,074

No	KAB/KOTA	D'	2T	BGM	D/S	N/D'	N/S	K/S	BGM/D
1	KERINCI	6,284	29	25	77.26	95.79	65.85	94.32	0.35
2	SEI. PENUH	2,350	5	3	86.16	97.81	78.34	100.00	0.10
3	MERANGIN	10,474	103	16	73.42	91.36	60.98	95.88	0.14
4	SAROLANGUN	9,413	33	30	95.64	93.63	82.89	100.00	0.30
5	BATANG HARI	7,729	100	34	85.56	93.72	71.13	99.11	0.39
6	MA JAMBI	11,223	78	32	84.91	97.92	75.27	100.00	0.25
7	TJ. TIMUR	5,655	49	32	80.73	93.23	67.85	97.51	0.51
8	TJ. BARAT	7,822	73	28	86.77	96.56	76.34	97.72	0.33
9	TEBO	8,196	58	19	68.90	92.18	55.21	100.00	0.20
10	BUNGO	10,260	44	4	84.86	94.36	73.26	99.45	0.04
11	JAMBI	11,863	106	48	61.17	88.91	46.88	99.86	0.35
	PROVINSI	91,268	680	271	78.05	93.72	65.68	98.63	0.27

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2015

Pada tabel diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita di Provinsi Jambi tahun 2015 berupa cakupan partipasi masyarakat (D/S) sebesar 78,1%, yang naik timbangannya (N/D') sebesar 93,72%, keberhasilan penimbangan (N/S) sebesar 65,68%, balita yang mempunyai KMS (K/S) sebesar 98,63%, jumlah balita di Bawah Garis Merah (BGM) datang ke penimbangan (BGM/D) sebesar 0,27%.

Tabel 3.19. Perbandingan Capaian Kinerja Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Prevalensi kekurangan gizi pada balita (kasus gizi buruk tertangani)	100%	100%	100% (63 kasus)	100% (6 kasus)	100% 148 kasus tertangani	100% kasus tertangani	100% (88 kasus tertangani)	100	100% 148 kasus tertangani	100%

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2016

Capaian keberhasilan kinerja prevalensi kekurangan gizi di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan akses terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Dalam tahun 2015, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 8 program, yakni :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan.
3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
5. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
6. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
7. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

Hambatan/kendala :

Permasalahan yang ditemui dalam prevalensi kekurangan gizi pada balita ini antara lain :

1. Penerapan pola perilaku hidup bersih dan sehat untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman risiko penyakit masih belum sepenuhnya baik. Termasuk didalamnya adalah pola umum gizi seimbang (PUGS), kesehatan lingkungan (sanitasi dan akses air bersih), pencegahan penyakit menular, aktifitas fisik, dan penggunaan obat.
2. Implementasi BPJS untuk jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara sejak 1 Januari 2014 menimbulkan beberapa tantangan, termasuk di wilayah Provinsi Jambi. Berbagai tantangan ini mencakup proses integrasi antara berbagai skema jaminan kesehatan yang sudah ada sebelumnya, sosialisasi kebijakan yang belum optimal ke segenap lapisan masyarakat, hingga sistem pendukung untuk pelaksanaan kebijakan yang belum sepenuhnya tersedia dan berjalan

Langkah antisipatif :

Langkah antisipatif dalam mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai target yang telah ditentukan antara lain :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Hal ini bisa dilakukan antara lain melalui pemberdayaan masyarakat melalui posyandu, desa/kelurahan siaga, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan.
2. Dalam konteks masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki ikatan kekerabatan dan jejaring sosial yang kuat, pemenuhan hak masyarakat akan kesejahteraan dan jaminan sosial bisa dilakukan dengan mensinergikan program dan layanan yang disediakan pemerintah dengan upaya sejenis yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator diperlukan untuk memastikan adanya jaminan yang memadai bagi masyarakat atas hak-hak dasarnya untuk hidup secara layak dan bermartabat.
3. Upaya-upaya untuk penerapan universal coverage melalui program BPJS perlu disinergikan dengan pendayagunaan dan pemberdayaan baik aparatur pemerintah di wilayah Provinsi Jambi, organisasi masyarakat yang terkait maupun juga peran media massa untuk sosialisasi kebijakan yang efektif. Begitu juga integrasinya dengan sistem dan penyediaan layanan publik sehingga kualitas layanan kesehatan yang universal bisa didapatkan masyarakat secara baik dan memadai.

c. Persentase Puskesmas Berkinerja Baik

Capaian persentase Puskesmas dengan kinerja yang baik dengan menilai Puskesmas yang melaksanakan Manajemen Puskesmas. Adapun Manajemen Puskesmas terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu : P1 (Perencanaan) , P2 (Lokakarya mini/ Lokmin) dan P3 (Evaluasi Kinerja Puskesmas). Pada tahun 2015 sebagian besar puskesmas belum mempunyai kinerja baik hal ini di sebabkan distribusi tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya baik tingkat bidan desa, Puskesmas maupun Kab/Kota dalam melaksanakan program sehingga capaian program yang telah ditetapkan bersama masih ada yang belum tercapai, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20. Capaian Puskesmas Dengan Kinerja Baik Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota					
		50% PKM Yang Menerapkan Mutu		50% PKM Menerapkan Program Pengembangan		75% PKM Melaksanakan Manajemen (P1,P2,P3)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kerinci	9	18	9	4	14	18
2	Merangin	9	21	9	4	14	21
3	Sarolangun	7	13	7	3	11	13
4	BT Hari	8	17	8	8	12	17
5	Muaro Jambj	9	19	9	8	14	19
6	Tanjab Timur	8	17	8	4	13	17
7	Tanjab Barat	8	16	8	6	12	16
8	Tebo	7	16	7	6	11	16
9	Bungo	9	18	9	5	14	18
10	Kota Jambi	10	20	10	10	15	20
11	Kota Sei Penuh	3	6	3	2	4	6
Propinsi		**9**	**11**	**11**	**2**	**11**	**11**
Target 2015		8		6		8	

Dari tabel di atas terlihat capaian pelaksanaan manajemen puskesmas dan penerapan manajemen mutu puskesmas pada tahun 2015 sudah cukup baik. Dapat dilihat bahwa 50% Puskesmas yang menerapkan mutu yang capaiannya lebih dari target yang telah di tentukan. Untuk Kabupaten/Kota 50% puskesmas telah mencapai target, 50% Puskesmas yang menerapkan program pengembangan sebagian besar belum mencapai target tetapi ada dua kabupaten yang sudah mencapai target yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Batang Hari. Untuk Puskesmas yang menerapkan P1,P2,P3 seluruh kabupaten Kota sudah mencapai target yang telah di tetapkan.

Selain penerapan penilaian manajemen dan pelaksanaan mutu tersebut, turut pula didukung oleh ketersediaan tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya baik tingkat bidan desa, puskesmas maupun Kab/Kota yang cukup merata, untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut :

Sampai dengan Tahun 2015, Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM-Kesehatan) yang bekerja pada unit kerja/unit pelayanan kesehatan dalam wilayah administratif provinsi Jambi berjumlah : 14.337 orang, terdiri atas 10.000 orang dengan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1.412 orang dengan status kepegawaian Pegawai Tidak Tetap (PTT), 1.318 orang dengan status kepegawaian Kontrak dan 1.607 orang dengan status kepegawaian swasta.

Grafik 3.9. Proporsi Jumlah SDM Kesehatan Provinsi Jambi Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2015

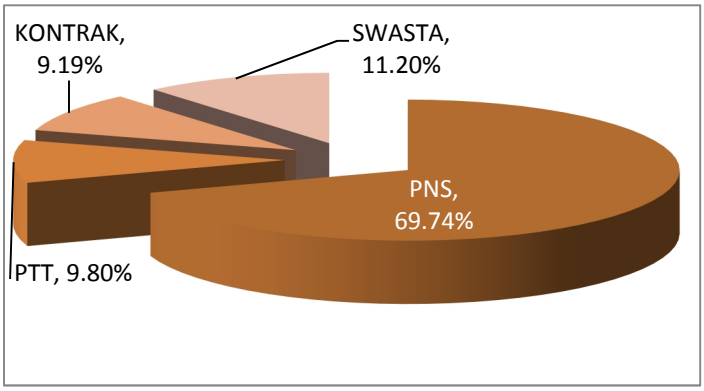

Jumlah SDM Kesehatan tersebut tersebar pada 9 kabupaten, 2 kota, dan provinsi Jambi, dengan rincian seperti pada tabel 2.1 berikut ini

Tabel 3.21. Sebaran SDM Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun2015

No	Kab / Kota / Prov	Jumlah	%
1	Kerinci	930	6.5
2	Merangin	1.129	7.9
3	Sarolangun	848	5.9
4	Bungo	1.496	10.4
5	Tebo	757	5.3
6	Batanghari	904	6.3
7	Muaro Jambi	1.278	8.9
8	Tanjab Barat	749	5.2
9	Tanjab Timur	767	5.3
10	Kota Jambi	3.164	22.1
11	Kota Sei Penuh	247	1.7
12	Provinsi	2.068	14.4
Jumlah		14.337	100,00

Mengacu Kepada Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk berdasarkan indikator Indonesia Sehat, Untuk Kategori Ketenagaan Dokter Spesialis masih di perlukan sebanyak 125 Orang, jenis ketenagaan dokter umum 336 orang, dokter gigi 202 orang, perawat 677 orang, bidan 60 orang, perawat gigi 150 orang, tenaga apoteker 133 orang, asisten apoteker 74 orang, tenaga gizi 361 orang, dan tenaga keterapian fisik sebanyak 58 orang. Sementara rasio tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian dan tenaga keteknisian medis, jumlahnya sudah mencukupi.

Jumlah SDM kesehatan yang dibutuhkan mempunyai keterkaitan erat dengan beberapa faktor lain, diantaranya adalah jumlah penduduk yang terus bertambah. Dalam upaya mewujudkan kondisi harapan menuju ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat, diharapkan hal-hal berikut :

1. Dukungan pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk dapat mengalokasikan formasi penerimaan tenaga kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan. Khususnya SDM Kesehatan untuk Rumah Sakit dan Puskesmas yang merupakan sarana terdepan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Mengingat masih rendahnya daya serap terhadap lulusan Institusi Pendidikan tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Jambi, sementara jumlah lulusan semakin bertambah setiap tahun, maka formasi untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan kiranya diutamakan bagi Institusi Pendidikan tenaga kesehatan yang ada dalam wilayah Provinsi Jambi.

Dengan demikian pada tahun 2015 pada indikator 50% Puskesmas yang menerapkan mutu yang capaiannya lebih dari target yang telah di tentukan. Untuk Kabupaten/Kota 50% puskesmas telah mencapai target, 50% Puskesmas yang menerapkan program pengembangan sebagian besar belum mencapai target tetapi ada dua kabupaten yang sudah mencapai target yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Batang Hari, dan rata-rata capaian kinerja tahun 2015 adalah sebesar 36,3% dari target 2015 sebesar 75%. Beberapa upaya strategis telah dilakukan dalam program antara lain :

1. Pemilihan tenaga teladan di Puskesmas
2. Penilaian Puskesmas berprestasi
3. Perjalanan teladan ke Pusat
4. Koordinasi perencanaan program bina Gizi & KIA dan BOK tingkat provinsi
5. Konsultasi teknis ke pusat
6. Sosialisasi prgram BOK ke Kab/ Kota
7. Pembinaan/ monitoring dan evaluasi program bina gizi& KIA dan BOK
8. Rapat koordinasi Yankestradkom provinsi dengan Kab/Kota/ RS/PKM di Kabupaten.

Tabel 3.22. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Puskesmas Yang Berkinerja Baik Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase Puskesmas berkinerja baik	50	50	60	36,4	50	75	36,3	48,4	60,01	75

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi & Hasil pengolahan data 2016

Capaian kinerja puskesmas berkinerja baik di atas merupakan upaya dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan akses terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Dalam tahun 2015, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 7 program, yakni :

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan.
2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
3. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
4. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Hambatan/kendala :

Permasalahan yang ditemui dalam capaian kinerja puskesmas berkinerja baik di Provinsi Jambi ini antara lain :

1. Adanya perubahan kriteria penilaian puskesmas berkinerja baik sebagaimana Permenkes Nomor 75 tahun 2014.
2. Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap baik/sudah biasa, bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan.
3. Belum sepenuhnya menerapkan kendali mutu pelayanan yang disebabkan kurangnya pengetahuan, peralatan, dan perhatian tersita pada upaya pengobatan, dapat dikatakan bahwa Puskesmas lebih sibuk pada masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik serta rendahnya disiplin/etos kerja staff, menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan yang berimbas pada terhambatnya kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan.
4. Sarana dan prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas, baik berupa alat medis maupun obat-obatan. Hal ini terjadi akibat dari sumber pendanaan/keuangan yang dimiliki Puskesmas relatif terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan.
5. Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya melaksanakan program dari Dinas Kesehatan. Misalnya program Posyandu yang tidak tepat sasaran. Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari pemerintah daerah.

Langkah antisipatif :

Langkah antisipatif dalam mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai target yang telah ditentukan antara lain :

1. Meningkatkan komitmen dan kemauan untuk meningkatkan/meratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien di Puskesmas, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan/revitalisasi kader PKK, pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang komprehensif, serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah.

2. Meningkatkan kesejahteraan pegawai karena berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji. Untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Meningkatkan sarana prasarana standar pelayanan serta penguatan anggaran kegiatan agar pelaksanaan program-program peningkatan kesehatan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

6. Sasaran Terciptanya Peningkatan Perlindungan Dan Kesejahteraan Sosial

a. Menurunnya Rumah Tangga Sangat Sangat Miskin

Data BPS Provinsi Jambi mencatat, dalam kurun waktu Maret 2015 sampai dengan September 2015, di Provinsi Jambi terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 10,85 ribu jiwa, yaitu dari 300,71 ribu pada Maret 2015 menjadi 311,56 ribu pada September 2015. Secara relatif juga terjadi kenaikan persentase penduduk miskin dari 8,86 persen pada Maret 2015 menjadi 9,12 persen pada September 2015.

Tabel 3.23. Penduduk Miskin di Provinsi Jambi Menurut Daerah, Maret 2015-September 2015

Daerah	Persentase Penduduk Miskin		Jumlah Penduduk Miskin (000)	
	Maret 2015	September 2015	Maret 2015	September 2015
(1)	(3)	(3)	(5)	(5)
Kota	11,60	12,11	119,54	125,60
Perdesaan	7,67	7,82	181,17	185,97
Kota+Perdesaan	**8,86**	**9,12**	**300,71**	**311,56**

Dari sisi jumlah, penduduk miskin di daerah perdesaan lebih banyak dari pada di perkotaan. Pada September 2015 penduduk miskin perdesaan mencapai 185,97 ribu (59,69 persen dari total penduduk miskin), sedangkan di perkotaan sebesar 125,60 ribu (40,31 persen dari total penduduk miskin). Kondisi pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 181,17 ribu, sedangkan di perkotaan sebesar 119,54 ribu. Hal ini berarti baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin.

Penduduk Provinsi Jambi yang lebih banyak tinggal di perdesaan, menjadikan secara relatif persentase penduduk miskin di perkotaan lebih besar daripada penduduk miskin di perdesaan. Persentase penduduk miskin Provinsi Jambi pada September 2015 di perkotaan sebesar 12,11 persen sementara di perdesaan 7,82 persen.

Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau Poverty Gap Index (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan atau Distributionally Sensitive Index (P2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbec (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil.

Tabel 3.24. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah Tahun 2015

Daerah	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan			
	Maret 2015		September 2015	
	P1	P2	P1	P2
(1)	(4)	(5)	(4)	(5)
Kota	2,130	0,535	1,614	0,397
Desa	1,117	0,265	1,599	0,455
Kota+Desa	**1,425**	**0,347**	**1,604**	**0,437**

Pada periode Maret 2015-September 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,425 pada Maret 2015 menjadi 1,604 pada September 2015. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,347 menjadi 0,437 pada periode yang sama (Tabel 4). Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perkotaan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode Maret 2015, sedangkan di perdesaan mengalami kenaikan. Pada September 2015, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)di Perkotaan turun dari 2,130 (Maret 2015) menjadi 1,614 pada September 2015, sementara Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)turun dari 0,535 (Maret 2015)menjadi 0,397 pada periode September 2015.

Dalam mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2015, upaya beberapa instansi terkait di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi sudah dilakukan secara maksimal. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan bagi pencari kerja di BPTT dan Pelatihan Samisake oleh Kabupaten /Kota dalam Provinsi Jambi.

Selain itu, dalam bidang kesejahteraan sosial selama Tahun 2015 telah dilakukan penyelenggaraan pelayanan dalam bidang sosial, meliputi pelayanan kepada lanjut usia terlantar melalui pelayanan panti dan lansia terlantar luar panti, pelayanan rehabilitasi panti remaja dan wanita, pelayanan sosial anak bagi anak terlantar, pelayanan dan pemberdayaan bagi penyandang cacat dan orang dengan kecacatan berat (ODK-berat), eks. wanita tuna susila, korban napza/narkoba, para eks. Napi, Wanita Rawan Penyakit Sosial (WTS Tidak langsung), anak punk dan gelandangan melalui pelayanan pada rumah singgah dengan pemberian penyuluhan dan keterampilan agar dapat kembali ke masyarakat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam bidang pemberdayaan sosial, Pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan bagi pemberdayaan dan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, dan pemberdayaan kelembagaan sosial yang merupakan mitra pemerintah dalam membantu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi, diantaranya lembaga sosial, BKKKS, Karang Taruna dan Orsos lainnya. Selain itu, juga dilakukan pelayanan dalam membantu mengatasi masalah korban bencana sosial dan korban bencana alam yang terjadi selama tahun 2015, serta pemulangan orang terlantar.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jambi memberikan apresiasi yang tinggi kepada perusahaan maupun BUMN/BUMD yang telah berpartisipasi dalam kegiatan bedah rumah melalui dana CSR, yang selama 3 tahun lalu telah terealisasi sebanyak 569 unit, masing-masing 263 unit tahun 2014 dan 283 unit di tahun 2015.

Grafik 3.10. Trend angka RTSM Provinsi Jambi

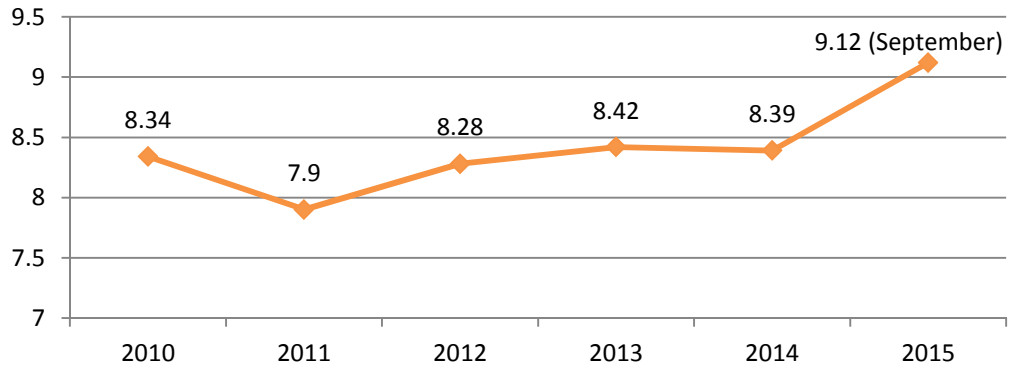

Trend perubahan Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel berikut ini menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2015 dan September 2015.

Tabel 3.25. Garis Kemiskinan Menurut Komponen Maret 2015-September 2015 (Rp/Kapita/Bln)

Wilayah	GARIS KEMISKINAN							
	Maret 2015				September 2015			
	Makanan	Non Makanan	Total	% GK Makanan	Makanan	Non Makanan	Total	% GK Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kota	297.507	108.556	406.074	73,26	308 379	115 476	423 855	72,76
Perdesaan	247.652	69.186	316.838	78,16	258 946	69 186	329 895	78,49
Kota + Desa	262.791	81.144	343.935	76,41	273 957	84 470	358 426	76,43

Selama periode Maret 2015-September 2015, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,21 persen, yaitu dari Rp 343.935 per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp 358.426 per kapita per bulan pada September 2015. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2015 sebersar 76,43 persen.

Pada September 2015, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, seperti beras yang memberi sumbangan sebesar 20,20 persen di perkotaan dan 26,48 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar ke dua kepada Garis Kemiskinan (11,35 persen di perkotaan dan 10,56 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah cabe merah (3,89 persen di perkotaan dan 5,12 persen di perdesaan), daging ayam ras (3,47 persen di perkotaan dan 2,99 persen di perdesaan), mie instan (3,47 persen di perkotaan dan 2,33 persen di perdesaan), telur ayam ras (3,41 persen di perkotaan dan 3,28 persen di perdesaan), gula pasir (3,03 persen di perkotaan dan 3,40 persen di perdesaan) dan seterusnya.

Tabel 3.26. Perbandingan dan Capaian Kinerja Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sangat Miskin Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase menurunnya rumah tangga sangat miskin (tingkat kemiskinan)	8,34	7,9	8,28	8,42	8,39	5	9,12	54,82		5

Sumber : Dinas Sosnakertrans, UMKM Provinsi Jambi & Hasil pengolahan data 2015

Capaian kinerja penurunan rumah tangga sangat miskin merupakan upaya dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan bagi masyarakat kurang mampu. Dalam tahun 2015, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 11 program, yakni :

1. Program pengembangan perumahan.
2. Program pengembangan kawasan pemukiman.
3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
4. Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
5. Program pembinaan anak terlantar.
6. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.
7. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo.
8. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (narapidana, PSK, narkoba, dll).
9. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
10. Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial.
11. Program peningkatan kesempatan kerja.

Hambatan/kendala :

Permasalahan yang ditemui dalam capaian kinerja penurunan rumah tangga sangat miskin di Provinsi Jambi ini antara lain :

1. Secara fungsional, keterbatasan kewenangan dan ketersediaan anggaran yang relatif terbatas merupakan masalah yang paling mendasar dalam upaya penurunan RTSM.
2. Bertambahnya warga pendatang yang akhirnya menetap dan menjadi penduduk wilayah Provinsi Jambi dengan tingkat perekonomian yang tergolong masuk dalam kategori RTSM.

Langkah antisipatif :

Langkah antisipatif dalam mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai target yang telah ditentukan yakni :

Perlu adanya sinergisitas program dan dukungan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak dan masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup; dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah; serta dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli yang dilihat dari pengeluaran perkapita. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk mengukur kualitas sumber daya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurannya mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk (pendapatan penduduk). Tren dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan kesejahteraan yang ditunjukkan dengan peningkatan IPM Provinsi Jambi.

Tabel 3.27. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi dan Kab/Kota

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jambi	**65.39**	**66.14**	**66.94**	**67.76**	**68.24**
Kerinci	65.16	65.85	66.71	67.49	67.96
Merangin	63.85	64.4	65.31	65.82	66.21
Sarolangun	64.64	65.2	66.16	67.13	67.67
Batanghari	65.67	66.32	66.97	67.24	67.68
Muaro Jambi	62.84	63.39	64.17	65.14	65.71
Tanjung Jabung Timur	57.21	57.77	58.63	59.41	59.88
Tanjung Jabung Barat	61.49	61.98	62.86	63.54	64.04
Tebo	63.62	64.45	65.23	65.91	66.63
Bungo	66.28	66.7	67.2	67.54	67.93
Kota Jambi	72.23	72.96	73.78	74.21	74.86
Kota Sungai Penuh	69.91	70.55	71.23	72.09	72.48

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2015

Tahun 2014 tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi relatif lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan Provinsi Jambi 7,92 persen lebih rendah dari nasional yang sebesar 11,25 persen. Untuk wilayah Sumatera, Provinsi Jambi menempati urutan ke-empat terendah setelah Bangka Belitung, kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Pada tahun 2014 garis kemiskinan Provinsi Jambi sebesar Rp.318.262,-. Garis Kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dari daerah pedesaan yaitu sebesar Rp.379.183,- dan untuk daerah pedesaan hanya sebesar Rp.291.534,-. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2014 sebesar 1,124 persen turun dibanding tahun 2013 yang sebesar 1,118. Ini berarti penduduk miskin semakin dalam atau jauh dari garis kemiskinan.

Grafik 3.11. Capaian IPM tahun 2014 Kabupaten/Kota

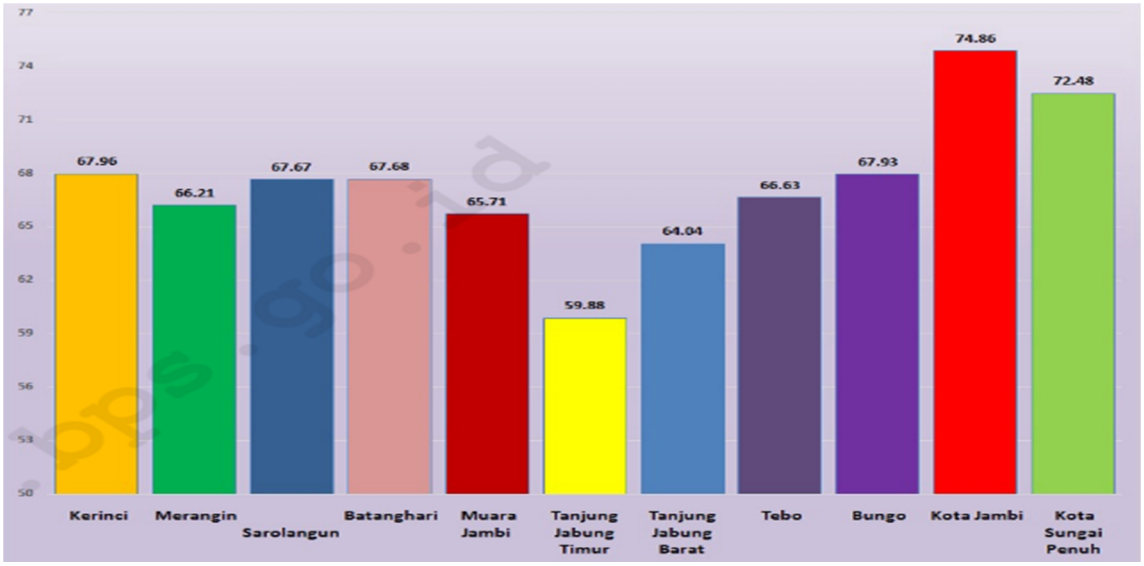

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2015

Jika dilihat dari capaian IPM Kab/Kota pada tahun 2014, Kota Jambi mencapai angka IPM tertinggi yakni sebesar 74,86 disusul oleh Kota Sungai Penuh dengan angka IPM 72,48. Menyusul dibawahnya dengan capaian IPM 67,96 diperoleh Kabupaten Kerinci. Capaian IPM terendah berada

pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan skor IPM 59,88 disusul oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi dengan masing-masing skor 64,04 dan 65,71.

Tabel 3.28. Perbandingan dan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi	65,39	66,14	66,94	67,76	68,24	70	68,24	97,48	68,24	70

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2015

Capaian keberhasilan peningkatan indeks pembangunan manusia di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan perlindungan kesejahteraan sosial. Dalam tahun 2015, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 13 program, yakni :

1. Program wajib belajar 12 tahun
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
6. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
7. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.
8. Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
9. Program pembinaan anak terlantar.
10. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo.
11. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
12. Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial.
13. Program peningkatan kesempatan kerja.

<u>Hambatan/kendala</u> :

Permasalahan yang ditemui dalam capaian kinerja indeks pembangunan manusia Provinsi Jambi lebih ditekankan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial Provinsi Jambi antara lain :

1. Fluktuasi angka putus sekolah sebagaimana data Provinsi Jambi di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan perlunya perhatian untuk menjawab persoalan putus sekolah. Sebagian persoalan ini perlu dijawab dengan upaya sinergis lintas bidang dan juga lintas aktor, seperti menjawab persoalan pekerja anak ataupun putus sekolah karena kejadian kehamilan yang tidak dikehendaki.
2. Meningkatnya usia harapan hidup memunculkan isu baru terkait dengan persoalan kependudukan, seperti isu kesejahteraan bagi lansia, termasuk layanan kesehatan dan jaminan sosial bagi lansia.
3. Penerapan pola perilaku hidup bersih dan sehat untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman risiko penyakit masih belum sepenuhnya baik. Termasuk didalamnya adalah pola umum gizi seimbang (PUGS), kesehatan lingkungan (sanitasi dan akses air bersih), pencegahan penyakit menular, aktifitas fisik, dan penggunaan obat.
4. Walaupun rasio sarana dan prasarana kesehatan sudah melampaui standar nasional, data dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi (pada rasio dokter dan dokter spesialis per satuan penduduk) dan penurunan rasio sarana dan prasarana kesehatan (puskesmas dan rumah sakit). Hal ini perlu menjadi perhatian upaya pembangunan kesehatan, termasuk yang diselenggarakan oleh pihak swasta, untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat.

5. Implementasi BPJS untuk jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara per 1 Januari 2014 menimbulkan beberapa tantangan, termasuk di Provinsi Jambi. Berbagai tantangan ini mencakup proses integrasi antara berbagai skema jaminan kesehatan yang sudah ada sebelumnya, sosialisasi kebijakan yang belum optimal ke segenap lapisan masyarakat, hingga sistem pendukung untuk pelaksanaan kebijakan yang belum sepenuhnya tersedia dan berjalan.
6. Secara fungsional, keterbatasan kewenangan dan ketersediaan anggaran yang relatif terbatas merupakan masalah yang paling mendasar dalam upaya penurunan RTSM.
7. Bertambahnya warga pendatang yang akhirnya menetap dan menjadi penduduk wilayah Provinsi Jambi dengan tingkat perekonomian yang tergolong masuk dalam kategori RTSM.

Langkah antisipatif :

Langkah antisipatif dalam mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai target yang telah ditentukan antara lain :

1. Kajian dan pengembangan strategi yang efektif untuk menjawab akar persoalan putus sekolah. Peran pemerintah bukanlah faktor tunggal namun menentukan karena menjadi katalisator dan fasilitator atas peran berbagai pihak baik unsur pemerintah maupun swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Hal ini bisa dilakukan antara lain melalui pemberdayaan masyarakat melalui posyandu, desa/kelurahan siaga, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan.
3. Dalam konteks masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki ikatan kekerabatan dan jejaring sosial yang kuat, pemenuhan hak lansia akan kesejahteraan dan jaminan sosial bisa dilakukan dengan mensinergikan program dan layanan yang disediakan pemerintah dengan upaya sejenis yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator diperlukan untuk memastikan adanya jaminan yang memadai bagi lansia atas hak-hak dasarnya untuk hidup secara layak dan bermartabat. Selain upaya perlindungan pemenuhan kebutuhan khusus, juga mencakup upaya untuk pengakuan dan membuka ruang partisipasi lansia dalam pembangunan. Upaya ini menjadipenting karena isu tentang pengabaian kapasitas lansia seringkali justrumemperkuat kerentanan lansia itu sendiri. Faktanya, banyak potensi dan kapasitas lansia yang bisa dikuatkan dan dikembangkan sebagai salah satu pilarpembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Upaya-upaya untuk penerapan universal coverage melalui program BPJS perlu disinergikan dengan pendayagunaan dan pemberdayaan baik aparatur pemerintah di wilayah Provinsi Jambi, organisasi masyarakat yang terkait maupun juga peran media massa untuk sosialisasi kebijakan yang efektif. Begitu juga integrasinya dengan sistem dan penyediaan layanan publik sehingga kualitas layanan kesehatan yang universal bisa didapatkan masyarakat secara baik dan memadai.
5. Perlu adanya sinergisitas program dan dukungan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.

7. Sasaran Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi

a. Investasi PMA dan Nilai Investasi PMDN

Pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menumbuhkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif sehingga terciptanya kemitraan dunia usaha, kemitraan antar usaha dalam rangka pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu telah melaksanakan beberapa upaya antara lain :

a. Meningkatkan Kerjasama strategis (kemitraan) untuk pengembangan investasi dan pemutakhiran data informasi investasi daerah,
b. Memfasilitasi serta Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal,
c. Meningkatkan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal,

d. Melaksanakan Pameran dan Temu usaha di dalam negeri; Kegiatan Pameran dan Temu usaha di Luar Negeri,
e. Profile Peluang Investasi di Provinsi Jambi.

Peningkatan Kerjasama strategis (kemitraan) antara pengusaha besar dengan UMKM sebagai upaya pengembangan investasi di provinsi jambi tahun 2015 dalam rangka untuk memfasilitasi pertemuan melalui kegiatan temu usaha kemitraan antara usaha kecil menengah dan koperasi dengan usaha besar dalam provinsi Jambi. Untuk menginventarisir mitra usaha potensial di provinsi jambi, dalam rangka menarik investor potensial ke daerah serta menciptakan sutau pertemuan yang dapat mendorong dan mendukung iklim investasi sehingga terbentuknya kemitraan usaha baru antara penanaman modal dengan pemerintah. Selain itu, pelaksanaan Jambi Bisnis Forum (JBF) adalah sebagai branding untuk penyebaran citra positif daerah khususnya provinsi jambi dalam rangka menarik lebih banyak investor potensial ke daerah serta menciptakan suatu pertemuan yang dapat mendorong dan mendukung iklim investasi.

Sejak tahun 2012, investasi di Jambi terus menunjukkan peningkatan yang disebabkan oleh tingginya pembangunan fisik baik oleh pemerintah ataupun swasta. Kondisi ini juga didukung oleh peningkatan kredit investasi yang mencapai 49,20%.

Diagram 3.3. Perkembangan Investasi PMA & PMDN

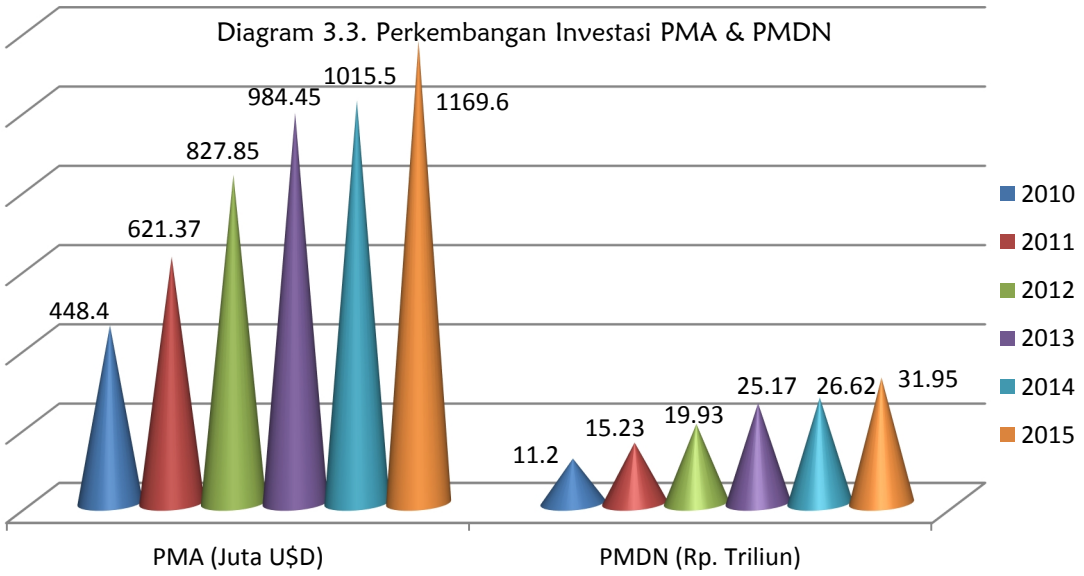

Jumlah investasi Jambi yang dicatat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 31,95 Triliun. Investasi tersebut meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun lalu yang realisasinya sebesar Rp 26,62 Triliun. Sejalan dengan hal tersebut, investasi asing melalui penanaman modal asing (PMA) juga meningkat 9,84% dari tahun lalu menjadi USD 1,169 Juta. Investasi Jambi sebagian besar dialokasikan pada sektor pertanian.

Berbagai upaya yang telah dilakukan telah meningkatkan realisasi investasi PMDN sampai dengan akhir Desember 2015 sebesar Rp. 31,95 Triliun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rahun 2014 yakni sebesar Rp. 26,62 Trilun, sedangkan realisasi untuk investasi PMA pada tahun 2014 sebesar USD1,061 juga mengalami peningkatan menjadi USD1,169 pada tahun 2015.

Tabel 3.29. Perbandingan dan Capaian Kinerja Nilai Investasi PMA dan Nilai Investasi PMDN Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Investasi PMA	USD448,4	USD621,3	USD827,8	USD984,4	USD1015	USD1.161	USD1.169	100,71	USD1.166	USD1.161
Investasi PMDN	Rp 11,2 Trilyun	15,23 Trilyun	19,93 Trilyun	25,17 Trilyun	26,62 Trilyun	18,26 Trilyun	31,95 Trilyun	174,97	31,95 Trilyun	18,36 Trilyun

Sumber : BPMD & PPT Provinsi Jambi, 2015

Dari data di atas capaian kinerja penanaman dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk tahun 2015 termasuk dalam kategori sangat baik dan untuk rata-rata keberhasilan capaiannya adalah cukup baik yakni sebesar 137,84%.

Faktor yang mempengaruhi peningkatan penanaman modal tersebut, antara lain :

a. Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang sangat strategis dan memiliki potensi sumberdaya alam relatif besar. Strategis karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sejalan dengan dimulainya pasar bebas Asean (AFTA) tahun 2015 dan Asean – China (ACFTA) pada tahun 2020.

b. Letak geografis Provinsi Jambi yang strategis, karena dekat pada titik pertumbuhan segitiga kawasan pembangunan yaitu, pertumbuhan regional IMT-GT (Indonesia, Malaysia dan Thailand-Growth Triangle) dan IMS-GT (Indonesia, Malaysia dan Singapura – Growth Triangle). Dengan demikian posisi Provinsi Jambi mempunyai keunggulan komperatif jika dibandingkan dengan Provinsi Lain. Letak tersebut dapat membawa konsekuensi pada biaya transportasi yang lebih rendah dibandingkan dengan pelabuhan lain di Indonesia.

c. Provinsi Jambi memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dimana sampai tahun 2013 mencapai angka 3.306.198 jiwa dengan angka pertumbuhan berkisar 2,3 % per tahun. Penduduk usia kerja tahun 2012 sebesar 2.260.688 atau 69,33 persen dari total penduduk pada tahun tersebut, kemudian tahun 2013 penduduk usia kerja mencapai 2.318.485 jiwa atau 70,12 persen dari total penduduk pada tahun 2013 tersebut. Perkembangan penduduk usia kerja tersebut terlihat mempunyai kecenderungan yang tetap pesat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini memberikan indikasi bahwa Provinsi Jambi memiliki ketersediaan tenaga kerja yang cukup besar dan menunjukkan tingginya konsumen atau pangsa pasar.

d. Pertumbuhan ekonomi Jambi merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera yaitu tahun 2011 pertumbuhan ekonomi mencapai 8,51 persen, tahun 2012 sebesar 7,44 persen dan tahun 2013 naik menjadi 7,88 persen dan tahun 2014 menjadi 7,93 % tertinggi di Sumatera dan nomor 2 nasional. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut mendorong tingkat konsumsi masyarakat yang juga meningkat, keadaan ini didorong oleh meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.

e. Jambi secara nasional termasuk daerah yang paling aman dan kondusif untuk berinvestasi, keadaan ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk masuknya investor ke Jambi. Tingkat kriminalitas yang masih relatif rendah dapat menjadi faktor kekuatan dalam mendorong peningkatan penanaman modal di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

f. Ketersediaan sumber daya alam yang potensial, berupa hutan, lahan pertanian, pangan dan holtikultura, perkebunan dan peternakan, bahan tambang serta potensi pariwisata baik wisata alam maupun wisata budaya. Untuk dapat menggerakkan roda pembangunan secara mandiri dan efisien, tentunya diperlukan daya dukung sumber daya alam yang memadai. Sumber daya alam ini akan menjadi modal dasar untuk meningkatkan investasi di Provinsi Jambi.Sumberdaya alam yang berlimpah seperti minyak, gas, batubara, emas dan tersedianya lahan yang luas dapat

dieksploitasi dengan baik dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian Jambi kedepan.

Peningkatan investasi ini tentunya tidak terlepas dari peran pelayanan perizinan yang semakin baik. Meningkatnya kualitas layanan perizinan ini ditandai dengan indikator jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh BPMD-PPT Provinsi Jambi sepanjang tahun 2015 sesuai dengan SOP Perizinan tersebut.

Pada tahun 2015, BPMD-PPT dalam bidang pelayanan perizinan telah melayani 304 izin dan non yang telah diterbitkan. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian di atas dari tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 menunjukan perkembangan yang sangat pesat. Adapun capaian pelayanan Perijinan tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 3.12. Perkembangan Pelayanan Perizinan Provinsi Jambi 2010-2015

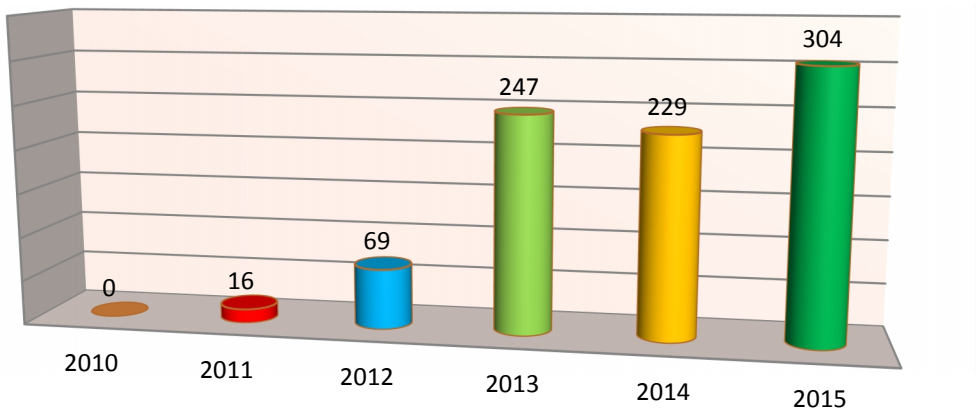

Capaian keberhasilan peningkatan nilai investasi di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan akses terhadap nilai investasi. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 4 program, yakni :

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
3. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana, dan prasarana daerah
4. Program pengembangan kemitraan

Hambatan/kendala :

Permasalahan yang ditemui dalam capaian kinerja peningkatan investasi di Provinsi Jambi ini antara lain :

1. Belum adanya kesamaan persepsi antar investor dengan aparatur daerah mengenai kebijakan serta peraturan terkait dengan PMA dan PMDN.
2. Belum tersedianya data rencana dan realisasi PMA/PMDN baik pada instansi terkait ataupun pemerintah Kabupaten/ Kota.
3. Belum adanya kesamaan persepsi antar investor dengan aparatur daerah mengenai kebijakan sertaperaturan terkait dengan PMA/PMDN.
4. Masih rendahnya kualitas produk pameran.

Langkah antisipatif :

Langkah antisipatif dalam mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai target yang telah ditentukan antara lain :

1. Melakukan inventarisasi data dan potensi/peluang investasi untuk diperbaharui dan dikembangkan.
2. Pembentukan instansi penanaman modal di Kabupaten/ Kota dan pelaksanaan RKPPMD yang tepat waktu.

3. Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan secara berkala dan memberikan teguran jika ada pelanggaran.
4. Penyatuan pandangan dalam pelaksanaan promosi dan dilakukan koordinasi terpadu dengan instansi terkait.
5. Pengintensifan sumberdaya yang ada dalam penyusunan bahan promosi.
6. Penyederhanaan prosedur perizinan perusahaan PMA/PMDN dengan membentuk pelayanan terpadu satu pintu, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota

b. Nilai Ekspor

Dalam rangka meningkatkan nilai ekspor, telah dilaksanakan program peningkatan dan pengembangan ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor non migas Provinsi Jambi baik volume maupun nilai ekspor, sehingga apabila nilai ekspor Jambi meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan dan mendatangkan devisa bagi negara.

Nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan November 2015 mengalami penurunan 17,53 persen dibanding bulan Oktober 2015, yaitu dari US$204,60 juta menjadi US$168,73 juta. Penyebab utama penurunan ekspor Provinsi Jambi bulan November 2015 adalah adanya penurunan di sektor industri dan sektor pertambangan.

Gambar 3.10. Struktur Nilai Ekspor Menurut Kelompok Komoditi di Provinsi Jambi Januari-November 2015

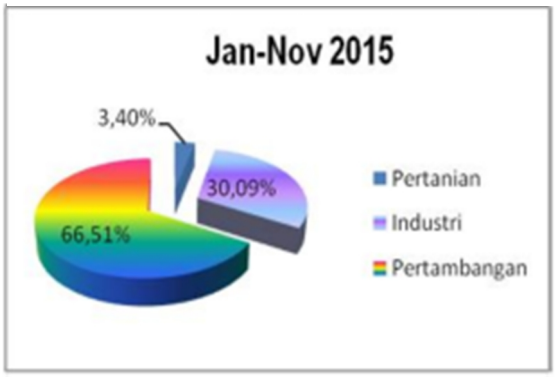

Sampai dengan bulan November 2015, ekspor Jambi mencapai US$2.463,66 juta. Namun masih lebih rendah bila dibandingkan tahun 2014. Dimana capaian ekspor Januari-November 2014 mencapai US$3.679,54 juta. Penurunan yang terjadi sebesar 33,04 persen.

Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Jambi adalah ekspor kelompok Pertambangan sebesar 66,51 persen, diikuti Kelompok Industri sebesar 30,09 persen, dan Kelompok Pertanian sebesar 3,40 persen. Bila dirinci menurut komoditi, Kelompok Pertambangan didominasi oleh Migas, kontribusinya mencapai 64,72 persen, penyumbang kontribusi terbesar dari Kelompok Industri yaitu karet dan olahan yang mencapai 13,94 persen. Sedangkan dari Kelompok Pertanian, komoditi pinang memiliki sumbangsih 3,26 persen.

Ekspor menurut Kelompok Komoditi di Provinsi Jambi

a. Pertambangan

Nilai ekspor Kelompok Pertambangan bulan November 2015 adalah US$116,35 juta yang didominasi ekspor migas sebesar US$ 116,06 juta. Bulan November 2015 tercatat ekspor Batubara sebesar US$ 289,58 ribu. Ekspor Pertambangan periode Januari–November 2015 dibandingkan dengan periode yang sama setahun yang lalu, mengalami penurunan sebesar 41,74 persen. Dikarenakan menurunnya ekspor pertambangan Jambi baik dalam bentuk migas maupun batubara.

Grafik 3.13. Distribusi Persentase Ekspor Provinsi Jambi Menurut Komoditi Januari-November 2015

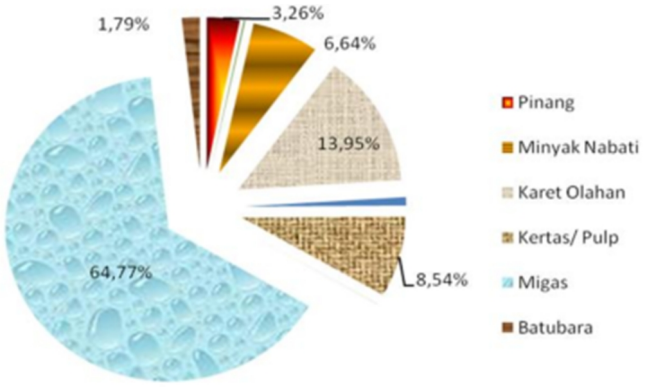

b. Pertanian

Nilai ekspor Kelompok Pertanian bulan November 2015 sebesar US$ 6,33 juta, naik 7,07 persen dibanding bulan sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan kenaikan nilai ekspor pinang serta komoditi Teh, Kopi dan rempah-rempah. Di bulan November ada ekspor Ikan dan Udang dari Provinsi Jambi sebesar US$ 182 sedangkan di bulan Oktober tidak ada ekspor komoditi tersebut. Volume ekspor kelompok pertanian pada November 2015 sebesar 5,28 ribu ton atau naik sebesar 22,90 persen dari bulan Oktober 2015 yang mencapai 4,29 ribu ton.

Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, dalam periode yang sama (Januari-November) nilai ekspor Kelompok Pertanian tahun 2015 meningkat sebesar 46,68 persen. Peningkatan ini karena penambahan nilai ekspor Pinang.

c. Industri

Kelompok Industri mengalami penurunan sebesar 35,01 persen, dari US$ 70,86 juta menjadi US$46,05 juta pada November 2015. Terjadi penurunan persentase di tiga komoditi yaitu minyak nabati, kayu lapis dan olahannya dan karet. Kenaikan terjadi pada komoditi arang. Ekspor Industri Jambi secara kumulatif selama tahun 2015 (Januari-November), bila dibandingkan dengan tahun 2014 tidak banyak mengalami perubahan. Penurunan terjadi sebesar 8,46 persen. Penurunan ini akibat menurunnya ekspor karet dan olahannya.

d. Pertambangan

Nilai ekspor Kelompok Pertambangan bulan November 2015 adalah US$116,35 juta yang didominasi ekspor migas sebesar US$ 116,06 juta. Bulan November 2015 tercatat ekspor Batubara sebesar US$ 289,58 ribu. Ekspor Pertambangan periode Januari–November 2015 dibandingkan dengan periode yang sama setahun yang lalu, mengalami penurunan sebesar 41,74 persen. Dikarenakan menurunnya ekspor pertambangan Jambi baik dalam bentuk migas maupun batubara.

Jika dilihat dari Ekspor menurut negara tujuan, secara umum nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada Bulan November 2015 ke beberapa negara utama mengalami penurunan. Pergerakan perubahan penurunan ekspor dapat diamati ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Perancis, Inggris, Cina, India, Australia dan Korea Selatan. Sedangkan ekspor Jambi ke negara yang mengalami kenaikan seperti ke Thailand, Jerman, Jepang dan Amerika Serikat.

Secara kumulatif nilai ekspor selama tahun 2015, hampir semua transaksi ekspor ke berbagai negara mengalami penurunan. Hanya ekspor ke Malaysia, Inggris, Cina dan Taiwan yang mengalami kenaikan. Komoditi utama yang diekspor pada bulan November 2015, yaitu Migas, Karet dan Olahannya, Pulp dan Kertas, Minyak Nabati, Batubara dan Pinang. Ekspor terbesar adalah Migas, komoditi ini diekspor antara lain ke Singapura, Thailand dan Australia. Komoditi karet dan olahan terbanyak diekspor ke Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. Komoditi Pulp dan kertas antara lain ke Cina, Taiwan dan India. Sedangkan untuk komoditi minyak nabati, batubara dan pinang diekspor ke Malaysia, Thailand, India dan Singapura.

Gambar 3.11. Pelabuhan Talang Duku Jambi

Jumlah ekspor ke enam negara mencapai 92,78 persen dari total ekspor. Ekspor terbesar adalah ke negara Singapura dan Thailand dengan komoditi Migas. Selanjutnya adalah ekspor ke Jepang dan Amerika dengan komoditi karet olahan. Sedang ekspor ke Cina komoditi terbesar yang diekspor adalah Pulp dan Kertas.

Kegiatan ekspor melalui Pelabuhan di Jambi dan Pelabuhan di luar Jambi pada bulan November 2015 melalui Pelabuhan Jambi sebesar US$57,44 juta dengan rincian komoditi asal jambi US$53,35 juta dan

komoditi yang berasal dari luar jambi sebesar US$4,08 juta. Sedangkan ekspor Provinsi Jambi yang melewati pelabuhan di luar Jambi mencapai US$ 115,38 juta.

Diagram 3.4. Perkembangan nilai Ekspor Provinsi Jambi 2010-2015

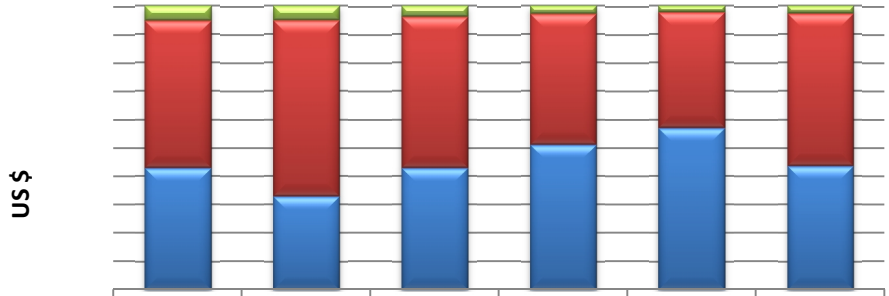

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
% Capaian	120.9	188.25	124.36	89.81	71.25	123.18
Realisasi	1209	2259	1741	1437	1282.43	2463.66
Target	1000	1200	1400	1600	1800	2000

Sumber : Disperindag Provinsi Jambi 2015

Neraca Perdagangan Provinsi Jambi

Keseimbangan neraca perdagangan dalam transaksi ekspor impor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, bila neraca perdagangan surplus akan menguntungkan Provinsi Jambi dan sebaliknya bila neraca perdagangan defisit maka merugikan perekonomian Jambi dan hal tersebut merupakan indikator ketergantungan yang tinggi pada negara lain.

Selama 5 tahun terakhir neraca perdagangan luar negeri Provinsi Jambi menunjukkan ketidakstabilan. Meskipun neraca perdagangan terlihat surplus namun kenyataannya tiga tahun terakhir angkanya menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Naik turunnya surplus neraca perdagangan ini sangat dipengaruhi antara lain :

1. Minimnya diversifikasi ekspor dan deficit migas yang terus meninggi
2. Belum adanya Negara alternative yang dapat dijadikan sasaran ekspor dan ebutuhan.
3. Turunnya harga komoditas utama ekspor.
4. Meningkatnya harga hasil minyak dunia dan stabilitas perekonomian Indonesia secara tidak langsung.

Perkembangan Neraca Perdagangan Daerah Jambi dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 menunjukan perkembangan yang sangat signifikan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Adapun capaian nilai ekspor non migas selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik 3.14. Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015

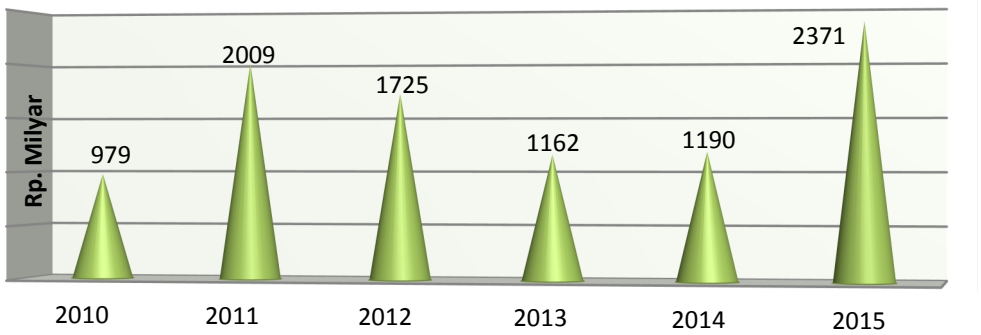

Pertumbuhan neraca perdagangan Provinsi Jambi 4 tahun terakhir (tahun 2012-2015) cenderung negatif, namun pada tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sebagaimana yang terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.15. Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015

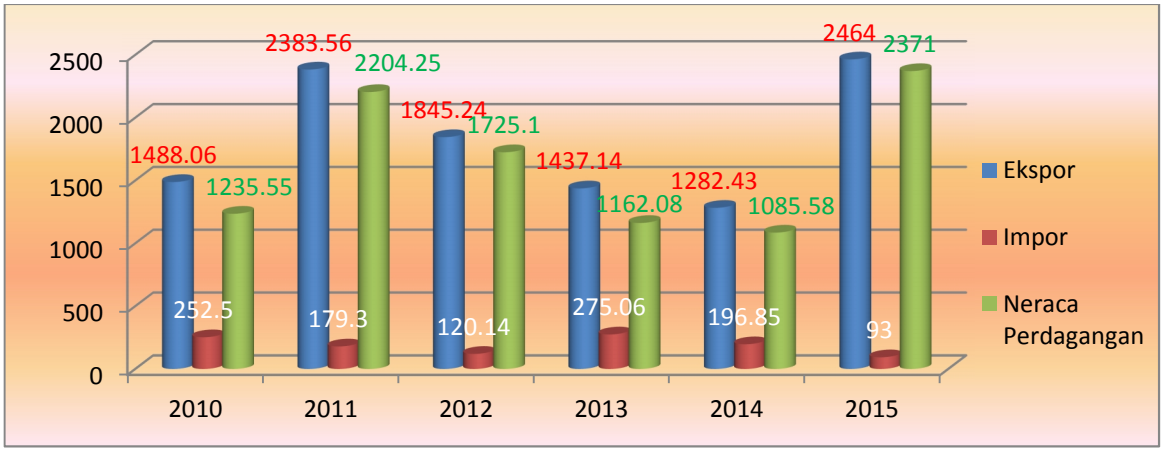

Berdasarkan realisasi yang telah diperlihatkan oleh peningkatan nilai ekspor, maka dapat dievaluasi bahwa peningkatan sebagaimana tersebut di atas disebabkan oleh bergairahnya sektor ekonomi khususnya di bidang pertambangan dan perindustrian serta terciptanya suasana kondusif yang tercipta di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi daerah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai ekpor.

Tabel 3.30. Perbandingan dan Capaian Kinerja Nilai Ekspor Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Peningkatan Nilai Ekspor	USD 1.209.672	USD 2.383.555	USD 1.659.055	USD 1.354.135	USD 1.282.430	USD 2.000.000	USD 2.463.660	123,18	USD 2.463.660	USD 2.000.000

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2015 & Data BPS 2015

Memperhatikan tabel di atas terlihat bahwa nilai ekspor non migas Provinsi Jambi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup besar. Adapun faktor penyebabnya antara lain :

1. Meningkatnya permintaan di beberapa Negara mitra dagang Indonesia diakibatkan oleh stabilitas harga beberapa komoditas utama ekspor Indonesa.
2. Kebijakan kemudahan dalam bea keluar produk ekspor.
3. Pesatnya peningkatan perekonomian di wilayah eropa yang menjadi pasar ekspor utama Indonesia.
4. Daya saing produk Indonesia semakin berkualitas dan mampu bersaing dengan produk luar serta kemudahan dalam retribusi fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor Provinsi Jambi khususnya dan Indonesia umumnya, maka upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan ekspor antara lain :

1. Meningkatkan rangkaian kebijakan dan program yang difokuskan pada peningkatan kualitas SDM eksportir serta kualitas produk ekspor Indonesia.
2. Perlunya diversifikasi Negara mitra dagang serta produk ekspor / komoditas.
3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing nasional agar Indonesia dapat menjaga nilai ekspor dan menghasilkan produk berkualitas ditingkat internasional.
4. Memfasilitasi eksportir dan UKM dalam melakukan pengembangan dan adaptasi produk guna meningkatkan kualitas dari produk ekspor utama daan produk potensial.
5. Meningkatkan industri hilir dengan membangun pabrik pengola sehingga Provinsi Jambi khususnya dan Indonesia pada umumnya dapat mulai melakukan ekspor untuk produk olahan bahan mineral. Upaya hilir ini dapat melahirkan antara lain :

a. Membuka lapangan pekerjaan.
b. Keuntungan inovasi pada produk bernilai tambah tinggi bagi Negara kita.
c. Melakukan multiplayer effect beberapa kemandirian dalam sektor ekspor nasional.
d. Peningkatan penerimaan Negara.

6. Memberikan penyuluhan kepada pengusaha kecil dan menengah tentang tata cara melakukan ekspor. Banyak produk masyarakat yang diminati pembeli mancanegara, namun karena banyak pengusaha kecil dan menengah tidak mengetahui bagaimana cara mengekspornya. Oleh karena itu kedepan perlu pembekalan yang lebih intensif terkait bagaimana cara mengekspor produk lokal ke luar negeri.

Capaian kinerja peningkatan nilai ekspor ini merupakan upaya yang dilakukan melalui program :

1. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
3. Program perlindungan konsumen dan pengaman perdagangan
4. Program pengembangan standarisasi nasional
5. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
6. Program pengembangan industri kecil dan menengah

c. Persentase Koperasi Berkualitas/berprestasi

Melalui Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi yang bertujuan meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif. Secara organisasi usaha, diharapkan memiliki daya saing ekonomi sebanding dengan badan usaha lainnya. Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktek berkoperasi yang baik (*best practices*) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas.

Untuk mendukung program tersebut, maka telah dilaksanakan beberapa langkah strategis diantaranya :

1. Mengembangkan jaringan kemitraan usaha koperasi,
2. Pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi,
3. Pembinaan dan pengembangan kader koperasi,
4. Pembinaan dan pengembangan usaha koperasi,
5. Peningkatan Kualitas Produk Usaha Anggota Koperasi.

Koperasi Berkualitas merupakan koperasi yang dikelola secara profesional, mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat. Terdapat tiga cara untuk mewujudkan koperasi Berkualitas. Pertama, melakukan klasifikasi semua koperasi. Diikuti cara kedua, masuk dalam klasemen yang dilakukan dari lembaga independen dari luar. Lalu ketiga, mampu mendorong koperasi-koperasi yang berada pada jaringannya untuk menjadi koperasi berprestasi.

Angka pertumbuhan koperasi yang ditargetkan selama tahun 2015 sebesar 1%, pada akhir tahun 2015 pertumbuhan koperasi mencapai sebesar 0,72 %. Data ini merupakan perkembangan koperasi dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, dimana jumlah koperasi yang ada di wilayah Provinsi Jambi sebanyak 3.659 unit pada akhir tahun 2014 dan meningkat menjadi 3.685 unit pada tahun 2015. Sehingga dengan demikian capaian kinerja yang diraih untuk persentase pertumbuhan ini sebesar 72 %. Peningkatan jumlah koperasi pada tahun 2015 dibanding tahun sebelumnya tidak diikuti dengan peningkatan koperasi aktif.

Meningkatnya kualitas koperasi dapat dilihat dari banyaknya koperasi yang memiliki prestasi di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Koperasi Berprestasi merupakan koperasi yang mempunyai pengelolaan/manajemen yang sehat dan baik yang diukur dari tingkat pertumbuhan modal, asset, SHU dan volume usaha. Kriteria nya antara lain ;

1. Koperasi tersebut memiliki klasifikasi predikat kelas A atau minimal B,
2. Laporan keuangan koperasi diaudit secara internal dan eksternal selama 2 tahun terakhir berturut-turut,
3. Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan minimal selama dua tahun terakhir berturut-turut tepat waktu (selambatnya-lambatnya tiga bulan setelah tutup tahun buku),
4. Memiliki pengurus dan pengawas yang berasal dari anggota,
5. Memiliki dan mengalokasikan biaya untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan setiap tahunnya,
6. Tidak ada penyelewengan yang merugikan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi,
7. Memiliki uraian tugas dan pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam Surat Keputusan pengurus.

Pada tahun 2015, jumlah koperasi yang ditargetkan sebagai Koperasi Berprestasi yaitu sebanyak 44 Koperasi. Berdasarkan usulan yang diterima dari Kab/Kota maka jumlah koperasi berprestasi yang masuk sebanyak 51 Koperasi. Masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi mengirimkan 4 (empat) Koperasi Berprestasi namun ada juga Kabupaten yang mengirimkan lebih dari 4 (empat) Koperasi yang akan berkompetisi di tingkat Provinsi. Dari ke 51 Kategori Koperasi Berprestasi yang masuk diseleksi hingga di tingkat Provinsi untuk kemudian diusulkankan ke tingkat Nasional. Pada tahun 2015 terdapat 3 (tiga) Koperasi di Provinsi Jambi yang mendapat penghargaan koperasi berprestasi di tingkat nasional.

Selain prestasi koperasi, meningkatnya koperasi berkualitas ditandai dengan meningkatnya koperasi yang melakukan RAT. Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan salah satu Indikator penting dalam mengamati manajemen koperasi dalam menjalankan operasional kegiatannya selama kurun waktu tertentu (selama 1 tahun buku). Selain itu RAT merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan usaha koperasi oleh pengurus selama kurun waktu tertentu.

Target yang ditetapkan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2015 sebanyak 1.011 unit koperasi. Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2015 terealisasi sebanyak 674 unit koperasi, sehingga dengan demikian dari target yang ditetapkan dibanding pencapaian RAT selama tahun 2015 yaitu sebesar 66,67%. Koperasi yang wajib melaksanakan RAT adalah koperasi aktif. Jumlah koperasi aktif tahun 2015 sebanyak 2.288 unit, target yang ditetapkan masih berada dibawah kewajiban Target optimal sesuai dengan Jumlah Koperasi yang aktif adalah 41,19%.

Koperasi Aktif adalah koperasi yang kelembagaannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dan usahanya berjalan dan ada transaksi usaha. Target jumlah koperasi aktif yang ditetapkan untuk Tahun 2015 sebesar 78% sementara realisasi yang tercapai sebesar 62,10%. Jumlah ini merupakan perbandingan antara jumlah koperasi yang ada di Provinsi Jambi per 31 Desember 2015 sebanyak 3.685 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 2.288 unit. Sedangkan jumlah koperasi yang tidak aktif sebanyak 1.397 unit. Pendataan koperasi by name by address mencatat jumlah koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. Berdasarkan data koperasi tahun 2014 sebanyak 3.659 unit, telah dilakukan up dating data base koperasi pada tahun 2015 dengan realisasi direktori koperasi sebanyak 1.349 koperasi, atau 36,86%.

Perbandingan kinerja persentase koperasi berkualitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.31. Perbandingan dan Capaian Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase koperasi berkualitas (koperasi RAT)	89,21 (902 unit)	97,23 (983 unit)	104,11 (1.053 unit)	113,35 (1.146 unit)	92,28 (933 unit)	98,91 (1000 unit)	66,67 (674 unit)	67,40	100 (1.011 unit)

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2016

Target persentase peningkatan RAT tahun 2015 menjadi 98,91% (1000 unit) tidak terealisasi. Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2015 sebanyak 674 unit (66,67%), sedangkan tahun 2014 sebanyak 933 unit. Sehingga di tahun 2015 terjadi penurunan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dibanding tahun 2014. Dengan kata lain terjadi penurunan persentase pelaksanaan RAT sebesar 3,33%. Penurunan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT ini disebabkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut ;

1. SDM Pembina Koperasi di Kab/Kota terbatas, hal ini tidak sebanding dengan jumlah koperasi yang dibina.
2. SDM pengurus koperasi relatif rendah sehingga kinerja koperasi menurun yang ada akhirnya pelaksanaan RAT pun terhambat.
3. Partisipasi dan motivasi anggota rendah, sehingga perkembangan koperasi lambat.

Capaian peningkatan koperasi berkualitas di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan koperasi berkualitas. Dalam tahun 2015, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 5 program, yakni :

1. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
2. Program pengembangan kemitraan
3. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
4. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
5. Program peningkatan kegiatan usaha mikro kecil menengah

d. Peningkatan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Melalui Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah yang bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan profesionalisme SDM guna meningkatkan daya saing UMKM, dilakukan berbagai upaya strategis diantaranya :

a. Memfasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kemitraan di Provinsi Jambi,
b. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi KUKM,
c. Melatih pengurus/pengelola Koperasi/KUD,
d. Pendataan dan Pemuktahiran Data UMKM se Provinsi Jambi,
e. Pelatihan Manajemen Usaha Kecil.

Dalam rangka memperkuat dan mempermudah dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan setiap peluang dan potensi sumber daya lokal yang ada secara optimal sesuai tuntutan pasar, maka telah dilakukan upaya antara lain ;

a. Pemberdayaan UMKM melalui One Village One Product (OVOP)
b. Mengembangkan promosi produk UMKM tingkat nasional, regional dan luar negeri
c. Mengembangkan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan koperasi dan UMKM
e. Pemberdayaan dan Pengembangan KSP/USP Kop Penerima Dana Bergulir
f. Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Bagi PMK
g. Pemberdayaan KSP/USP Kop dan LKM berwawasan Gender penerima dana bergulir
h. Peningkatan keterampilan bagi pengelola KSP/USP-Koperasi
i. Sosialisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pemanfaatan Dana KUR dan LPDB di Provinsi Jambi

Capaian pelaksanaan program ini telah menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif dan meningkatnya kesadaran berwirausaha sebagai budaya serta mengembangkan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Jumlah UMKM mengalami peningkatan dari 81.552 Unit pada tahun 2013, meningkat menjadi 81.959 Unit pada tahun 2014, atau mengalami peningkatan 0,49%. Pada tahun 2015, perkembangan UMKM kembali mengalami peningkatan menjadi 81.979 unit. Rincian lebih detil, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.16. Perkembangan UMKM tahun 2011 dan 2015

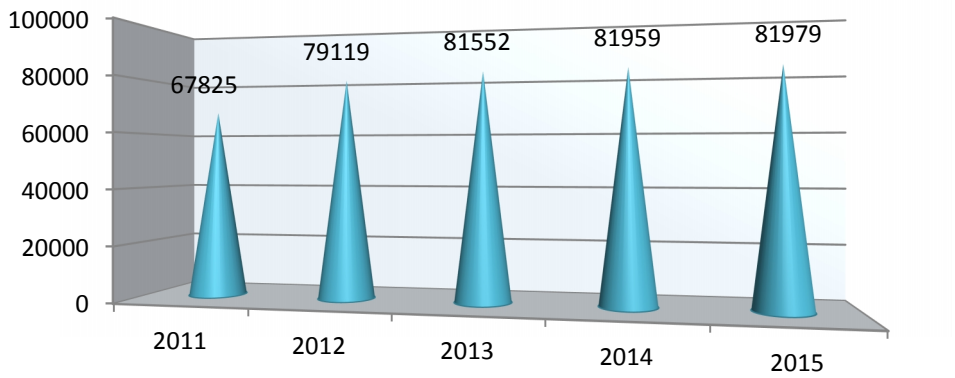

Berdasarkan diagram di di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2010 target perkembangan UMKM di Provinsi Jambi sebanyak 65.240, tahun 2011 target perkembangan UMKM di Provinsi Jambi sebanyak 65.250 UMKM dengan capaian 67.852 UMKM serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 110.538 orang, tahun 2012 target perkembangan UMKM di Provinsi Jambi sebanyak 65.300 UMKM dengan capaian 79.119 UMKM serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 119.932 orang, tahun 2013 target perkembangan UMKM di Provinsi Jambi sebanyak 65.350 UMKM dengan capaian 81.552 UMKM serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 153.761 orang, tahun 2014 target perkembangan UMKM di Provinsi Jambi sebanyak 65.400 UMKM dengan capaian 81.959 UMKM serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 154.929 orang. Peningkatan jumlah UMKM terjadi pada tahun 2015 dengan tingkat capaian sebanyak 81.979 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 154.429 orang.

Jika dilihat dari Angka pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil (IMK) akan disajikan menurut 7 (tujuh) jenis industri, antara lain industri makanan (kode 10), industri pakaian jadi, industri kayu, barang dari kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri barang galian bukan logam, industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya dan industri furnitur.

Tabel 3.32. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (*y-on-y*)Triwulan III Tahun 2015

No	Kode KBLI	Jenis Industri	Pertumbuhan (%)	
			Triwulanan (*y-on-y*)	
			Provinsi Jambi	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	10	Industri Makanan	4,59	6,83
2	14	Industri Pakaian Jadi	12,07	4,06
3	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-8,40	-2,02
4	20	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	42,78	18,87
5	23	Industri Barang Galian Bukan Logam	6,64	0,71
6	25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	25,09	-4,85
7	31	Industri Furnitur	8,79	-0,63
IMK (Industri Mikro dan Kecil)			**6,32**	**5,79**

Pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil triwulanan (y-on-y) pada triwulan IV Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 6,32 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2014. Demikian juga angka pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil untuk nasional mengalami peningkatan sebesar 5,79 persen. Pertumbuhan produksi industry tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel di samping :

Dari ketujuh jenis industri tersebut, jenis industri yang mengalami kenaikan antara lain :

1. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia (kode 20), naik sebesar 42,78 persen, dan angka pertumbuhan nasional mengalami kenaikan sebesar 18,87 persen.
2. Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya (kode 25), naik sebesar 25,09 persen, sedangkan angka pertumbuhan nasional mengalami penurunan sebesar 4,85 persen.
3. Industri pakaian jadi (kode 14), naik sebesar 12,07 persen. Dan angka pertumbuhan nasional meningkat sebesar 4,06 persen.

4. Industri furniture (kode 31), naik sebesar 8,79 persen, sementara angka pertumbuhan nasional mengalami penurunan sebesar 0,63 persen.
5. Industri barang galian bukan logam (kode 23), naik sebesar 6,64 persen, dan angka pertumbuhan nasional naik sebesar 0,71 persen.
6. Industri makanan (kode 10), naik sebesar 4,59 persen. Dan untuk angka pertumbuhan nasional meningkat sebesar 6,83 persen.

Pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil triwulanan (q-to-q) pada triwulan IV tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4,47 persen dibandingkan dengan triwulan III tahun 2015. Sedangkan angka pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil secara nasional mengalami kenaikan sebesar 1,35 persen pada triwulan IV tahun 2015 dibandingkan dengan triwulan III tahun 2015.

Pertumbuhan produksi industri manufaktur Mikro dan Kecil per triwulannya dapat dilihat pada tabel disamping ini :

Tabel 3.33. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (*q-to-q*) Triwulan IV Tahun 2015 Provinsi Jambi

No	Kode KBLI	Jenis Industri	Pertumbuhan (%)	
			Triwulanan (*q-to-q*)	
			Provinsi Jambi	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	10	Industri Makanan	-9,68	2,49
2	14	Industri Pakaian Jadi	-5,03	1,23
3	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-10,97	3,70
4	20	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	9,89	3,95
5	23	Industri Barang Galian Bukan Logam	-0,50	-0,58
6	25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	11,51	-0,15
7	31	Industri Furnitur	-1,59	-2,21
IMK (Industri Mikro dan Kecil)			**-4,47**	**1,35**

Jenis industri yang mengalami kenaikan pada triwulan IV tahun 2015 dibandingkan dengan triwulan III tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Industri barang logam bukan mesin dan peralatannya, naik sebesar 11,51 persen, namun tidak demikian halnya dengan angka pertumbuhan nasional, secara nasional industri ini yang mengalami penurunan sebesar 0,15 persen.
2. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, naik sebesar 9,89 persen, dan angka pertumbuhan nasional naik sebesar 3,95 persen.

Adapun jenis industri yang mengalami penurunan adalah :

1. Industri kayu, barang dari kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, turun sebesar 10,97 persen, namun demikian angka pertumbuhan nasional mengalami kenaikan sebesar 3,70 persen.
2. Industri makanan, turun sebesar 9,68 persen, sedangkan angka pertumbuhan nasional naik sebesar 2,49 persen.
3. Industri pakaian jadi, turun sebesar 5,03 persen, sedangkan angka pertumbuhan nasional mengalami kenaikan sebesar 1,23 persen.
4. Industri furniture, turun sebesar 1,59 persen, begitu pula angka pertumbuhan nasional turun sebesar 2,21 persen.
5. Industri barang galian bukan logam, turun sebesar 0,50 persen. Demikian juga halnya dengan angka pertumbuhan nasional mengalami penurunan yaitu sebesar 0,58 persen.

Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode September 2014 – Maret 2015 tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Jambi mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pengeluaran perkapita sebagai proxy pendapatan, baik secara nominal maupun riil. Pengeluaran nominal per kapita penduduk meningkat dari Rp 329.181 pada September 2014 menjadi Rp 343.935 pada Maret 2015.

Perkembangan tingkat kesejahteraan juga dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non-makanan, dimana semakin tinggi persentase pengeluaran non-makanan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk non-makanan tidak mengalami

peningkatan yang berarti, hal ini berarti untuk pengeluaran makanan jauh lebih dibutuhkan selama periode 2014-2015, dibanding dengan peningkatan pada kelompok non-makanan.

Gambar 3.12. Pelatihan Kewirausahaan

Peningkatan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendekatan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi yang diwakili antara lain oleh pendapatan- tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu sendiri.

Peningkatan pendapatan juga menggambarkan bagaimana manfaat terhadap akses pembangunan telah dirasakan oleh warga negara. Namun demikian, penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan, peningkatan pendapatan juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau negara sendiri. Peran dari pihak non negara, seperti swasta dan masyarakat adalah pilar kunci yang menyumbang pada capaian peningkatan pendapatan.

Peningkatan pendapatan perkapita penduduk Provinsi Jambi telah mencapai angka Rp 7,01 juta per kapita per tahun. Realisasi ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik untuk tahun 2015. Selain itu, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini telah menyumbang sebanyak 82,47% dari target akhir RPJMD untuk meningkatkan pendapatan sebanyak Rp8.5 juta per kapita per tahun pada tahun 2015.

PDRB sebagai ukuran produktifitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Secara nominal Provinsi Jambi hanya menyumbang dibawah 1 persen terhadap pembentukan PDB. Sementara pendapatan perkapita menunjukkan bahwa pendapatan perkapita penduduk Provinsi Jambi cukup baik, hal ini dapat dilihat dari angka PDRB perkapita yang selalu meningkat bahkan sudah melebihi 26 juta pada tahun 2013. Dalam 5 tahun terakhir peningkatan angka PDRB dua kali lipat, sehingga secara otomatis PDRB perkapita pun meningkat relatif lebih tinggi. Pada tahun 2011 PDRB perkapita masyarakat Jambi hanya sebesar 19,9 juta dan pada tahun 2013 telah mencapai angka 26,0 juta, atau naik sebesar 30 persen.

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja peningkatan jumlah unit usaha mikro dan kecil dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.34. Perbandingan dan Capaian Kinerja Peningkatan Jumlah Unit Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Peningkatan pelaku unit usaha mikro dan kecil	65.240 unit (99,60 %)	67.825 unit (103,54 %)	79.119 unit (120,79 %)	81.552 unit (124,50 %)	81.959 unit (125,12%)	65.500 unit (100%)	81.979 unit (125,15 %)	125,15	81.979 unit	65.500 unit (100%)

Sumber : Disperindag Provinsi Jambi 2016

Capaian keberhasilan peningkatan koperasi berkualitas di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan terhadap peningkatan investasi. Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 8 program, yakni :

1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
2. Program penguatan permodalan UMKMK
3. Program peningkatan pemasaran hasil UMKMK
4. Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif
5. Program pengembangan standarisasi nasional
6. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
7. Program pengembangan industri kecil dan menengah
8. Program penataan struktur industri

Hambatan/kendala :

1. Belum optimalnya pembinaan Industri Kecil, Menengah dan Besar (IKMB) yang disebabkan luasnya wilayah dan banyaknya pelaku usaha industri yang harus dibina merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program ini, disamping belum optimalnya dukungan keterkaitan mitra antara usaha besar dan BUMN baik berupa penyediaan bahan baku, modal dan pasar.
2. Terbatasnya akses pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka akses pasar, produktifitas, alih teknologi dan desain.
3. Terbatasnya jumlah aparat pembina koperasi di Kabupaten/kota yang memahami tentang perkoperasian, rendahnya motivasi pengurus dan rendahnya partisipasi aktif anggota koperasi, tidak berkembangnya usaha koperasi dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan.

Langkah antisipatif :

Meningkatkan mitra usaha dengan usaha besar dan BUMN, memasyarakatkan sistem teknologi informasi dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota dalam upaya pembinaan IKM.

e. Laju Inflasi Provinsi Jambi

Inflasi Provinsi Jambi dilihat dari perhitungan inflasi dari Kota Jambi sebagai pusat ibukota serta Kabupaten Bungo yang menjadi acuan pengukuran inflasi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada Desember 2015, Kota Jambi tercatat mengalami inflasi sebesar 0,91% (mtm). Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan proyeksi 0,82%, tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,96% (mtm). Pencapaian inflasi tahun 2015 secara keseluruhan tercatat sebesar 1,37%.

Gambar 3.13. Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Kota Jambi

Inflasi Desember utamanya disebabkan kenaikan harga bahan makanan seperti cabai merah, bawang merah, ikan gabus, telur ayam ras, semangka, pepaya, ikan nila, dan cabai hijau serta kenaikan tarif angkutan udara dan tarif tenaga listrik. Kenaikan harga berbagai bahan makanan didorong kenaikan permintaan bahan makanan selama perayaan hari raya keagamaan (Maulid Nabi dan Natal) dan masa liburan. Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara didorong kenaikan permintaan jasa angkutan udara selama masa liburan akhir tahun.

Sejalan dengan kondisi di Kota Jambi, Bungo tercatat mengalami inflasi 1,43% (mtm) dengan laju inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 1,29%. Inflasi Bungo utamanya disebabkan

kenaikan harga pada kelompok bahan makanan seperti cabai merah, beras, bawang merah, telur ayam ras, jengkol, ikan nila, dan tomat buah. Selain itu, kenaikan tarif tenaga listrik, harga rokok kretek filter, dan rokok kretek turut menyumbangkan inflasi Bungo pada bulan ini.

Memperhatikan perkembangan harga pada Desember 2015 tersebut, pada periode bulan Januari 2016 mendatang, diperkirakan akan terjadi inflasi sekitar 1,25% (mtm) atau 3,56% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan Desember 2015. Inflasi diprediksi akan dipengaruhi oleh kenaikan harga beras, dampak lanjutan kenaikan tarif tenaga listrik bulan Desember 2015 bagi pelanggan pasca bayar, dan penyesuaian harga sebagian besar komoditas kelompok inti antara lain perlengkapan rumah tangga, kendaraan, produk elektronik, mie, dan rokok sejalan dengan kenaikan upah dan penyesuaian nilai tukar.

Namun demikian, penurunan harga BBM dan LPG 12 Kg per 5 Januari 2015, penurunan tarif tenaga listrik, dan kembali normalnya harga tarif angkutan udara pasca musim liburan diperkirakan dapat mengurangi tekanan inflasi Januari 2016. Ke depan, beberapa potensi risiko yang dapat menyebabkan tekanan inflasi yang lebih tinggi dari prakiraan (upside risk) antara lain risiko gangguan cuaca yang berpotensi mengganggu produksi tanaman bahan makanan, hasil tangkapan ikan dan produksi sayuran, serta risiko penyesuaian harga LPG 3 Kg.

Sementara itu, potensi penurunan tarif angkutan darat pasca penurunan harga BBM dapat berpotensi menurunkan tekanan inflasi bulan Januari 2016 (downside risk). Dalam rangka mengevaluasi pelaksananaan program pengendalian inflasi di tahun 2015 dan mulai memetakan serta memitigasi potensi-potensi risiko yang dapat memberikan tekanan inflasi pada tahun 2016 Untuk itu, pada tauhun 2016 TPID Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi berupaya meningkatkan koordinasi tim teknis dalam rangka memantau kecukupan stok dan memitigasi risiko kenaikan harga LPG 3 Kg.

TPID terus berkomitmen melakukan kegiatan pemantauan stok ke pasar-pasar utama dan distributor utama sembako untuk memantau kecukupan stok serta melakukan kegiatan pengendalian ekspektasi harga di masyarakat melalui penyampaian informasi stok, harga, dan program kerja TPID melalui media cetak dan media elektronik.

Berikut disajikan perkembangan inflasi di Provinsi Jambi tahun 2010 s.d. 2015

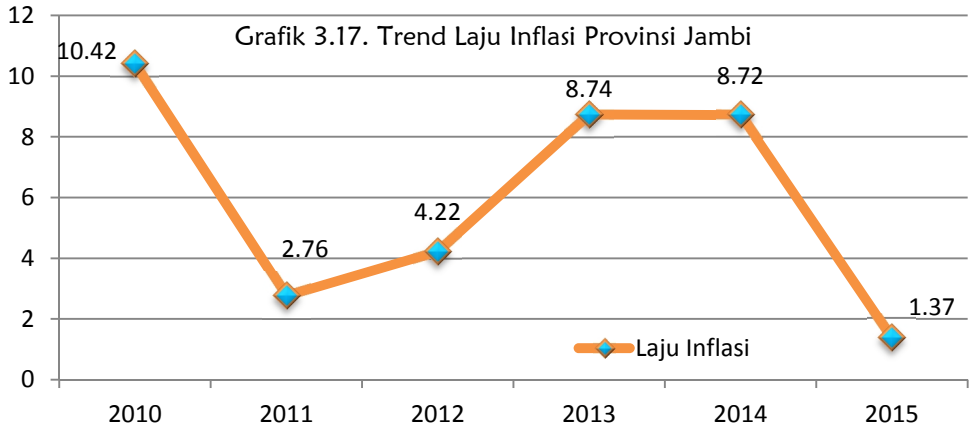

Tabel 3.35. Perbandingan dan Capaian Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Inflasi Provinsi Jambi	10,42	2,76	4,22	8,74	8,72	5,53	1,37	403,64		5,53

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2015

8. Sasaran Terselenggaranya Promosi Daerah Melalui Peningkatan Kepariwisataan Daerah

a. Peningkatan Kunjungan Wisata dan Industri Pariwisata

Kebudayaan merupakan bagian penting dalam pembangunan karena terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pertumbuhan industri pariwisata pada akhirnya nanti akan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisata.

Gambar 3.14. Obyek wisata Percandian Muaro Jambi

Dalam rangka menumbuhkan sektor industri pariwisata dan kunjungan wisata, Pemerintah Provinsi Jambi memfokuskan upaya dengan mengoptimalkan sumber destinasi wisata yang mudah dijangkau jalur transportasi, antara lain dengan cara mengoptimalkan fungsi Museum Negeri Jambi, optimalisasi fungsi Taman Budaya Jambi, meningkatkan fungsi Museum Perjuangan Rakyat Jambi, serta pengembangan nilai dan geografis sejarah.

Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya strategis diantaranya pendataan kebudayaaan area Geopark Merangin bersama dengan tim Geologi dari Kementerian ESDM menuju pengembangan menjadi Global Geopark Network (GGN) serta telah bekerjasama pula dengan UNESCO. Pada tahun 2014 lalu telah dilakukan penelitian oleh pihak UNESCO. Selain itu, telah didata kebudayaan Seberang Kota Jambi, pendataan cagar budaya bawah air, penulisan buku sejarah, dan pendataan cagar budaya di Kabupaten Batanghari dan Kerinci, International Conference on Jambi Studies serta Malam Apresiasi Budaya Melayu Jambi.

Dalam rangka meningkatkan fungsi Museum Negeri Jambi, pelaksanaan survey rencana pengadaan koleksi ke 5 kabupaten/kota untuk memperoleh data koleksi yang perlu diselamatkan dan dilestarikan di museum dan survey pengelolaan data dan dokumentasi koleksi di 3 kabupaten, pengadaan bahan dan perawatan koleksi, pembuatan miniatur koleksi untuk sarana bimbingan dan publikasi, 3 pameran khusus dalam provinsi (pameran transportasi dan alat angkut tradisional Jambi, menelisik ragam hias koleksi museum dan pertunjukan seni tradisional dan pesona jalinan benang emas, serta melaksanakan pameran bersama di luar daerah dan pencetakan buku ragam pakaian pengantin Melayu Jambi.

Tabel 3.36. Koleksi dan Kunjungan Wisatawan ke Museum Negeri Jambi (Museum Siginjei) Tahun 2012 – 2015

TAHUN	INDIKATOR							
	Koleksi	Tk/Sd	Sltp	Smu	Wis Man	Wis Nus	Lain2	Total
2012	3.100 buah	16.431	2.210	3.799	180	8.091	1.889	32.600
2013	3.371 buah	13.929	4.865	5.577	192	915	2.522	28.000
2014	3.371 buah	33.625	7.885	9.132	320	1.791	2.455	55.208
2015	3.441 buah	8.180	3.801	3.057	152	1.463	3.846	20.499

Sumber : UPTD Museum Negeri Jambi

Gambar 3.15. Proporsi Kunjungan wisatawan ke Museum Negeri Jambi (Museum Siginjei)

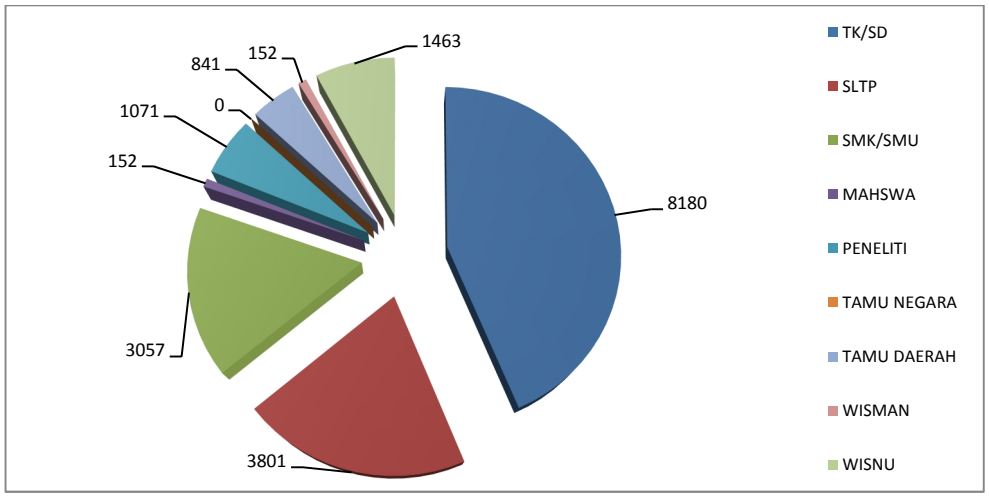

Sumber : UPTD Museum Negeri Jambi

Meningkatkan fungsi Museum Perjuangan Rakyat Jambi dengan cara menerbitkan naskah perjuangan rakyat Jambi, terselamatkannya benda bersejarah koleksi panglima pasukan Selempang Merah sebagai koleksi MPRJ, terwujudnya kerjasama antar pihak sekolah dengan MPRJ dalam berkreasi dan menanamkan cinta terhadap perjuangan bangsa, penyebaran informasi benda koleksi museum kepada masyarakat pada Festival Candi Muarojambi dengan jumlah kunjungan pada pameran sebanyak 300 orang dan pada pameran bersama di beberapa wilayah nusantara serta bertambahnya koleksi MPRJ yaitu replika keris Siginjei dan keris Singa Merjaya.

Tabel 3.37. Jumlah Koleksi dan Kunjungan Wisatawan ke Museum Perjuangan Rakyat Jambi Tahun 2012 - 2015

Tahun	INDIKATOR							
	KOLEKSI	TK/SD	SLTP	SMU	WIS MAN	WIS NUS	LAIN2	TOTAL
2012	508 buah	7.468	2.695	1.814	42	4.407	195	16.621
2013	443 buah	3.955	1.151	722	23	2563	588	9.002
2014	6 buah	5.429	687	999	-	-	11.720	19.418
2015	18 buah	1.761	799	504	-	-	15.467	18.531

Sumber : UPTD Museum Perjuangan Rakyat Jambi

Selain itu, untuk menarik minat wisatawan ke Provinsi Jambi, berbagai event juga telah dilakukan. Diantaranya adalah Malam Apresiasi Seni Melayu Jambi. Perhelatan seni ini dihadiri oleh pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, pejabat pemerintah Jambi, seniman, budayawan, kritikus seni, apresiator seni dan para presevator seni, baik dari kota Jambi maupun beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi.

Rangkaian acara yang disajikan secara tersusun, mulai pertunjukan Kompangan, selanjutnya kunjungan ke Ruang Pameran Seni Rupa Taman Budaya Jambi. Pergelaran Seni Budaya Melayu Jambi menampilkan kesenian-kesenian Tradisi Melayu Jambi, seperti Tari Inai dan Kelintang Perunggu dari Tungkal, Kesenian Tradisi Rampi-rampo dari Muaro Bungo, Orkestrasi Musik dan Lagu yang membawakan lagu ciptaan Seniman Jambi Alm. Choki Hasibuan dan Alm. Syamsuri, Tari Garapan Tari Inai dan Zapin Sarung dan diakhiri dengan pertunjukan Komposisi Musik Gendang Redap In Concert. Pergelaran Seni Budaya Melayu Jambi tersebut dimainkan oleh anak-anak Jambi kreatif dan memiliki potensi seni yang dihimpun dari beberapa sanggar, yaitu; Sanggar Seni Sekintang Dayo Jambi, SENDA Ensemble Jambi, Kuju Sako, Ar-Ra'sye, Riadhusolihin, Jambi Temponic, Gong Sitimang Jambi, Mindulahin, Yamaha Music Jambi, Santa Sisilia dan Cimata. Hal ini juga sebagai

bentuk Silaturahmi Geliat seni Muda Jambi yang keseluruhannya terhimpun di Labor Seni Taman Budaya Jambi.

Gambar 3.16. Malam Apresiasi Seni Melayu Jambi

Dari sisi Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah, telah dilakukan upaya penulisan sejarah lisan dalam bentuk dokumen yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian dan penulisan sejarah Jambi pada 3 Kabupaten Merangin, Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat, pelaksanaan FGD tentang pengusulan kawasan situs percandian Muarajambi menuju UNESCO, pelatihan cara membaca dan menulis aksara Incung, dikenalnya Candi Muarajambi oleh 150 orang peserta city tour Seminar Internasional Sriwijaya, terinformasikannya cara konservasi koleksi naskah-naskah kuno pada 50 peserta.

Gambar 3.17. Kawasan Geopark Merangin Jambi

Dengan dilaksanakannya berbagai event-event sebagaimana tersebut di atas, berdampak pada pertumbuhan industri pariwisata Provinsi Jambi. Perkembangan industri pariwisata secara bertahap menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah hotel, restoran dan rumah makan, dan biro perjalanan wisata.

Tabel 3.38. Perkembangan Kunjungan Wisata Ke Provinsi Jambi

No.	INDIKATOR	CAPAIAN PADA TAHUN				KETERANGAN
		2013	2014	2015	%	
1	2	4	5	5	6	7
I	**WISATAWAN**	(orang)	(orang)	(orang)		
a.	**Mancanegara**	9.919	10.056	10.776		Sumber data :
	Terdiri dari :					
	1. Singapura	1.475	1.475	1.578	6.98	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi
	2. Malaysia	1.740	1.752	1.805	3.03	
	3. Thailand	11	11	25	127.27	
	4. Philipina	44	44	50	13.64	
	5. Brunei	-	-	-	-	
	6. China	2.935	2.954	2.998	1.49	
	7. Taiwan	1.108	1.128	1.178	4.43	
	8. Jepang	881	881	866	1.70	
	9. India	681	681	690	1.32	
	10. U S A	627	630	730	15.87	
	11. Australia	25	28	30	7.14	2. Jumlah Hotel di Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi
	12. Eropa	249	295	670	127.12	
	13. Arab Saudi	64	64	-	-	
	14. Iran	13	13	-	-	
	15. Turki	9	9	-	-	
	16. Denmark	10	36	43	19.44	
	17. Korea	20	20	27	35.00	
	18. Jerman	27	35	86	145.71	
b.	**Nusantara**	**1.434.130**	**1.520.000**	**2.447.660**	**61.03**	
II.	**HOTEL**					
	- Bintang	**29**	**29**	**25**	**13.79**	
	- Melati	**139**	**139**		**7.91**	
III.	**Restoran / Rumah Makan**	**710**	**738**	**150**	**1.63**	
IV.	**Biro Perjalanan Wisata**	**77**	**77**	**84**	**9.09**	

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Jambi 2015

Berdasarkan grafik dan tabel diatas, kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah Jambi mengalami peningkatan di tiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 tercatat sebanyak 1.434.130 wisatawan dan meningkat sebanyak 85.870 wisatawan pada tahun 2014. Sedangkan kunjungan wisatawan nusantara mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1.520.000 wisatawan dan pada tahun 2015 bergerak naik menjadi 2.447.660 wisatawan.

Dengan meningkatnya industri pariwisata dan jumlah kunjungan wisata ini membuktikan bahwa semakin membaiknya infrastruktur jalan menuju tempat-tempat wisata yang tentunya sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara, dan secara tidak langsung pula berdampak pada tumbuhnya industri pariwisata serta mendongkrak perekonomian industri kecil di Provinsi Jambi.

Grafik 3.18. Capaian Kunjungan Wisatawan Ke Provinsi Jambi tahun 2010 s.d. 2015

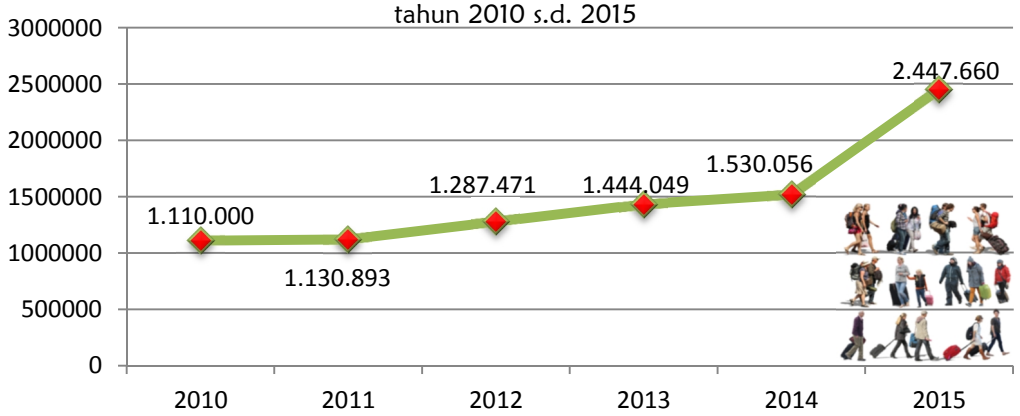

Persentase peningkatan industri pariwisata ini semata-mata tidak terlepas dari peningkatan potensi wisata yang ada, namun juga berasal dari kontribusi perusahaan yang menjalankan bisnisnya di Provinsi Jambi yang secara tidak langsung berdampak pada peningkatan hunian kamar hotel, restoran rumah makan dan lain-lain. Kondisi ini juga turut didukung oleh semakin membaiknya akses infrastruktur jalan menuju tempat-tempat wisata sehingga mempengaruhi tingkat kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara, dan secara tidak langsung pula berdampak pada tumbuhnya industri pariwisata serta mendongkrak perekonomian industri kecil di Provinsi Jambi.

Tabel 3.39. Perbandingan dan Capaian Kinerja Pertumbuhan Industri Pariwisata dan Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Pertumbuhan Industri Pariwisata	77,40	83,00	89,20	95,50	96,50	97	97.2	100,2	97.2	98
Peningkatan jumlah kunjungan wisata	1.110.000 wisatawan	1.122.350 wisatawan	1.278.240 wisatawan	1.434.130 wisatawan	1.520.000 wisatawan	1.554.319 wisatawan	2.447.660 wisatawan	157,47	2.447.660 wisatawan	1.554.319 wisatawan
Jumlah tamu menginap di hotel berbintang	23.550 orang	23.621 orang	23.755 orang	23.850 orang	24.229 orang	25.000 orang	22.379 orang	89,51 orang	22.379 orang	25.000 orang
Lama tinggal wisatawan	1,4 hari	1,4 hari	1,4 hari	1,5 hari	1,87 hari	2 hari	2,00 hari	100	2,00 hari	2 hari

Sumber : DinasKebudayaan & Pariwisata Provinsi Jambi 2016

b. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Provinsi Jambi

Perkembangan pariwisata Provinsi Jambi dianalisis dari aspek penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Penerimaan sektor pariwisata tidak terlepas dari peran pajak dan retribusi. Dengan menjumlahkan pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan berbagai retribusi seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan, retribusi tempat rekreasi dan pendapatan lain yang sah maka akan didapat penerimaan sektor pariwisata.

Secara global perkembangan industri pariwisata di Provinsi Jambi dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Grafik 3.19. Perkembangan Jumlah Restoran & Biro Perjalanan Wisata Tahun 2011-2015

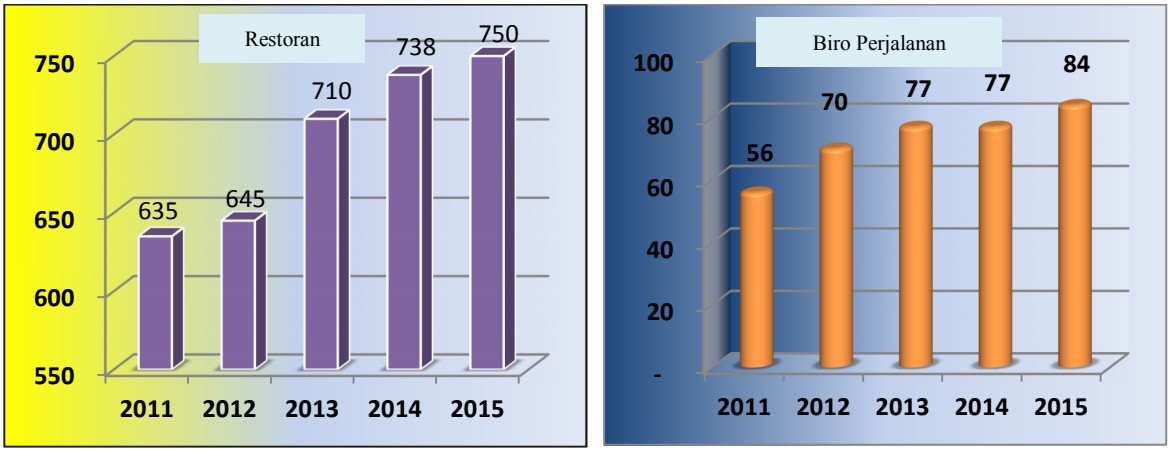

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi 2015

Diagram 3.5. Perkembangan Jumlah Hotel di Provinsi Jambi Tahun 2011-2015

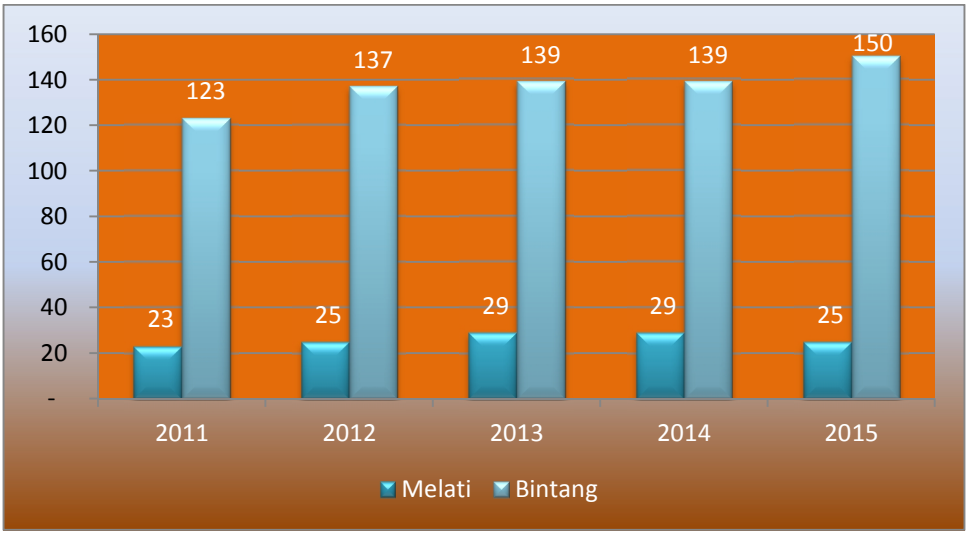

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi 2015

Dari tiga grafik di atas dapat dilihat pertumbuhan industri pariwisata yang mencakup perhotelan, restoran/rumah makan, serta biro perjalanan wisata mengalami pergerakan positif di setiap tahunnya. Hal ini dirasa cukup menggembirakan karena industri pariwisata dapat berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Gambar 3.18. Hotel berbintang di Kota Jambi

Salah satu sarana yang menunjang pariwisata di Jambi adalah usaha akomodasi hotel, yaitu hotel berbintang dan hotel non berbintang yang meliputi motel, penginapan, losmen atau pondok wisata. Hotel yang ada di Provinsi Jambi menyebar di seluruh Kabupaten dan Kota. Namun tidak semua Kabupaten mempunyai hotel berbintang. Bila diamati setiap tahunnya, usaha akomodasi di Provinsi Jambi mengalami perkembangan dalam hal jumlah maupun kualitasnya. Misalnya dengan memperhatikan kenyaman tamu maka akan sangat menentukan jumlah wisatawan dan lama menginap. Seiring dengan pertumbuhan hotel, maka jumlah kamar yang tersedia juga meningkat.

Jika dilihat dari sektor Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada Bulan November 2015 TPK hotel bintang di Provinsi Jambi sebesar 40,50 persen, lebih tinggi dibanding TPK Bulan Oktober 2015 yang mencapai angka 39,57 persen. Menurut kelasnya TPK tertinggi tercatat pada hotel bintang 3 (tiga) sebesar 45,81 persen dan terendah pada hotel bintang 4 (empat) sebesar 28,83 persen. Penurunan TPK hotel berbintang pada November 2015 dibanding November 2014 terjadi pada kelompok hotel bintang 1 (satu), hotel bintang 3 (tiga) dan hotel bintang 4 (empat).

Grafik 3.20. Perkembangan TPK Hotel Bintang Menurut Klasifikasi Hotel di Provinsi Jambi Bulan November 2014 – November 2015

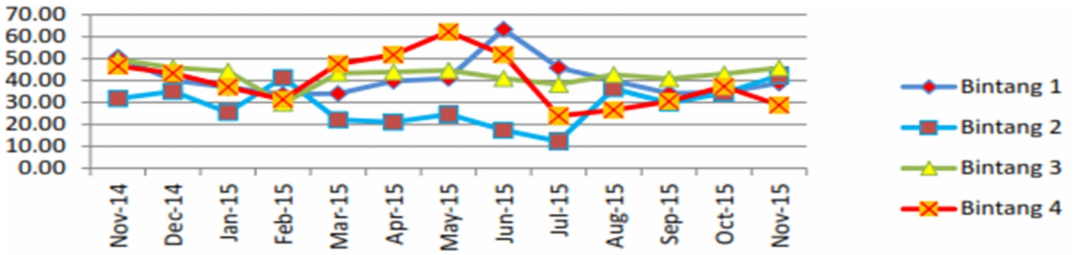

Perkembangan TPK selama setahun yang lalu, tertinggi adalah TPK hotel Bintang 1 (satu) bulan Juni 2015 sebesar 63,38 persen. Sedangkan terendah Hotel Bintang 2 (dua)pada bulan Juli 2015 sebesar 12,35 persen.

Dilihat dari jumlah tamu yang menginap di seluruh hotel bintang Bulan November 2015 sebanyak 22.379 orang. Jumlah tamu nusantara sebanyak 22.279 orang, yang terdiri dari 2.838 orang menginap di hotel bintang 1 (satu), 1.856 orang menginap di hotel bintang 2 (dua), 13.732 orang menginap di hotel bintang 3 (tiga), dan 3.953 orang menginap di hotel bintang 4 (empat). Tamu mancanegara sebanyak 100 orang yang menginap di hotel bintang 3 (tiga).

Tabel 3.40. Jumlah Tamu Mancanegara dan Tamu Nusantara pada
Hotel Bintang Menurut Klasifikasi Hotel di Provinsi Jambi Bulan September – November 2015

Bulan	Klasifikasi Hotel						
	Tamu Menginap	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
September	Total	1.914	2.260	10.694	1.799	*	16.667
	Mancanegara	0	0	20	15	*	35
	Nusantara	1.914	2.260	10.674	1.784	*	16.632
Oktober	Total	1.667	1.564	11.629	3.114	*	17.974
	Mancanegara	0	0	21	0	*	21
	Nusantara	1.667	1.564	11.608	3.114	*	17.953
November	Total	2.838	1.856	13.732	3.953	*	22.379
	Mancanegara	0	0	33	67	*	100
	Nusantara	2.838	1.856	13.699	3.886	*	22.279

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2016

Rata–Rata Lama Menginap Tamu Mancanegara dan Tamu Nusantara di Hotel Bintang

Pada Bulan November 2015 rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan tamu nusantara tertinggi ada pada hotel bintang 2 (dua) sebesar 2,00 dan terendah di hotel bintang 3 (tiga) sebesar 1,19. Dibandingkan Bulan Oktober 2015, rata-rata lama menginap hotel bintang 1 (satu), hotel bintang 3 (tiga)dan hotel bintang 4 (empat)mengalami penurunan.

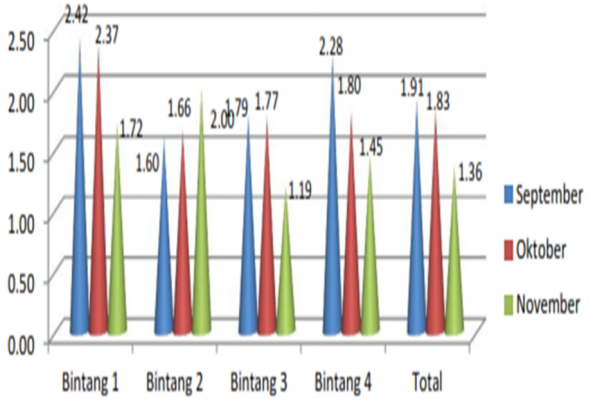

Diagram 3.6. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap
PDRB Provinsi Jambi tahun 2010 s,d 2015

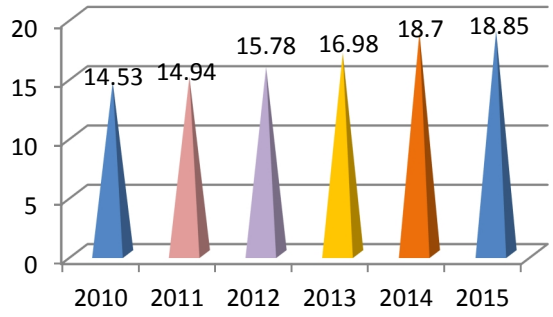

Selain tingkat hunian hotel, perkembangan industri pariwisata seperti restoran dan rumah makan sangat mempengaruhi meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Provinsi Jambi. Restoran dan rumah makan merupakan sebuah tempat usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum. Peningkatan jumlah restoran dan rumah makan yang mengakibatkan persaingan antar restoran cukup tinggi di Provinsi Jambi. Peningkatan jumlah penduduk merupakan peluang bagi pengusaha untuk membuka bisnis restoran. Meningkatnya jumlah bisnis makanan khususnya restoran di Kota Jambi tentunya menyebabkan persaingan bisnis

yang semakin ketat pada industri ini yang dicirikan dengan semakin meningkatnya permintaan dan jumlah pesaing baru. Setiap restoran akan menawarkan kepada konsumennya konsep yang berbeda-beda mulai dari menawarkan rasa (taste) makanan yang unik, tempat yang nyaman, keunikan tempat. Rumah makan maupun restoran yang ada di Kota Jambi harus mampu bersaing dengan memberikan nilai tambah dari menu makanan yang ditawarkan untuk dapat menyakinkan konsumennya.

Tabel 3.41. Perbandingan dan Capaian Kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	14,53	14,94	15,78	16,98	18,7	19	18,85	99,21	18,85	19
Perdagangan besar & eceran	9,5	9,91	10,16	12,64	15,23	15,5	15,3	98,70	15,3	15,5
Hotel	10,95	11,83	10,23	7,35	9,50	10	9,7	97,0	9,7	10
Restoran	5,05	5,38	7,23	7,58	8,65	9	8,9	98,88	8,9	9

Capaian keberhasilan peningkatan industri wisata, kunjungan wisata, serta kontribusi PDRB di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan ragam budaya pariwisata daerah. Dalam tahun 2015, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari program, yakni :

1. Program pengembangan nilai budaya
2. Program pengelolaan kekayaan budaya
3. Program pengelolaan keragaman budaya
4. Program pengembangan kerjasama pengolahan kekayaan budaya
5. Program perencanaan pembangunan sosial budaya
6. Program pengembangan data dan informasi
7. Program pengembangan pemasaran pariwisata
8. Program pengembangan destinasi pariwisata
9. Program pengembangan kemitraan
10. Program pengembangan informasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi
11. Program transportasi udara

Hambatan/kendala :

1. Potensi pariwisata Provinsi Jambi sebetulnya sangat terbuka dan masih mungkin dikembangkan lagi. Namun, beberapa yang dialami antara lain adalah jauhnya jarak wisata serta terbatasnya akses wisata alam yang sangat bagus untuk dikunjungi namun keterbatasan transportasi. Selain itu belum sinerginya antara event-event budaya dengan pola distribusi dan kalender musim pariwisata. Terdapat bulan-bulan dimana jumlah wisatawan meningkat seperti liburan sekolah atau liburan hari raya dan akhir/awal tahun. Pengelolaan event budaya yang disinergikan dengan momentum seperti ini akan bisa meningkatkan jumlah wisatawan yang lebih banyak lagi.
2. Pentingnya sektor pariwisata juga bisa dilihat dari dukungan dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan nilai, keragaman dan kekayaan budaya yang ada. Namun demikian, upaya-upaya ini masih perlu disinergikan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah, seperti dukungan kebijakan dan sarana-prasarana yang akan menjadi *enabling environment* bagi inisiatif masyarakat dalam pengembangan wisata berbasis budaya.
3. Seiring peningkatan kunjungan wisatawan, dinilai tingkat pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata yang profesional belum memadahi sesuai dengan jumlah dan karakteristik wisatawan yang semakin beragam.

Langkah antisipatif :

1. Memperluas pilihan wisata dengan memperbaharui destinasi wisata termasuk destinasi baru yang beragam tentunya dengan menyiapkan akses yang baik menuju destinasi wisata.
2. Sarana pendukung untuk meningkatkan kepuasan wisatawan, seperti sarana transportasi, ataupun sarana dan prasarana yang lain.
3. Pelembagaan partisipasi masyarakat dan dukungan bagi inisiatif masyarakat dalam pengembangan sarana dan destinasi wisata

9. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Seluruh Wilayah Dan Berkurangnya Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah

a. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan 5 program utama, yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Produksi Pertanian, Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastuktur/ Sarana Prasarana Pertanian dan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil TPH (Domestik dan Internasional).

Produksi padi Provinsi Jambi tahun 2015 mencapai ±561.542 ton Gabah Kering Giling (GKG). Dibandingkan produksi tahun 2014, terjadi penurunan sebanyak 103.178 ton GKG (15,52 persen). Penurunan produksi terjadi karena adanya penurunan luas panen sebesar 20.322 hektar (13,92 persen) dan penurunan produktivitas padi sebesar 0,85 kuintal/hektar (1,86 persen).

Produksi padi Provinsi Jambi tahun 2015 hanya memberikan sumbangan terhadap produksi padi nasional sebesar 0,75 persen. Sedangkan kontribusi pulau Sumatera yang terdiri dari 10 provinsi terhadap produksi padi nasional sebesar 24,45 persen dan kontribusi terbesar secara Nasional masih disumbangkan oleh Pulau Jawa.

Tabel 3.42. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Wilayah, 2013-2015

Uraian	2013 (ATAP)	2014 (ATAP)	2015 (Aram II)	Perkembangan				Distribusi (%)		
				2013-2014		2014-2015		2013 (ATAP)	2014 (ATAP)	2015 (AramII)
				Absolut	(%)	Absolut	(%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
1. Luas Panen (ha)										
- Jambi	153.243	145.990	125.668	-7.253	-4,73	-20.322	-13,92	1,11	1,06	0,89
- Sumatera	3.518.149	3.466.211	3.697.103	-51.938	-1,48	230.892	6,66	25,43	25,12	26,13
- Indonesia	13.835.252	13.797.307	14.150.740	-37.945	-0,27	353.433	2,56	100,00	100,00	100,00
2. Produktivitas (ku/ha)										
- Jambi	43,36	45,53	44,68	2,17	4,99	-0,85	-1,86			
- Sumatera	47,61	47,97	49,52	0,36	0,77	1,54	3,21			
- Indonesia	51,52	51,35	52,91	-0,17	-0,33	1,57	3,05			
3. Produksi (ton)										
- Jambi	664.533	664.721	561.542	187	0,03	-103.178	-15,52	0,93	0,94	0,75
- Sumatera	16.749.659	16.628.893	18.306.779	-120.766	-0,72	1.677.886	10,09	23,50	23,47	24,45
- Indonesia	71.279.709	70.846.465	74.876.038	-433.244	-0,61	4.029.573	5,69	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2015

Produksi jagung Provinsi Jambi tahun 2015 mencapai ±50.588 ton pipilan kering. Dibandingkan produksi tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar 6.972 ton (15,98 persen). Kenaikan produksi jagung terjadi karena peningkatan luas panen seluas 743 hektar (9,36 persen) dan peningkatan produktivitas jagung sebesar 3,33 kuintal/hektar (6,06 persen). Perkiraan luas panen

jagung tahun 2015 sebesar 8.680 hektar memberikan kontribusi terhadap luas panen jagung nasional sebesar 0,22 persen, sedikit lebih besar dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 0,21 persen. Sedangkan kontribusi pulau Sumatera terhadap luas panen jagung nasional pada tahun 2015 sebesar 20,27 persen, sementara lebih dari 50 persen luas panen jagung masih dihasilkan oleh Pulau Jawa.

Produksi jagung tahun 2015 sebesar 50.588 ton memberikan kontribusi terhadap produksi jagung nasional sebesar 0,26 persen, lebih besar dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 0,23 persen. Sedangkan kontribusi pulau Sumatera terhadap produksi jagung nasional pada tahun 2015 sebesar 22,14 persen, sementara lebih dari 50 persen jagung masih dihasilkan oleh Pulau Jawa.

Angka Ramalan II (ARAM II) produksi kedelai tahun 2015 diperkirakan sebesar 7.105 ton biji kering. Dibandingkan produksi tahun 2014, terjadi peningkatan produksi sebesar 305 ton (4,49 persen). Peningkatan produksi kedelai tahun 2015 terjadi karena meningkatnya produktivitas sebesar 0, 94 kuintal/hektar (7,33 persen) sedangkan luas panen mengalami penurunan sebesar 140 hektar (2,65 persen).

Perkembangan produksi kedelai dua tahun sebelumnya adalah sebagai berikut, pada tahun 2013 produksi mencapai 2.372 ton biji kering atau mengalami penurunan sebesar 32,53 persen dibandingkan tahun 2012 dan pada tahun 2014 produksi mencapai 6.800 ton biji kering atau mengalami kenaikan sebesar 186,65 persen dibandingkan tahun 2013. Produksi kedelai tahun 2015 memberikan kontribusi terhadap produksi kedelai nasional diperkirakan sebesar 0,72 persen, meningkat dibanding kontribusi pada tahun 2014 yang mencapai 0,71 persen. Sedangkan kontribusi Pulau Sumatera terhadap produksi kedelai nasional pada tahun 2015 hanya sebesar 10,66 persen dan lebih dari 50 persen kontribusi produksi kedelai nasional dihasilkan oleh Pulau Jawa.

Tabel 3.43. Perkembangan dan Distribusi Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai Menurut Wilayah, 2013-2015

Uraian	2013 (ATAP)	2014 (ATAP)	2015 (Aram II)	Perkembangan				Distribusi (%)		
				2013-2014		2014-2015		2013 (ATAP)	2014 (ATAP)	2015 (Aram II)
				Absolut	(%)	Absolut	(%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
1. Luas Panen (ha)										
- Jambi	1.877	5.288	5.148	3.411	181,73	-140	-2,65	0,34	0,86	0,83
- Sumatera	50.508	79.905	75.235	29.397	58,20	-4.670	-5,84	9,17	12,98	12,06
- Indonesia	550.793	615.685	623.764	64.892	11,78	8.079	1,31	100,00	100,00	100,00
2. Produktivitas (ku/ha)										
- Jambi	12,64	12,86	13,80	0,22	1,75	0,94	7,33			
- Sumatera	13,64	13,91	13,91	0,28	2,02	0,00	0,02			
- Indonesia	14,16	15,51	15,74	1,35	9,53	0,23	1,47			
3. Produksi (ton)										
- Jambi	2.372	6.800	7.105	4.428	186,65	305	4,49	0,30	0,71	0,72
- Sumatera	68.872	111.163	104.689	42.291	61,41	-6.474	-5,82	8,83	11,64	10,66
- Indonesia	779.992	954.997	981.737	175.005	22,44	26.740	2,80	100,00	100,00	100,00

Kondisi ini telah meningkatkan PDRB dari sektor pertanian menjadi 27,70% pada tahun 2015. Capain kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari tahun 2010 s.d. 2014 sebagai berikut :

Grafik 3.21. Capaian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jambi 2010 - 2015

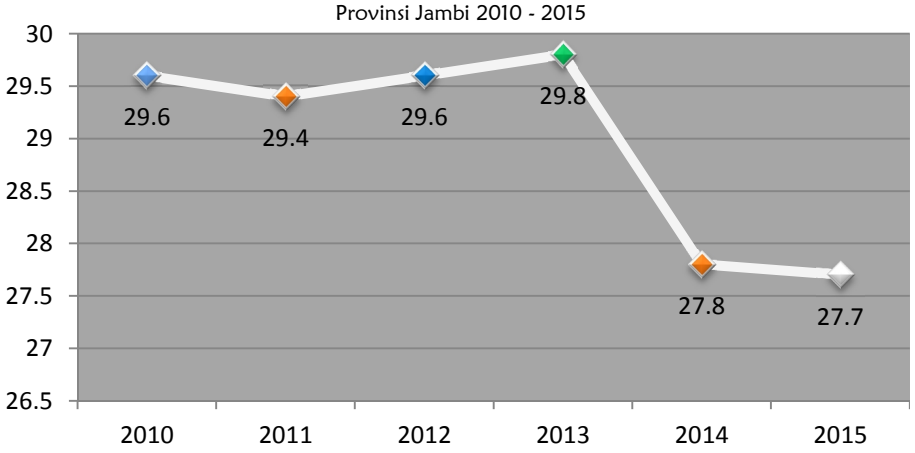

Pengukuran kinerja capaian kinerja kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.44. Perbandingan Capaian Kinerja Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	27,5	29,4	29,6	29,83	27,8	29–29,5	27.70	95,51	29,6	29 – 29,5

Sumber : Jambi Dalam Angka 2015

Capaian realisasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di atas turut didukung oleh upaya pelaksanaan berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan perekonomian daerah daerah. Dalam tahun 2015, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari program, yakni :

1. Program peningkatan kesejahteraan petani
2. Program peningkatan pemasaran produk pertanian
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
4. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian
5. Program pemberdayaan penyuluh pertanian
6. Program perbaikan dan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana pertanian

b. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP)yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. Nilai ini juga menunjukkan daya tukar (term of trade)dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Mulai Desember 2013 dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTP dari tahun dasar 2007=100 menjadi tahun dasar 2012=100. Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi pertanian dan pola konsumsi rumah tangga pertanian di perdesaan, serta perluasan cakupan subsektor pertanian dan provinsi dalam penghitungan NTP agar penghitungan indeks dapat dijaga ketepatannya. Perbedaan antara NTP tahun dasar 2007=100 dengan NTP tahun dasar 2012=100 adalah meningkatnya cakupan jumlah

komoditas baik pada paket komoditas It maupun Ib. Penghitungan NTP (2012=100) juga mengalami perluasan khususnya pada subsektor Perikanan. Selain NTP Perikanan secara umum yang dihitung di 33 provinsi termasuk Provinsi DKI Jakarta, Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) juga disajikan secara terpisah.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana komponen Ib hanya terdiri dari Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Dengan dikeluarkannya konsumsi dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada Desember 2015, NTP Provinsi Jambi naik sebesar 0,61 persen dibandingkan bulan sebelumnya yaitu dari 95,15 menjadi 95,72. Kenaikan NTP pada Desember 2015 disebabkan indeks harga hasil produksi pertanian naik sebesar 1,39 persen sedangkan indeks harga yang dibayar petani hanya naik sebesar 0,77 persen. Kenaikan yang tinggi terutama pada indeks harga yang diterima petani pada subsektor Tanaman Pangan dan subsektor Hortikultura.

Pada bulan Desember 2015, NTP naik pada subsektor subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,78 persen, subsektor Hortikultura naik sebesar 1,00 persen, dan pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik sebesar 0,82 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada subsektor Peternakan yang turun sebesar 0,46 persen dan subsektor Perikanan turun sebesar 0,25 persen.

Indeks Harga yang Diterima Petani (It)

Indeks Harga yang Diterima Petani (It) menunjukkan perubahan harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pada Desember 2015, It naik sebesar 1,39 persen dibandingkan It November 2015, yaitu dari 114,75 menjadi 116,34. Kenaikan It terjadi pada seluruh subsektor, yaitu subsektor Tanaman Pangan naik sebesar 1,80 persen, subsektor Hortikultura sebesar 1,81 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar sebesar 1,55 persen, subsektor Peternakan naik sebesar 0,21 persen dan subsector Perikanan naik sebesar 0,18 persen.

Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)

Melalui indeks harga yang dibayar petani (Ib) dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat perdesaan, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.

Pada Desember 2015, Ib naik sebesar 0,77 persen bila dibanding Ib November 2015, yaitu dari 120,60 menjadi 121,54. Kenaikan tersebut terjadi pada seluruh subsektor yaitu subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,01 persen, subsektor Hortikultura sebesar 0,81 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,72 persen, subsektor Peternakan sebesar 0,68 persen, dan subsektor Perikanan naik sebesar 0,43 persen.

Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor

a. Subsektor Tanaman Pangan (NTPP)Pada Desember 2015 NTP untuk subsektor Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 101,67 atau naik 0,78 persen. Kenaikan pada It dipengaruhi oleh naiknya indeks pada kelompok palawija sebesaR 2,70 persen. Kenaikan Ib dipengaruhi oleh indeks kelompok konsumsi rumah tangga yang naik sebesar 1,18 persen.
b. Subsektor Hortikultura (NTPH)Pada Desember 2015, NTP untuk subsektor Hortikultura (NTPH) sebesar 95,81 atau naik 1,00 persen. Kenaikan It dipengaruhi oleh kenaikan pada indeks yang diterima petani sayur-sayuran dan petani buah-buahan yang masing-masing naik sebesar 1,81 persen dan 1,88 persen. Sedangkan kenaikan Ib dipengaruhi oleh indeks kelompok konsumsi rumah tangga yang naik sebesar 0,98 persen.
c. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)Pada Desember 2015, NTP untuk subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 92,04 atau naik 0,82 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan It sebesar 1,55 persen serta kenaikan Ib sebesar 0,72 persen. Kenaikan

pada Ib dipengaruhi naiknya indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,82 persen dan kenaikan indeks BPPBM sebesar 0,21 persen.

d. Subsektor Peternakan (NTPT)Pada Desember 2015, NTP untuk subsektor Peternakan (NTPT) sebesar 99,80 atau turun sebesar 0,46 persen dari bulan sebelumnya. Pada bulan ini It naik sebesar 0,21 persen dan Ib naik sebesar 0,68 persen. Kenaikan It pada subsektor ini dipengaruhi indeks kelompok ternak besar yang naik 0,18 persen, kelompok unggas naik sebesar 0,53 persen dan hasil ternak naik sebesar 1,43 persen. Sedangkan kelompok ternak kecil turun sebesar 0,78 persen. Kenaikan yang terjadi pada Ib dipengaruhi oleh indeks konsumsi rumah tangga yang naik sebesar 1,03 persen dan indeks BPPBM yang juga naik sebesar 0,32 persen.

e. Subsektor Perikanan (NTNP)Pada Desember 2015, NTP subsektor Perikanan (NTNP)sebesar 99,73 atau turun 0,25 persen. Indeks yang diterima nelayan dan pembudidaya ikan pada bulan ini naik sebesar 0,18 persen dan indeks yang dibayar nelayan dan pembudidaya ikan mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,43 persen.

1. Kelompok Perikanan Tangkap (NTN)Nilai Tukar Nelayan (NTN)turun sebesar 0,35 persen yaitu dari 103,39 menjadi 103,03 pada Desember 2015. Indeks yang diterima nelayan hanya naik sebesar 0,15 persen dan indeks yang dibayar nelayan naik sebesar 0,50 persen.
2. Kelompok Perikanan Budidaya (NTPi)Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)turun sebesar 0,13 persen yaitu dari 96,20 menjadi 96,08 pada Desember 2015. Indeks yang diterima pembudidaya ikan naik sebesar 0,21 persen dan indeks yang dibayar pembudidaya ikan naik sebesar 0,35 persen.

Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Perdesaan

Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Perdesaan mencerminkan angka inflasi/deflasi di wilayah perdesaan. Pada Desember 2015, IHK di wilayah perdesaan Provinsi Jambi sebesar 123,72 atau terjadi inflasi sebesar 0,93 persen. Jika dilihat menurut kelompok konsumsi rumah tangga, inflasi terjadi pada enam kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 1,79 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,54 persen; kelompok perumahan sebesar 0,31 persen, kelompok sandang sebesar 0,03 persen serta kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 0,05 persen. Sedangkan deflasi terjadi pada kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen dan pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,27 persen.

Tabel 3.45. Indeks Harga Konsumen Perdesaan dan Persentase Perubahannya Provinsi Jambi, Desember 2015 (2012=100)

No	Kelompok Konsumsi Rumah Tangga	Indeks Harga Konsumen (IHK) Perdesaan	
		November 2015	Desember 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bahan Makanan	126,80	129,06
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	120,73	121,38
3	Perumahan	113,61	113,96
4	Sandang	118,01	118,04
5	Kesehatan	116,73	116,61
6	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	106,92	106,63
7	Transportasi dan Komunikasi	128,47	128,54
	Konsumsi Rumah Tangga	**122,58**	**123,72**

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) menurut Subsektor

Pada Desember 2015, NTUP Jambi sebesar 101,21 yang berarti naik sebesar 1,21 persen. Hal ini karena It naik 1,39 persen sedangkan Indeks BPPBM naik sebesar 0,17 persen.

Kenaikan NTUP Provinsi Jambi dipengaruhi oleh kenaikan NTUP yang cukup besar pada beberapa subsektor, yaitu pada subsektor Tanaman Pangan naik sebesar 1,62 persen, subsektor Hortikultura naik sebesar 1,91 persen, dan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik sebesar 1,34 persen. Sedangkan pada subsektor Peternakan turun sebesar 0,10 persen dan subsektor Perikanan turun sebesar 0,01 persen.

Perbandingan Antar Provinsi se-Sumatera

Perubahan NTP dan NTUP di 10 provinsi se-Sumatera pada Desember 2015 antar provinsi se-Sumatera ini diharapkan dapat digunakan untuk melihat posisi NTP dan NTUP Provinsi Jambi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain disekitarnya.

Tabel 3.46. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian serta Persentase Perubahannya Menurut Provinsi se-Sumatera, Desember 2015 (2012=100)

Provinsi	NTP			NTUP	
	November 2015	Desember 2015	Persentase Perubahan	November 2015	Desember 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NAD	98,41	98,13	-0,28	103,62	103,92
Sumatera Utara	99,54	100,62	1,09	104,75	106,55
Sumatera Barat	98,06	97,75	-0,32	105,35	105,80
Riau	94,70	95,03	0,35	100,87	101,78
Jambi	**95,15**	**95,72**	**0,61**	**99,99**	**101,21**
Sumatera Selatan	96,30	96,03	-0,28	102,68	102,96
Bengkulu	93,44	92,96	-0,51	101,34	101,60
Lampung	104,04	103,84	-0,19	111,46	111,79
Bangka Belitung	103,94	102,92	-0,98	109,37	108,50
Kepulauan Riau	98,99	98,78	-0,21	105,01	105,20

Pada Desember 2015, Nilai Tukar Petani di beberapa daerah di Sumatera hanya naik di tiga provinsi, sedangkan NTP di tujuh provinsi lainnya mengalami penurunan. Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi berada pada urutan delapan diantara sepuluh provinsi se-Sumatera. NTP tertinggi di Provinsi Lampung sebesar 103,84 sedangkan NTP terendah di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 92,96. Dilihat dari perubahan NTP pada Desember 2015 terhadap bulan sebelumnya, kenaikan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 1,09 persen. Nilai Tukar Usaha Pertanian Provinsi Jambi pada Desember 2015 berada pada urutan kesepuluh diantara provinsi se-Sumatera. Untuk NTUP tertinggi di Provinsi Lampung yaitu sebesar 111,79 dan kenaikan NTUP tertinggi yaitu di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 1,71 persen.

Grafik 3.22. Capaian NTP

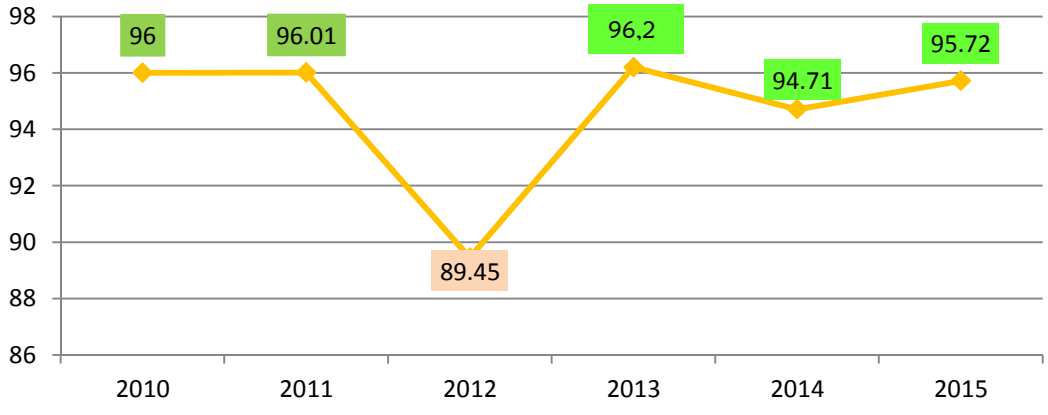

Tabel 3.47. Perbandingan dan Capaian Kinerja NTP Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
NTP	96	96,01	89,45	96,2	94,71	104	95,72	92,03	95,72	104-106

Sumber : JDA 2015 & hasil pengolahan data 2016

Capaian keberhasilan peningkatan NTP di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan NTP Provinsi Jambi. Dalam tahun 2015, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari program, yakni :

1. Program peningkatan kesejahteraan petani
2. Program peningkatan nilai tambah agribisnis
3. Program peningkatan pemasaran produk pertanian
4. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/kehutanan
5. Program pemberdayaan penyuluh pertanian
6. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Hambatan/kendala :

Menyikapi rendahnya NTP Provinsi Jambi pada tahun 2015, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya, yaitu :

1. Indeks harga yang dibayarkan oleh petani (baik untuk keperluan rumah tangga petani ataupun untuk keperluan produksi pertanian) peningkatannya lebih cepat daripada indeks harga yang diterima petani, sehingga kemampuan nilai tukar petani menjadi lebih rendah.
2. Terjadi transformasi pola konsumsi petani yang cenderung mengikuti pola konsumsi masyarakat perkotaan, dimana lebih banyak mengkonsumsi barang-barang yang sifatnya tidak produktif.
3. Kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah terbesar ada pada kegiatan pengadaan dan perdagangan saprotan, alsintan, serta kegiatan pengolahan hasil dan perdagangan produk (*off-farm* dalam sistem agribisnis) yang jatuh pada mereka yang bukan petani, akibatnya nilai tambah yang dinikmati petani tetap kecil, sementara mereka yang berada pada ekonomi non-usaha tani menikmati nilai tambah yang besar.

Langkah antisipatif :

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, beberapa hal yang perlu dilakukan ke depan, antara lain :

1. Mengurangi beban belanja konsumsi rumah tangga petani dengan memberdayakan atau memanfaatkan pekarangan rumah untuk pengembangan tanaman pangan seperti cabe, sayur-sayuran, ikan, dll.
2. Meningkatkan peran Koperasi Agribisnis yang bergerak di tiga sub sektor: hulu, kegiatan usahatani dan hilir, serta menangani satu aliran produk sebagai bisnis inti (*core business*) sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah kabupaten/lokalita. Dengan demikian, pengembangan suatu komoditas mulai dari hulu sampai hilir dapat dilakukan.
3. Memperbaiki jalur distribusi/transportasi dari sentra produksi ke pasar,
4. Membangun gudang atau *Supply Base* untuk hasil pertanian yang mudah rusak,
5. Memperbaiki tata niaga produk pertanian, dan
6. Membangun industri hilir untuk barang jadi atau barang setengah jadi beserta kegiatan perdagangannya sehingga nilai tambah produk dapat dikuasai oleh petani.

c. Ketersediaan Energi/kap/perhari, dan Pola Pangan Harapan

Ketersediaan Energi Tahun 2014 dan 2015.

Ketersediaan energi ideal sesuai Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebesar minimal 2.200 kkal/kap/hari. Ketersediaan energi ini sangat bergantung pada kondisi ketersediaan bahan pangan dari kemampuan produksi, sehingga apabila produksi bahan pangan meningkat, ada kecendrungan

ketersediaan energi akan meningkat. Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai target ketersediaan energi tahun 2015 minimal minimal 2.200 kkal/kap/hari. Jika dibandingkan antara target dan realisasi ketersediaan tahun 2015, maka realisasi ketersediaan energi tahun 2015 yakni sebesar 3.146 kkal/kap/hari, telah melebihi yang angka target RPJMD dengan persentase capaian 143%. Demikian pula halnya dengan ketersediaan protein, target sebesar 57 gram/kap/hari, realisasi sebesar 76,43 gram/kap/hari telah tercapai sebesar 134,09%. Perkembangan capaian energi kkal/kap/hari dari tahun 2010-2015 dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram 3.7. Target dan capaian ketersediaan energi/kap/hari Provinsi Jambi

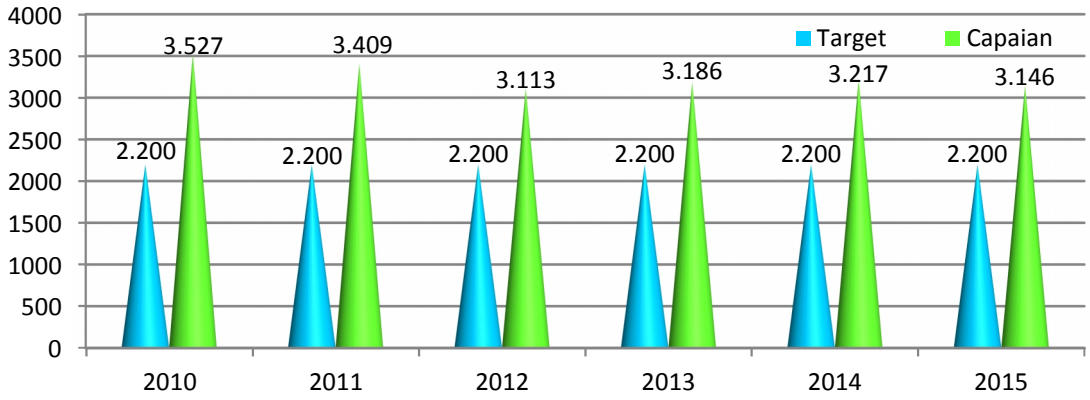

Dari grafik di atas dapat dilihat perkembangan capaian ketersediaan energi kkal/kap/hari dari tahun 2010-2015, pada grafik terlihat capaian ketersediaan energi tertinggi berada pada tahun 2011 yakni sebesar 3.409 kkal/kap/hari. Namun pada tahun selanjutnya ketersediaan energi terus berfluktuasi dan mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 3.113 kkal/kap/hari. Peningkatan ketersediaan energi kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 3.217 kkal/kap/hari, namun pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 3.146 kkal/kap/hari. Ketersediaan energi (kkal/kap/hari) secara umum produksi Provinsi Jambi sangat mencukupi melebihi target RPJMD 2015 dengan besaran 2.200 kkal/kap/hari, sehingga dengan sendirinya ketersediaan energi juga terpenuhi.

Tabel 3.48. Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Jambi Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014

No.	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari) 2013	2014	2015	Ketersediaan Ideal (Kkal/Kap/Hari)
1.	Padi – Padian	1.434	1.481	1.467	**1.100**
2.	Umbi – Umbian	218	174	157	**132**
3.	Pangan Hewani	167	179	184	**264**
4.	Minyak Dan Lemak	757	827	798	**220**
5.	Buah Biji/Berminyak	177	225	218	**66**
6.	Kacang – Kacangan	98	103	98	**110**
7.	Gula	129	152	150	**110**
8.	Sayuran dan Buah	133	76	74	**132**
9.	Lain – Lain	-	-	-	**66**
	Jumlah	**3.113**	**3.217**	**3.146**	**2.200**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan Energi pada tahun 2013 s.d. 2015 sudah melebihi ketersediaan energi ideal sebesar 2.200 kkal/kap/hari, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang. Komposisi ketersediaan bahan pangan masih didominasi oleh kelompok sumber bahan pangan penghasil karbohidrat, minyak dan lemak, buah/biji berminyak dan gula, sementara ketersediaan bahan pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah masih lebih rendah dari ketersediaan ideal berdasarkan pola pangan harapan (PPH).

Ketersediaan Pangan dari Kemampuan Produksi

Pengertian ketersediaan pangan dalam bahasan berikut ini adalah ketersediaan pangan untuk dikonsumsi masyarakat yang berasal dari produksi lokal yang merupakan selisih dari produksi daerah dikurangi dengan kebutuhan benih (khusus padi dan palawija), tercecer dan pakan. Ketersediaan pangan dari kemampuan produksi daerah, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.49. Kondisi Ketersediaan dari Kemampuan Produksi Tahun 2014 (angka tetap) dan 2015 (angka ramalan II), Jumlah Konsumsi Penduduk dan Kebutuhan Berdasarkan Pola Pangan Harapan

No.	Komoditas	Tahun 2014				Tahun 2015			
		Keterse-diaan	Konsumsi Penduduk	Kebutuhan Berdskan PPH		Keterse-diaan	Konsumsi Penduduk	Kebutuhan Berdskan PPH	
				Tingkat Ketersediaan	Tingkat Konsumsi			Tingkat Ketersediaan	Tingkat Konsumsi
1.	Padi	372,249	385,519	323,064	308,724	351,488	309,691	307,658	279,689
2.	Jagung	23,009	234	394	353	22,547	587	352	320
3.	Kedelai	2,094	16,885	30,772	27,566	3,059	17,150	27,311	24,829
4.	Kacang Tanah	1,387	502	3,794	3,399	1,423	848	3,713	3,376
5.	Kacang Hijau	218	1,046	3,323	2,977	355	1,206	2,988	2,716
6.	Ubi Kayu	32,177	16,718	78,093	69,958	37,368	26,051	68,802	62,547
7.	Ubi Jalar	65,500	3,310	25,510	23,749	70,450	62,364	23,357	21,233
8.	Daging	41,765	24,769	37,204	33,329	30,179	23,022	36,157	32,871
	- Ruminansia	10,345	4,347	6,837	6,125	10,623	3,008	5,935	5,396
	- Non Ruminansia	31,420	20,422	30,367	27,204	19,555	20,014	30,222	27,475
9.	Telur	13,175	30,628	45,572	40,825	11.952	26.500	40,980	37,274
10.	Ikan	95.272	68.431	75,997	98,678	92.548	101.728	98,646	89,678

Dari tabel di atas terlihat bahwa tahun 2014 & 2015 ketersediaan beberapa komoditas bahan pangan dari produksi lokal telah memenuhi konsumsi penduduk Provinsi Jambi, kecuali untuk komoditas kedelai, kacang hijau, telur dan ikan.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jambi merupakan Cadangan pangan pemerintah dalam hal ini adalah bahan pangan beras, yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bekerjasama dengan Perum Bulog. Cadangan pangan ini dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan daerah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan, bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 200 ton beras, dengan target minimal 60% pada tahun 2015. Provinsi Jambi telah melaksanakan pengadaan cadangan pangan berupa beras sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 90 ton.

Grafik 3.23. Cadangan Pangan Provinsi Jambi

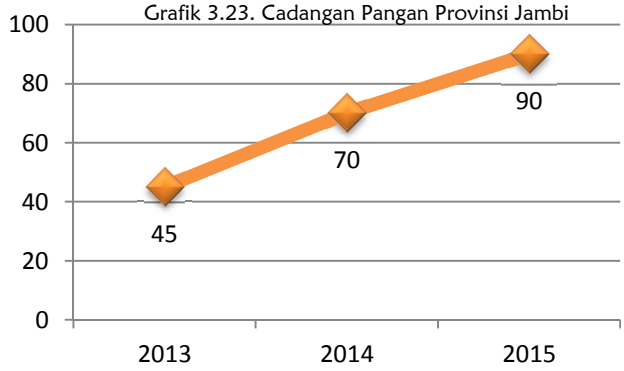

Perkembangan cadangan pangan Provinsi Jambi dapat dilihat sebagaimana grafik disamping :

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa cadangan pangan pemerintah Provinsi Jambi baru dapat dilaksanakan pada tahun 2013 sebanyak 45 ton beras, dan pada tahun 2014 ditambah pengadaan beras sebanyak 35 ton hingga menjadi 70 t0n. Kurun 2014-2015 cadangan pangan Provinsi Jambi mengalami peningkatan sebanyak 20 ton dan hingga saat ini total cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 90 ton. Dari total cadangan pemerintah daerah tersebut, telah digunakan sebanyak 12,8 ton untuk membantu bencana alam/kerawanan pangan di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Batang Hari, Sarolanun dan Tanjab Barat sehingga stok cadangan pangan pemerintah per 31 Desember 2015 sebesar 77,2 ton.

Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

Penanggulangan kerawanan pangan diprovinsi Jambi dilaksanakan melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Provinsi Jambi telah dimulai pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012. Jumlah kelompok yang telah diberdayakan berjumlah 354 kelompok dengan jumlah KK miskin 8.111 KK di 87 Desa yang tersebar pada 11 Kabupaten/Kota, namun sejak Tahun 2013 tidak ada penambahan Desa Mandiri Pangan baru.

Untuk mengukur penurunan % penduduk rawan pangan tersebut memerlukan data yang lengkap dan perlu kajian khusus maka data yang kami tampilkan kemungkinan besar tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun dalam kesempatan ini kami mencoba untuk mencari pendekatan melalui jumlah desa rawan pangan yang telah diberdayakan dibandingkan dengan jumlah desa rawan pangan kondisi awal.

Grafik 3.24. Jumlah Pemberdayaan Desa Rawan Pangan

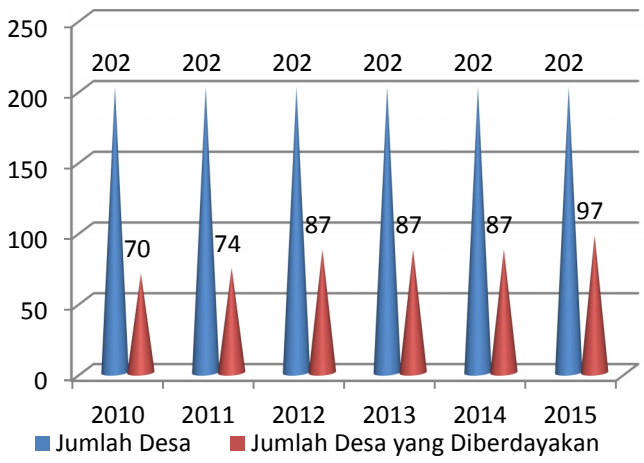

Jumlah desa rawan pangan berdasarkan hasil Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2010 sebanyak 202 desa. Sampai dengan tahun 2014, dari 202 desa tersebut telah diberdayakan sebanyak 87 desa dan ada penambahan di tahun 2015 sebanyak 10 desa dalam pengembangan sehingga total desa rawan pangan yang telah diberdayakan sebanyak 97 desa (48,02%).

Dari grafik disamping dapat dilihat bahwa tahun 2010 jumah desa mandiri pangan yang telah diberdayakan sebanyak 70 desa, tahun 2011 ada penambahan desa baru 4 desa menjadi 74 desa (36,63%) dan tahun 2012 ada penambahan desa mandiri pangan baru sebanyak 13 desa, sehingga jumlah desa yang telah diberdayakan sampai dengan tahun 2012 sebanyak 87 desa (43,07%). Jika dihitung peningkatan persentase antara pemberdayaan desa mandiri pangan tahun 2010 – 2011 terjadi kenaikan pemberdayaan desa mandiri pangan sebesar 1,9%, demikian pula halnya antara tahun 2011 – 2012 terjadi kenaikan pemberdayaan desa mandiri pangan sebesar 6,4%. Namun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 tidak ada lagi penambahan desa mandiri pangan baru, sehingga capaian kinerja stagnan pada angka tersebut.

Pada tahun 2015 ada dilakukan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan dengan memberdayakan 10 desa di 2 (dua) kawasan mandiri pangan, sehingga sampai dengan tahun 2015 telah diberdayakan sebanyak 97 desa. (48,02%) Jika dirata-ratakan peningkatan pemberdayaan desa mandiri pangan dari tahun 2010 – 2015, diperoleh hasil peningkatan pemberdayaan desa mandiri pangan sebesar 2,28%/ tahun. (rumus : 13,37% - 1,9% dibagi 5 tahun = 2,28%/tahun). Angka ini sekali lagi bukan angka penurunan penduduk rawan pangan, melainkan angka peningkatan pemberdayaan desa mandiri pangan.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dibuat berdasarkan 3 (tiga) filar ketahanan pangan (ketersediaan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan) dalam semua kondisi bukan hanya pada situasi kerawanan pangan saja. Selain itu FSVA juga bermaksud untuk mengetahui berbagai penyebab kerawanan pangan secara lebih baik atau kerentanan terhadap kerawanan pangan, bukan hanya kerawanan pangan itu sendiri. Kategori/prioritas penanganan tingkat ketahanan dan kerentanan pangan ditunjukkan dengan menggunakan pola warna sebagai berikut :

Prioritas I Sangat Rawan	Prioritas II Rawan	Prioritas III Cukup Rawan	Prioritas IV Cukup Tahan	Prioritas V Tahan	Prioritas VI Sangat Tahan

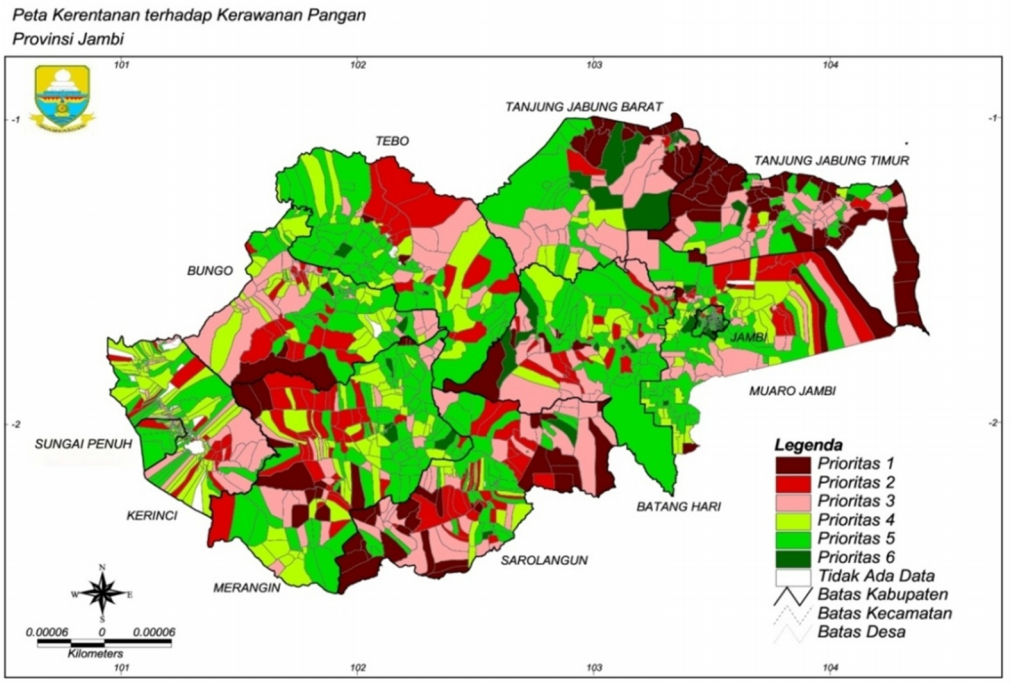

Gambar 3.19. Peta Kerentanan Kerawanan Pangan

Indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat Ketahanan dan Kerentanan Pangan antara lain :

1. Ketersediaan Pangan ; Jumlah warung/toko kelontong (tempat usaha untuk menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran).
2. Akses Terhadap Pangan ; Persentase penduduk miskin, Jalan utama desa yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.
3. Pemanfaatan Pangan ; Jumlah sarana /fasilitas kesehatan, Jumlah kematian balita dan ibu melahirkan, Jumlah penderita gizi buruk.

Klasifikasi desa / kelurahan menurut prioritas penanganan kerentanan pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.50. Klasifikasi Desa / Kelurahan Menurut Prioritas Penanganan Kerentanan Pangan.

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Prioritas 1 s.d 3 (Rentan Kerawanan Pangan)					Prioritas 4 s.d 6 (Tahan Pangan)	
				1	2	3	1 s.d 3	%	4 s.d 6	% tase
1.	Kerinci	12	208	-	31	27	**54**	25,96	**154**	74,04
2.	Sungai Penuh	5	69	-	5	16	**21**	30,43	**48**	69,57
3.	Merangin	24	212	14	39	24	**75**	35,38	**137**	64,62
4.	Sarolangun	10	142	25	29	37	**89**	62,68	**53**	37,32
5.	Bungo	17	146	3	22	31	**56**	38,36	**90**	61,64
6.	Tebo	12	106	2	16	10	**28**	26,42	**78**	73,58
7.	Muara Jambi	11	151	6	20	21	**47**	31,13	**104**	68.87
8.	Batang Hari	8	113	6	18	23	**47**	41,59	**66**	58,41
9.	Tanjab Barat	13	70	16	2	22	**40**	57,14	**30**	42,86
10.	Tanjab Timur	11	93	37	2	33	**70**	75,26	**23**	24,73
11.	Kota Jambi	8	62	-	4	1	**5**	8,06	**57**	91,94
	Jumlah	**131**	**1.372**	**109**	**188**	**245**	**532**	**38,78**	**840**	**63,12**

Sumber Data : BKP Provinsi Jambi.

Berdasarkan tabel diatas (data olahan Tahun 2014) terlihat bahwa secara umum Provinsi Jambi Cukup Tahan Pangan (63,12% tahan pangan dan 36,88% rentan rawan pangan), yang dapat digambarkan kedalam peta ketahanan pangan berikut :

Skor PPH Provinsi Jambi

Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya diversifikasi baik di bidang produksi, penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah Pola Pangan Harapan atau disingkat dengan PPH. Dengan PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan Regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH), menggunakan data Survai Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Berdasarkan target Skor PPH tahun 2015 yakni sebesar 93,2, saat ini target sebesar 93,2 tersebut jika dikaitkan dengan target SPM Bidang Ketahanan Pangan terkait skor PPH, diharapkan minimal 90% dari yang ditargetkan semula, sehingga dari target skor PPH 93,2 menjadi 83,88 (90% x 93,2 = 83,88) sehingga realisasi skor PPH Provinsi Jambi Tahun 2015 yakni sebesar 83,4 mendekati ideal.

Perkembangan skor PPH Provinsi Jambi dari tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.51. Skor PPH Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015.

No.	Tahun	Skor PPH		% Capaian
		Target Renstra 2010-2015	Realisasi	
1.	2010	82,7	86,0	102,85
2.	2011	87,9	89,3	107,90
3.	2012	89,7	89,7	104,50
4.	2013	91,4 (82,26)	83,3	101,30
5.	2014	93,2 (83,88)	83,4	99,43
6.	2015	95,0 (85,50)	83,4*	99,43

*angka 2014 (angka 2015 masih dalam proses).

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum skor PPH Provinsi Jambi telah sesuai dengan yang ditargetkan, meskipun di tahun 2015 (angka 2014) belum tercapai sesuai target. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi penduduk Provinsi Jambi sudah mendekati Pola Pangan Harapan, meskipun belum optimal. Penyebab belum tercapainya skor PPH sebagaimana target yang ditetapkan tahun 2015 karena adanya penurunan konsumsi energi kelompok bahan pangan umbi-umbian.

Tabel 3.52. Perbandingan Capaian Kinerja Ketersediaan Energi/kap/hari, dan Pola Pangan Harapan Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Ketersediaan energi kkal/kap/hari	3.527 kkal/Kap/ Hr	3.409 kkal/Kap/ Hr	3.527 kkal/Kap/ Hr	3.113 kkal/Kap/ Hr	3.186 kkal/Kap/ Hr	2.200 kkal/Kap/ Hr	3.146 kkal/Kap/ Hr	143	3.527 kkal/Kap/ Hr	2.200 kkal/kap/ Hr
Skor PPH	86	89,3	89,7	83,3	83,4	93,2	83,4	89,67	89,67	93,2

Sumber : Hasil pengolahan data 2016

Capaian keberhasilan ketersediaan energi/kap/hari dan pola pangan harapan di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan sektor pertanian dan ketahanan pangann Provinsi Jambi. Dalam tahun 2015, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 5 program, yakni :

1. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
2. Program lumbung pangan
3. Program pengembangan sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura
4. Program peningkatan produksi & produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
5. Program peningkatan ketahanan pangan melalui pembangunan desa mandiri pangan dan pembangunan lumbung desa

Hambatan/kendala :

1. Banyaknya pandangan masyarakat awam yang menilai bahwa umbi-umbian merupakan makanan ringan, bukan pengganti beras, bahkan ada yang berpendapat dengan mengkonsumsi ubi, kita seperti kembali ke masa-masa penjajahan dahulu (kemunduran).
2. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota, dan adanya kebijakan dari pusat untuk penghematan dana, sehingga ada beberapa dana yang harus dikurangi.

Langkah antisipatif :

1. Upaya kedepan akan lebih ditingkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
2. Meningkatkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan yang tentunya didasari oleh percepatan penetapan kebijakan anggaran (DPA) yang relatif memadai dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditentukan.

10. Sasaran Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan

a. Penurunan Titik Api (Hot Spot)

Dalam rangka mencegah serta menanggulangi terjadinya kebakaran hutan, maka Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, salah satu upaya yang dilakukan adalah pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dalam kegiatan ini dilakukan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah terlaksana di 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi.

Gambar 3.20. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi

Kurun waktu sampai dengan bulan Desember 2015, jumlah titik api yang tercatat oleh satelit NOAA18 sebanyak 1.654 titik api, jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan titik api tahun 2014 sebanyak 1.152 titik, tahun 2013 sebanyak 1.151 titik hal ini terjadi bersamaan dengan datangnya musim kemarau dan bencana elnino. Meningkatnya jumlah titik api ini merupakan dampak nasional bukan hanya terjadi di Provinsi Jambi.

Hingga akhir musim kemarau lalu, kabut asap datang menerjang, mengepung wilayah Sumatera dan Kalimantan selama berminggu-minggu. Kondisi terakhir di Sumatera, khususnya wilayah Jambi dan Riau, kabut asap masih memicu indeks standar pencemaran udara pada level yang sangat berbahaya. Setara dengan dua kali lipat di atas ambang bahaya.

Masalah kabut asap ini adalah bencana tahunan yang terus terjadi karena kesengajaan oknum pembakar hutan dari perusahaan kelapa sawit demi alasan efisiensi biaya untuk membersihkan lahan. Dalam sejarahnya, Jambi sebagai penyumbang titik api terbanyak di Sumatera pernah tiga kali diserang kebakaran hutan dan lahan dalam skala yang luar biasa besar, yaitu pada tahun 1997 dan 2006 silam, dan kini 2015, kebakaran hutan besar kembali terjadi di Jambi.

Disamping membutuhkan alokasi biaya yang tak sedikit untuk melakukan operasi pemadaman, banyak pihak pun memprediksi bahwa masalah kebakaran hutan dan kabut asap membawa dampak ekonomi yang cukup besar. Terutama bagi Provinsi Jambi sebagai salah satu dari daerah yang memiliki lahan yang dibakar dan terbakar dalam cakupan area wilayah relatif luas. Ratusan titik panas (hotspot) berasal dari dua ratus hektare lahan hutan Jambi.

Dua dampak kabut asap bagi kondisi ekonomi Provinsi Jambi antara lain :

1. Kebakaran hutan rugikan sektor perhubungan khususnya transportasi udara

Gambar 3.21. Kondisi Jarak Pandang Di Bandara Sultan Thaha Jambi

Kabut asap yang menyelimuti Jambi dan Riau telah menghilangkan jauh jarak pandang di Provinsi Jambi. Imbasnya adalah mematikan aktivitas di Bandara Sultan Thaha Syaifuddin Jambi. Puluhan penerbangan harus dibatalkan setiap harinya dari dan menuju Jambi. Imbasnya adalah matinya pemasukan daerah dan peputaran ekonomi dari para pendatang yang masuk ke Jambi. Bahkan karena penerbangan mati, maka terlihat terjadi penumpukan barang-barang kargo yang tak bisa terkirim oleh perusahaan jasa pengiriman barang. Imbasnya adalah banyak pelaku ekonomi yang gagal mengirimkan barang pesanannya kepada konsumen di luar Jambi. Puluhan ribu ekor Udang Ketak atau Udang Ronggeng khas nelayan Kuala Tungkal Jambi harus tertahan distribusinya selama berminggu-minggu akibat bencana kabut asap.

2. Kebakaran hutan rugikan sektor kesehatan dan sosial masyarakat

Kerugian ekonomi berikutnya harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat Jambi. Dalam konteks ini, kerugian paling jelas dirasakan masyarakat adalah membengkaknya biaya kesehatan sebagai efek samping dari menurunnya kesehatan masyarakat. Tak dapat dipungkiri, akibat terpapar kabut asap yang sangat menyesakkan, ribuan masyarakat mau tak mau harus menderita penyakit Infeski Saluran Pernafasan Atas (ISPA).

Perkembangan jumlah titik api dari tahun 2010 s.d. 2015 dapat dilihat pada diagram berikut:

Grafik 3.25. Trend Titik Api berdasar satelit NOAA
Tahun 2010 s.d. 2015

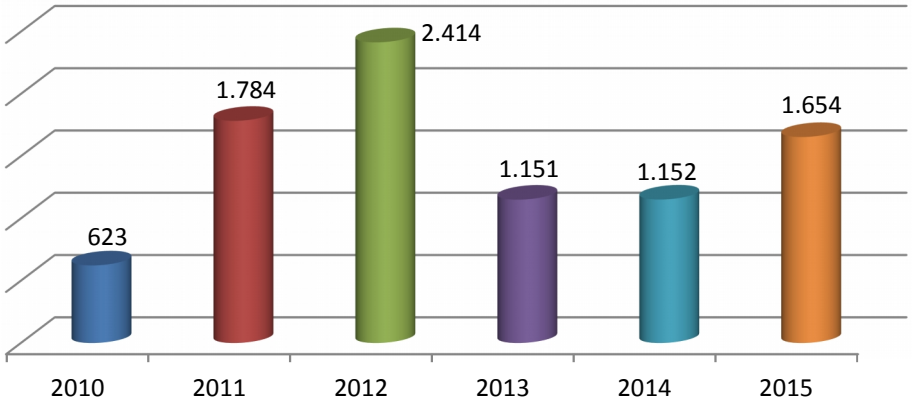

Tabel 3.53. Perbandingan dan Capaian Kinerja Penurunan Jumlah Titik Api Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Penurunan Jumlah titik api	1.782 titik	1.784 titik	2.414 titik	1.151 titik	1.152 titik	300 titik	1.654	18,13		300 titik

Sumber : Hasil pengolahan data 2016

Dari tabel di atas terlihat perkembangan terus meningkatnya jumlah titik api di Provinsi Jambi. Segala upaya telah dilakukan diantaranya hujan buatan, pemadaman secara manual orang-perorangan, namun bertepatan dengan datangnya musim kemarau yang cukup panjang serta bencana elnino membuat jumlah titik api semakin bertambah. Hal ini juga diperparah oleh ulah para perusahaan serta petani yang ingin membuka lahan dengan cara membakar lahan dengan alasan efisiensi.

Kondisi tersebut benar-benar menyadarkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk sebuah kerusakan lingkungan. Provinsi Jambi sebagai salah satu paru-paru dunia yang dikaruniai ekosistem lengkap, mulai dari pegunungan Kerinci di wilayah barat sampai dengan lahan basah Taman Nasional Berbak di kawasan Timur Provinsi Jambi. Provinsi Jambi juga memiliki lahan gambut terluas ketiga di Pulau Sumatera setelah Riau dan Sumatera Selatan. Kebakaran gambut mudah merambat ke bawah permukaan tanah akibatnya pemadaman kebakaran di lahan gambut menjadi sangat sulit dilakukan. Lahan gambut merupakan penyimpan karbon dengan jumlah yang sangat besar.

Bencana kebakaran hutan tahun 2015 telah dijadikan momentum dalam menata kembali, melaksanakan moratorium deforestasi, maupun mitigasi sebab-sebab kebakaran hutan di daerah.Dalam rangka mengefektifkan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, maka Pemda bersama DPRD Provinsi Jambi telah mengesahkan PERDA tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 26 Desember 2015. Perda tersebut merupakan inisiatif dari DPRD dan merupakan Perda pertama di seluruh Indonesia terkait

dengan antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang sangat parah/dahsyat beberapa bulan yang lalu. Salah satu pasal dalam Perda tersebut adalah melarang semua pihak untuk membakar hutan dalam pembersihan lahan.

Mengingat bencana asap tidak dapat diselesaikan oleh satu provinsi, maka Pemerintah Provinsi Jambi juga telah membawa masalah ini di Forum Gubernur Se-Sumatera. Dalam hal ini kedepan akan di bentuk Tim Modifikasi Cuaca (TMC) di masing-masing Provinsi yang tugasnya selain memonitor bencana yang diakibatkan oleh cuaca dan juga untuk memodifikasi cuaca yang berguna untuk peningkatan produksi pertanian dan perikanan. Oleh Sebab itu Pemerintah Provinsi Jambi menghimbau kepada para Bupati/Walikota untuk selalu waspada dan tanggap terhadap bencana, karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa Elnino akan terus pada level kuat hingga pada bulan Februari 2016 dan akan meluruh pada bulan berikutnya. Pada Bulan April dan Mei berpeluang untuk terjadinya peningkatan curah hujan hingga di atas normal dan sinyal akan adanya La Nina diprediksi akan terjadi pada akhir tahun 2016

Secara umum, dari tahun ke tahun trend jumlah titik api mengalami kenaikan, untuk itu diharapkan dengan adanya Perda pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tersebut berdampak positif terhadap berkurangnya jumlah titik api pada masa yang akan datang. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang terus berkomitmen dalam mengantisipasi dan melakukan upaya-upaya pemadaman secara sinergis, hal ini merupakan hasil dari berbagai program yang terkait peningkatan kualitas kelestarian sumber daya alam/lahan. Dalam tahun 2015, program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 4 program, yakni :

1. Program pengendalian dan pengrusakan lingkungan
2. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
3. Program fasilitasi dan pemulihan cadangan SDA
4. Program perlindungan hutan dan konservasi sumber daya hutan

Hambatan/kendala :

1. Kurangnya sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
2. Informasi tentang sumber daya manusia dan peralatan kebakaran yang dimiliki perusahaan di bidang kehutanan belum terinventarisir.
3. Lokasi Tahura sekitar tanjung merupakan lahan gambut yang terjadi kebakaran pada musim kemarau.
4. Masih kurangnya tenaga penyuluh dan Polhut.

Langkah antisipatif :

1. Koordinasi dengan Mangala Agni Provinsi Jambi lebih di tingkatkan.
2. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dikawasan konflik.
3. Pembuatan bloking kanal diareal gambut sehingga air tidak mengalir langsung ke sungai diharapkan lahan gambut akan tetap basah untuk mengurangi kebakaran.
4. Penambahan anggaran untuk penyegaran polhut dan tenaga penyuluh kehutanan.
5. Menginventarisir SDM dan perlengkapan kebakaran di Perusahaan bidang kehutanan dan yang berbatasan dengan kawasan hutan.

11. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup

a. Luasan Lahan Tertutup Pohon

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan sebagaimana Luas Kawasan Hutan Tetap di Provinsi Jambi berdasarkan SK Menhutbun RI No.421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 (cq. PERDA RTRW Provinsi Jambi No. 9 Tahun 1993 tanggal 27 Desember 1993) adalah seluas 2.179.440 Ha (42,73% Luas Daratan Jambi) dengan rincian :

a. Hutan Produksi Terbatas : 340.700,00 Ha (15,63%)
b. Hutan Produksi Tetap : 971.490,00 Ha (44,57%)

c. Hutan Lindung : 191.130,00 Ha (8,77%)
d. Hutan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam :

- ✓ Cagar Alam : 30.400,00 Ha (1,39 %)
- ✓ Taman Nasional : 608.630,00 Ha (27,92 %)
- ✓ Tahura : 36.660,00 Ha (1,68 %)
- ✓ Hutan Wisata Alam : 430,00 Ha (0,02 %)

Rasio luas kawasan tertutup berdasarkan kondisi saat ini di provinsi Jambi sebesar 64,80% persen (Dinas Kehutanan, 2014); telah diatas nasional yang hanya 52,43%, target ini akan terus meningkat dengan upaya-upaya penanaman satu milyar pohon (one Bilion Indonesia Tree). Upaya ini dilakukan oleh pemegang izin HTI, Pemegang izin HTR, Pemegang izin Perusahaan perkebunan, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota. Pohon yang ditanam sebanyak 56.634.327 batang dengan jarak tanam rata-rata 4x5 meter setara dengan luas 113.268,65 Hektar. Upaya ini perlahan meningkatan target kawasan tertutup pohon pada tahun 2015 dalam pencapaian target MDGs.

Kawasan hutan Provinsi Jambi meliputi luas ± 2.179.440,00 Ha atau 42,73% dari keseluruhan luas Provinsi Jambi. Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan di Provinsi Jambi pada tahun 2010 mencapai 46%, yang terdiri dari Kawasan Konservasi seluas 676.120 Ha, Kawasan Lindung seluas 191.130 Ha dan Kawasan lindung Gambut seluas 253.330 Ha. Luasan kawasan lindung ini jauh diatas nasional yang hanya 26,40 pada tahun 2009, tahun 2015 ditargetkan luasan ini terus meningkat. Pada tahun 2013, luasan kawasan hutan tertutup pohon mengalami peningkatan perluasan sebesar 75 Ha dari hasil reboisasi di kawasan tanaman hutan rakyat sekitar tanjung sehingga luasan kawasan hutan tertutup pohon pada tahun 2013 mencapai ± 1.120.655 Ha. Pada tahun 2014, peningkatan luasan lahan tertutup pohon meningkat seluas 100 Ha sesuai dengan target dalam perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan yakni sebesar 100 Ha menjadi ± 1.120.755 Ha. Pada tahun 2015, pelaksanaan program penanaman pohon terus dilanjutkan dengan menanam 100 Ha bibit pohon yan diharapkan dapat meningkatkan luas kawasan tertutup pohon pada tahun 2020. Oleh sebab itu, total luasan lahan tertutup pohon di provinsi Jambi pada tahun 2015 tetap berada pada luasan ± 1.120.755 Ha.

Gambar 3.22. Luas Kawasan Tertutup Pohon

Di tingkat nasional, rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial ini persentasenya sebesar 4,35 persen (Kementerian Kelautan,2009). Provinsi Jambi mempunyai 10% kawasan lindung perairan, sehingga saat ini status provinsi Jambi telah mencapai target MDGs tahun 2015 yaitu sebesar 10%. Untuk proposi tangkapan ikan yang berada pada batasan biologis aman di provinsi Jambi sebesar 71.820 ton/tahun sehingga status Jambi saat ini masih dibatas Maximum Sustainable Yield (MSY) yang ditentukan.

Gambar 3.23. Persentase luasan lahan tertutup pohon
Provinsi Jambi 2010 s.d. 2015

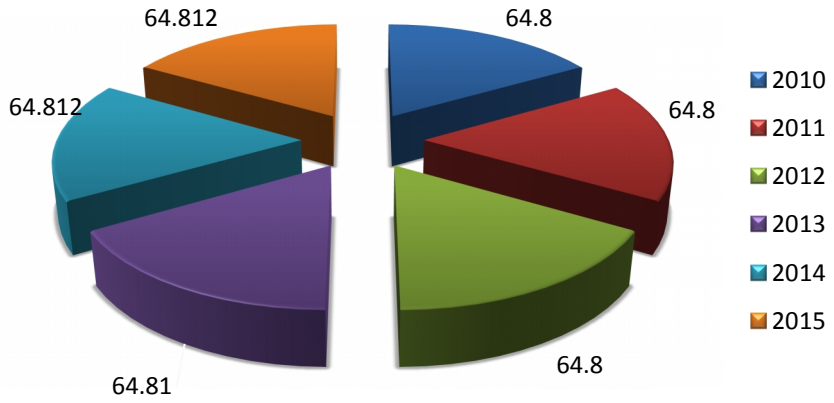

Capaian tersebut di atas tentunya tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam berbagai program yang saling terkait, diantaranya : Program pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan yang bertujuan memamfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, difokuskan dalam dua Inventarisasi Potensi Hutan yang telah dilakukan inventarisasi potensi pada 8 kabupaten, serta kegiatan Restrukturisasi Industri Kehutanan, Optimalisasi PNBP dari SDA sektor kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah melalui revitalisasi industri kehutanan dengan bahan baku yang legal dan berkelanjutan, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor kehutanan. Upaya ini juga dilakukan pada 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi.

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan didukung oleh capaian pemeliharaan atas tanaman unggulan lokal dan tanaman OBIT yang telah tertanam seluas 10 Ha serta terpeliharanya arboretum seluas 12 Ha. Terlaksananya pemeliharaan tanaman di 2 hutan tanaman rakyat seluas 147,75 Ha. Terbentuknya hutan desa sebanyak 24 unit yang berada di 3 Kabupaten (Merangin, Bungo, Batanghari) dengan total luas 54 ribu Ha. Selanjutnya peningkatan pengawasan batas sesuai target yaitu sepanjang 48,10 km meningkat sebesar 13,00 Km dari tahun 2012, serta sosialisasi tata batas di 6 (enam kecamatan yakni : Muara Sabak Barat (Kab. Tanjab. Timur), Dendang (Kab. Tanjab. Timur), Tebo Tengah (Kab. Tebo), Sumay (Kab. Tebo), Merlung (Kab. Tanjab. Barat), Pauh (Kab. Sarolangun). Terjaganya kawasan hutan dari perambahan dan terselesaikannya 9 kasus tindak pidana kehutanan. Terwujudnya konsep perubahan substansi kehutanan dalam tata ruang Provinsi Jambi yang telah melewati tahap uji konsistensi dari stakeholder dengan proses yang masih akan berlanjut di Tahun Anggaran 2015 mendatang.

Tabel 3.54. Persentase Luasan Lahan Tertutup Pohon Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase lahan tertutup pohon	64,80 (1.120.355 Ha)	64,80 (1.120.510 Ha)	64,80 (1.120.555 Ha)	64,81 (1.120.655 Ha)	64,812 (1.120.755 Ha)	65,5 (1.120.855 Ha)	64,81 (1.120.755 Ha)	98,94	64,81 (1.120.755 Ha)	65,5 (1.120.855 Ha)

Sumber : Hasil pengolahan data 2016

Capaian persentase rasio luasan lahan tertutup pohon sebagaimana tabel di atas merupakan upaya dalam rangka meningkatkan pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup dengan program yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini terdiri dari 7 program, yakni:

1. Program penataan kawasan
2. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya
3. Program pengendalian dan pengrusakan lingkungan
4. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

5. Program fasilitasi dan pemulihan cadangan SDA
6. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
7. Program rehabilitasi hutan dan lahan

Hambatan/kendala :

1. Ekosistem alami di kawasan tropika seringkali amat rentan terhadap degradasi. penebangan, kebakaran, penggembalaan, dan budidaya pertanian dan perladangan yang berlebihan membuat vegetasi asli sulit untuk pulih kembali. Perambahan hutan dan model-model pertanian yang tidak berkelanjutan telah mempercepat degradasi lahan dan penurunan kesuburan tanah sangat cepat. Lapisan tanah telah hilang, tanah menjadi keras sehingga vegetasi sulit untuk tumbuh.

Langkah antisipatif :

1. Melakukan reboisasi dan penghijauan dengan membuat hutan tanaman dengan jenis yang tumbuh cepat.
2. Perlu adanya pengaturan teknik penanaman baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga dapat meningkatkan secara optimal tujuan penghijauan dalam mencegah bahaya erosi dan banjir. Keberadaan pohon dan tegakan hutan tidak secara otomatis mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, justru peranan serasah dan tumbuhan bawah sangat besar dalam mencegah terjadinya bahaya erosi dan sedimentasi.

b. Indikator Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Hutan adalah sumberdaya alam yang multifungsi. Dalam kaitannya dengan efek pemanasan global hutan mengurangi kadar CO2 di udara dan memperangkapnya dalam bentuk biomassa hutan. Hutan klimaks ada dalam keseimbanagan dinamik yang tidak lagi berfungsi mengurangi kadar CO2. Jika dilakukan penebangan dengan cara yang benar, misalnya dengan tebang pilih yang mengikuti aturan, kerusakan yang terjadi adalah minimum. Pohon ditempat yang ditebang itu dipicu untuk tumbuh. Nisbah fotosintesis dan respirasi (P/R) naik sampai tercapai lagi keseimbangan. Oleh karena itu, jika penebangan dilakukan dengan baik akan menguntungkan dalam usaha penangkalan pemanasan global.

Reboisasi dan penghijauan dengan membuat hutan tanaman dengan jenis yang tumbuh cepat, penyerapan CO2 akan berjalan cepat. Karbon yang tersimpan dalam biomassa hutan tanaman akan lebih besar daripada biomassa dalam hutan yang rusak. Apabila hutan yang rusak itu telah menjadi padang rumput. Dengan demikian hutan tanaman itu akan membantu dalam penurunan kadar CO2 di udara. Akan tetapi pada umumnya biomassa hutan tanaman itu lebih rendah jumlah karbon yang tersimpan dalam hutan alam primer yang semula ada di tempat tersebut. Dengan demikaian hutan tanaman sulit untuk dapat sepenuhnya mengembalikan kadar CO2 udara pada tingkat seperti hutan klimaks, walaupun diproduksi bahan awet dari hutan tanaman. Apabila hutan tanaman dapat mengalihkan para pe ladang menjadi non-peladang, hutan yang rusak yang semula dipakai untuk perladangan akan dapat pulih secara alamiah.

Berdasarkan perhitungan dan analisis Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) 2010 terhadap pertumbuhan emisi dan mitigasi bahwa dalam skenario bisnis seperti biasa/business As Usual, Provinsi Jambi akan menjadi kontibutor emisi gas rumah kaca yang signifikan di Indonesia sampai tahun 2030. Selanjutnya diterangkan Emisi bersih GRK tahunan Jambi pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 57 MtCo2e[1]– setara dengan sekitar 3 persen dari total emisi Indonesia. Gambut dan Land Use and Land Use Change Forest (LULUCF) sejauh ini adalah kontibutor emisi terbesar terhadap emisi Provinsi Jambi, mewakili 85 persen dari total emisi provinsi, Apabila tidak terdapat perubahan dalam cara pengelolaan sektor-sektor beremisi tinggi, emisi netto Jambi diperkirakan akan meningkat hingga 30 persen antara tahun 2005 dan 2030 dari 57 Mt CO2e menjadi 74 MtCO2e.

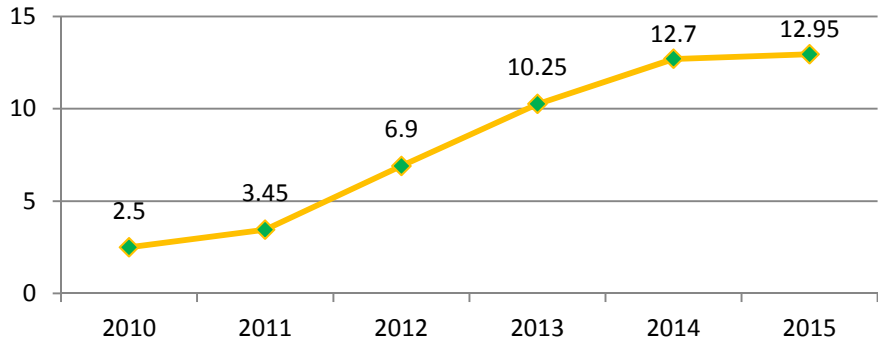

Grafik 3.26. kemampuan
penurunan emisi gas rumah kaca (dalam MtCO2)

Pro Environment merupakan salah satu Strategi pembangunan Provinsi Jambi, untuk itu dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 mempunyai Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 69 Mt CO2 hingga tahun 2030 atau 17,25 MtCO2 selama 5 tahun (yaitu 53% dari lahan gambut dan 36 % dari kehutanan). Menurut Perhitungan yang dilakukan oleh Dewan Nasional Perubahan Ikim, Jambi memiliki potensi untuk menurunkan emisi GRKnya sampai dengan 55 MtCO2e hingga tahun 2030, dengan perpaduan yang tepat antara kebijakan dalam negeri dan dukungan internasional. Dari kemungkinan-kemungkinan penurunan ini, 48 persen datang dari upaya upaya terkait konservasi lahan gambut dan 38 persen berasal dari sektor LULUCF. mewakili 80 persen total potensi pengurangan Jambi :

1. Mencegah pembakaran hutan dan lahan gambut ;
2. Mengurangi deforestasi hutan melalui penggunaan lahan yang lebih efektif, kebijakan-kebijakan alokasi lahan dan dengan meningkatkan produktivitas pertanian;
3. Merehabilitasi lahan gambut yang tidak digunakan atau yang rusak;
4. Mengelola hutan secara lestari; dan
5. Melakukan reboisasi.

Beberapa Program yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi emisi karbon di Provinsi Jambi adalah :

1. Natural Resource Management, diantaranya pembenahan tata ruang dan rehabilitasi lahan, dalam hal ini Provinsi Jambi saat ini sedang melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
2. Renewable Energy: Hydro power, Solar cell dan biomass,
3. Capacity and Human Resource Management : UMKM, Koperasi desa, capacity building, pengembangan sekolah kejuruan green dan riset.

Selain upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan Pergub Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca yang bertujuan untuk memberi panduan kepada Pemerintah Provinsi Jambi serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembangunan rendah karbon sehingga konsistensi pelaksanaannya menjadi terukur dan terarah serta mampu mendukung konsistensi pembangunan rendah karbon secara nasional. Sampai tahun 2014 Pemerintah provinsi Jambi telah menangani emisi gas rumah kaca sebesar 12,70 Mt CO_2. Pada tahun 2015, kemampuan meningkatkan upaya pengurangan emisi karbon sampai dengan 17,25MtCO_2 belum tercapai dengan baik dan hanya mencapai angka 12,95MtCO_2. Kondisi ini terjadi disebabkan karena adanya bencana kebakaran hutan dan lahan yang membuat emisi karbon terus meningkat, sedangkan kemampuan menurunkan relatif memakan waktu yang cuku lama.

Tabel 3.55. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Emisi gas rumah kaca tertangani	2,5 Mt CO_2	3,45 Mt CO_2	6,90 Mt CO_2	10,25 Mt CO_2	12,70 Mt CO_2	17,25 Mt CO_2	12,95 Mt CO_2	75,07	12,95 Mt CO_2	17,25 Mt CO_2

Sumber : Hasil pengolahan data 2015

12. Sasaran Terselenggaranya Tata Pemerintahan Yang Baik

a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dan Asset Daerah

Target kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Provinsi tahun 2015 dengan predikat WTP telah tercapai sebagaimana target tahun 2015. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah, disiplin aparatur dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta mendeteksi secara dini terhadap kecurangan pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksaan/pembinaan terhadap 45 objek pemeriksaan (Obrik) dengan 36 penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau 80% dari target yang telah direncanakan sebelumnya.

Gambar 3.24. Penerimaan Opini WTP oleh BPK RI kepada Gubernur Jambi

Adapun progres tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi dari tahun 2010 s.d. 2015 dapat dijelaskan bahwa jumlah temuan sebanyak 1.863 dengan 3.428 rekomendasi. Terhadap rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 2.376 rekomendasi, dalam proses penyelesaian sebanyak 277 rekomendasi dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 775 rekomendasi.

Pada tahun 2015 Inspektorat Provinsi Jambi telah melakukan pemeriksaan reguler di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dapat dijelaskan bahwa terdapat temuan sebanyak 321 dengan 547 rekomendasi dari jumlah tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 191 rekomendasi atau 34,92 persen, dalam proses penyelesaian sebanyak 31 rekomendasi atau 5,67 persen dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 325 rekomendasi atau 59,41 persen.

Dari hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Itjend Kementerian Dalam Negeri periode tahun 2015 terdapat 72 temuan (Tujuh puluh dua) temuan dengan 129 (Seratus dua puluh sembilan) rekomendasi. Atas rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 42 rekomendasi atau 36,20 %, sedangkan 74 rekomendasi atau 63,20% lainnya masih dalam proses. Adapun terhadap rekomendasi yang masih dalam proses adalah merupakan rekomendasi terhadap Hasil Pemeriksaan yang baru dilaksanakan pada tahun 2014.

Hasil pemeriksaan BPK-RI periode 2002-2015 sebanyak 588 temuan dengan 1312 rekomendasi terdiri dari Pemeriksaan LKPD, Pemeriksaan pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada pada KPUD dan Panwas Provinsi Jambi, Pemeriksaan Bantuan Parpol, Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Bantuan ADB pada Inspektorat Provinsi Jambi, Pemeriksaan atas dana perimbangan, Pemeriksaan atas Belanja Provinsi Jambi, Pemeriksaan Kinerja RSUD, Pemeriksaan Pendapatan, Pemeriksan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS dan

Dana Pendidikan Dasar Lainnya, pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungajwaban program Jamkesmas, Pemeriksaan Penggunaan Dana STAR SDP pada Inspektorat Provinsi Jambi, Pelaksanaan Kerja Sama Kontrak Produksi Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Jambisapta Manunggal Pratama Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel dan Resort, Pemeriksaan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Pemeriksaan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada PT JII dan PT SPP di Jambi serta Pemeriksaan atas operasional PT. BPD Jambi Tahun Buku 2012 dan 2013.

Dari jumlah tersebut Pemerintah Provinsi Jambi melalui Inspektorat Provinsi Jambi telah melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dengan hasil selesai ditindak lanjuti sejumlah 191 rekomendasi atau 34,92 persen, dalam proses penyelesaian tindaklanjut sebesar 31 rekomendasi atau 5,65 persen dan belum ditindaklanjuti sebanyak 325 rekomendasi atau 59,41 persen.

Perbandingan capaian kinerja opini BPK Pemerintah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.56. Perbandingan Capaian Kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah & Asset Daerah Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP

Sumber : Hasil pengolahan data 2016

Pencapaian kinerja opini BPK atas laporan keuangan dan asset daerah tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dengan melaksanakan program-program sebagai berikut ;

1. Program peningkatan kapasitaas sumber daya aparatur.
2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
4. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan.

Hambatan/kendala :

Beberapa penyebab utama yang menjadi permasalahan selama melakukan program prioritas baiknya opini BPK RI terhadap pengelolaan keuangan dan asset daerah Provinsi Jambi selama tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

1. Terbatasnya Jumlah Personil yang memahami Kasus-kasus tertentu.
2. Adanya tahapan penyelesaian kasus yang memerlukan pendalaman sehingga memerlukan waktu yang relatif lama.
3. Masih terdapat Objek Pemeriksaan (SKPD) yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan sebelumnya karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap Obrik yang tidak/belum melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan.

Langkah antisipatif :

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus seperti diklat audit Investigasi.
2. Mengupayakan penyelesaian kasus tahapan dan waktu yang lebih singkat.
3. Perlu adanya sanksi yang jelas dan tegas sehubungan dengan pelaksanaan tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan, baik yang berhubungan dengan pemeriksaan oleh BPK maupun oleh APFP.
4. Menyarankan SKPD agar lebih pro aktif berkoordinasi dengan lembaga pemeriksa, baik APFP maupun BPK sehingga tindaklanjut dapat dilaksanakan dengan cepat.
5. Mengupayakan pola yang tepat menghubungkan antara Obrik/SKPD dengan pihak ketiga dalam menindaklanjuti temuan yang ada.

b. Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Provinsi Jambi, dan Kabupaten /Kota

Sebagai konsekuensi diratifikasinya *United Nations Convention against Corruption* (UNCA) oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No.7 Tahun 2006, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kembali terhadap langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Direktorat Hukum dan HAM Bappenas sejak tahun 2006 telah mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi 2011-2025 yang lebih komprehensif, yang dijadikan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholders*. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2011-2025 tersebut ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasikan dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai dampak yang konkrit bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dan konsolidasi demokrasi.

Sebagai penjabaran rencana aksi jangka panjang 2011-2025, dibuat rencana aksi jangka menengah 2011 - 2015. Selain itu dibentuk juga rencana aksi yang lebih tajam dan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh Kementerian / Lembaga secara tahunan. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Tahunan ini dimulai pada akhir tahun 2010 dengan melibatkan Kementerian / Lembaga terkait.

Pelaksanaan ADPPK Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota telah bergulir sejak tahun 2013. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan ralisasi pencapaian AD PPK tahun 2015 yang dilaksanakan oleh 33 (tiga puluh tiga) provinsi dan 40 (empat puluh) kabupaten serta 33 (tiga puluh tiga) kota pada bulan Desember (B12) tahun 2015 yang disampaikan kepada Kementerian terkait rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi diantaranya Irjen Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, LKPP, diperoleh hasil verifikasi AD PPK Provinsi Jambi dari 9 aksi pada B12 mendapatkan predikat Memuaskan (Hijau = 9 Aksi) dengan capaian 100%, sedangkan capaian AD PPK Kab/Kota dalam Provinsi Jambi tahun 2015 3berdasarkan hasil verifikasi terhadap laporan atas realisasi pencapaian 88 aksi yang ditetapkan dalam AD-PPK pada 2 (dua) Kota dan 8 (delapan) Kabupaten pada pelaporan Bulan Desember 2015 (B12) diperoleh hasil sebagai berikut :

a. 53 aksi (60,23 %) memperoleh kategori hijau atau dengan predikat memuaskan
b. 35 aksi (39,77 %) memperoleh kategori merah atau dengan predikat mengecewakan

Pada tahun 2015, berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi terhadap laporan atas realisasi pencapaian aksi yang ditetapkan dalam aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (ADPPK) pada bulan Desember (B12) tahun 2015, diperoleh capaian realisasi aksi daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabuapten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.57. Realisasi ADPPK Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota B12 Tahun 2015

No.	Provinsi, Kab/Kota	Capaian Aksi				Jumlah Aksi	% Capaian
		Hijau	Kuning	Merah	Abu		
1.	Pemprov Jambi	9				9	100
2.	Pemkab Batanghari	4		4		8	50
3.	Pemkab Bungo	8				8	100
4.	Pemkab Kerinci	1		7		8	12,5
5.	Pemkab Merangin	5		3		8	62,5
6.	Pemkab Muaro Jambi	7		1		8	87,5
7.	Pemkab Sarolangun	5		3		8	62,5
8.	Pemkab Tanjab Barat	6		2		8	75
9.	Pemkab Tanjab Timur	4		4		8	50
10.	Pemkab Tebo	7		1		8	87,5
11.	Pemkot Jambi	4		4		8	50
12.	Pemkot Sungai Penuh	2		6		8	25

Atas hasil capaian AD PPK Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota sebagaimana tabel di atas, bahwa capaian AD PPK Provinsi Jambi mendapatkan apresiasi yang sangat baik terbukti dari hasil verifikasi dengan kategori hijau untuk seluruh rencana aksi yang dilaporkan. Sedangkan rencana aksi yang masih mengalami kendala yakni dari Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Diberikannya kategori merah pada penilaian tersebut dikarenakan ukuran keberhasilan yang ingin dicapai tidak didukung data sesuai aksi.

Tabel 3.58. Perbandingan Capaian Kinerja ADPPK Provinsi Jambi dan Kab/Kota Tahun 2013 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja		2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
% Penilaian AD PPK Prov. Jambi	-	66,6 8 Aksi (kuning)	100 8 Aksi (hijau)	100 8 Aksi (hijau)	100 8 Aksi (hijau)	100 8 Aksi (hijau)	100 8 Aksi (hijau)	100 8 Aksi (hijau)
% AD-PPK Kab/Kota	-	-	70	100 (11 Kab/Kota	45 (5 Kab/Kota)	45,45	70	100

Sumber : Hasil pengolahan data 2016

Capaian kinerja meningkatnya aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota sesungguhnya tidak terlepas dari dukungan berbagai 9 program, antara lain :

1. Prorgram penerapan tata pemerintahan yang baik.
2. Program reformasi birokrasi.
3. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
5. Program pengembangan komunikasi dan informasi media massa.
6. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
7. Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan.
8. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
9. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Hambatan/kendala :

Permasalahan daerah yang masih mendapat nilai merah antara lain :

1. Data dukung tidak sesuai target capaian.
2. Tidak ada laporan akibat offline internet daerah.
3. Terjadinya mutasi jabatan pada pengelola aksi, dan belum mengetahui cara pelaporan aksi.

Langkah antisipatif :

1. Solusi yang bisa dilakukan adalah sosialisasi ADPPK yang lebih optimal.
2. Mendorong SKPD terkait di daerah provinsi, dan kab/kota untuk melaksanakan ADPPK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Melaporkan permasalahan yang diterima dalam mengimplementasikan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai amanat Inpres Nomor 2 tahun 2014.
4. Mengefektifkan tugas Tim koordinasi ADPPK pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kab/Kota yang dipimpin oleh sekretaris daerah masing-masing dan asisten sekda yang membidangi pemerintahan untuk memantau realisasi pencapaian dan pelaporan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Meningkatkan peran Bappeda provinsi dan Kab/Kota dalam memantau dan memverifikasi laporan pencapaian ADPPK serta kelengkapan data dukung yang menjadi syarat memenuhi target capaian yang telah ditetapkan.
6. Mendorong SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan AD-PPK Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk dapat merealisasikan pencapaian target yang ditetapkan.

7. Mengefektifkan tugas tim koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Pemerintahan untuk melaksanakan dan merealisasikan pencapaian aksi dan pelaporan AD-PPK Kabupaten/Kota.

c. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) / Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Provinsi Jambi

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendayagunaan aparatur negara bidang pelayanan publik melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bidang pelayanan publik melalui KepMenPAN Nomor : 81/1995 yang menyebutkan bahwa layanan prima adalah layanan yang memberikan kepuasan pelanggan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berbagai keluhan masyarakat atas rendahnya kinerja pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah baik pelayanan di bidang perizinan, administrasi, pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit termasuk pula pelayanan oleh badan usaha milik daerah, perlu segera diupayakan perbaikannya. Keluhan masyarakat yang tidak segera di respon oleh pemerintah akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat/Survei Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Berbagai unsur yang ada dalam survei tersebut dapat dijadikan acuan dan tolok ukur perbaikan pelayanan pada masa yang akan datang.

Pelaksanaan Survei IKM/SKM secara berkala telah dilakukan oleh Pemeritah Provinsi Jambi. Pada tahun 2014, pelaksanaan survei IKM lingkup Pemerintah Provinsi Jambi telah dilakukan pada 16 (enam belas) SKPD dengan unit pelaksanaan survei sebanyak 30 unit, dan pada tahun 2015 pelaksanaan survei SKM SKPD dilakukan pada 34 SKPD, berikut disajikan skor rata-rata hasil penilaian survei SKM lingkup SKPD Provinsi Jambi yang dijadikan sampel yang mengiterpretasikan kinerja pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2015, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.59. Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2015

NO	NAMA SKPD	UNSUR PELAYANAN									Rata-rata	NILAI HURUF
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Inspektorat Provinsi Jambi	77.50	67.50	65.00	70.00	70.00	70.00	72.50	70.00	42.50	**67.16**	**B**
2	Bappeda Provinsi Jambi	75.00	75.00	70.00	72.50	72.50	80.00	87.50	72.50	57.50	**73.54**	**B**
3	Balitbangda Provinsi Jambi	75.00	80.56	77.78	75.00	72.22	75.00	75.00	69.44	50.00	**72.15**	**B**
4	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	83.33	79.17	77.08	81.25	83.33	91.67	87.50	77.08	81.25	**82.33**	**A**
5	Badan Lingkngan Hidup Provinsi Jambi	75.00	76.56	70.31	75.00	75.00	76.56	75.00	75.00	89.06	**76.31**	**B**
6	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	75.00	76.56	76.56	75.00	76.56	75.00	79.69	76.56	62.50	**74.75**	**B**
7	Badan Penanaman Modal Daerah dan PPT Provinsi Jambi	77.50	77.50	72.50	100.00	82.50	85.00	90.00	72.50	97.50	**83.81**	**A**
8	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi	76.79	80.36	80.36	69.64	78.57	85.71	80.36	76.79	67.86	**77.30**	**B**
9	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	75.00	80.00	75.00	82.50	80.00	82.50	82.50	80.00	90.00	**80.75**	**B**
10	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PP Provinsi Jambi	80.00	77.50	75.00	77.50	77.50	75.00	80.00	80.00	97.50	**79.92**	**B**
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi	70.00	67.50	60.00	67.50	75.00	65.00	70.00	75.00	52.50	**66.88**	**B**
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi	75.00	82.50	77.50	80.00	77.50	85.00	82.50	85.00	80.00	**80.48**	**B**
13	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	75.00	77.50	77.50	72.50	75.00	75.00	72.50	75.00	77.50	**75.20**	**B**
14	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	71.08	74.02	68.63	73.00	74.02	77.45	73.53	69.12	76.96	**73.02**	**B**
15	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi	73.78	76.22	71.34	73.78	76.22	75.00	75.00	76.83	80.49	**75.33**	**B**
16	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	75.00	75.00	70.00	77.50	77.50	75.00	75.00	77.50	72.50	**74.93**	**B**

17	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	81.25	75.00	75.00	93.75	75.00	75.00	81.25	75.00	87.50	**79.78**	B
18	Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	79.63	83.33	79.63	85.19	81.48	81.48	81.48	81.48	77.78	**81.19**	B
19	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi	77.78	77.78	66.67	91.67	75.00	75.00	77.78	80.56	75.00	**77.39**	B
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	78.79	74.24	78.79	85.16	81.06	82.58	83.33	79.55	67.42	**78.91**	B
21	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jambi	73.21	71.43	69.64	69.05	73.21	77.38	78.57	73.21	75.60	**73.41**	B
22	Dinas Sosial, Tenagakerja, dan Transmigrasi Provinsi Jambi	73.33	78.33	75.00	80.00	76.67	76.67	78.33	76.67	80.00	**77.15**	B
23	Dinas Pendapatan Provinsi Jambi	80.49	73.78	72.56	79.88	77.44	80.49	74.39	80.49	87.80	**78.51**	B
24	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	75.00	80.00	75.00	100.00	75.00	75.00	75.00	75.00	50.00	**75.48**	B
25	Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Jambi	75.00	75.00	72.50	75.00	75.00	75.00	77.50	75.00	97.50	**77.42**	B
26	Sekretariat Dewan Pembina Pengurus KORPRI Provinsi Jambi	77.50	75.00	77.50	75.00	70.00	75.00	77.50	67.50	42.50	**70.76**	B
27	Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi	77.78	88.89	75.00	88.89	80.56	80.56	86.11	80.56	44.44	**78.01**	B
28	Biro Hukum Setda Provinsi Jambi	72.5	75.00	75.00	75.00	77.5	75.00	75.00	75.00	45	**71.60**	B
29	Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi	67.5	67.5	57.5	55	67.5	67.5	67.5	57.5	47.5	**61.61**	C
30	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	75.00	78.13	78.13	84.38	81.25	78.13	81.25	81.25	84.38	**80.13**	B
31	Biro Umum Setda Provinsi Jambi	78.13	75.00	75.00	90.63	78.13	75.00	81.25	75.00	65.63	**77.01**	B
31	Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	100.00	**77.70**	B
32	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**81.64**	A
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75.10**	B
34	Sekretariat Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**70.73**	B
	NILAI RATA-RATA SKM PROVINSI JAMBI	**75.87**	**76.46**	**73.20**	**78.95**	**76.35**	**77.30**	**78.43**	**75.53**	**71.99**	**76.01**	**B**

Berdasarkan rekapitulasi hasil survei, diperoleh nilai SKM Pemerintah Provinsi Jambi dengan mutu rata-rata pelayanan "B" dan kinerja unit pelayanan termasuk kategori "BAIK" yang artinya tingkat kepuasan pelayanan pada Pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata tahun 2015 yakni 76,01 dengan predikat B.

Grafik 3.27. Trend rata-rata skor survey IKM / SKM Provinsi Jambi 2013 - 2015

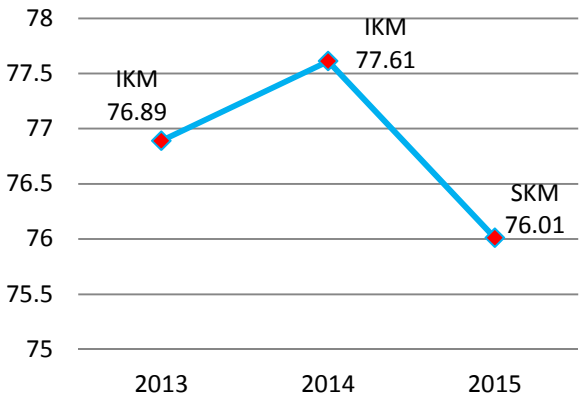

Jika dilihat dari rata-rata unsur pelayanan dari masing-masing SKPD, sebagaimana indikator yang terdapat dalam unsur SKM antara lain : Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif Pelayanan, Produk/Hasil Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Perilaku Petugas Pelayanan, Maklumat Pelayanan, serta Mekanisme Pengaduan Pelayanan rata mendapatkan skor diatas 70.

Rata-rata capaian skor per unsur dapat dilihat pada grafik disamping :

Dari rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2015 paling tinggi diperoleh dari unsur Biaya/tarif pelayanan dan disusul dengan unsur Perilaku Petugas Pelayanan, serta kemampuan petugas pelayanan. Sedangkan unsur yang mendapatkan skor rata-rata terendah yakni pada unsur Menaknisme pengaduan pelayanan, dan unsur Waktu pelayanan.

Grafik 3.28. Capaian SKM Per Unsur

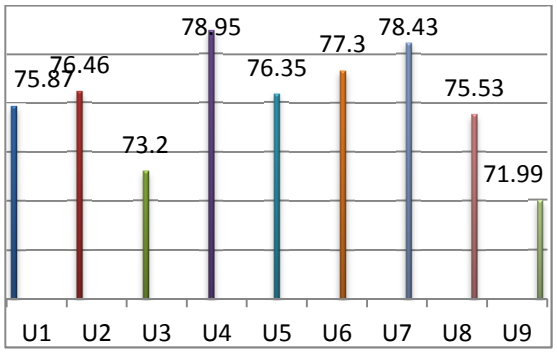

Tabel 3.60. Perbandingan dan Capaian Kinerja Peningkatan Skor SKM Pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2013 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Skor IKM / SKM Pemerintah Provinsi Jambi	-	-	-	76,89 (B)	77,61 (B)	85 (A)	76,01 (B)	89,42	77,61	> 85 (A)

Sumber : Hasil pengolahan data 2016

Pencapaian kinerja peningkatan skor SKM ini diharapkan akan meningkat pada masa yang akan datang, terlepas dari belum seluruhnya SKPD yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat namun langkah ini merupakan upaya untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan yang diberikan oleh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang dijadikan sampel sebagai cerminan pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ini antara lain dengan melaksanakan program berikut ;

1. Program peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Program penerapan tata pemerintahan yang baik.
3. Program penguatan akuntabilitas kinerja.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Hambatan/kendala :

1. Belum seluruhnya SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang melaksanakan survei SKM terhadap pelayanan SKPD maupun unit pelayanan di wilayah kerjanya.
2. Beberapa SKPD yang telah melakukan survei belum memberikan laporan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan survei SKM yang dilaksanakannya.

Langkah antisipatif :

1. Mendorong dan memotivasi SKPD untuk melaksanakan survei SKM pada unit kerjannya secara berkala, yang didukung oleh ketersediaan anggaran yang cukup sebagai sumberdaya pelaksanaan survei SKM yang harus dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.
2. Mengingatkan SKPD untuk segera menyampaikan laporan hasil pelaksanaan survei SKM tersebut kepada Gubernur Jambi melalui leading sektor pelaksanaan survei SKM yakni Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

d. Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD

Provinsi Jambi 2010-2015, perhatian Provinsi Jambi akan pentingnya akuntabilitas, bisa dilihat dalam rumusan misi ke-5 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak.

Capain kinerja yang sudah diraih menunjukkan hasil yang belum maksimal. Target yang ditetapkan adalah nilai B untuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi, belum berhasil dicapai (0%). Belum tercapainya target kinerja ini dikarenakan belum maksimalnya perumusan

indikator dalam perencanaan kinerja, baik itu indikator (outcome) maupun indikator kinerja (output) SKPD. Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi kinerja pemerintah daerah tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB pada Desember 2015.

Grafik 3.29. Trend Perolehan Skor SAKIP Provinsi Jambi 2010 - 2015

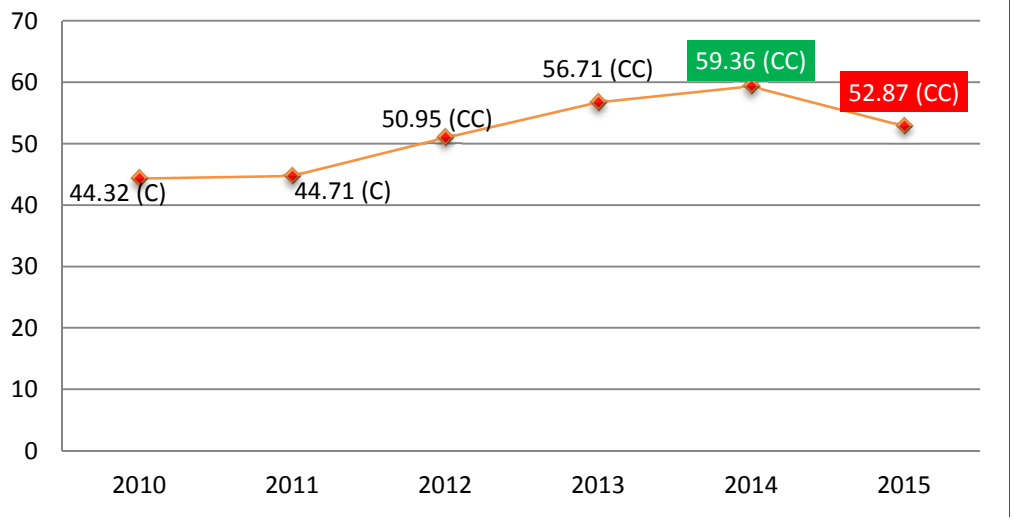

Tabel 3.61. Perbandingan dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi	C 44,32 Penilaian LAKIP 2009	C 44,71 Penilaian LAKIP 2010	CC 50,95 Penilaian LAKIP 2011	CC 56,71 Penilaian LAKIP 2012	CC 59,36 Penilaian LAKIP 2013	B >60 Peniaian LKj 2014	CC 52,87 Penilaian LKj 2014	81,33	CC 52,87 Penilaian LKj 2014	B >60

Sumber : Hasil pengolahan data 2016

Menurut penilaian Kemenpan RB, beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah Provinsi Jambi meraih nilai 52,87 atau masih mencapai predikat CC (cukup baik namun perlu perbaikan yang tidak mendasar). Capaian ini memperoleh persentase sebesar 81,33% dari target yang ingin dicapai yakni sebesar 60%.
b. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang dievaluasi.

c. Pemerintah Provinsi Jambi telah membangun akuntabilitas kinerja pada tingkat pemerintah provinsi dan SKPD dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi perencanaan, kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

d. Secara umum, evaluasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi cukup baik, namun ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk perbaikan ke depan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.62. Hasil Evaluasi Kemepan RB RI atas Akuntabilitas Kinerja Provinsi Jambi Tahun 2014 (2015)

Aspek	Tantangan dan Rekomendasi
Perencanaan Kinerja	Tantangan : 1. Pemerintah Provinsi Jambi belum mengupayakan perubahan yang signifikan dalam penerapan manajemen kinerja, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut : 2. Masih terdapat ketidakselarasan antara kondisi yang ingin diwujudkan jangka menengah dengan setiap tahunnya. 3. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan belum cukup untuk mengukur kondisi yang ingin diwujudkan 4. Rumusan Renstra beserta ukuran keberhasilannya belum sepenuhnya dijabarkan (cascade down) kedalam berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja. Rekomendasi : 1. Merumuskan ha-hal yang ingin diwujudkan pada RPJMD periode yang akan datang dengan mendasarkan pada mekanisme pencapaian "HASIL" (outcome) yang diinginkan di akhir periode RPJMD. 2. Menciptakan keselarasan antara perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang akan ditetapkan. 3. Menyempurnakan kualitas ukuran keberhasilan pada RPJMD menjadi berorientasi pada "HASIL" (outcome), relevan, terukur, dan cukup untuk mengukur kondisi yang ingin dicapai pada jangka menengah maupun capaian target setiap tahunnya. 4. Memerintahkan Bappeda, BKD, Biro Organisasi, untuk menjabarkan lebih lanjut sasaran strategis dan indikator kinerja pada RPJMD tersebut hingga sinergi dengan indikator kinerja individu yang ada pada SKPD (sesuai tupoksi & peran yang diharapkan).
Pengukuran Kinerja	Tantangan : 1. Belum terbangun mekanisme pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkelanjutan pada level Provinsi maupun SKPD. 2. Evaluasi pelaksanaan program belum memberikan hasil yang maksimal, masih dijumpai ketidakselarasan antara kegiatan, hasil program, serta peran yang diemban setiap SKPD 3. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan belum cukup untuk mengukur kondisi yang ingin diwujudkan Rekomendasi : Menyempurnakan kualitas ukuran keberhasilan pada RPJMD menjadi berorientasi pada "HASIL" (outcome), relevan, terukur, dan cukup untuk mengukur kondisi yang ingin dicapai pada jangka menengah maupun capaian target setiap tahunnya.
Pelaporan Kinerja	Tantangan : LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014 yang disusun telah disampaikan kepada Menteri/Kepala Bappenas, Menteri PAN dan RB RI, dan Menteri Dalam Negeri RI. Terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaporan kinerja, antara lain : 1. LKj terutama di tingkat SKPD belum sepenuhnya menyajikan informasi

	pencapaian sasaran yang berorientasi outcome/hasil, dan lebih banyak menyajikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 2. LKj terutama di tingkat SKPD belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja secara memadai Rekomendasi : Menyempurnakan penyajian informasi dalam LKj terutama di SKPD mengenai capaian target kinerja yang tela diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan disertai penjelasan yang cukup mengenai hasil analisis kinerja
Evaluasi	Tantangan : Hasil evaluasi belum belum maksimal ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja. Demikian juga, Pemerintah Provinsi Jambi belum melakukan evaluasi program secara memadai dalam rangka menilai keberhasilan program strategis Rekomendasi : 1. Membangun aplikasi pemantauan kinerja yang akan memudahkan mekanisme pemantauan kinerja dan mekanisme pengumpulan data kinerja. 2. Menyederhanakan rumusan program dan kegiatan dengan fokus pada "HASIL" yang diharapkan. 3. Memerintahkan Inspektorat untuk meningkatkan "kualitas evaluasi" akuntabilitas kinerja di setian SKPD. 4. Meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan seluruh Kabupaten/Kota agar terwujud peningkatan kualitas implementasi SAKIP yang merata.

Selain tantangan sebagaimana substansi pada tabel di atas, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah mengembangkan transparansi dan akuntabilitas kinerja melalui sarana teknologi informasi. Saat ini keterbukaan informasi tentang perencanaan dan anggaran telah dipublikasikan dalam web Provinsi Jambi di jambiprov.go.id dalam transparansi kebijakan pembangunan, transparansi anggaran, dan keterbukaan ruang publik dalam pembangunan Provinsi Jambi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah mengaplikasikan sistem e-SAKIP dalam pengumpulan data kinerja yang terarah dan terukur sejak tahun 2013 dan masih berlangsung hingga tahun 2015.

Gambar 3.25. Kebijakan Pembangunan, Transparansi Anggaran,
Keterbukaan informasi publik, serta aplikasi e-SAKIP

Melalui web ini, publik juga dapat memberikan saran dan kritik membangun terkait perkembangan pembangunan Provinsi Jambi. Namun tidak dipungkiri seiring berkembangnya teknologi, juga perlu diimbangi dengan kemampuan akses informasi yang lebih baik. Untuk menunjang keberhasilan transparansi tersebut, maka telah dilakukan upaya dalam bentuk pelaksanaan program-program sebagai berikut :

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
4. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.
5. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
6. Program tata kelola pemerintahan yang baik.

Hambatan/kendala :

1. Persoalan dengan pengembangan sarana-sarana untuk membuka transparansi dan akuntabilitas adalah sejauh mana sarana-sarana dan sistem informasi berbasis teknologi informasi sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Sistem yang tersedia sebagai sarana pengembangan akuntabilitas belum seluruhnya menjangkau masyarakat yang belum melek teknologi. Strategi ini juga penting karena proporsi masyarakat yang belum melek teknologi jumlahnya lebih banyak
3. Juga penting untuk menggali, sejauh mana aplikasi dan data berbasis teknologi informasi ini telah dipakai sebagai pijakan perbaikan perencanaan tahun/periode setelahnya.

Langkah antisipatif :

1. Pemanfaatan informasi dan hasil analisis pengendalian untuk perbaikan kualitas perencanaan pada periode berikutnya.
2. Penyebarluasan informasi dan prosedur untuk penerapan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menjamin hak masyarakat dalam kebijakan publik.

13. Sasaran Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan

a. Indikator Kinerja Persentase Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Beberapa Indikator capaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut MDGs antara lain :

Tabel 3.63. Indikator Kesetaraan Gender MDGs (Nasional)

Indikator		Acuan Dasar	Capaian 2014	Target Capaian MDGs 2015		Sumber
				Target	Realisasi	
1.	Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi					BPS, Susenas
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	100,27 (1993)	99,28%	100,00	100,00	
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	99,86 (1993)	104,10%	100,00	100,00	
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	93,67 (1993)	103,28%	100,00	100,00	
	Rasio APM perempuan/laki laki di Perguruan Tinggi	74,06 (1993)	112,01%	100,00	100,00	
2.	Rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	98,44 (1993)	100,34%	100,00	100,00	
3.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non-pertanian	29,24% (1990)	35,53%	Meningkat	Meningkat	BPS, Sakernas
4.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12,50% (1990)	17,32%	Meningkat	Meningkat	KPU

Sumber : Laporan MDG's 2014

Keadaan dan Kecenderungan

Capaian Target MDGs dipantau dengan menggunakan 3 pendekatan yakni pendidikan, ketenagakerjaan dan politik. Di bidang pendidikan kesetaraan gender diukur dengan menggunakan rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan rasio angka melek huruf penduduk berusia 15-24 tahun. Rasio indikator perempuan terhadap laki-laki merupakan indeks paritas gender (IPG). Kesetaraan gender dikatakan

sudah terwujud apabila indeks paritas gender sama dengan seratus persen. Jika IPG lebih kecil dari 100 persen, berarti terjadi ketimpangan gender di mana kondisi laki-laki lebih baik dan jika IPG lebih besar dari 100 persen, terjadi ketimpangan gender di mana konsisi perempuan lebih baik. Untuk mengukur capaian dua bidang lainnya, yaitu a) bidang ketenagakerjaan : digunakan indikator kontribusi perempuan dalam kerja upahan di sektor non-pertanian, sedangkan b) bidang politik indikator yang digunakan untuk mengetahui keterlibatan perempuan dalam bidang pengambilan keputusan publik digunakan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR.

Kesetaraan gender di bidang pendidikan di Indonesia sudah berada pada posisi yang menggembirakan. Pada tahun 2014 rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SD (99,28 persen) serta rasio AMH (100,34 persen) sudah sangat dekat dengan Target MDGs 100 persen, artinya kesetaraan gender sudah terwujud dan kondisi seperti ini harus dipertahankan Pada jenjang SMP, rasio APM adalah sebesar 104,10 persen dan rasio APM SMA sebesar 103,28 persen, dan kondisi ini sudah sesuai dengan harapan karena mendekati capaian MDGs (100 persen). Hal ini perlu dijaga agar peningkatan APM perempuan jangan sampai menurunkan APM laki-laki. Seperti yang terjadi pada jenjang perguruan tinggi, rasio APM mencapai angka 112,01 persen, yang kurang sesuai dengan harapan, karena menjauh dari target MDGs. Masih perlu perhatian khusus terhadap laki-laki agar kesetaraan gender dapat terwujud.

Di bidang ketenagakerjaan, keterlibatan perempuan dalam kerja upahan di sektor non-pertanian yang meningkat dari 29,24 persen pada tahun 1990 menjadi 35,53 persen pada tahun 2014, sudah sesuai dengan target MDGs (meningkat tetapi masih terlalu sedikit). Di bidang poilitk, proporsi perempuan di DPR sudah lebih tinggi di tahun 2014 (17,30 persen) dibandingkan pada tahun 1990 (12,50 persen), sudah sesuai dengan target MDGs (meningkat tetapi belum sesuai dengan kuota yang diharapkan).

Perkembangan rasio APM laki-laki terhadap perempuan (rasio APM P/L) di SD sampai dengan perguruan tinggi dari tahun ke tahun bervariasi antar-jenjang pendidikan. Fluktuasi rasio APM P/L di SD dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2014 relatif datar dan selalu sangat dekat dengan angka 100 persen, sehingga untuk jenjang pendidikan ini, kesetaraan gender sudah lama terwujud dan tetap bertahan sampai dengan tahun 2014.

Grafik 3.30. Rasio APM SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, 2001 - 2014

Pada jenjang sekolah menengah kondisi kesetaraan gender dapat dikatakan sudah sesuai harapan. Pada jenjang SMP, posisi rasio APM P/L selalu sedikit di atas 100 persen dari tahun 2001

hingga kini. Ketimpangan gender pada jenjang pendidikan SMP menunjukkan kondisi perempuan yang sedikit lebih baik, namun masih dalam batas toleransi 5 persen (kecuali pada tahun 2013 yang besarnya 105,69 persen), tetapi kemudian pada tahun 2014 sudah kembali berada di dalam batas toleransi. Trend ini masih sesuai dengan harapan (on-track). Sementara itu, pada jenjang pendidikan SMA, dalam beberapa tahun posisi rasio APM P/L di SMA berada di sekitar target MDGs tetapi pada tahun 2014 mengarah pada ketimpangan di mana kondisi perempuan cenderung lebih baik, walaupun tidak signifikan.

Rasio APM parempuan terhadap laki-laki pada jenjang perguruan tinggi (PT) memiliki trend yang mengarah pada ketimpangan yang lebih besar. Tampak pada Gambar 3.1 bahwa rasio APM P/L-PT (87,10 persen) tahun 2001 menunjukkan adanya ketimpangan di mana laki-laki lebih baik, kemudian pada tahun 2004 berada pada posisi yang sangat dekat dengan target MDGs (100 persen) sampai tahun 2007 dan kembali on-track pada tahun 2009-2011. Mulai tahun 2012 terjadi lagi ketimpangan dengan kondisi laki-laki lebih buruk, bahkan di tahun 2014 mencapai angka rasio 112,01 persen.

Kesetaraan gender di bidang pendidikan di daerah. Di tingkat nasional dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah dekat dengan kondisi kesetaraan gender pada jenjang SD sampai dengan SMA, tetapi kondisi di tingkat daerah tidak demikian. Meskipun rasio APM P/L di SD secara nasional sudah sangat dekat dengan kesetaraan gender tetapi hal tersebut tidak dirasakan oleh semua provinsi. Tabel dibawah ini ditunjukkan bahwa provinsi yang sudah sangat dekat dengan kesetaraan gender berjumlah 12 yaitu Provinsi Kalimatan Timur, Sumatera Utara, NTB, **Jambi (99,61)**, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Jawa Barat, Banten, NTT dan DIY. Kemudian pada jenjang SMP jumlah provinsi yang sudah sangat dekat dengan kondidi kesetaraan gender adalah Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur, sedangkan pada jenjang SMA dan PT kesetaraan gender dicapai oleh masing-masing satu provinsi yaitu Maluku (SMA) dan Sulawesi Tenggara (PT).

Tabel 3.64. Kesetaran Gender Pendidikan pada Jejang SD, SMP, SMA dan PT di Daerah

No.	Jenjang Sekolah	Sangat dekat dengan kesetaraan gender (laki-laki lebih baik)		Sangat dekat dengan kesetaraan gender (perempuan lebih baik)	
		Provinsi	Rasio APM P/L	Provinsi	Rasio APM P/L
1	SD	Kalimantan Timur	99,00	Sulawesi Barat	100,12
2		Sumatera Utara	99,33	Jawa Barat	100,23
3		Nusa Tenggara Barat	99,52	Banten	100,39
4		Jambi	99,61	Nusa Tenggara Timur	100,46
5		Kalimantan Selatan	99,85	DI Yogyakarta	100,79
6		Sulawesi Tenggara	99,97		
7	SMP			Sumatera Utara	100,68
				Jawa Timur	100,84
8	SMA	Maluku	99,65		
9	PT	Sulawesi Tenggara	99,06		

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Indikator MDGs 2001-2012, Data Indikator MDGs 2013, Data Indikator MDGs 2014

Kesetaraan gender keaksaraan. Dari sisi keaksaraan tidak terjadi kesejangan. Tampak pada bahwa rasio AMH P/L penduduk berusia 15-24 tahun dari tahun ke tahun sudah sangat dekat dengan 100 persen, sehingga dapat dikatakan telah terjadi kesetaraan gender. Walaupun demikian, di tingkat provinsi rasio AMH P/L penduduk berusia 15-24 bervariasi. Hanya Provinsi Papua yang memiliki rasio AMH P/L di bawah 95 persen dan provinsi yang sangat dekat dengan rasio AMH P/L 100 persen berjumlah 20 provinsi, bahkan terdapat provinsi dengan rasio AMH P/L 100 persen yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi sisanya memiliki rasio AMH P/L yang dekat dengan kondisi kesetaraan gender di bawah 105 persen.

Grafik 3.31. Rasio AMH Perempuan Terhadap Laki-laki Penduduk Berusia 15-24 Tahun, 2001-2014

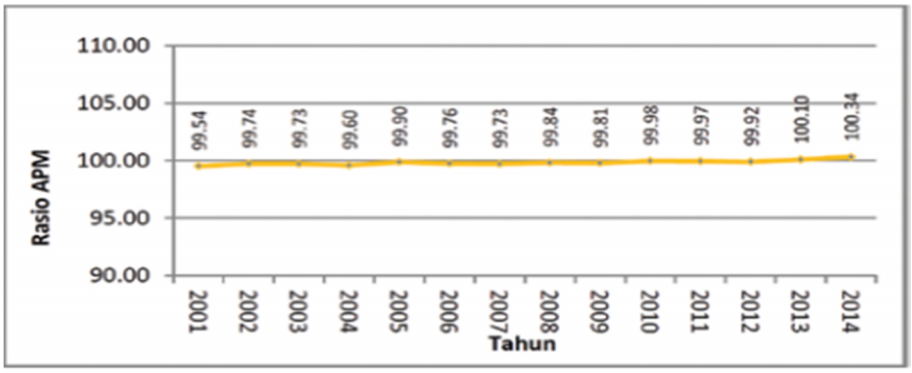

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2001 - 2014

Kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian dari tahun dasar mengalami trend yang naik, namun kenaikannya sangat lamban. Tampak pada di bawah ini kontribusi perempuan tersebut di tahun 2001 adalah sebesar 32,30 persen dan mengalami penurunan sampai pada angka 31,49 persen di tahun 2004. Pada tahun 2009 kontribusi perempuan mencapai titik tertinggi yaitu sebesar 37,08 persen dan turun kembali menjadi sebesar 35,10 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014 kontribusi perempuan naik sedikit menjadi sebesar 35,53. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian antar-provinsi bervariasi. Pada grafik terlihat bahwa kontribusi perempuan berada pada kisaran antara 47,32 persen di Provinsi Gorontalo dan 25,56 persen di Provinsi Papua.

Grafik 3.32. Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian 2001 - 2014

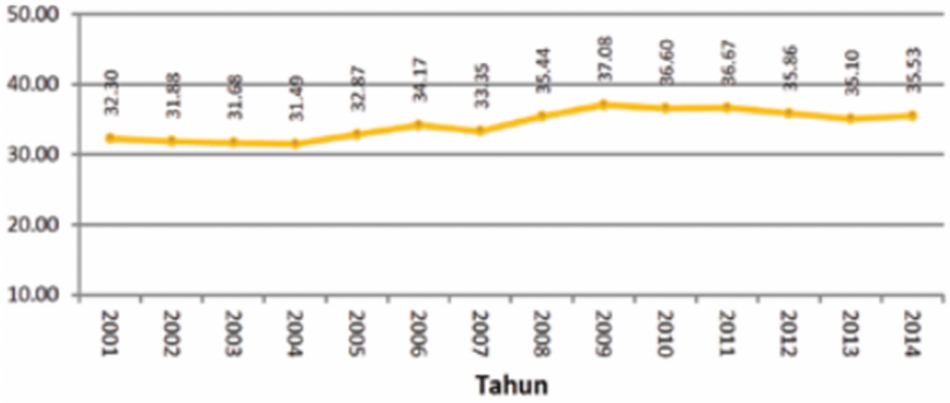

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2001 - 2014

Perempuan di Parlemen. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR tingkat nasional memiliki trend meningkat, walaupun berfluktuasi Sejak pemilu legislatif periode tahun 1950 dilaksanakan, perempuan sudah menduduki kursi di DPR, mekipun sedikit (3,8 persen), namun nilai indikator ini terus mengalami trend naik sampai pada puncaknya di tahun 1987 (13 persen), kemudian turun lagi sampai tahun 1999 (9 persen). Undang-undang nomor 12 tahun 2013 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang menerapkan kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif dapat menaikkan kembali proporsi perempuan di DPR hingga pemilu tahun 2009 (18,4 persen), namun di tahun 2014 nilai indikator ini turun lagi menjadi 17,3 persen.

Grafik 3.33. Persentase Anggota DPR Perempuan pada Periode Pemilu 1950 – 2014

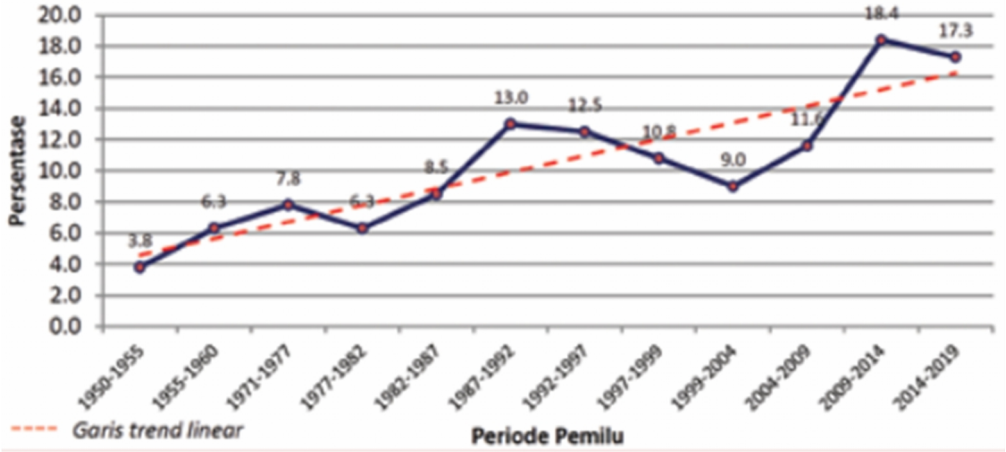

Sumber: KPU, Pusat Data Arsip Nasional KPU

Jumlah anggota DPR perempuan antar-provinsi bervariasi. Tampak pada Gambar 3.7 bahwa provinsi yang tidak memiliki anggota DPR perempuan berjumlah 7 (tujuh) yaitu Provinsi Aceh, Kep. Bangka Belitung, Bali, NTT, Gorontalo, dan Papua Barat. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, NTB, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara memiliki 1 (satu) anggota DPR perempuan. Kendati demikian, terdapat provinsi yang memiliki anggota DPR perempuan lebih dari 10, yaitu Jawa Timur (11), Jawa Tengah (14) dan Jawa Barat (19). Sisanya 5 (lima) perempuan atau kurang dari 5 (lima) anggota DPR perempuan.

Grafik 3.34. Jumlah Anggota DPR Perempuan Periode 2014-2019 menurut Provinsi

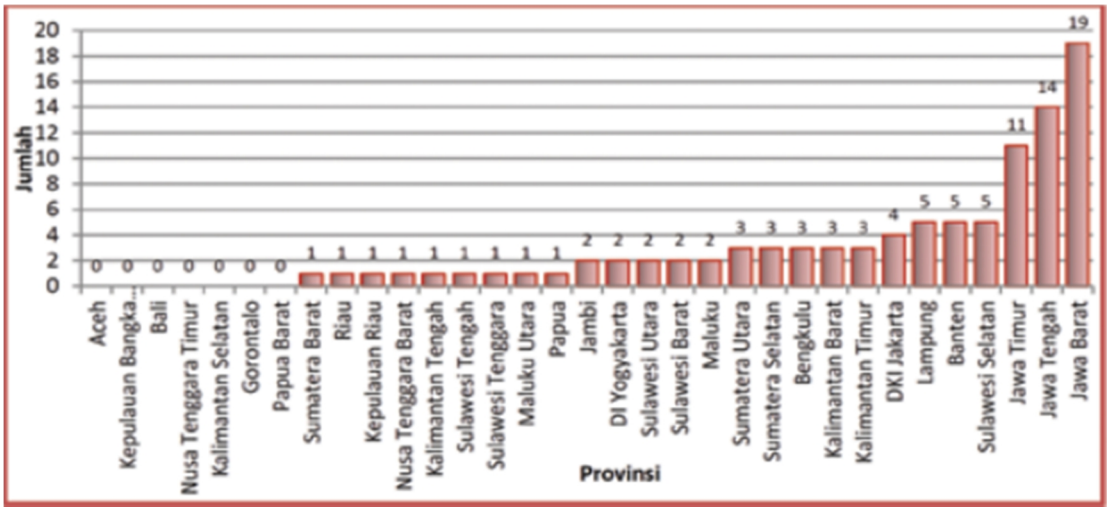

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Data Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Hasil Pemilu 2014

Kondisi seperti ini juga terjadi di DPRD tingkat kabupaten/kota. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pusat Kajian Politik UI (Puskapolui) terhadap hasil pemilu 2014 di 403 kabupaten/kota terpilih menunjukkan bahwa terdapat 14 kabupaten/kota yang tidak memiliki anggota DPRD perempuan. Pada tabel di atas terlihat bahwa di Provinsi Jawa Timur, NTB, Maluku, dan Maluku Utara, terdapat 1 (satu) kabupaten tidak memiliki anggota DPRD perempuan, di Provinsi NAD, Jambi dan NTT, terdapat 2 kabupaten yang tidak memiliki anggota DPRD perempuan, sedangkan di Provinsi Sumatera Barat terdapat 4 kabupaten yang tidak memiliki anggota DPRD permpuan. Sementara itu, jumlah kabupaten yang memiliki hanya 1(satu) anggota DPRD perempuan berjumlah 36, dan jumlah kabupaten yang memiliki anggota DPRD lebin dari 10 hanya berjumlah 27 kabupaten.

Tabel 3.65. Perbandingan dan Capaian Kinerja Persentase Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	96,00	96,06	96,33	97,40	97,43	99	99,61	100,61	99,61	99

Sumber : Hasil pengolahan data 2016

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dan perempuan, maka berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Melalui program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melaksanakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, terbentuknya Institusi pemberdayaan perempuan di masing-masing Kab/Kota dalam Provinsi Jambi juga merupakan upaya juga berdampak pada penanganan pemberdayaan perempuan dan anak di masing-masing Kab/Kota.

Kewajiban Pemerintah untuk mengembangkan kebijaksanaan dan peraturan berkaitan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai persamaan substantif, hak yang sama dan persamaan *legal standard* antara laki-laki dan perempuan (misalnya; hak yang sama dalam keluarga, peluang kerja yang sama, pemberian gaji yang sama, kewarisan, kewarganegaraan, kesempatan di bidang politik). Proses modernisasi dan kemajuan tehnologi informasi membawa dampak pada perubahan sosial pada peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Jumlah kaum perempuan yang bekerja di luar rumah seperti, sebagai Pegawai Negeri, di bidang Pemerintahan, Legislatif dan Yudikatif), semakin meningka. Fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja memang diharapkan bahkan didorong oleh negara lewat konsep ke mitra sejajaran pria dan wanita.

Sebagai bentuk kesetaraan gender dan emansipasi wanita di pemerintahan, Pemerintah Provinsi Jambi selalu berusaha menghormati hak-hak wanita dalam pemerintahan termasuk didalamnya adalah memberikan kesempatan dalam berkarya di lingkungan pemerintahan. Perkembangan angka persentase wanita yang menjabat eselon merupakan salah satu indikator semakin proporsionalnya kesempatan yang di berikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Jika dilihat dari jumlah wanita yang menjabat eselon dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.66. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Wanita Yang Menjabat Eselon lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2010 s.d. 2015

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2010)	Tahun capaian kinerja				2015			Capaian Target s.d. 2015	Target Akhir RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase Wanita yang menjabat eselon lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	24,47 (245 orang dari 1.001 jabatan eselon)	25,47 (255 orang dari 1.001 jabatan eselon)	26,27 (263 orang dari 1.001 jabatan eselon)	26,50 (267 orang dari 1.001 jabatan eselon)	27,11 (271 orang dari 1.001 jabatan eselon)	28,97 (290 orang dari 1.001 jabatan eselon)	29,27 (293 orang dari 1.001 jabatan eselon)	101,03	29,27 (293 orang dari 1.001 jabatan eselon)	30 (302 orang dari 1.001 jabatan eselon)

Sumber : BKD, Biro Organisasi, & hasil pengolahan data 2016

Jika dilihat pada tabel di atas, terlihat trend kenaikan persentase wanita yang menjabat eselon. Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 245 orang atau sebesear 24,47% dari jumlah jabatan yang ada yakni sebanyak 1.001 jabatan eselon (eselon 1 s.d eselon 4). Kenaikan persentase dialami

pada tahun 2011 dengan tingkat persentase sebesar 25,47% dengan jumlah pejabat wanita sebanyak 255 orang. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 26,27% dengan jumlah pejabat sebanyak 263 orang sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 267 orang. Capain akhir tahun 2014 diperoleh persentase sebesar 27,11% atau dengan jumlah 271 orang perempuan dalam jabatan eselon pada Pemerintah Provinsi Jambi. Pada tahun 2015, jumlah perempuan yang menduduki jabaran struktural tercatat sebanyak 293 orang. Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar 2,16% dari tahun 2014. Capaian ini sedikit lagi menyentuh tingkat proporsional dalam mendukung kebijakan pemerintah mengenai emansipasi wanita dan kesetaraan gender menunju target 30% pada akhir periode RPJMD. Dengan meningkatnya persentase ini, berdampak positif pada perencanaan anggaran responsif berbasis gender yang melahirkan program dan kegiatan-kegiatan yang berbasis gender, terutama program/kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.3. Capaian Kinerja Lainnya

Selain pencapaian IKU Gubernur sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, pencapaian tujuan dan target pembangun yang lain juga menjadi penanda kemajuan dan keberhasilan dari program/kegiatan pembangunan daerah. Bagian berikut akan menguraikan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk beberapa kinerja lain, khususnya capaian RPJMN sebagai berikut :

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jambi dalam empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. Perekonomian Provinsi Jambi yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2015 mencapai Rp40,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp31,7 triliun.

Grafik 3.35. Pertumbuhan PDRB q to q
Menurut Lapangan Usaha

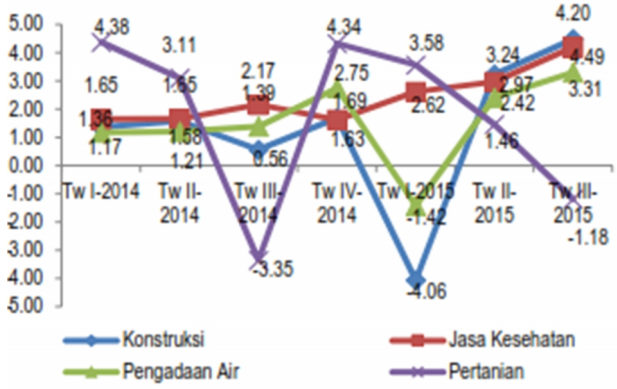

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan III-2015 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q)meningkat sebesar 0,5 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ini disebabkan oleh lapangan usaha Konstruksi yang tumbuh 4,5 persen. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dengan pertumbuhan 4,2 persen. Sedangkan dari sisi Pengeluaran komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi (16,7 persen)karena pergerakan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan III-2015 terhadap triwulan III-2014 (y-on-y)mencapai 4,5 persen, melambat dibanding periode yang sama pada tahun 2014 yang sebesar 6,9 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,8 persen. Dari sisi Pengeluaran oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh 11,2 persen.

Secara kumulatif triwulan I sampai III tahun 2015 terhadap triwulan I sampai III tahun 2014 (c-to-c), ekonomi Jambi tumbuh 5,2 persen, melambat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 8,0 persen. Lapangan usaha yang tumbuh paling cepat adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,0 persen. Dari sisi Pengeluaran oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 4,2 persen.

Struktur ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan III-2015 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yakni sebesar 27,7 persen. Sementara pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan untuk Komponen Ekspor sebesar 66,0 persen serta Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yaitu sebesar 47,3 persen. Namun terkoreksi oleh Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang berperan 46,1 persen.

Grafik 3.36. Pertumbuhan y-on-y Beberapa Lapangan Usaha Triwulan III-2015

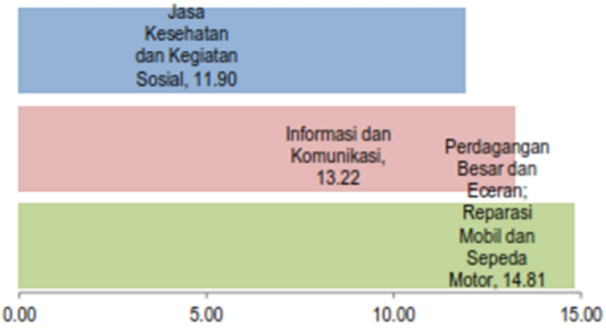

Grafik 3.37. Trend Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

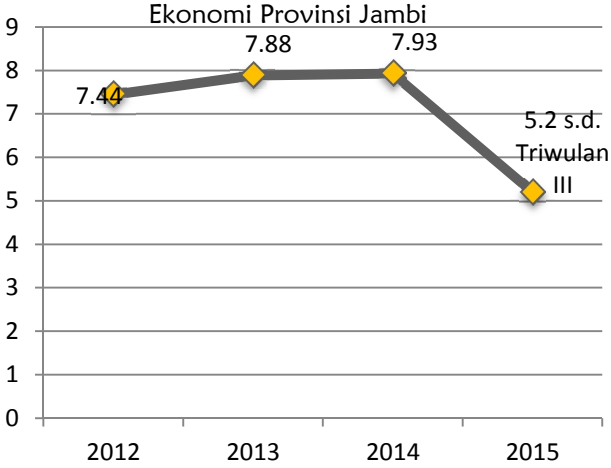

3.4. Capaian Tujuan RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015

Capaian tujuan RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015 dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, tujuan yang telah berhasil dicapai. Kedua, tujuan yang menunjukkan kemajuan bermakna dan diharapkan dapat dicapai pada atau sebelum tahun 2015. Ketiga, tujuan yang masih memerlukan upaya keras untuk mencapainya.

Tujuan-tujuan IKU RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015 yang telah tercapai adalah :

- IKU 1, Persentase jalan dalam kondisi baik (mantap)
- IKU 2, Rasio elektrifikasi
- IKU 3, Perkembangan energi baru terbarukan
- IKU 4, Persentase fungsionalisasi luas daerah irigasi
- IKU 8, Prevalensi kekurangan gizi pada balita (kasus balita gizi buruk tertangani)
- IKU 12, Nilai investasi PMA
- IKU 13, Nilai investasi PMDN
- IKU 14, Nilai ekspor
- IKU 16, Peningkatan pelaku usaha mikro kecil menengah
- IKU 17, Laju inflasi Provinsi Jambi
- IKU 22, Ketersediaan energi kkal/kap/hr dan pola pangan harapan
- IKU 18, Pertumbuhan kunjungan wisata
- IKU 26, Opini BPK
- IKU 27, Aksi daerah percepatan dan pemberantasan korupsi (AD-PPK)
- IKU 30, Persentase kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Tujuan-tujuan IKU RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015 yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2016 (on-track) adalah :

- IKU 5, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan
- IKU 6, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan
- IKU 7, Angka partisipasi murni
- IKU 11, Indeks pembangunan manusia
- IKU 19, Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
- IKU 20, Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
- IKU 21, Nilai tukar petani
- IKU 24, Persentase luasan lahan tertutup pohon (rehabilitasi lahan kritis)

Tujuan-tujuan IKU RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015 yang telah menunjukkan kemajuan namun masih diperlukan kerja keras untuk mencapainya adalah :

- IKU 9, Persentase puskesmas berkinerja baik
- IKU 10, Persentase menurunnya rumah tangga sangat miskin (RTSM)
- IKU 15, Persentase koperasi yang berkualitas
- IKU 23, Penurunan jumlah titik api
- IKU 25, Penurunan emisi gas rumah kaca (kemampuan menurunkan emisi karbon)
- IKU 28, Skor indeks kepuasan masyarakat / survey kepuasan masyarakat
- IKU 29, Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi

Ringkasan Capaian Tujuan RPJMD 2010 - 2015

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2010-2015 merupakan kerangka pembangunan strategis Provinsi Jambi untuk periode 5 tahun sebagaimana visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD, maka capaian tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan Jambi Dengan Infrastruktur Pelayanan Umum Yang Berkualitas dan Ketersediaan Yang Lebih Baik.

Provinsi Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik ditandai dengan tercapainya sasaran percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan infrastruktur energi dan listrik, serta meningkatnya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih. Wujud meningkatnya infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik dicapai melalui indikator jalan dalam kondisi mantap (baik), rasio elektrifikasi, pengembangan energi baru terbarukan, fungsionalisasi luas daerah irigasi, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, serta

sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan dengan tingkat capain dibanding target yang ingin dicapai dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.38. Capaian Tujuan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik

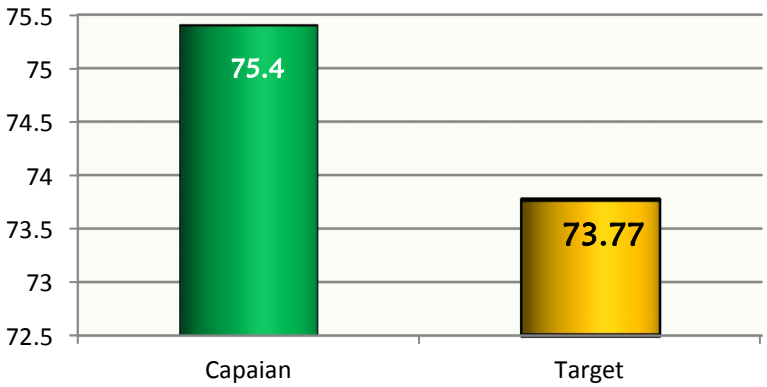

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian tujuan meningkatnya infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik Pemerintah Provinsi Jambi dari rata-rata capaian pada masing-masing indikator kinerja utama memperoleh angka 75,40% jika dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai pada tahun 2015 yakni 73,77%, hal ini berarti terdapat peningkatan sebesar 1,63% dalam target pencapaian tujuan. Namun jika dilihat dari skala nilai peringkat kinerja sebagaimana penjelasan skala ukuran kinerja pada awal bab ini, capaian 75,40% merupakan capaian yang sangat baik. Ini berarti capaian tujuan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik Pemerintah Provinsi Jambi sangat baik dan perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan infrastruktur. Peningkatan Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap sama artinya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bila dibandingkan dengan target Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 sebesar 75% telah memenuhi realisasi Persentase jalan Provinsi Jambi kondisi baik pada tahun 2015 sebesar 75.40% jalan mengalami peningkatan sebanyak 0.58 persen dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari sektor energi yang merupakan sektor vital pendukung pembangunan daerah, dengan semua keterbatasan yang ada, maka tidak semua desa di Provinsi Jambi dapat dialiri listrik PLN. Oleh karena itu, dalam rangka penyediaan energi khususnya pada desa-desa yang tidak terjangkau oleh aliran PT. PLN, hingga saat ini telah terbangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro beserta jaringannya dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Dari 1.484 desa yang ada di Provinsi Jambi, masih ada 154 desa yang belum dialiri listrik PLN. Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 22 desa yang belum teraliri listrik. Kemudian Kabupaten Tanjab Barat 59 desa, Kabupaten Tanjab Timur ada 1 desa, Kabupaten Batanghari 6 desa, Kabupaten Sarolangun ada 35 desa. Selanjutnya, di Kabupaten Tebo ada 13 desa, Kabupaten Bungo ada 3 desa, Kabupaten Kerinci ada 4 desa, dan Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi sudah teraliri oleh aliran listrik. Dengan terjangkaunya jaringan aliran listrik di desa-desa tersebut berdampak pada meningkatnya Rasio Elektrifikasi Desa di Provinsi Jambi yang mencapai 89,62 persen pada tahun 2015, meningkat sebesar 17,65 persen dari tahun 2014.

Indikator Fungsionalisasi daerah irigasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Persentase fungsionalisasi daerah irigasi sama artinya dengan meningkatkan lahan pertanian. Bila dibandingkan dengan target Persentase fungsionalisasi daerah irigasi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 realisasi Persentase fungsionalisasi daerah irigasi pada tahun 2015 mencapai angka 78,03% fungsionalisasi irigasi. Hal ini berarti jaringan fungsional mengalami peningkatan sebanyak 0.64% dari tahun sebelumnya.

Dengan peningkatan panjang dan rehabilitasi jaringan irigasi telah berdampak positif pada peningkatan produksi pertanian Provinsi Jambi tentunya disandingkan dengan program-program prioritas di bidang pertanian dan ketahanan pangan, pada tahun 2014 Provinsi Jambi berdasarkan angka tetap produksi padi Jambi mencapai 664.721 ton GKG, terjadi kenaikkan 187 ton atau 0,003 persen dibandingkan 2013, sebesar 664.533 ton GKG. Pada tahun 2015, berdasarkan ARAM BPS 2015, produksi padi meningkat menjadi 786.948 ton GKG, atau mengalami peningkatan sebesar 122.228, ton atau sebesar 18,39 persen dibandingkan tahun 2014. Perkiraan peningkatan produksi padi pada 2015 menyumbang produksi padi nasional sebesar 1,04 persen. Kenaikkan produksi padi terjadi karena adanya peningkatan produktivitas sebesar 2,17 kuintal atau lima persen, sedangkan luas panen mengalami penurunan seluas 7.253 hektare (ha) atau sebesar 4,73 persen. Sementara itu, produksi padi nasional pada 2014 sebesar 70.846.465 ton atau menurun sebesar 0,61 persen, di mana produksi padi Jambi 2014 hanya memberikan sumbangan terhadap produksi padi nasional sebesar 0,94 persen.

Tujuan : Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya.

Terwujudnya kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya ditandai dengan pemerataan akses terhadap pendidikan, pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat, serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Wujud meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya dicapai melalui indikator APM SD, SMP, SMA, Prevalensi kekurangan gizi pada balita, puskesmas berkinerja baik, menurunnya rumah tangga sangat miskin, serta indeks pembangunan manusia dengan tingkat capain dibanding target yang ingin dicapai dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.39. Capaian Tujuan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya

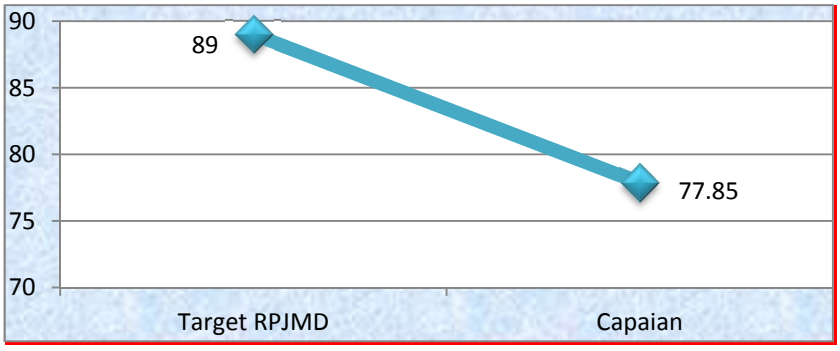

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian tujuan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya dilihat dari rata-rata capaian pada masing-masing indikator kinerja utama hanya mencapai 77,85% jika dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai pada tahun 2015 yakni sebesar 89%, hal ini berarti tidak tercapainya 11,15% target dalam pencapaian tujuan. Namun jika dilihat dari skala nilai peringkat kinerja sebagaimana penjelasan skala ukuran kinerja pada awal bab ini, capaian 71,31% merupakan capaian yang Sedang dalam interval nilai realisasi kinerja. Ini berarti capaian tujuan

kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang. Capaian interval sedang tersebut jika persepsikan dengan tingkat capaian 100% pada tahun 2015 memang termasuk dalam kategori sedang, namun capaian ini merupakan capaian yang sangat baik mengingat tujuan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 89% dan terpaut 11,15 poin dari terget yang sudah tercapai.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Capaian APM sekolah Provinsi Jambi pada tahun 2015 belum mencapai target RPJMD. APM pendidikan dasar mencapai 99,95% dari target 100%, APM pendidikan menengah (SMP) mencapai 79,44% dari target sebesar 90%, dan capaian APM pendidikan atas (SMA) sebesar 62,47% dari target sebesar 78%.

Pada penanganan kasus gizi buruk, di Provinsi Jambi tahun 2015 sebanyak 88 kasus dan sebanyak 4 orang meninggal. Semua kasus gizi buruk mendapat perawatan (100%), adapun perawatan yang diberikan berupa rawat inap atau rawat jalan. Bagi penderita pasca perawatan pemerintah Provinsi Jambi memberikan bantuan berupa formula pemulihan yang diberikan kepada 30 anak. Jumlah penderita gizi buruk yang meninggal pada tahun 2015 sebanyak 4 orang. Terjadi penurunan jumlah kasus gizi buruk dibandingkan tahun 2014 (13 orang) dan tahun 2013 (15 orang). Jumlah kasus meninggal terjadi penurunan dibandingkan tahun 2014.

Penyebab terjadinya kasus gizi buruk pada balita di Provinsi Jambi disebabkan oleh masalah konsumsi yang kurang, kelainan kongenital dan atau adanya infeksi seperti : ekonomi, penkyakit jantung, penyakit infeksi (diare,kecacingan, pneumoni, TB paru), BBLRDown Sindrome, TB Tulag, Cacat Fisik). Masalah lain yang ditemukan masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan orang tua dalam mengasuh anak terutama dalam hal pemberian makan, kesehatan perorangan dan kesehatan lingkungan akibat kemiskinan.

Capaian persentase Puskesmas dengan kinerja yang baik dengan menilai Puskesmas yang melaksanakan Manajemen Puskesmas. Adapun Manajemen Puskesmas terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu : P1 (Perencanaan) , P2 (Lokakarya mini/ Lokmin) dan P3 (Evaluasi Kinerja Puskesmas). Pada tahun 2015 sebagian besar puskesmas belum mempunyai kinerja baik hal ini di sebabkan distribusi tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya baik tingkat bidan desa, Puskesmas maupun Kab/Kota dalam melaksanakan program sehingga capaian program yang telah ditetapkan bersama masih ada yang belum tercapai.

Pelaksanaan manajemen puskesmas dan penerapan manajemen mutu puskesmas pada tahun 2015 sudah cukup baik. Dapat dilihat bahwa 50% Puskesmas yang menerapkan mutu yang capaiannya lebih dari target yang telah di tentukan. Untuk Kabupaten/Kota 50% puskesmas telah mencapai target, 50% Puskesmas yang menerapkan program pengembangan sebagian besar belum mencapai target tetapi ada dua kabupaten yang sudah mencapai target yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Batang Hari. Untuk Puskesmas yang menerapkan P1,P2,P3 seluruh kabupaten Kota sudah mencapai target yang telah di tetapkan.

Pada indikator menurunnya Rumah Tangga Sangat Sangat Miskin sebagaimana Data BPS Provinsi Jambi, dalam kurun waktu Maret 2015 sampai dengan September 2015, di Provinsi Jambi terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 10,85 ribu jiwa, yaitu dari 300,71 ribu pada Maret 2015 menjadi 311,56 ribu pada September 2015. Secara umum relatif terjadi kenaikan persentase penduduk miskin dari 8,86 persen pada Maret 2015 menjadi 9,12 persen pada September 2015.

Dari sisi jumlah, penduduk miskin di daerah perdesaan lebih banyak dari pada di perkotaan. Pada September 2015 penduduk miskin perdesaan mencapai 185,97 ribu (59,69 persen dari total penduduk miskin), sedangkan di perkotaan sebesar 125,60 ribu (40,31 persen dari total penduduk miskin). Kondisi pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 181,17 ribu,

sedangkan di perkotaan sebesar 119,54 ribu. Hal ini berarti baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin. Penduduk Provinsi Jambi yang lebih banyak tinggal di perdesaan, menjadikan secara relatif persentase penduduk miskin di perkotaan lebih besar daripada penduduk miskin di perdesaan. Persentase penduduk miskin Provinsi Jambi pada September 2015 di perkotaan sebesar 12,11 persen sementara di perdesaan 7,82 persen.

Tujuan : Mewujudkan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Provinsi Jambi dengan struktur ekonomi yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui peningkatan investasi daerah, peningkatan kepariwisataan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Wujud meningkatnya struktur ekonomi yang kokoh berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dicapai melalui indikator nilai investasi PMA & PMDN, nilai ekspor, laju inflasi, pertumbuhan wisata, kontribusi sektor pariwisata, dan sektor pertanian terhadap PDRB, nilai tukar petani serta ketersediaan energi kkal/kap/hr dengan tingkat capain dibanding target yang ingin dicapai dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.40. Capaian Tujuan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi

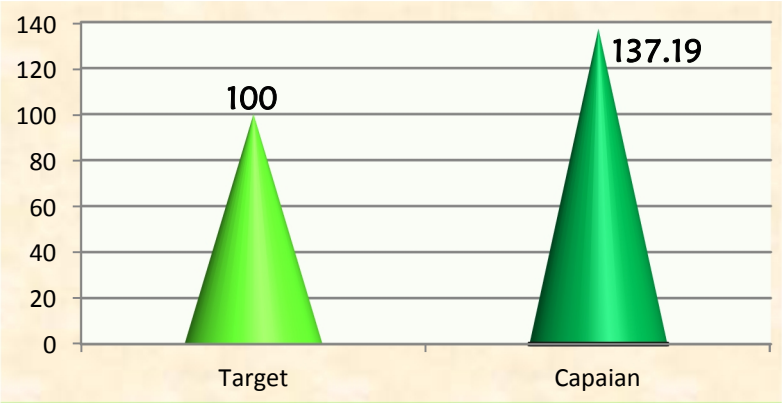

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian tujuan struktur ekonomi yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi Pemerintah Provinsi Jambi dari rata-rata capaian pada masing-masing indikator kinerja utama memperoleh angka 137,19% jika dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai pada tahun 2015 yakni 100%, hal ini berarti terdapat peningkatan sebesar 37,19% dari target pencapaian tujuan. Jika dilihat dari skala nilai peringkat kinerja sebagaimana penjelasan skala ukuran kinerja pada awal bab ini, capaian 137,19% berada pada interval ukuran kinerja yang sangat baik. Ini berarti tujuan meningkatnya struktur ekonomi Provinsi Jambi yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi sudah tercapai melebihi target yang telah ditentukan. Untuk itu pada masa yang akan datang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi agar Provinsi Jambi menjadi lebih baik.

Perkembangan investasi daerah baik itu Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan yang sangat berarti. Di penghujung tahun 2015, nilai PMA di Provinsi Jambi telah mencapai USD 1.169,6 Juta melebihi target yang ingin dicapai yakni sebesar USD 1.161,35 Juta. Begitu pula dengan perkembangan nilai

PMDN, pada akhir tahun 2015 ini tercatat mencapai Rp. 31,95 Triliun mengalami peningkatan sebesar ±Rp. 5 Triliun dari tahun 2014 yang hanya mencapai Rp. 26,62 Triliun.

Membaiknya kondisi ekonomi dalam daerah turut berpengaruh pada nilai ekspor Provinsi Jambi ke negara luar Indonesia melalui pelabuhan di Provinsi Jambi. Pada tahun 2014 nilai ekspor Provinsi Jambi tercatat sebesar USD 1.282,43 Juta dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2015 sebesar USD 1.1281.230 Juta dan memberikan kontribusi ekspor Provinsi Jambi pada tahun 2015 menjadi USD 2.463.660 Juta.

Dari sisi upaya penurunan inflasi, pada tahun 2015 Inflasi Provinsi Jambi yang dilihat dari perhitungan inflasi dari Kota Jambi sebagai pusat ibukota serta Kabupaten Bungo yang menjadi acuan pengukuran inflasi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada Desember 2015, Kota Jambi tercatat mengalami inflasi sebesar 0,91% (mtm). Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan proyeksi 0,82%, tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,96% (mtm). Pencapaian inflasi tahun 2015 secara keseluruhan tercatat sebesar 1,37%.

Inflasi Desember utamanya disebabkan kenaikan harga bahan makanan seperti cabai merah, bawang merah, ikan gabus, telur ayam ras, semangka, pepaya, ikan nila, dan cabai hijau serta kenaikan tarif angkutan udara dan tarif tenaga listrik. Kenaikan harga berbagai bahan makanan didorong kenaikan permintaan bahan makanan selama perayaan hari raya keagamaan (Maulid Nabi dan Natal) dan masa liburan. Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara didorong kenaikan permintaan jasa angkutan udara selama masa liburan akhir tahun.

Penurunan inflasi sebagaimana tersebut di atas turut ditunjang oleh aspek-aspek lain yang secara tidak langsung turut mempengaruhi diantaranya kontribusi sektor-sektor yang menyumbang PDRB Provinsi Jambi. Perkembangan pariwisata Provinsi Jambi dianalisis dari aspek penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Penerimaan sektor pariwisata tidak terlepas dari peran pajak dan retribusi. Dengan menjumlahkan pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan berbagai retribusi seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan, retribusi tempat rekreasi dan pendapatan lain yang sah maka akan didapat penerimaan sektor pariwisata.

Pertumbuhan industri pariwisata yang mencakup perhotelan, restoran/rumah makan, serta biro perjalanan wisata mengalami pergerakan positif di setiap tahunnya. Hal ini dirasa cukup menggembirakan karena industri pariwisata dapat berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Jika dilihat dari sektor Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada Bulan November 2015 TPK hotel bintang di Provinsi Jambi sebesar 40,50 persen, lebih tinggi dibanding TPK Bulan Oktober 2015 yang mencapai angka 39,57 persen. Menurut kelasnya TPK tertinggi tercatat pada hotel bintang 3 (tiga) sebesar 45,81 persen dan terendah pada hotel bintang 4 (empat) sebesar 28,83 persen. Penurunan TPK hotel berbintang pada November 2015 dibanding November 2014 terjadi pada kelompok hotel bintang 1 (satu), hotel bintang 3 (tiga) dan hotel bintang 4 (empat).

Tujuan : Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan.

Pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan serta ditandai dengan meningkatnya kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup. Wujud meningkatnya pengelolaan sumber daya alam secara terpadu

dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan dilihat melalui indikator menurunnya titik api (hot spot) dari bencana kebakaran hutan dan lahan, luasan tertutup pohon (rehabilitas lahan kritis), serta penurunan emisi gas rumah kaca (CO_2) dengan tingkat capain dibanding target yang ingin dicapai dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.41. Capaian Tujuan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan Provinsi Jambi

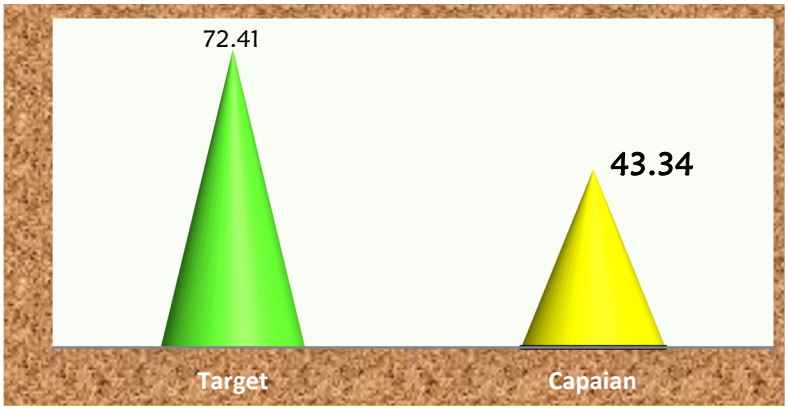

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian tujuan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan Provinsi Jambi dari rata-rata capaian pada masing-masing indikator kinerja utama memperoleh angka 43,34% jika dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai pada tahun 2015 yakni 72,41%, hal ini berarti terdapat selisih capaian sebesar 29,07% dari target pencapaian tujuan. Jauhnya selisih persentase target capaian yang harus diraih oleh Pemerintah Provinsi disebabkan oleh beberapa faktor yang memang merupakan kondisi nyata yang harus dihadapi oleh Provinsi Jambi, terutama mengenai bencana kebakaran hutan dan lahan yang pada akhirnya berimplikasi pada tidak maksimalnya upaya penurunan emisi karbon CO_2 pada tahun 2015.

Kurun waktu sampai dengan bulan Desember 2015, jumlah titik api yang tercatat oleh satelit NOAA18 sebanyak 1.654 titik api, jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan titik api tahun 2014 sebanyak 1.152 titik, tahun 2013 sebanyak 1.151 titik hal ini terjadi bersamaan dengan datangnya musim kemarau dan bencana elnino. Meningkatnya jumlah titik api ini merupakan dampak nasional bukan hanya terjadi di Provinsi Jambi.

Bencana kebakaran hutan tahun 2015 telah dijadikan momentum dalam menata kembali, melaksanakan moratorium deforestasi, maupun mitigasi sebab-sebab kebakaran hutan di daerah.Dalam rangka mengefektifkan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, maka Pemda bersama DPRD Provinsi Jambi telah mengesahkan PERDA tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 26 Desember 2015. Perda tersebut merupakan inisiatif dari DPRD dan merupakan Perda pertama di seluruh Indonesia terkait dengan antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang sangat parah/dahsyat beberapa bulan yang lalu. Salah satu pasal dalam Perda tersebut adalah melarang semua pihak untuk membakar hutan dalam pembersihan lahan.

Secara umum, dari tahun ke tahun trend jumlah titik api mengalami kenaikan, untuk itu diharapkan dengan adanya Perda pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tersebut berdampak positif terhadap berkurangnya jumlah titik api pada masa yang akan datang. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang terus berkomitmen dalam mengantisipasi dan melakukan upaya-upaya pemadaman secara sinergis.

Dari sisi penurunan emisi karbon sebagai upaya pengurangan CO_2, Pro Environment merupakan salah satu Strategi pembangunan Provinsi Jambi, untuk itu dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 mempunyai Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 69 Mt CO2 hingga tahun 2030 atau 17,25 MtCO2 selama 5 tahun (yaitu 53% dari lahan gambut dan 36 % dari

kehutanan). Menurut Penghitungan yang dilakukan oleh Dewan Nasional Perubahan Ikim, Jambi memiliki potensi untuk menurunkan emisi GRKnya sampai dengan 55 MtCO2e hingga tahun 2030, dengan perpaduan yang tepat antara kebijakan dalam negeri dan dukungan internasional. Dari kemungkinan-kemungkinan penurunan ini, 48 persen datang dari upaya upaya terkait konservasi lahan gambut dan 38 persen berasal dari sektor LULUCF.

Selain upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan Pergub Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca yang bertujuan untuk memberi panduan kepada Pemerintah Provinsi Jambi serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembangunan rendah karbon sehingga konsistensi pelaksanaannya menjadi terukur dan terarah serta mampu mendukung konsistensi pembangunan rendah karbon secara nasional. Sampai tahun 2014 Pemerintah provinsi Jambi telah menangani emisi gas rumah kaca sebesar 12,70 Mt CO2. Pada tahun 2015, kemampuan meningkatkan upaya pengurangan emisi karbon sampai dengan 17,25MtCO2 belum tercapai dengan baik dan hanya mencapai angka 12,95MtCO2. Kondisi ini terjadi disebabkan karena adanya bencana kebakaran hutan dan lahan yang membuat emisi karbon terus meningkat, sedangkan kemampuan menurunkan relatif memakan waktu yang cuku lama.

Tujuan : Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dalam memenuhi kepentingan umum.

Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi ditandai dengan penyelenggaraan tata Pemerintahan yang baik, serta terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Wujud pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dicapai dengan indikator opini BPK, aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, skor indeks kepuasan masyarakat, peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi, serta kesetaraan gender, dengan tingkat capain dibanding target yang ingin dicapai dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.42. Capaian Tujuan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara professional dalam memenuhi kepentingan umum

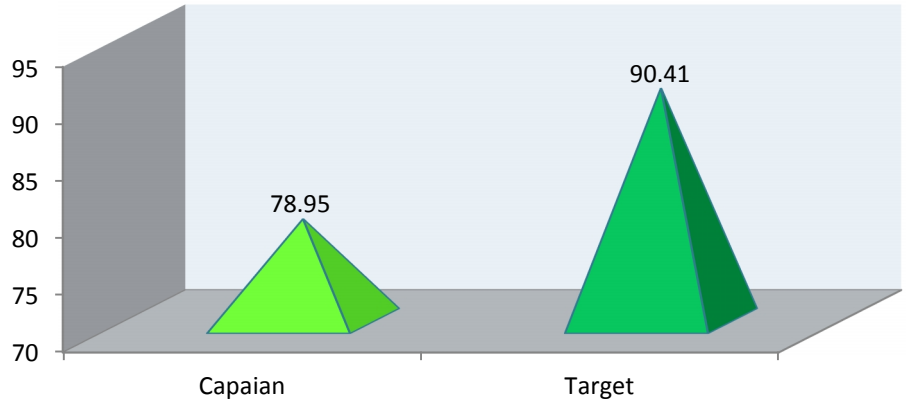

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian tujuan meningkatnya kualitas kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi yang dilihat dari rata-rata capaian pada masing-masing indikator kinerja utama memperoleh angka 78,95% jika dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai pada tahun 2015 yakni 90,01%, hal ini berarti terdapat selisih sebesar 11,46% dalam pencapaian tujuan. Namun jika dilihat dari skala nilai peringkat kinerja sebagaimana penjelasan skala ukuran kinerja pada awal bab ini, capaian 78,95% merupakan capaian yang **Tinggi** dalam interval nilai realisasi kinerja. Ini berarti capaian tujuan kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Dari sisi pengelolaan keuangan dan aset daerah, Pemerintah Provinsi Jambi meraih predikat WTP pada tahun 2015. WTP ini merupakan capaian yang ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2012. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan dilakukan menggunakan empat standar yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Informasi Laporan Keuangan, efektifitas system pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemeriksaan menggunakan empat kriteria tersebut dan dengan mempertimbangkan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan terlebih dahulu, maka BPK RI memberikan opini WTP dengan Paragraf Penjelas. Melalui opini tersebut, BPK menilai bahwa Provinsi Jambi untuk semua hal telah menyajikan secara wajar pada LKPD tahun 2014.

Capaian Target MDGs Kesetaraan Gender dipantau dengan menggunakan 3 pendekatan yakni pendidikan, ketenagakerjaan dan politik. Di bidang pendidikan kesetaraan gender diukur dengan menggunakan rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan rasio angka melek huruf penduduk berusia 15-24 tahun. Rasio indikator perempuan terhadap laki-laki merupakan indeks paritas gender (IPG). Kesetaraan gender dikatakan sudah terwujud apabila indeks paritas gender sama dengan seratus persen.

Di tingkat nasional dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah dekat dengan kondisi kesetaraan gender pada jenjang SD sampai dengan SMA. Meskipun rasio APM P/L di SD secara nasional sudah sangat dekat dengan kesetaraan gender tetapi hal tersebut tidak dirasakan oleh semua provinsi. Provinsi yang sudah sangat dekat dengan kesetaraan gender berjumlah 12 yaitu Provinsi Kalimatan Timur, Sumatera Utara, NTB, **Jambi (99,61)**, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Jawa Barat, Banten, NTT dan DIY. Kemudian pada jenjang SMP jumlah provinsi yang sudah sangat dekat dengan kondidi kesetaraan gender adalah Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur, sedangkan pada jenjang SMA dan PT kesetaraan gender dicapai oleh masing-masing satu provinsi yaitu Maluku (SMA) dan Sulawesi Tenggara (PT).

Dari sisi peningkatan penerapan akuntalitas kinerja instansi pemerintah belum menunjukkan hasil maksimal. Target yang ditetapkan adalah nilai B untuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi, belum berhasil dicapai (0%). Belum tercapainya target kinerja ini dikarenakan belum maksimalnya perumusan indikator dalam perencanaan kinerja, baik itu indikator (outcome) maupun indikator kinerja (output) SKPD. Pemerintah Provinsi Jambi meraih nilai 52,87 atau masih mencapai predikat CC (cukup baik namun perlu perbaikan yang tidak mendasar). Capaian ini memperoleh persentase sebesar 81,33% dari target yang ingin dicapai yakni sebesar 65%.

Dilihat dari capaian indeks kepuasan masyarakat, rekapitulasi hasil survei IKM Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh nilai SKM dengan mutu rata-rata pelayanan "B" dan kinerja unit pelayanan termasuk kategori "BAIK" yang artinya tingkat kepuasan pelayanan pada Pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata tahun 2015 yakni 76,01 dengan predikat B.

Secara keseluruhan, capaian tujuan Provinsi Jambi sampai dengan periode akhir RPJMD telah tercapai dengan baik. Tujuan yang mendapatkan angka capaian paling tinggi yakni Tujuan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persentase sebesar 137,19%. Sedangkan capaian paling rendah berada pada Tujuan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan Provinsi Jambi hanya mencapai angka 43,34%. Belum maksimalnya capaian tujuan ini dikarenakan capaian yang harus diraih oleh Pemerintah Provinsi disebabkan oleh beberapa faktor yang memang merupakan kondisi nyata yang harus dihadapi oleh Provinsi Jambi, terutama mengenai bencana

kebakaran hutan dan lahan yang merupakan masalah nasinal yang pada akhirnya berimplikasi pada tidak maksimalnya upaya penurunan emisi karbon CO_2 pada tahun 2015.

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 89,66% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program utama sebesar 86,48% sedangkan realisasi untuk program pendukung sebesar 96,45%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program sasaran Penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan berkelanjutan meningkat sebesar 99,92%. Sedangkan penyerapan terkecil pada program dalam sasaran Pembangunan infrastruktur energi dan listrik meningkat dengan persentase sebesar 72,23%

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015 relatif mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.67. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2015

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur	565,856,445,133	537,507,037,232	94.99
2.	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik	12,005,133,000	9,153,120,140	76.24
3.	Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	228,150,101,842	214,826,135,894	94.16
4.	Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas	254,517,818,435	233,596,453,760	91.78
5.	Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat	282,016,024,665	237,908,718,407	84.36
6.	Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial	26,271,907,000	24,312,022,738	92.54
7.	Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan	24,618,592,000	23,498,446,064	95.45
8.	Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisataan daerah	18,074,754,000	16,934,237,023	93.69
9.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	32,715,262,500	30,876,664,748	94.38
10.	Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan	7,704,026,000	6,880,834,070	89.31
11.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup	9,732,846,000	8,509,721,383	87.43
12.	Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik	29,815,318,000	28,467,665,626	95.48
13.	Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan	13,537,743,400	12,216,459,644	90.24
	Jumlah	**1,505,015,971,975,-**	**1,384,687,516,729,-**	**78.67**
	Belanja langsung pendukung	**320,323,158,001,-**	**264,803,390,026,-**	**77,58**
	Total belanja langsung	**1,825,339,129,976,-**	**1,649,490,906,755,-**	**77,67**

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Realisasi anggaran pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 sebesar 78,67%. Penyerapan anggaran ini berbanding lurus dengan pelaksanaan kinerja yang secara menyeluruh telah dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, maka terdapat sisa anggaran sebesar 21,33%. Sisa anggaran ini didalamnya terkandung muatan kebijakan penghematan anggaran dan juga pengalokasian anggaran yang diperuntukkan bagi kinerja prioritas daerah, namun demikian penghematan tersebut tetap memperhatikan mutu dari capaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Alokasi anggaran berdasarkan tingkat serapan anggaran tertinggi terealisasi pada sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan capaian sebesar 95,48%. Hal ini sebanding dengan tingkat capaian kinerja meningkatnya tata kelola pemerintahan Provinsi Jambi dengan keberhasilan capaian rata-rata sangat baik dengan perolehan capaian sasaran sebesar 85,69%. Sedangkan serapan anggaran paling rendah yakni pada pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur energi dan listrik sebesar 76,24%.
3. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya serapan anggaran sebesar 100% antara lain dikarenakan :
   a. Adanya efisiensi dana dalam pelaksanaan program.
   b. Adanya sisa lelang/kontrak pengadaan barang dan jasa.
   c. Kegiatan yang melibatkan pihak ketiga (rekanan) yang mendapat alokasi pagu kegiatan yang cukup besar tidak didorong sebagai prioritas utama.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

BAB IV berisi :

Simpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi

*L*aporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran serta perjanjian kinerja tahun 2015 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka mewujudkan good governance. Selain itu, Laporan Kinerja tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir sekaligus penutup laporan kinerja yang menggambarkan pencapaian tujuan RPJMD Provinsi Jambi periode 2010-2015.

Laporan Kinerja (LKj) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Pemerintah Provinsi Jambi juga menjadi makna strategis sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam kaitannya dengan kedudukan sebagai Pemerintah Provinsi Jambi, LKj juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah otonom maupun sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2015, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2015 merupakan tahun terakhir (kelima) dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2010-2015. Keberhasilan yang dicapai semata-mata adalah berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen pemerintah daerah dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, sehingga terget Jambi EMAS 2015 dapat terwujud. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Secara umum, terlihat bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2015 dan akhir periode RPJMD rata-rata sangat baik, karena 15 indikator telah tercapai serta memenuhi kriteria sangat baik, 8 indikator menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2016 dengan capaian indikator memenuhi kriteria tinggi dan sedang, dan terakhir terdapat 7 indikator yang menunjukkan kemajuan namun masih diperlukan kerja keras untuk mencapainya, termasuk diantaranya terdapat indikator yang masuk kriteria rendah.

Dilihat dari capaian tujuan Pemerintah Provinsi Jambi, secara keseluruhan capaian tujuan Provinsi Jambi sampai dengan periode akhir RPJMD 2010-2015 dengan visi misi Jambi EMAS 2015 telah tercapai dengan baik. Tujuan yang mendapatkan angka capaian paling tinggi yakni Tujuan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persentase sebesar 137,19%. Sedangkan capaian paling rendah berada pada Tujuan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan Provinsi Jambi hanya mencapai angka 43,34%. Belum maksimalnya capaian tujuan ini dikarenakan capaian yang harus diraih oleh Pemerintah Provinsi disebabkan oleh beberapa faktor yang memang merupakan kondisi nyata yang harus dihadapi oleh Provinsi Jambi, terutama mengenai bencana kebakaran hutan dan lahan yang merupakan masalah nasinal yang pada akhirnya berimplikasi pada tidak maksimalnya upaya penurunan emisi karbon CO2 pada tahun 2015.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran, indikator kinerja utama, dan pencapaian tujuan yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa upaya maksimal telah dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2015, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Hal ini bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk sistem akuntabilitas kinerja yang dikenal sebagai e-sakip adalah bagian dari upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/kegiatan yang berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui link laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (lppk).

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi ke depan. *Pertama*, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan masih tingginya angka rumah tangga sangat miskin, bencana kebakaran hutan dan lahan yang semakin tinggi yang tentunya berimplikasi pada sulitnya upaya penurunan emisi karbon di Provinsi Jambi. Peran Pemerintah Provinsi Jambi diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi, daerah yang berbatasan dengan Provinsi Jambi maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti masih tingginya angka rumah tangga sangat miskin sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, serta belum sinerginsya pemerintah daerah antar provinsi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas, kreatifitas, inovasi, dan komitmen yang kuat dalam upaya mencapai kinerja yang akuntabel sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

LAMPIRAN

Laporan Kinerja (LKj)

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

2016

PENGHARGAAN YANG DITERIMA
OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PADA TAHUN 2015

1. Provinsi Terbaik Penyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2014 (2015) Oleh Presiden Republik Indonesia.
2. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Nasional Tahun 2015 Oleh Presiden Republik Indonesia.
3. Penghargaan atas Inovasi Pelayanan Publik Taman Budaya Jambi sebagai Top 25 Inovasi Pelayanan Publik oleh Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2015.
4. Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tingkat nasional tahun 2015 oleh Menteri Tenaga Kerja RI.
5. Pembina Terbaik Nasional PNPM Mandiri Perdesaan Kategori Pendamping Lokal (PL) Lokasi Normal tahun 2015.
6. Penghargaan Pembina Terbaik Nasional PNPM Mandiri Pedesaan Kategori Pendamping Lokasi Normal (Sikompak Award) dari Menteri Dalam Negeri RI.
7. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI 2015
8. Penghargaan " Silver Award " oleh Menteri Perindustrian RI untuk Gugus Kendali Mutu (GKM) Kopi Pandawa Kincai pada Konvensi GKM Tingkat Nasional Tahun 2015.
9. Penghargaan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Jambi tahun 2014 (evaluasi tahun 2015) dengan Predikat "CC", diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jambi

Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Untuk itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jambi mendefenisikan fokus utama pembangunan dalam program prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2010 – 2015 dengan Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan untuk mengukur tercapainya tujuan pada akhir periode RPJMD adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum

Tujuan : Mewujudkan Jambi dengan ketersediaan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan lebih baik

Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan umum daerah, pembangunan infrastruktur energi dan listrik, serta terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih.

Tabel 1. IKU Misi I

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
1. Persentase jalan dalam kondisi mantap (baik)	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas PU, Dishub
2. Rasio elektrifikasi	$\frac{\text{Daya listrik terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan}} \times 100\%$	Dinas ESDM
3. Persentase pengembangan energi baru terbarukan	$\frac{\text{Jumlah RT menggunakan listrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	Dinas ESDM, Bappeda, PU
4. Persentase fungsionalisasi luas daerah irigasi	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$	Dinas PU
5. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Dinas PU, Bappeda
6. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Dinas PU, Bappeda

Misi 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya

Tujuan : Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya

Sasaran : Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial

Tabel 2. IKU Misi 2

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
1. Angka partisipasi murni (APM) : - SD (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Bappeda, BPMPP
- SMP (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$	
- SMA (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun}} \times 100\%$	
2. Prevalensi kekurangan gizi pada balita	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}}$	Dinas Kesehatan, RSUD
3. Persentase puskesmas berkinerja baik	Kriteria berdasarkan indikator dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014	Dinas Kesehatan
4. Persentase menurunnya rumah tangga sangat miskin (RTSM)	Angka BPS	Sosnakertrans, Bappeda
5. Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \frac{1}{3}[X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ dimana : $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$(indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$(indeks rata-rata lama sekolah) $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak	Bappeda

Misi 3 : **Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri**

Tujuan : Mewujudkan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi

Sasaran : Terciptanya iklim investasi yang kondusif, peningkatan kepariwisataan daerah, serta terselenggaranya pembangunan pertanian dan ketahanan pangan

Tabel 3. IKU Misi 3

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
1. Persentase koperasi berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi berkualitas}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	Dinas Koperasi
2. Peningkatan pelaku usaha mikro kecil menengah	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Disperindag
3. Nilai investasi PMA	Nilai investasi berskala nasional (PMA)	Badan Penanaman Modal Daerah, Bappeda
4. Nilai investasi PMDN	Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Bappeda, Disperindag
5. Nilai Ekspor	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	Disperindag, Bappeda
6. Laju inflasi provinsi	$[\{(1+\Delta Inf_1)(1+\Delta Inf_2)(1+\Delta Inf_t)\}^{1/t}] - 1$ Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.	Bappeda
7. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata, Bappeda, Disperindag
8. Pertumbuhan kunjungan wisata	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata
9. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Dinas Pertanian, Bappeda
10. Nilai tukar petani	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan
11. Ketersediaan energi/kap/perhari dan Persentase pola pangan harapan (PPH)	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Badan Ketahanan Pangan, Badan Koordinasi Penyuluhan

Misi 4 : **Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu Yang Optimal Dengan Mengedepankan Penataan Ruang dan Lingkungan**

Tujuan : Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan

Sasaran : Terwujudnya kualitas dan kelestarian sumber daya air, lahan, serta meningkatnya kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup

Tabel 4. IKU Misi 4

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
1. Penurunan titik api (hot spot)	Pencegahan dan penanggulangan titik api	Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan
2. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%luasan lahan tertutup pohon)	$\frac{\text{Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan dan lahan kritis}} \times 100\%$	Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan
3. Penurunan emisi gas rumah kaca	$\frac{\text{penurunan emisi tertangani}}{\text{target penurunan emisi gas rumah kaca}} \times 100\%$	Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Sosnakertrans, Dinas PU, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Disperindag

Misi 5 : **Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Serta Kesetaraan Gender**

Tujuan : Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dalam memenuhi kepentingan umum

Sasaran : Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum, serta meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan

Tabel 5. IKU Misi 5

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
1. Opini BPK	Opini BPK terhadap laporan keuangan dan asset	Inspektorat, Bappeda, Lembaga pusat, Biro Organisasi, seluruh SKPD
2. Aksi daerah pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota	Kategori "baik" (hijau) dalam pelaksanaan ADPPK Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota penilaian oleh UKP4	Bappeda, Biro Organisasi, Inspektorat
3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jambi	Skor rata-rata IKM	Biro Organisasi, seluruh SKPD

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
4. Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja daerah	Penilaian atas evaluasi kinerja oleh Kementerian PAN RB RI	Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi
5. Persentase kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	APM laki-laki (SD/SMP/MI/SMA) / APM perempuan (SD/SMP/MI/SMA) - kontribusi perempuan dalam pekerjaan non pertanian - rasio melek huruf perempuah terhadap laki-laki	Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosnakertrans

Jambi, Oktober 2011

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **H. HASAN BASRI AGUS**

Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, Januari 2015

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015

No	Sasaran	Indikator	Target 2015
	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum		
1.	Kualitas ketersedian infrastruktur meningkat	– Persentase jalan wilayah Provinsi Jambi dalam kondisi mantap (kondisi baik, sedang)	75
2.	Pembangunan infrastruktur energi dan listrik meningkat	– Persentase Rasio elektrifikasi – Persentase pengembangan energi baru terbarukan (PLTMH/ PLTMS)	82 88
3.	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, dan air bersih	– Persentase fungsionalisasi daerah irigasi – Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan – Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	66,35 68,87 62,41
	Misi 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya		
4.	Pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas meningkat	– Angka partisipasi murni (APM) - SD (%) - SMP (% - SMA (%)	 100 90 78
5.	Layanan kesehatan masyarakat meningkat, terutama layanan bagi masyarakat kurang mampu	– Prevalensi kekurangan gizi pada balita – Persentase puskesmas yang berkinerja baik	100 85
6.	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial	– Persentase menurunnya rumah tangga sangat miskin – Indeks pembangunan manusia	5 70
	Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri		
7.	Investasi meningkat	– Nilai investasi PMA – Nilai investasi PMDN – Nilai Ekspor – Persentase koperasi berkualitas – Peningkatan pelaku usaha mikro, kecil, menengah. – Laju inflasi provinsi Jambi	US$ 1.161jt Rp. 18,36 T US$ 2 jt 98,91 82.000 unit 5,53%
8.	Kunjungan dan industri kepariwisataan daerah meningkat	– Pertumbuhan kunjungan wisata – Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1.554.319 wisatawan 19
9.	Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan meningkat	– Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB – Persentase nilai tukar petani (NTP) – Ketersediaan energi/kap/perhari dan Persentase pola pangan harapan (PPH)	29-29,5 104-106 2.200 gr/kap/hr
	Misi 4 : Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu yang Optimal dengan Mengedepankan Penataan Ruang dan Lingkungan		
10.	Kualitas kelestarian sumber daya air, dan lahan meningkat	– Penurunan titik api (hot spot)	300 titik

11.	Kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup meningkat	– Persentase luasan lahan tertutup pohon – Penurunan emisi gas rumah kaca	65,5 (1.120.855Ha) 17,25 Mt CO2
	Misi 5 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender		
12.	Pengelolaan tata pemerintahan yang baik meningkat	– Opini BPK terhadap laporan keuangan & asset daerah – Skor Aksi daerah pencegahan & pemberatasan korupsi Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota – Persentase peningkatan indeks kepuasan masyarakat – Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi	WTP 8 Aksi (kategori hijau) 75% >85 (A) B
13.	Partisipasi & peran perempuan dalam pembangunan meningkat	– Persentase kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (dilihat dari APM 15-24 T)	99,0

Jambi, Januari 2015

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 85 **/KEP.GUB/SETDA.ORG-2/2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. dalam rangka implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja sampai dengan capaian kinerja, maka perlu dibentuk Tim Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jambi.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 12);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PROVINSI JAMBI**

KESATU : Membentuk Tim Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jambi.

KEDUA : Tim Penguatan SAKIP sebagaimana diktum KESATU, bertugas :

1. merencanakan sekaligus menetapkan rencana kinerja dan penetapan kinerja Provinsi Jambi yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel dengan berpedoman pada RPJMD, Renstra, dan dokumen berkaitan dengan perencanaan lainnya,
2. merumuskan indikator kinerja utama, dan indikator kinerja lainnya yang terukur agar mempermudah proses pengukuran kinerja dan capaian kinerja,
3. mengumpulkan data kinerja dari masing-masing SKPD serta menyusun laporan kinerja yang menyajikan indikator kinerja utama, serta keberhasilan pencapaian tujuan seperti yang ditetapkan dalam RPJMD,
4. memantapkan evaluasi kinerja dengan melakukan penyempurnaan penyimpulan hasil evaluasi kinerja dengan mencermati alur logika antar sub sistem AKIP (perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi),

5. menilai……...

5. menilai capaian kinerja dengan cara mengumpulkan data capaian kinerja, dan memperhitungkan kinerja lainnya seperti kinerja pencatatan keuangan, kinerja pelayanan publik, kinerja transparansi, dan lain sebagainya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jambi.

KEEMPAT : Kepada Anggota Tim sebagaimana terlampir dalam keputusan ini diberikan Honorarium selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2013.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2013.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 4 Februari 2013

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Jambi,
2. Kepala Bappeda Provinsi Jambi,
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi,
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 85 /KEP.GUB/SETDA.ORG-2/2013
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2013

SUSUNAN PERSONIL TIM PENGUATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PROVINSI JAMBI

I.	Pembina	: Gubernur Jambi
II.	Pengarah	: Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
III.	Penanggung Jawab	: Asisten Administrasi Umum
IV.	Koordinator	: Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
V.	Ketua	: Kabag. Pendayagunaan Aparatur, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
VI.	Wakil Ketua	: Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi
VII.	Sekretaris	: Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektorat Provinsi Jambi
VIII.	Anggota Tim	: 1. Kabid SDM, Pemerintahan dan Sosbud, Bappeda Provinsi Jambi. 2. Kasubbag PRK & Dokumentasi, Bappeda Provinsi Jambi 3. Kasubbag Perencanaan, Inspektorat Provinsi Jambi 4. Kabag. Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 5. Adha, S.Kom. (Pelaksana Subbag Perencanaan Inspektorat Provinsi Jambi) 6. Kasubbag PPKA Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 7. Kasubbag TU Biro Ekbang & SDA Setda Provinsi Jambi 8. Helvirani, S.E. (Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi) 9. R. Andri Riandi, S.I.P. (Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi) 10. Selamat Rihardi. (Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi)
IX.	Anggota Sekretariat	: 1. Untung 2. Tri Wahyuni, S.E. 3. Rusli Anwar, A.Ma. 4. Nasfin Rahman 5. Ngatman

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1
Telanaipura Jambi

2016